



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa perlu melakukan penyesuaian dan atau penajaman program, indikator kinerja (outcome) capaian kondisi awal dan kondisi akhir, bidang urusan dan perangkat daerah penanggung jawab terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah terbit dan mengalami perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016, yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dan jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan surat edaran bersama Mendagri dan Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.. Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor...)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014–2018.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan pada BAB I mengenai pendahuluan diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan pada BAB II mengenai Gambaran Umum dan Kondisi Daerah diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- c. Ketentuan pada BAB III mengenai Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Ketentuan pada BAB IV mengenai Analisis Isu-Isu Strategis diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- e. Ketentuan pada BAB VII mengenai Kebijakan Umum dan Program Pembangunan diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- f. Ketentuan pada BAB VIII mengenai Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- g. Ketentuan pada BAB IX mengenai Penetapan Indikator Kinerja Daerah diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- h. Ketentuan pada BAB X mengenai Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam BAB X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 20 Oktober 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 20 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR 20**

**REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.10.175.17 TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 dilakukan dalam rangka menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan kebijakan pembangunan nasional.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling *update*. Dokumen perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi misi Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dokumen Perubahan RPJMD ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Oktober 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. RUSDI MASSE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-11
1.5 Maksud dan Tujuan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
A. Letak, Luas dan Batas Wilayah	II-1
B. Kondisi Topologi	II-2
C. Kondisi Geoglogi	II-4
D. Kondisi Klimatologi	II-6
E. Kondisi Hidrologi	II-6
F. Penggunaan Lahan	II-8
2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH.....	II-9
2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA	II-14
2.1.4 ASPEK DEMOGRAFI	II-15
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-21
2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	II-21
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-21
B. Struktur Ekonomi	II-24
C. inflasi	II-25
D. PDRB Perkapita	II-26

E. Paritas Daya beli (Purchasing Power Parity)	II-27
F. Tingkat Kemiskinan	II-28
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-38
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-89
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.2.1.1 Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	III-4
3.1.1.1.2 Data Perimbangan	III-5
3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-6
3.2.1.2 Belanja Daerah	III-7
3.1.1.2.1 Belanja Tidak Langsung	III-9
3.1.1.2.2 Belanja Langsung	III-9
3.2.2 Neraca Daerah	III-10
3.2.2.1 Aset	III-11
3.2.2.2 Kewajiban	III-11
3.2.2.3 Eksuitas Dana	III-12
3.2.2.4 Rasio Likuiditas	III-19
3.2.2.5 Rasio Solvabilitas	III-20
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu	III-21
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-21
3.2.1.1 Kebijaksanaan Pelaksanaan Belanja Aparatur	III-21
3.2.1.3 Kerangka Pendanaan	III-24
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGI	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Isu strategi	IV-60
4.2.1 Isu Global	IV-60
4.2.2 Telaahan kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN 2015-2019)	IV-62
4.2.2.1 Agenda Prioritas	IV-62
4.2.3 Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	

2013-2018)	IV-69
1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	IV-69
2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018	IV-69
4.2.4 Isu Strategis Daerah	IV-70
4.2.4.1 Standar Playanan Minimal (SPM)	IV-71
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-7
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan	VI-11
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1 Pedoman Transisi	X-1
10.2 Kebijakan Umum Pembangunan Transisi	X-1
10.3 Program Transisi	X-1
10.4 Kaidah Pelaksanaan	X-2
BAB XI PENUTUP	XI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	I-5
Tabel 2.1	Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut kecamatan (km ²), persentase luas dan jumlah Kelurahan/Desa 2016	II-2
Tabel 2.2	Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang 2016	II-4
Tabel 2.3	Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Keadalaman Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-7
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Rappang	II-9
Tabel 2.5	Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-11
Tabel 2.6	Lokasi Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-11
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2009-2016	II-15
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2009-2016	II-17
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Per Km ² Tahun 2013-2016	II-18
Tabel 2.10	Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2016	II-19
Tabel 2.11	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2016	II-19
Tabel 2.12	Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2016	II-20
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Seri 2010 Kabupaten Sidenreng Rappang	II-21
Tabel 2.14	Perbandingan laju Pertumbuhan Ekonomi pada enam Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	II-22
Tabel 2.15	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	II-23
Tabel 2.16	Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Juta Rupiah)	II-23
Tabel 2.17	Distribusi Persentase PDRB 2010 menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2012-2016	II-24

Tabel 2.18	PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016	II-26
Tabel 2.19	Perbandingan PDRB Per Kapita pada Enam Wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016	II-27
Tabel 2.20	Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-29
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang	II-31
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang	II-31
Tabel 2.23	Angka Kelangsungan Hidup Bayi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-32
Tabel 2.24	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-33
Tabel 2.25	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	II-34
Tabel 2.26	Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-34
Tabel 2.27	Insutrumen Kepemudaan Tahun 2016	II-35
Tabel 2.28	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016	II-35
Tabel 2.29	Organisasi Kesenian dan Sarana Pementasan Seni dan Budaya Tahun 2016	II-36
Tabel 2.30	Situs Cagar Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-36
Tabel 2.31	Jenis Objek Wisata Tahun 2016	II-37
Tabel 2.32	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Asing) tahun 2013-2016	II-38
Tabel 2.33	Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	II-39
Tabel 2.34	Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-42
Tabel 2.35	Kinerja Kesehatan Tahun 2013-2016 Kab Sidenreng Rappang	II-43
Tabel 2.36	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-44
Tabel 2.37	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang	II-45

Tabel 2.38	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Tahun 2016	II-45
Tabel 2.39	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Sidenreng rappang sampai dengan tahun 2016	II-46
Tabel 2.40	Jumlah Infrastruktur Pemukiman yang Terlayani	II-46
Tabel 2.41	Presentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-47
Tabel 2.42	Panjang Drainase yang terbangun Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2013-2016	II-47
Tabel 2.43	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-48
Tabel 2.44	Data Perhungan Tahun 2013-2016 Kab. Sidenreng Rappang	II-49
Tabel 2.45	Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-50
Tabel 2.46	Jumlah Armada Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016	II-50
Tabel 2.47	Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016	II-51
Tabel 2.48	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	II-52
Tabel 2.49	Angka Kerja di Bawah Umur 15-19 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	II-53
Tabel 2.50	Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-53
Tabel 2.51	Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-54
Tabel 2.52	Jenis dan jumlah kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-55
Tabel 2.53	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dirunci Menurut Angkatan Kerja dan Bahkan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015	II-56
Tabel 2.54	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-57
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	II-57
Tabel 2.56	Pencari Kerja yang ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-58

Tabel 2.57	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-58
Tabel 2.58	Keselamatan dan Perlindungan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-59
Tabel 2.59	Data Ketrasmigrasian Kab Sidenreng Rappang Tahun 2017	II-48
Tabel 2.60	Presentase Koperasi aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-61
Tabel 2.61	Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-61
Tabel 2.62	Data Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-216 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-62
Tabel 2.63	Jumlah Investor Berskala Nasional dan (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-63
Tabel 2.64	Situs Budaya Kab Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-63
Tabel 2.65	Jumlah Organisasi Pemuda Per Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-64
Tabel 2.66	Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	II-65
Tabel 2.67	Jumlah SKPD Lingkup Pemerintahan Kab. Sidenreng Rappang	II-65
Tabel 2.68	Jumlah dan Nomenklatur Dinas Pemerintah kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017	II-66
Tabel 2.69	Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	II-66
Tabel 2.70	Rasio Jumlah Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-67
Tabel 2.71	Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-67
Tabel 2.72	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang	II-68
Tabel 2.73	Data Penyuluhan Sektor Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016	II-69
Tabel 2.74	Data Perkembangan Kelembangan Kelompok Tani tahun 2016	II-69
Tabel 2.75	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	II-70
Tabel 2.76	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Tahun 2013-2016	II-71

Tabel 2.77	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2013	II-71
Tabel 2.78	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013	II-72
Tabel 2.79	PKK Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang	II-72
Tabel 2.80	Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016	II-73
Tabel 2.81	Perkembangan Pengelolaan Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016	II-74
Tabel 2.82	Jumlah Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016	II-74
Tabel 2.83	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016	II-75
Tabel 2.84	Tabel Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan, Palawija, Hortikultura Tahun 2013-2016	II-75
Tabel 2.85	Penggunaan pupuk kurun waktu tiga Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-76
Tabel 2.86	Data Sebaran Penggilingan Padi Besar Selama Kurun Waktu tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-77
Tabel 2.87	Data Perkembangan Perintisan Jalan Tani Selama Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-79
Tabel 2.88	Sebaran Perkembangan Alat Mekanisme Pertanian Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-80
Tabel 2.89	Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-81
Tabel 2.90	Data Perkembangan populasi Ternak Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-82
Tabel 2.91	Data Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-83
Tabel 2.92	Data Perkembangan Luas Area Budidaya Perikanan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-83

Tabel 2.93	Data Perkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-84
Tabel 2.94	Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II-85
Tabel 2.95	Perkembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-85
Tabel 2.96	Data Perkembangan Industri	II-86
Tabel 2.97	Data Keteransmigrasian	II-89
Tabel 2.98	Persentase konsumsi Pangan & Non Pangan	II-90
Tabel 2.99	Daftar Izin yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	II-91
Tabel 2.100	Jenis-Jenis Restribusi Pendapat Asli Daerah	II-91
Tabel 2.101	Angka Kriminalitas	II-93
Tabel 2.102	Tabel Indikator Pendidikan Tahun 2014-2016	II-94
Tabel 2.103	Tabel Keadaan Penduduk Berdasarkan Kemampuan Baca Tulis, Angka kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2016	II-96
Tabel 2.104	Tabel Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2015	II-97
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2016	III-4
Tabel 3.3	Belanja Daerah KABUPATEN Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	III-8
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten sidenreng Rappang Tahun 2014-2016	III-10
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah KABUPATEN sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	III-13
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	III-19
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016	III-21
Tabel 3.8	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	III-23
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016	III-24

Tabel 3.10	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sidenreng Rappang	III-25
Tabel 3.11	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018	III-26
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah untuk mendanai Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018	III-27
bel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018	III-28
Tabel 3.14	Pendanaan Prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	III-29
Tabel 3.15	Jumlah Anggaran berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	III-31
Tabel 3.16	Kebijakan Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018	III-31
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-2
Tabel 4.2	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-7
Tabel 4.3	Identifikasi RPJMD Kabupaten Lain	IV-58
Tabel 4.4	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV-73
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepada Daerah	V-4
Tabel 5.2	Kesesuain Misi RPJPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang tahun 2014-2018	V-7
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	VI-17
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah dan Kebutuhan Pendanaannya	VIII-2
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	IX-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-10
Gambar 2.1	Peta Adiministrasi Kabupaten sidenreng Rappang	II-01
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	II-15
Gambar 2.3	Pengeluaran perkapita (Rp. 000) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-28
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-28
Gambar 2.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-29
Gambar 2.6	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016.....	II-40
Gambar 2.7	Angka Kematian Balita per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II-41
Gambar 2.8	Angka Kamatian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	35 II-41
Gambar 2.9	Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang (kasus) di kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016.....	II-43
Gambar 2.10	Perkembangan Tingkatb Pengangguran Terbuka di kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015	II-59
Gambar 3.1	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016.....	III-5
Gambar 3.2	Proporsi Dana Perimbangan Tahun 2012-2016.....	III-6
Gambar 3.3	Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012-2016.....	III-7
Gambar 3.4	Proporsi Belanja Daerah Tahun 2012-2016	III-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2013 dan hasilnya telah terpilih pasangan H.RUSDI MASSE dan Ir. H. DOLLAH MANDO sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode masa jabatan tahun 2013 - 2018 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.73 - 7180 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Bupati Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.73 - 7181 Tahun 2013 tentang pengangkatan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dilantik pada tanggal 18 Desember 2013.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik wajib menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2013 Sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain :

1. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan dan visi serta misi yang ditawarkan masing masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda agenda pembangunan yang ditawarkan Calon Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Pendekatan Teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Bottom Up dan Top Down. Pendekatan atas bawah dan, bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sesuai Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila : (a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, (c) terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional); dan atau (d) merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018. Namun seiring dengan perkembangan keadaan Kabupaten Sidenreng Rappang, regional, nasional, maupun global serta berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilaksanakan secara periodik melalui RKPD Tahun 2014 , RKPD Tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2016, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah.

Adapun alasan utama yang melandasi dilakukannya perubahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017) dan kebijakan pembangunan nasional (perubahan kebijakan nasional tiga dimensi pembangunan dan Sembilan Program Prioritas Nawacita yang diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019).
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2016, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) yang mengakibatkan terjadinya penambahan dan pengurangan dinas, badan, kantor serta bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja banyak tidak tercapai yang antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang direncanakan.
4. Indikator dan target *outcome* dari beberapa program serta kinerja daerah yang tertuang pada RPJMD masih belum terukur secara kuantitatif sehingga sulit untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam LAKIP dan LKPJ.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan maksud untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling *update*. Dokumen perubahan RPJMD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan penyusunan perubahan RPJMD adalah:

1. Perbaiki sistematika dan substansi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang; serta
6. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Revisi RPJMD ini.

Secara ringkas, perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

BAB PERDA No. 10 Tahun 2017	PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014-2018
BAB I	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman latar belakang dan penyebutan alasan revisi
	<ul style="list-style-type: none">• Melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk
BAB II	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2016
BAB III	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi Hasil Capaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 sampai 2016
	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2017 dan 2018
BAB IV	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui permasalahan pembangunan daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Menganalisis/memasukkan RPJMN 2015-2019
	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui isu strategis
BAB V	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD
BAB VI	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman arah kebijakan tahun 2018
BAB VII	<ul style="list-style-type: none">• Penajaman program pembangunan daerah tahun 2018
BAB VIII	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui program, indikator, target dan pagu tahun 2018
	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah penanggungjawab bidang urusan/program perangkat daerah
BAB IX	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui indikator kinerja daerah
BAB X	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaharui kaidah pelaksanaan

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941).
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 -2025.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Sidenreng Rappang.
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

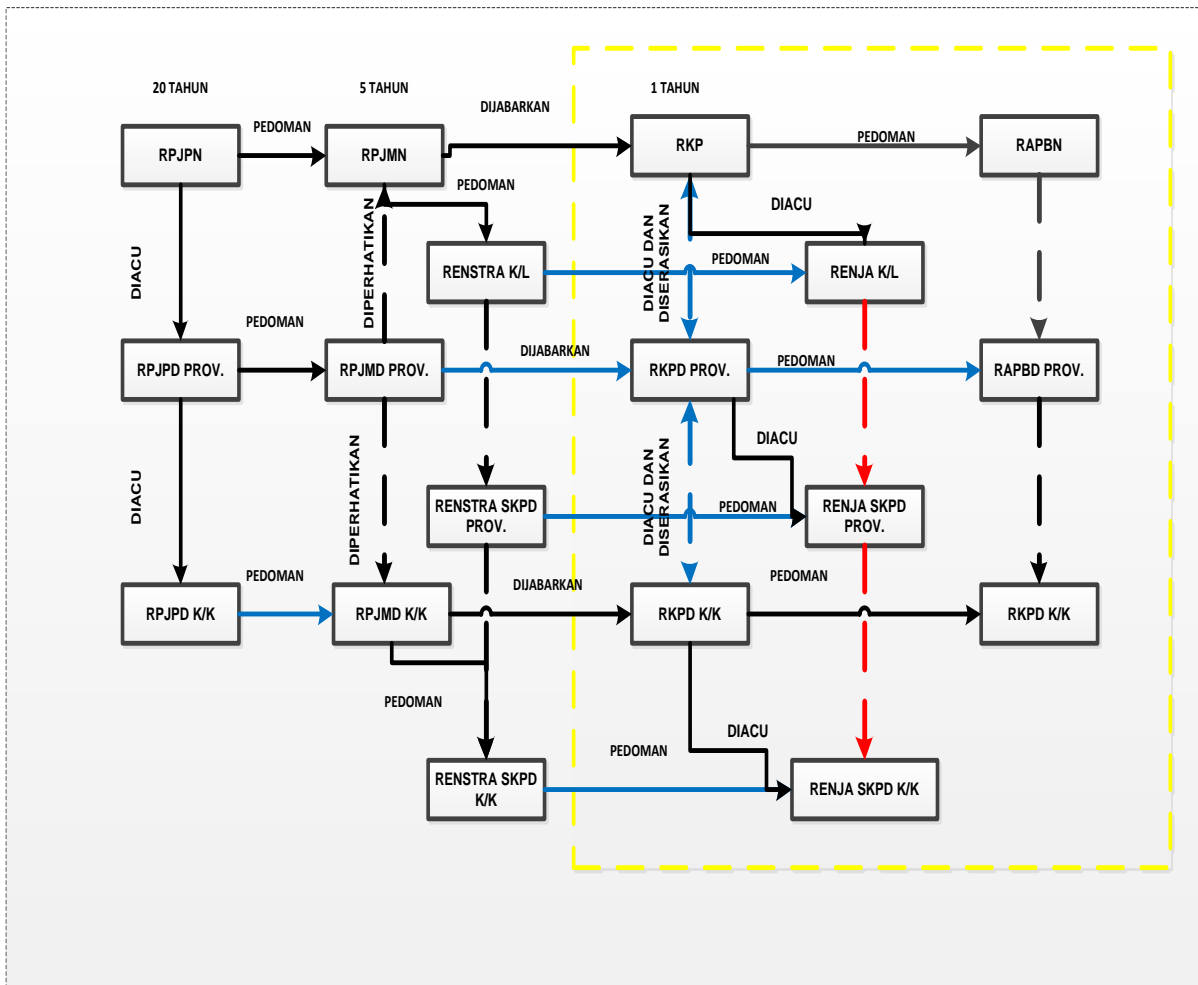
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2014-2019, serta RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 juga perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
3. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 sampai dengan tahun 2032 seperti Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare.
8. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) Bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka menengah.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam Bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan dengan visi, misi dan program pembangunan dari bupati terpilih masa bakti 2014- 2018, sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 menjadi dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun kedepan.

Pada prinsipnya tujuan penyusunan revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan, terarah dan terpadu dalam merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. Secara khusus tujuan penyusunan revisi RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjadi panduan/pedoman operasional visi dan misi bupati terpilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah.
7. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah.

Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

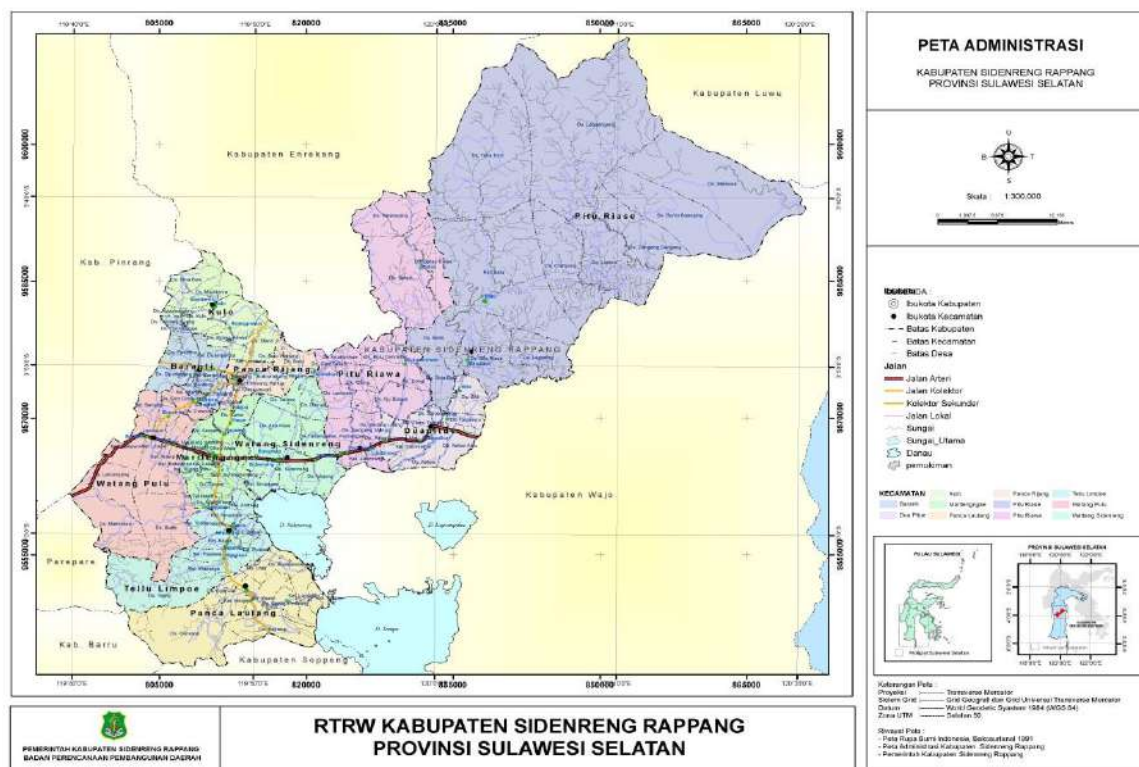
a. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara $3^{\circ}43'$ – $4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41'$ – $120^{\circ}10'$ Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- ❖ Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 189.808,70 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menurut kecamatan (Km²),
Persentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	16189,65	8,85	3	7
2	Tellu LimpoE	10059,26	5,30	6	3
3	Watang Pulu	16363,87	8,62	5	5
4	Baranti	4524,62	2,38	5	4
5	Panca Rijang	4173,75	2,20	4	4
6	Kulo	7998,85	4,21	-	6
7	MaritengngaE	6747,13	3,55	7	5
8	Watang Sidenreng	10621,19	5,60	3	5
9	Pitu Riawa	21592,64	11,38	2	10
10	Dua Pitue	7506,33	3,95	2	8
11	Pitu Riase	84031,41	44,27	1	11
Jumlah		189808,70	100,00	38	68

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

B. Kondisi Topografi

Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Lereng 0 – 2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
- Lereng 2 – 15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha

atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Lereng 15 – 40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15 – 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15 – 40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah di kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0 – 25 M dpl.

Tabel 2. 2 Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	Total
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100
11	Pitu Riase	35	25	40	-	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung.

C. Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah **Alluvial** meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah **Regosol** seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang–kadang terdiri dari

lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah **Grumosol** seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan MaritengngaE yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah **Mediteran** seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks meditreran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah **Podsolit** seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

D. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

Tipe Pertama : Adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua : Adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3 – 4 bulan . Bulan-bulan kering terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua PituE, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara).

Tipe Ketiga : Adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4 – 6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur)

E. Kondisi Hidrologi

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu LimpoE dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan MaritengngaE dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua PituE dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat

diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman(M)
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2,5
		- Sessanriu	3.250	13	2,5
2.	Tellu LimpoE	- La Toling	5.000	5	2
		- Pemantingan	7.000	7	2,5
		- Watang Lowa	6.000	3	1,5
3.	Watang Pulu	- BangkaE	5.000	10	8
		- CakkaloloE	5.000	10	5
		- AlekarajaE	11.000	8	3
		- Lompengan	5.000	8	2,5
		- DataE	3.000	6	2,5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2,5
		- Polojiwa	3.000	4	2,5
		- Batu Pute	3.000	3	3
4.	Baranti	- Rappang	15.000	30	5
5.	Panca Rijang	- Rappang	10.000	25	8
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6.	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- AnrelliE	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7.	MaritengngaE	- Takkalasi	5.000	8	3
8.	Dua PituE	- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3
		- Samallangi	2.500	8	2
		- Loka	10.250	25	3
				- AnabannaE	5.000
9.	Pitu Riawa	- Banjara	2.500	6	2,5

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

F. Penggunaan Lahan

- ✓ Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032, Kawasan Lindung di bagi atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. Kawasan lindung geologi.
- ✓ Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas :
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - c. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - d. Kawasan peruntukan pertanian;
 - e. Kawasan peruntukan perikanan;
 - f. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. Kawasan peruntukan industry;
 - h. Kawasan peruntukan pariwisata
 - i. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - j. Kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Permukiman	3.936	2,09
2	Sawah	44.934	23,86
3	Hutan Sejenis	1.563	0,83
4	Hutan Lebat	57.138	30,34
5	Perkebunan	17.646	9,37
6	Padang Rumput	17.251	9,16
7	Kebun Campur	20.471	10,87
8	Ladang/Tegalan	1.394	0,74
9	Kolam/Tambak/Rawa	734	0,39
10	Danau	1.563	0,83
11	Belukar/Lainnya	21.695	11,52
Jumlah		188.325	100

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2012-2013

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

k. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh konsisi pasar.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 - 2032, arah kebijakan penataan ruang:

1. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
4. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya;
6. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu

Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat dan distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	PKL	PKLP	PPK	PPL
1	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4				PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032.

Untuk Pengembangan Kawasan Budidaya di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijelaskan seperti pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2. 6 Lokasi Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	JENIS KAWASAN	LOKASI
1	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan berkelanjutan (63.672 Ha)	Tersebar di Seluruh Kecamatan
2	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi (115,60 Ha)	Kecamatan Pitu Riase
3	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terbatas (23.999 Ha)	Kecamatan Pitu Riase (12.540 Ha) Kecamatan Pitu Riawa (776 Ha) Kecamatan Panca Lautang (4.560 Ha) Kecamatan Tellu Limpoe (3.093 Ha) Kecamatan Watang Pulu (2.327 Ha) Kecamatan Kulo (703 Ha)
4	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat (450 Ha)	Kecamatan Kulo (96 Ha) Kecamatan Pitu Riawa (49 Ha) Kecamatan Panca Lautang (61 Ha) Kecamatan Tellu Limpoe (27 Ha)

No	JENIS KAWASAN	LOKASI
		Kecamatan Watang Pulu (133 Ha) Kecamatan Panca Rijang (25 Ha) Kecamatan Watang Sidenreng (59 Ha)
5	Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	Tersebar di seluruh Kecamatan
6	Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering (10.117 Ha) : 1. Komoditi Jagung 2. Komoditi Kacang Kedele 3. Komoditi Kacang Tanah	Kecamatan Kulo, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Panca Rijang, Pitu Riase dan Pitu Riawa. Kecamatan Panca Rijang Kecamatan Dua Pitue, Panca Rijang dan Pitu Riawa.
7	Kawasan peruntukan pertanian Hortikultura (74,807 Ha)	Kecamatan Baranti
8	Kawasan peruntukan perkebunan kakao	Tersebar di seluruh kecamatan
9	Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa (3.498 Ha)	Tersebar di seluruh kecamatan
10	Kawasan peruntukan perkebunan komoditi cengkeh (2.294 Ha)	Kecamatan Kulo, Pitu Riase dan Pitu Riawa
11	Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kopi (277 Ha)	Kecamatan Kulo, Watang Pulu dan Pitu Riase
12	Kawasan peruntukan perkebunan komoditi jambu mete (5.610 Ha)	Kecamatan Kulo, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Panca Lautang, Panca Rijang, Watang Pulu, Pitu Riase, Pitu Riawa dan Watang Sidenreng
13	Kawasan Peruntukan pengembangan peternakan besar (24.450 Ha)	Kecamatan Watang Pulu dan Panca Lautang
14	Kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas (2.446 Ha)	Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti, dan Kulo
15	Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe dan Panca Lautang
16	Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar	Kecamatan Maritengngae, Watang Pulu, Baranti, Kulo, Panca Rijang, Pitu Riase, Dua Pitue, Watang Sidenreng dan Pitu Riawa
17	Kawasan peruntukan pengolahan ikan	Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe
18	Kawasan Perlindungan Setempat/Reservant	Danau Sidenreng (Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe dan Panca Lautang)
19	Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara komoditas mineral logam berupa emas dan mangan	Kecamatan Pitu Riase, Panca Rijang dan Pitu Riawa
20	Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batu bara komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa	Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Watang Pulu

No	JENIS KAWASAN	LOKASI
21	Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batu bara komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami, tanah liat, pasir urug dan batu gunung	Tersebar di seluruh kecamatan
22	Kawasan peruntukan pertambangan wilayah usaha pertambangan komoditas batu bara	Kecamatan Pitu Riawa
23	Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam	Kecamatan Tellu Limpoe
24	Kawasan peruntukan industri besar (Industri Mattirotasi) untuk pengolahan hasil pertanian (80 Ha)	Kecamatan Watang Pulu
25	Kawasan peruntukan industri (Industri Masepe) untuk pengembangan industri alat pertanian (60 Ha)	Kecamatan Tellu Limpoe
26	Kawasan peruntukan industri sedang (industri pengolahan dan pengawetan daging sapi). (15 Ha)	Kecamatan Watang Pulu, Panca Rijang dan Pitu Riase
27	Kawasan Peruntukan industri sedang (industri pengolahan komoditas hasil hutan dan perkebunan) (25 Ha)	Kecamatan Pitu Riawa dan Pitu Riase
28	Kawasan peruntukan industri sedang (industri penggilingan padi)	Tersebar diseluruh Kecamatan
29	Kawasan peruntukan industri rumah tangga (industri pembuatan batu nisan)	Kecamatan Maritenggae
30	Kawasan peruntukan industri rumah tangga (industri pengrajin besi alat-alat rumah tangga)	Kecamatan Tellu Limpoe
31	Kawasan peruntukan pariwisata budaya: 1. Kawasan Monumen Ganggawa 2. Monumen Bambu Runcing 3. Kawasan Monumen Andi Cammi 4. Kawasan Masjid Kuno Jerrae 5. Kawasan Maccera Tappareng	Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang
32	Kawasan peruntukan pariwisata alam : 1. Kawasan Bungge Tjitta 2. Kawasan Taman Wisata Alam Maddenra 3. Kawasan Permandian Air Panas 4. Kawasan Danau Sidenreng 5. Kawasan Gua Parinding	Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kelurahan Masepe Kecamatan Tellu Limpoe Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe dan Panca Lautang Kecamatan Pitu Riase
33	Kawasan peruntukan pariwisata buatan: 1. Kawasan Taman Rekreasi Datae 2. Kawasan Taman Rekreasi Puncak Harapan 3. Kawasan Agrowisata	Kelurahan lawawoi Kecamatan Watang Pulu Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Tersebar di seluruh kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, 2012-2032

I. WILAYAH RAWAN BENCANA

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu:

A. Banjir

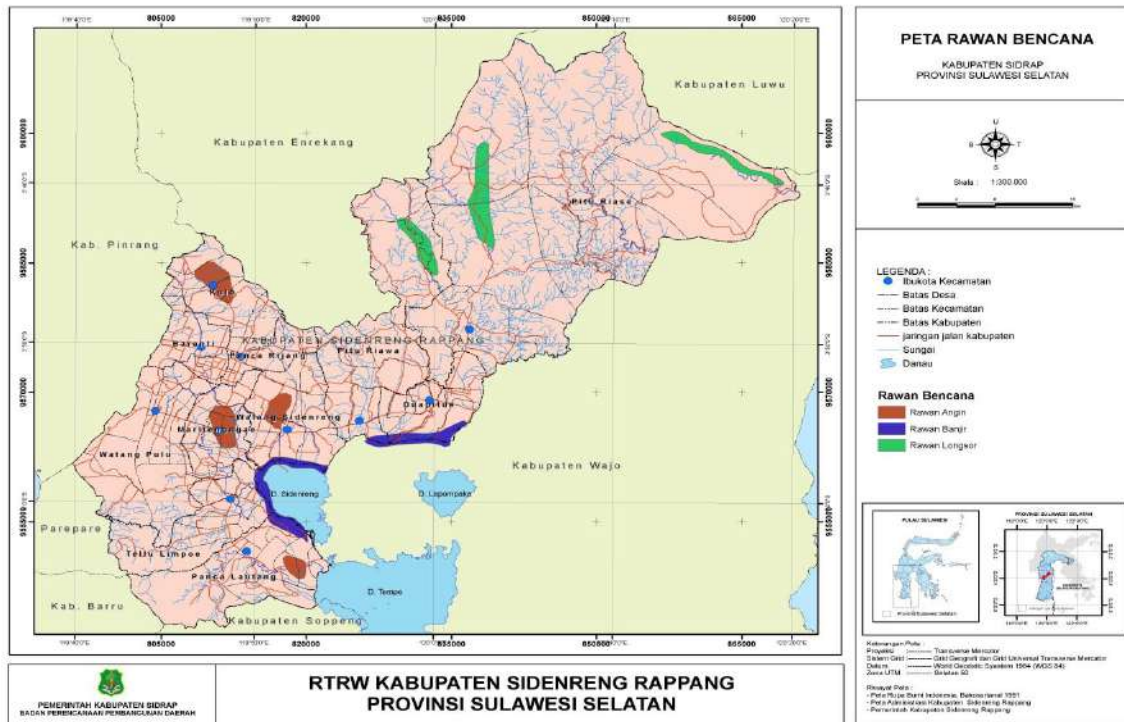
Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang berada disekitar Danau Sidenreng, Kecamatan Watang Pulu dan di Kecamatan Dua Pitue.

B. Longsor

Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan rawan longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi diantaranya di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pitu Riase yaitu Desa Lepingeng, Desa Tana Toro, dan Desa Belawae.

C. Angin Puting Beliung

Sedangkan untuk kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu di Kecamatan Kulo, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritangngae, Kecamatan Tellu Limpoe serta Kecamatan Panca Lautang.



Gambar 2. 2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang
 Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2013-2032

m. ASPEK DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2009 sampai 2016 atau selama 3 tahun terakhir ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2009-2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	17,071	17,241	17,339	17,442	18,113	17,277	17,242	17,203
2	Tellu Limpoe	21,511	22,728	22,871	23,089	23,415	23,456	23,582	23,700
3	Watang Pulu	25,959	30,128	30,582	30,947	31,590	33,420	34,235	35,061
4	Baranti	26,569	28,068	28,369	28,522	28,997	29,476	29,763	30,045
5	Panca Rijang	25,258	27,086	27,332	27,613	28,195	28,173	28,383	28,584
6	Kulo	10,660	11,345	11,462	11,586	11,831	11,917	12,031	12,147
7	Maritengngae	40,767	46,139	46,643	47,203	48,197	48,955	49,563	50,172
8	Watang Sidenreng	15,729	17,051	17,203	17,395	17,762	17,605	17,703	17,805
9	Pitu Riawa	24,212	24,980	25,213	25,473	26,210	25,831	25,984	26,132
10	Dua Pitue	26,340	27,272	27,549	27,865	28,252	28,513	28,775	29,040
11	Pitu Riase	18,407	19,873	20,089	20,316	20,745	21,987	22,526	23,096
Jumlah		252,483	271,911	274,652	277,451	283,307	286,610	289,787	292,985

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Pada tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya, kenaikan terbesar selama delapan tahun terakhir pada tahun 2009-2010 dari 252,483 jiwa menjadi 271,911 jiwa yaitu kenaikann sebesar 19,428 jiwa, diikuti tahun 2012-2013 sebesar 5,856 jiwa, sedangkan kenaikan terkecil pada tahun 2015-2016 dari 289,787 menjadi 289,872 jiwa atau kenaikan sebesar 3.198 jiwa. Jumlah penduduk perkecamatan tahun 2009-2016 tersebut diatas selanjutnya dibagi atas jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan seperti pada data berikut ini :

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2009-2016

NO	KECAMATAN	Tahun															
		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Panca Lautang	8,311	8,934	8,316	8,925	8,363	8,976	8,404	9,038	8,726	9,387	8,368	8,909	8,364	8,878	8,353	8,850
2	Tellu Limpoe	10,730	11,927	10,761	11,967	10,847	12,024	10,951	12,138	11,167	12,248	11,146	12,310	11,223	12,359	11,289	12,411
3	Wattang Pulu	14,845	15,346	14,846	15,282	15,074	15,508	15,224	15,703	15,577	16,013	16,538	16,882	16,971	17,264	17,396	17,665
4	Baranti	13,523	14,543	13,527	14,541	13,690	14,679	13,706	14,816	13,988	15,009	14,254	15,222	14,415	15,348	14,562	15,483
5	Panca Rijang	13,032	14,084	13,032	14,054	13,163	14,169	13,292	14,321	13,591	14,604	13,605	14,568	13,727	14,656	13,835	14,749
6	Kulo	5,520	5,822	5,511	5,834	5,582	5,880	5,635	5,951	5,762	6,069	5,811	6,106	5,875	6,156	5,937	6,210
7	Maritengngae	22,269	23,855	22,295	23,844	22,595	24,048	22,886	24,317	23,400	24,797	23,746	25,209	24,080	25,483	24,397	25,775
8	Watang Sidenreng	8,377	8,716	8,346	8,705	8,439	8,764	8,528	8,867	8,720	9,042	8,652	8,953	8,716	8,987	8,774	9,031
9	Pitu Riawa	12,223	12,686	12,277	12,703	12,395	12,818	12,518	12,955	12,858	13,352	12,739	13,092	12,833	13,151	12,916	13,216
10	Dua Pitue	13,175	14,024	13,219	14,053	13,423	14,126	13,581	14,284	13,886	14,366	13,865	14,648	14,013	14,762	14,152	14,888
11	Pitu Riase	9,949	9,910	9,973	9,900	10,101	9,988	10,221	10,095	10,451	10,294	11,082	10,905	11,371	11,155	11,666	11,430
	Jumlah	131,954	139,847	132,103	139,808	133,672	140,980	134,946	142,485	138,126	145,181	139,806	146,804	141,588	148,199	143,277	149,708

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan cenderung lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki selama delapan tahun terakhir tahun 2009-2016 pada 10 kecamatan, terjadi pengecualian dikecamatan Pitu Riase dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2013-2016

No.	Kecamatan	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	111	112	113	113	117	112	112	112
2	Tellu Limpoe	208	220	222	224	226	227	228	230
3	Wattang Pulu	172	199	202	205	208	220	226	232
4	Baranti	493	521	526	529	538	546	552	558
5	Panca Rijang	742	796	803	812	828	828	834	840
6	Kulo	142	151	153	154	157	158	160	162
7	Maritengngae	619	700	708	716	731	742	752	761
8	Watang Sidenreng	130	141	142	144	147	145	146	147
9	Pitu Riawa	115	119	120	121	124	122	123	124
10	Dua Pitue	376	390	394	398	403	407	411	415
11	Pitu Riase	22	24	24	24	24	26	26	27
Jumlah Rata-Rata		285	307	310	313	318	321	325	156

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Terlihat bahwa sebaran kepadatan jumlah penduduk tiap kilometer persegi di kabupaten Sidenreng Rappang, meningkat tahun demi tahun dengan pengecualian pada tahun 2015-2016 yang mengalami penurunan angka kepadatan penduduk yaitu 156/km². Peningkatan kepadatan penduduk rata-rata tahun 2009-2016 sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk tiap kecamatan dengan luas wilayah kecamatan. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sementara wilayah administrasi kecamatannya relatif sempit maka tingkat kepadatan perkilometranya juga besar. Terlihat bahwa walaupun jumlah penduduk terbesar berada dikecamatan Maritengngae yang juga sebagai ibukota kabupaten, kepadatan perkilometranya masih dibawah kecamatan Panca Rijang, hal ini karena luas wilayah kecamatan Panca Rijang lebih sempit dari pada kecamatan Maritengngae, hal yang sama juga berlaku bagi kecamatan yang memiliki potensi kependudukan dan wilayah kecamatan yang kurang lebih sama.

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah 189.808,70 kilometer persegi yang didiami oleh 292.985 orang, pada delapan tahun terakhir yaitu 2009-2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata kepadatan perkilometranya adalah 313 km², akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan kepadatan rata-rata 156 km²

Faktor lain yang perlu dijelaskan pada aspek demografi adalah sex ratio atau perbandingan berdasarkan jenis kelamin seperti yang ditampilkan pada data berikut ini :

Tabel 2.10 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	90.57	93.18	93.17	92.99	92.96	93.93	94.21	94.38
2	Tellu Limpoe	88.51	89.92	90.21	90.22	91.17	90.54	90.81	90.96
3	Wattang Pulu	96.38	97.15	97.2	97.08	97.28	97.96	98.3	98.48
4	Baranti	91.39	93.03	93.26	92.51	93.2	93.64	93.92	94.05
5	Panca Rijang	92.6	92.73	92.9	92.81	93.06	93.39	93.66	93.80
6	Kulo	94.28	94.46	94.93	94.69	94.94	95.17	35.44	95.60
7	Maritengngae	93.14	93.5	93.96	94.12	94.37	94.2	94.49	94.65
8	Watang Sidenreng	93.64	95.88	96.29	96.18	96.44	96.64	96.98	97.15
9	Pitu Riawa	95.51	96.65	96.7	96.63	96.3	97.3	97.58	97.73
10	Dua Pitue	92.91	94.07	95.02	95.08	96.66	94.65	94.93	95.06
11	Pitu Riase	102.1	100.74	101.13	101.25	101.53	101.62	101.94	102.06

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Secara sex ratio penduduk kabupaten Sidenreng Rappang selang delapan tahun terakhir menunjukkan angka dibawah 100 pada 10 kecamatan, sedangkan pada Kecamatan Pitu Riase menunjukkan angka diatas seratus yang artinya khusus di Kecamatan Pitu Riase jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Data lain yang perlu diketahui dari sisi demografi adalah data jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga Indonesia menurut kecamatan tahun 2009 sampai tahun 2016.

Tabel 2.11 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	4,317	4,303	4,427	4,427	4,455	4,329	4,320	4,317
2	Tellu Limpoe	5,440	5,155	5,304	5,354	5,388	5,357	5,300	5,412
3	Wattang Pulu	6,567	7,289	7,500	7,589	7,639	7,917	8,098	8,293
4	Baranti	6,720	7,042	7,246	7,285	7,332	7,332	7,379	7,436
5	Panca Rijang	6,389	6,450	6,637	6,705	6,748	6,666	6,703	6,748
6	Kulo	2,695	2,761	2,841	2,872	2,890	2,888	2,909	2,935
7	Maritengngae	10,311	10,678	10,987	11,118	11,118	11,139	11,244	11,359
8	Watang Sidenreng	3,979	4,077	4,195	4,242	4,269	4,277	4,313	4,355
9	Pitu Riawa	6,124	5,767	5,934	5,995	6,033	5,996	6,098	6,084

NO.	KECAMATAN	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10	Dua Pitue	6,663	6,257	6,438	6,512	6,553	6,569	6,632	6,701
11	Pitu Riase	4,657	4,734	4,871	4,926	4,957	5,236	5,236	5,487
Jumlah Rata-Rata		63,862	64,513	66,380	67,025	67,382	67,706	68,373	69,127

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Tabel 2.12 Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2016

NO.	KECAMATAN	TAHUN							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	4.00	4.01	3.92	3.94	4.07	3.99	3.99	3.98
2	Tellu Limpoe	4.00	4.41	4.31	4.31	4.35	4.38	4.45	4.38
3	Wattang Pulu	4.00	4.13	4.08	4.08	4.14	4.22	4.23	4.23
4	Baranti	4.00	3.99	3.92	3.92	3.95	4.02	4.03	4.04
5	Panca Rijang	4.00	4.20	4.12	4.12	4.18	4.23	4.23	4.24
6	Kulo	4.00	4.11	4.03	4.03	4.09	4.13	4.14	4.14
7	Maritengngae	4.00	4.32	4.25	4.25	4.34	4.39	4.41	4.42
8	Watang Sidenreng	4.00	4.18	4.10	4.10	4.16	4.12	4.10	4.09
9	Pitu Riawa	4.00	4.33	4.25	4.25	4.34	4.31	4.26	4.30
10	Dua Pitue	4.00	4.36	4.28	4.28	4.31	4.34	4.34	4.33
11	Pitu Riase	4.00	4.20	4.12	4.12	4.18	4.20	1.00	4.21
Jumlah Rata-Rata		4.00	4.21	4.14	4.14	4.20	4.23	4.24	4.24

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Tren pertumbuhan jumlah anggota rumah tangga selang delapan tahun terakhir tahun 2009-2016 cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2010-2011 yang menurun sebesar 0,7. Pada tahun 2015-2016 jumlah rumah tangga tetap yaitu 68,373 artinya pada setiap satu rumah tangga terdapat 4 orang penghuni rumah tangga.

b. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2015 Badan Pusat Statistik melakukan perubahan tahun dasar dalam perhitungan PDRB dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya nominal PDRB, merubah besaran indicator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Seri 2010 Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

No.	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.84	3.46	9.35	6.63	12.50
2	Pertambangan dan Penggalian	17.27	9.30	14.52	9.62	12.34
3	Industri Pengolahan	14.23	9.80	9.56	9.59	8.30
4	Pengadaan Listrik dan gas	12.22	8.58	8.15	(1.94)	12.49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.61	5.38	2.16	0.33	3.22
6	Konstruksi	9.84	10.42	3.97	9.32	9.24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.16	6.45	7.63	6.81	6.94
8	Transportasi dan Pergudangan	8.16	8.45	10.57	9.53	9.67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.26	6.20	5.90	7.07	5.53
10	Informasi dan Komunikasi	17.81	13.82	10.44	11.14	7.73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.63	12.41	6.44	9.29	16.64
12	Real Estate	7.83	7.77	7.28	7.72	5.04
13	Jasa perusahaan	9.84	9.67	6.94	5.64	8.21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.85	4.44	3.31	8.92	(7.67)
15	Jasa Pendidikan	7.38	8.09	3.57	6.11	5.55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.55	8.73	9.69	9.06	10.91

No.	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016*
17	Jasa-jasa	8.36	5.00	7.06	7.55	7.89
PDRB		8.93	6.93	7.87	7.98	9.00

Sumber; BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

*Angka sementara 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, itu dikarenakan adanya perubahan tahun dasar perhitungan yang memiliki perbedaan PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010 = 100) menggunakan KBLI2009.

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2015-2016 mengalami peningkatan karena ada beberapa sector yang memiliki peran penting diantaranya sector pertanian, kehutanan dan perikanan 6.63% menjadi 12.50%, sector konstruksi dimana adanya pembangkit listrik tenaga angin yang dikelola oleh PT.UPC, transportasi jalan ditandai dengan pembangunan jalan beton di berbagai wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Sirkuit Puncak Mario selanjutnya sector jasa dilihat dari adanya Event Motor Cross.

Tabel 2.14 Perbandingan laju Pertumbuhan Ekonomi pada Enam Wilayah Kabupaten/Kota dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)
		2016
1	Pare-Pare	6.87
2	Enrekang	7.64
3	Wajo	4.98
4	Pinrang	7.51
5	Sidenreng Rappang	9.00
6	Soppeng	8.24
Propinsi Sulawesi Selatan		7.41
Nasional		5.00

Sumber: Data PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh laju pertumbuhan tertinggi yaitu 9,00%. Laju Pertumbuhan Kabupaten Sidenreng Rappang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,41% atau lebih tinggi dari pada capaian laju pertumbuhan nasional yaitu 5,00%.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016.

Tabel 2.15 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	
	Jumlah (Juta Rp.)	% Perkembangan	Jumlah (Juta Rp.)	% Pertumbuhan
2012	6.108.344,52		5.297.538,52	
2013	6.936.042,95	13.55	5.664.558,05	6.93
2014	8.047.481,60	16.03	6.110.201,65	7.87
2015	9.304.933,25	15.36	6.597.660,75	7.92
2016*	10.772.990,25	16.04	7.191.284,24	9.00
Rata-rata	8.765.362,00	15.24	6.390.161,95	7.94

Sumber Data : BPS Sidenreng Rappang, 2017

*Angka sementara 2016

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, Rata-rata nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas dasar Harga Berlaku kurun waktu 5 (lima) Tahun mencapai Rp. 8,765 Triliun atau berkembang rata-rata 15,24%. Jika berdasarkan Atas dasar Harga konstan Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp. 6,390 Triliun atau tumbuh rata-rata 7,94%.

Tabel 2.16 Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Harga Berlaku	% Terhadap Sul Sel	Harga Konstan	% Terhadap Sul Sel
1	Pare-Pare	5,544,661.05	1.46	4,106,873.75	1.52
2	Enrekang	5,901,552.14	1.56	3,899,612.41	1.45
3	Wajo	16,540,503.20	4.36	11,620,820.85	4.31
4	Pinrang	14,792,038.47	3.90	10,404,179.13	3.86
5	Sidenreng Rappang	10,772,990.25	2.84	7,191,284.24	2.67
6	Soppeng	7,935,787.23	2.09	5,554,053.77	2.06
	Provinsi Sulawesi Selatan	379,209,481.75	100.00	269,338,548.61	100.00

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, dari 6 (enam) kabupaten yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang tertinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Wajo yaitu Rp. 16,54 Triliun atau 4,36%, Kabupaten Sidenreng Rappang urutan ke 3 (tiga) dengan nilai kontribusi 10,77 Triliun atau 2,84%, yang terendah adalah Kota Parepare dengan nilai kontribusi Rp. 5,54 Triliun atau 1,46% dari Total Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Rp. 379,20 Triliun.

B. Struktur Ekonomi

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri. Berdasarkan dengan itu, Kabupaten sidenreng rappang dipastikan menganut tipe agraris. Perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat didominasi oleh sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan, pada tahun 2016 mencapai 34,82%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.17 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2012-2016

No.	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.27	34.06	34.06	33.35	34.82
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.32	3.62	4.42	4.74	4.84
3.	Industri Pengolahan	13.33	13.83	14.24	14.43	14.35
4.	Pengadaan Listrik dan gas	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
6.	Konstruksi	13.77	14.32	14.08	14.22	14.34
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.64	10.31	9.74	9.54	9.12
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.61	1.65	1.78	1.98	1.95
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.59	0.59	0.59	0.59	0.58
10.	Informasi dan Komunikasi	2.51	2.60	2.54	2.45	2.29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.85	2.98	2.95	2.96	3.05
12.	Real Estate	4.08	4.16	4.15	4.16	4.04
13.	Jasa perusahaan	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

No.	Sektor	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.70	5.44	5.26	5.50	4.54
15.	Jasa Pendidikan	3.89	3.99	3.71	3.58	3.56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1.33	1.37	1.39	1.40
17.	Jasa-jasa	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

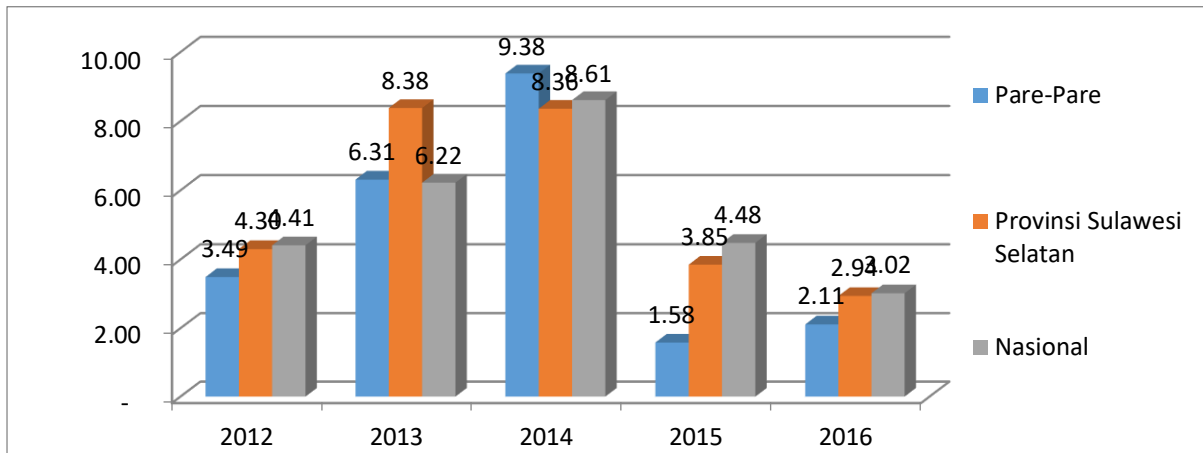
*Angka sementara 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2012-2016 peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih sangat dominan. Pada Tahun 2012 sumbangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar yaitu 35,27% jika dibandingkan dengan Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Fluktuatifnya angka persentase sumbangan sektor ini menunjukkan bahwa, terjadinya transformasi struktur PDRB terhadap sektor lain. Sektor yang paling menonjol yang memperlihatkan persentase penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah sector Industri pengolahan dari 13,33% menjadi 14,35%.

C. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah ke bawah. Berikut ini grafik Perkembangan Laju inflasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2012-2016. khusus untuk informasi inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu Kota Parepare.

Grafik 2.1 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2012-2016



Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014. Tingginya inflasi disebabkan karena gejolak ekonomi akibat krisis global. Selanjutnya pada Tahun 2012–2016 inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare cenderung memperlihatkan perkembangan inflasi fluktuatif yang berada pada kisaran 2 % s/d 9%. Inflasi ini masih positif dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap menurunnya daya beli masyarakat.

D. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besarnya penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut.

Tabel 2.18 PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

Tahun	Nilai (Rp)	Perkembangan (%)
2012	21.830.329,60	
2013	24.482.427,01	59,48
2014	28.078.160,57	14,71
2015	32.109.560,66	14,10
2016*	36.769.767,21	16,67
Rata-rata	30.359.978,86	26,24

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

*Angka sementara 2016

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata pendapatan per kapitanya mencapai Rp. 30.359.978,86 dan rata-rata persentase perkembangannya mencapai 26,24%.

Tabel 2. 19 Perbandingan PDRB Per Kapita pada Enam Wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota/Nasional	Income Per Kapita (jiwa) Atas dasar harga Berlaku (Juta Rp)
1	Pare-Pare	39.49
2	Enrekang	29.27
3	Wajo	41.93
4	Pinrang	40.02
5	Sidenreng Rappang	36.77
6	Soppeng	35.07
	Propinsi Sulawesi Selatan	44.06
	Nasional	47.96

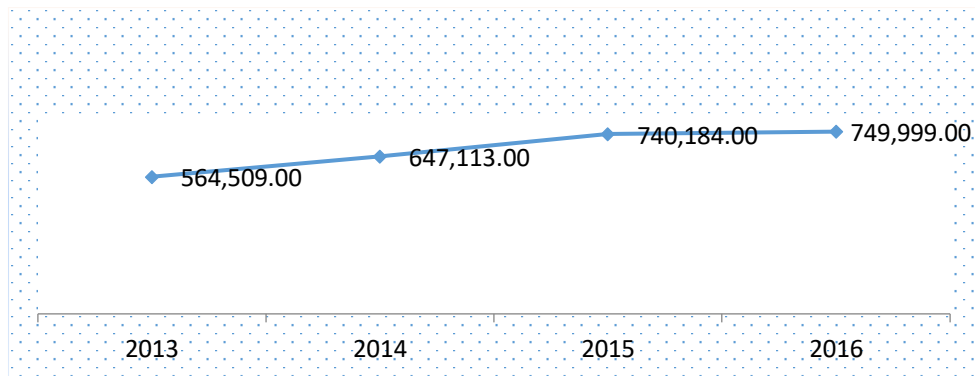
Sumber: BPS Sidenreng Rappang,Provinsi Sulawwesi Selatan: 2017

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, perolehan PDRB Perkapita tertinggi pada enam wilayah Kabupaten/Kota pada tahun 2016, diduduki oleh Kabupaten Wajo dengan nilai 41.93 Juta (Rp.) tetapi tidak lebih tinggi dari PDRB Perkapita Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 44.06 Juta (Rp). Urutan kedua Kabupaten Pinrang dengan nilai PDRB sebesar 40.02 Juta (Rp.) selanjutnya Kota Parepare dengan nilai PDRB 39.49 Juta (Rp.) kemudian Kabupaten Sidenreng Rappang dengan urutan ke empat dengan nilai PDRB sebesar 36.77 Juta (Rp.).

E. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)

Pengeluaran perkapita masyarakat yang menjadi salah satu komponen IPM, yang menyangkut pada aspek daya beli masyarakat seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 2 Pengeluaran perkapita (Rp. 000) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



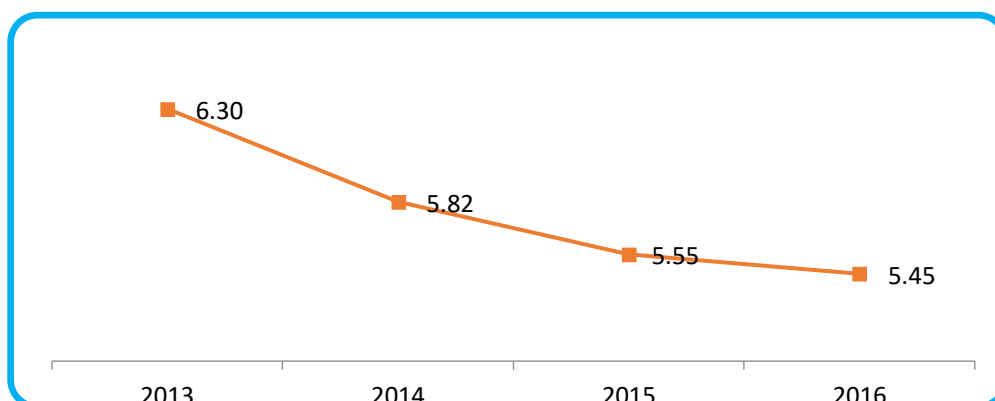
Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2016 mencapai Rp. 749.999,- per-bulan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 14,38 persen dimana pengeluaran per-kapita tahun 2014 sebesar Rp. 647.113,-.

F. Tingkat Kemiskinan

Capaian Perkembangan Antar Waktu pada Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang terlihat pada gambar di bawah, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan trend kecenderungan menurun dari tahun 2013 sebesar 6.30% hingga pada tahun 2016 sebesar 5.45%. Ini merupakan outcomes dari pelaksanaan program/kebijakan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Gambar 2. 2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016*

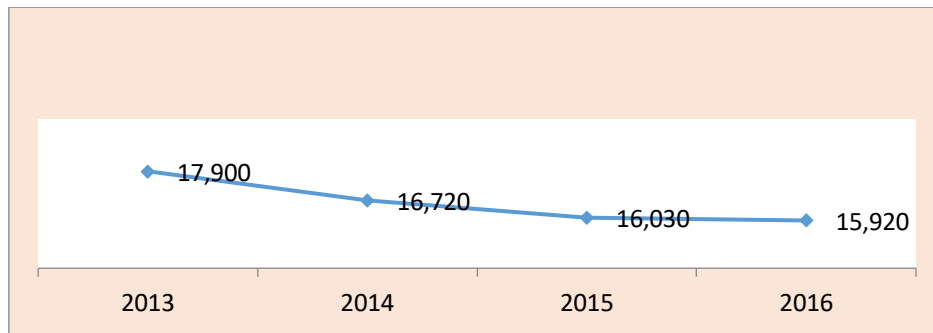


Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

*Angka sementara 2016

Dilihat dari jumlah penduduk miskin seperti pada gambar di bawah menunjukkan penurunan angka yang cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 17.900 jiwa penduduk miskin hingga tahun 2014 sebesar 16.720 jiwa dan tahun 2015 sebesar 16.030, dan tahun 2016 sebesar 15.920 jiwa penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Gambar 2. 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

Angka Kriminalitas

Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2015 sebanyak 1.897 kasus, angka ini naik sebesar 36,87 persen daritahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.386 kasus. Selain itu, kejahatan narkoba, Pencurian dan penganiayaan adalah 3 kasus terbanyak yang terjadi di Sidenreng Rappang, dan pada umumnya terlihat bahwa kasus kejahatan banyak terjadi di daerah perkotaan.

Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 2.20 Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013–2016

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.05	68.07	68.57	
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.16	12.80	12.88	
Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7.08	7.30	7.32	
Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	10,416	10,434	11,004	
IPM Kabupaten Sidenreng Rappang	67,15	68,14	69,00	69,39

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016

Pada Tahun 2015 BPS melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, perubahan metodologi ini menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibanding metode lama, selain itu terjadi perubahan peringkat, namun hal tersebut tidak bisa dibandingkan karena

perbedaan metodologi dan indikator. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 67,15 point dan pada tahun 2015 sebesar 69.00 point, dengan perkembangan rata-rata 0,92 point.

Angka Melek Huruf

Hasil Susenas 2015 menunjukkan persentase penduduk 10 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis sebesar 93.23 persen atau mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya yang mencapai 94.07 persen. Seperti tahun-tahun sebelumnya, persentase penduduk laki-laki 10 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis masih lebih tinggi dibanding perempuan.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dimensi pendidikan pendukung pembangunan manusia (IPM) dan dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Pada tahun 2014 dengan penggunaan metode baru (2010) diperoleh capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,30 tahun, sedangkan pada Tahun 2015 meningkat sebesar 7,32 tahun.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD+MI, SMP+MTs, SMA+MA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap indikator pendidikan dalam rangka menghitung tingkat partisipasi pendidikan maka, tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi pada tahun 2013 terhadap semua jenjang pendidikan terdapat di tingkat SD+MI yaitu 105,92 persen. Perkembangan APK per jenjang pendidikan 4 (empat) tahun terakhir 2013-2016 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
1	SD+MI	105,92	104,61	103,73	102,57
2	SMP+MTs	94,25	70,57	100,22	107,71
3	SMA+MA	73,27	89,70	79,19	82,36

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga pada tahun 2016 masih di bawah 100%. Pada tahun 2013 APM tertinggi juga berada pada jenjang pendidikan SD+MI yaitu 93,23 persen.

Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
1	SD+MI	93,23	89,70	84,22	85,69
2	SMP+MTs	67,66	77,29	57,89	60,71
3	SMA+MA	50,66	43,37	43,96	46,88

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia di bawah 1 (satu) tahun Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 30 kasus, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2016 sebanyak 25 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin agar meminimalisir terjadinya kematian bayi. Sedangkan kelahiran hidup bayi dengan kasus terbanyak pada tahun 2013. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(1000 - \text{angka kematian bayi})$. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.23 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Kematian Bayi (Jiwa)	33	4	30	25
2	Kelahiran Hidup Bayi (Jiwa)	5.353	4.983	5.196	5.012
3	AKB (Angka Kematian Bayi)	6,16	0,80	5,77	4,99
4	AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)	993.84	999.2	994.23	995.01

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup saat lahir dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Adapun Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2015 yaitu 68.53 tahun, lebih tinggi dari tahun 2014 yaitu 68,07 Tahun.

Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Presentase Balita Gizi Buruk selama 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2016 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk.

Tabel 2.24 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa	10	15	2	0
2	Jumlah Balita	Jiwa	14.216	27.208	23.990	24.127
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,07	0,06	0,08	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Rasio Penduduk Yang Bekerja

Angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Hasil Sakernas 2015 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2015 sebanyak 112.592 jiwa atau sekitar 53.27 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104.741 orang (sekitar 93.03 persen) berstatus bekerja. Sementara sisanya sebanyak 7.851 orang (sekitar 6.97 persen) berstatus tidak bekerja (pengangguran). Berikut ini perkembangan rasio penduduk yang bekerja tiga tahun terakhir seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.25 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Penduduk yang bekerja	Jiwa	96.076	105.295	104.741
2	Angkatan kerja	Jiwa	104.006	112.252	112.592
3	Rasio Penduduk yang bekerja	%	92,38	93,80	93,03

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

(Data Ketenagakerjaan Tahun 2016 tidak tersedia di BPS)

Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Tabel 2.26 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Grup Kesenian	10	15	15	15
2	Jumlah Sarana Gedung Kesenian	-	-	-	-
3	Jumlah Klub Olahraga	200	221	374	144
4	Jumlah Gedung/ Lapangan Olahraga	281	287	386	1.272

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Pembinaan pemuda atau generasi muda dilakukan dengan berbagai pola pembinaan dengan pengelompokan bentuk kedalam instrument pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah. Instrumen kepemudaan ini dibedakan atas pengelompokan menurut organisasi, bentuk kegiatan dan jenis usaha produktif yang terdiri atas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Pemuda Pelopor (PP), Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Purna Paskibraka dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27 Instrumen Kepemudaan Tahun 2016

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	Pemuda Pelopor (PP)	Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)	Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Purna Paskibraka	Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
31	-	-	-	35	60

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Organisasi kepemudaan yang ada dan terdaftar sebanyak 31 OKP yang telah berkontribusi melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan, Purna paskibraka yang menjadi wadah berkumpul dan pembinaan para alumni pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional sebanyak 35 orang. Dan kelompok usaha pemuda produktif sebanyak 60 kelompok dari berbagai jenis usaha yang mendapat bantuan dana usaha dari APBN.

Berikut ini ditampilkan sarana prasarana olahraga berupa gedung dan lapangan olahraga yang tersebar di 11 kecamatan.

Tabel 2.28 Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Lapangan Olahraga					Jumlah
		Sepak Bola	Lap. Basket	Lap. Volley	Bulu Tangkis	Kolam Renam	
1	Panca Lautang	10	11	43	43	-	
2	Tellu Limpoe	9	9	34	34	-	
3	Watang Pulu	10	5	65	65	2	
4	Baranti	9	9	56	56	-	
5	Panca Rijang	8	13	56	56	-	
6	Kulo	6	3	23	23	-	
7	Maritengngae	12	10	77	77	1	
8	Watang Sidenreng	8	4	27	27	-	
9	Pitu Riawa	12	7	51	51	-	
10	Dua Pitue	9	7	47	47	-	
11	Pitu Riase	12	14	56	56	1	
	Jumlah	106	92	535	535	4	1.272

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Untuk bidang seni dan budaya daerah ini memiliki potensi organisasi kesenian yang terdiri atas tim kesenian kabupaten, beberapa sanggar seni dan group kesenian yang sering mengangkat dan mengharumkan nama daerah ditingkat propinsi dan nasional, misalnya

pertunjukan seni budaya bugis sidenreng seperti : simponi kecapi, tari padduppa, tari pattennung, lagu ongkona sidenreng dan lagu mappadendang.

Tabel 2.29 Organisasi Kesenian dan Sarana Pementasan Seni dan Budaya Tahun 2016

Tim Kesenian Kabupaten	Sanggar Seni	Group Kesenian	Gelandang Seni Budaya	Sarana Tempat Pementasan
1	10	4	-	11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk pementasan seni dan budaya pemerintah kabupaten telah memiliki tim kesenian yang dipersiapkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya didalam di berbagai kegiatan. Selain tim kesenian kabupaten juga terdapat 10 sanggar seni dan 4 group kesenian yang tersebar di beberapa kecamatan. Organisasi kesenian di atas berkontribusi dalam melestarikan seni dan budaya tradisional Bugis. Organisaasi kesenian ini sering ditampilkan pada acara-acara penting di tingkat kabupaten dan propinsi. Untuk aksi pementasan seni dan budaya telah tersedia sarana tempat pementasan baik terbuka maupun tertutup yang tersebar dibeberapa kecamatan yang berjumlah 11 (sebelas) buah.

Untuk bidang seni budaya, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki situs-situs cagar budaya, baik yang berupa peninggalan sejarah masuknya agama Islam berupa Masjid dan makam, maupun situs-situs kuno peradaban sebelum agama Islam masuk didaerah kita ini, seperti makam-makam kuno. Berikut ini akan disajikan daftar situs cagar budaya yang keberadaan masih dapat kita saksikan sampai hari ini :

Tabel 2.30 Situs Cagar Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Masjid Kuno	Makam	Rumah Adat (Saoraja)	Sumur Kuno	Lainnya
2	24	4	2	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Tahun 2017

Dari tabel di atas untuk situs masjid kuno sebanyak 2 buah yaitu Masjid kuno Jerra'e Allakuang dan Langgara Tungga Tanatoro. Masjid Jerrae ini merupakan satu diantara tiga masjid tertua yang terdapat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya makam-makam kuno sebanyak 24 buah yang terdiri atas makam-makam kuno penyiar Islam dan makam-makam kuno raja-raja. Selain itu juga terdapat 4 rumah adat dan rumah raja-raja (saoraja) yang tersebar

dibeberapa kecamatan, 2 sumur kuno termasuk sumur tua atau Bungge Citta yang berlokasi di desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, tidak jauh dari Masjid Kuno Jerra'e. Situs-situs yang disebutkan diatas juga selama ini menjadi destinasi wisata budaya yang banyak diminati oleh wisatawan lokal sebagai pesiarah.

selain seni budaya dan situs cagar budaya, kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun buatan yang apabila dikelompokkan menjadi jenis dapat dibagi atas obyek wisata alam, sejarah, budaya, agro dan obyek wisata sport yang kami tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31 Jenis Obyek Wisata Tahun 2016

Wisata Alam	Wisata Sejarah	Wisata Budaya	Wisata Agro	Wisata Sport
7	4	4	5	2

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Pada tabel di atas terlihat bahwa obyek wisata sejarah cukup banyak yaitu 7 buah yang sebagian besar merupakan situs cagar budaya yang menjadi potensi utama wisata sejarah yaitu sebanyak 4 buah, selebihnya merupakan monument-monumen perjuangan kemerdekaan. Selain itu obyek wisata agro juga mendapat tempat dihati wisatawan misalnya sanggar kerajinan tenun sutra di desa Carawali. Karena lokasinya yang strategis yaitu dijalan poros kearah Tana Toraja, lokasi wisata agro ini kerap disinggahi oleh turis mancanegara yang akan ke Tana Toraja. Disana mereka akan menyaksikan proses pembuatan kain tenun sutera dengan peralatan tenun tradisional sekaligus dapat membelinya langsung sebagai oleh-oleh.

Untuk wisata sport, terdapat obyek wisata terbaru dan disukai oleh kalangan remaja dan pencinta otomotif khususnya motor sport yaitu obyek wisata sport sirkuit RMS Land yang berlokasi di Kota Rappang. Obyek wisata ini sering dan dipercaya melaksanakan berbagai even balap motor sampai ketingkat nasional karena sarana kelengkapan yang dimiliki memenuhi standar Ikatan Motor Indonesia sebagai pendamping penyelenggara kegiatan racing motor sport.

Pada tabel berikut ini ditampilkan arus kunjungan wisatawan dalam hal ini wisatawan mancanegara yang mengunjungi beberapa obyek wisata di kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.32 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Asing) tahun 2013-2016

2013	2014	2015	2016
400	350	400	250

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Walaupun potensi obyek wisata yang dimiliki daerah ini belum menjadi destinasi utama dan hanya pendukung dari destinasi wisata utama Tana Toraja, hal tersebut terlihat dari kecenderungan pergerakan fluktuatif dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 sebanyak 400 orang kunjungan wisatawan mancanegara, tahun 2014 sebanyak 350 orang, pada tahun 2015 sebanyak 400 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 250 orang.

c. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian utama khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Perkembangan rasio siswa per sekolah di tingkat SD/MI menunjukkan angka yang semakin menurun selama tiga tahun terakhir, pada Tahun 2016 sebesar 129,65 persen. Sedangkan Rasio Siswa per Sekolah pada tingkat SMP+MTs Tahun 2016 sebesar 218,32 persen, tingkat SMA/SMK/MA Tahun 2016 sebesar 294,43 persen.

Perkembangan Rasio Siswa per Kelas untuk tingkat SD/Mi untuk tahun 2016 sebesar 19,19 persen, pada tingkat SMP/MTs sebesar 20.93 persen sedangkan rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/MA sebesar 26.09 persen. Perkembangan rasio siswa per guru menunjukkan tingkat kecukupan guru pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Rasio Siswa per Guru untuk tingkat SD/MI untuk tahun 2016 sebesar 13,07 persen, tingkat SMP/MTs sebesar 11,35 persen dan pada Rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 12,14 persen.

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/ MI tahun 2016 sebanyak 0,25 persen, pada tingkat SMP/MTs Angka Putus Sekolah sebesar mencapai 0,89 persen. Demikian pula pada tingkat SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah sebesar 0,94 persen. Angka Kelulusan untuk tiga jenjang pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2016 adalah 100 persen, artinya pada tahun 2016 semua siswa yang mengikuti ujian dinyatakan lulus, baik pada jenjang

SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Berikut gambaran kinerja urusan pendidikan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 3 tahun seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.33 Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2014	2015	2016
Pendidikan				
1	Rasio Siswa / Sekolah			
	- Rasio Siswa/Sekolah SD/ MI	133,67	131,08	129,65
	- Rasio Siswa/Sekolah SMP/MTs	214,58	209,74	218,32
	- Rasio Siswa/Sekolah SMA/SMK/MA	289,58	284	294,43
2	Rasio Siswa / Kelas			
	- Rasio Siswa / Kelas SD / MI	21	17,83	19,19
	- Rasio Siswa / Kelas SMP / MTs	26	23,92	20,93
	- Rasio Siswa / Kelas SMA/SMK/MA	29	29	26,09
3	Rasio Siswa / Guru			
	- Rasio Siswa / Guru SD / MI	13	13,12	13,07
	- Rasio Siswa / Guru SMP/MTs	12	10,79	11,35
	- Rasio Siswa / Guru SMA/SMK/MA	11	11	12,14
4	Angka Putus Sekolah (APtS)			
	- Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ³⁾	0,4	0,51	0,25
	- Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ³⁾	0,75	0,78	0,89
	- Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA ³⁾	1,43	1,99	0,94
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	-APS SD/MI	95,97	103,73	105,11
	-APS SMP/MTs	79,21	100,22	96,55
	-APS SMA/MA	41,97	79,19	51,60
6	Angka Kelulusan			
	- Angka Kelulusan (AL) SD/MI ²⁾	99,52	99,40	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ²⁾	98,03	99,62	100
	- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ²⁾	99,17	99,29	100

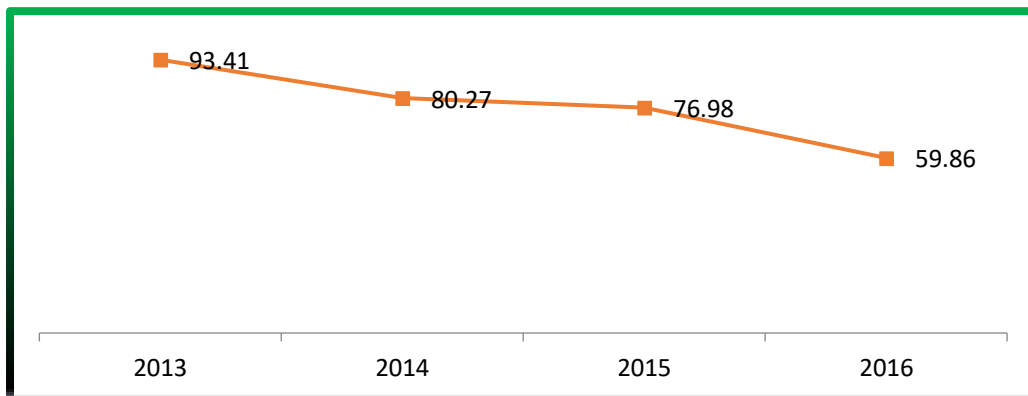
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Kesehatan

1. **Angka Kematian Ibu (AKI)** adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 KH. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil,

pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama empat tahun terakhir (Tahun 2013-2016) mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 93.41 per 100.000 KH, tahun 2014 turun menjadi sebesar 80.27 per 100.000 KH, tahun 2015 turun menjadi sebesar 76.98 per 100.000 KH dan tahun 2016 turun menjadi 59.86 per 100.000 KH.

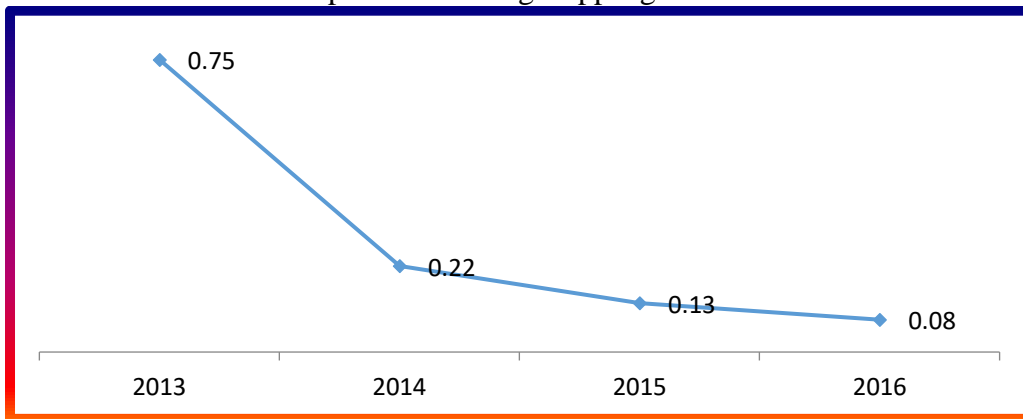
Gambar 2. 4 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

- 2. Angka Kematian Balita (AKABA)** adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal *sebelum* mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. AKABA di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 0,75 per 1.000 KH, sedangkan tahun 2014 turun menjadi sebesar 0,13 per 1.000 KH dan tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,08 per 1.000 KH.

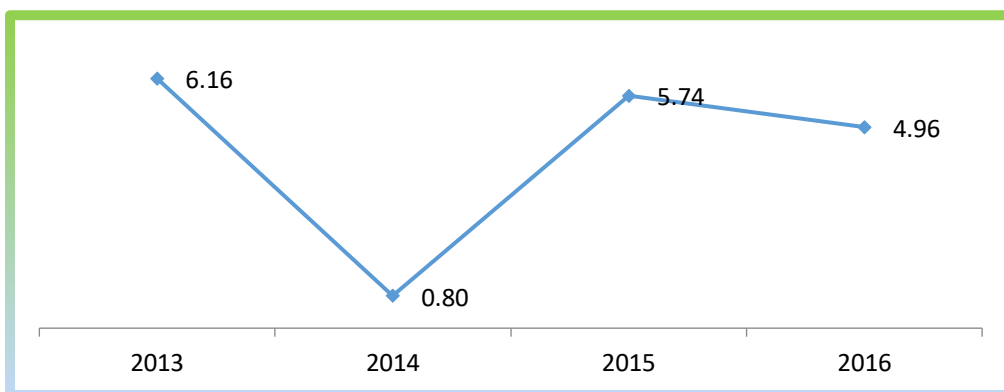
Gambar 2. 5 Angka Kematian Balita per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

- 3. Angka kematian bayi** adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Gambaran perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013-2016 yaitu pada tahun 2013 sebesar 6.16 per 1.000 KH dan mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2014 sebesar 0.80 per 1.000 KH, tapi pada tahun 2015 kembali meningkat sebesar 5.74 per 1.000 KH dan turun kembali pada Tahun 2016 sebesar 4.96 per 1.000 KH.

Gambar 2. 6 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

- 4. Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui

kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

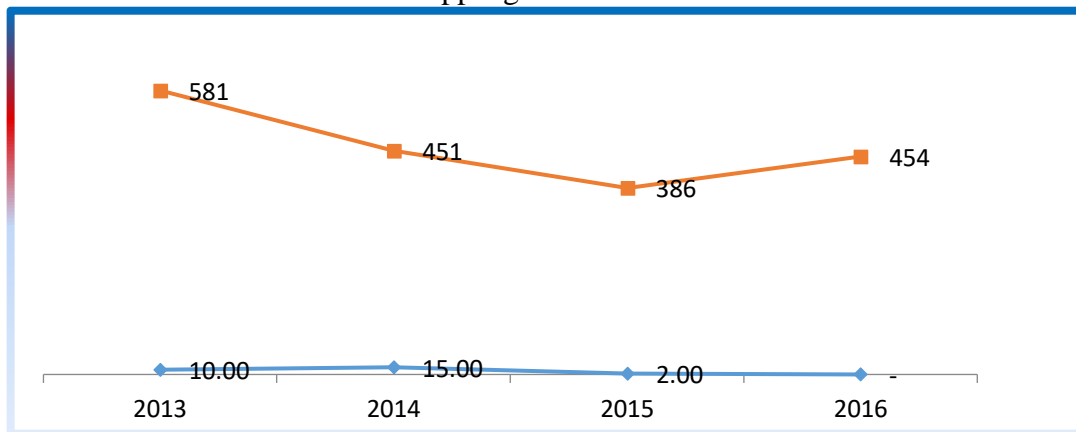
Tabel 2.34 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Baranti	3	0	5	2
2	Maritengngae	9	0	3	5
3	Watang Pulu	3	2	4	4
4	Panca Lautang	4	0	1	2
5	Kulo	1	1	2	0
6	Tellu Limpoe	6	0	5	2
7	Dua Pitue	0	0	1	1
8	Pitu Riase	3	0	1	4
9	Pitu Riawa	3	0	1	1
10	Watang Sidenreng	0	0	3	3
11	Panca Rijang	1	1	4	1
	Jumlah	33	4	30	25

(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

5. **Kasus Gizi Balita** Berikut ini digambarkan kasus gizi berdasarkan tinggi badan per berat badan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak tahun 2013-2016, dimana kasus gizi kurang pada tahun 2013 sebesar 581 kasus mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 451 kasus dan tahun 2015 sebanyak 386 kasus, tetapi mengalami peningkatan mencapai 454 kasus pada Tahun 2016. Sedangkan kasus gizi buruk tahun 2013 sebanyak 10 kasus, tahun 2014 meningkat sebanyak 15 kasus, tahun 2015 menurun menjadi 2 kasus dan tahun 2016 tidak ada kasus.

Gambar 2. 6 Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang (kasus) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Jumlah Posyandu pada tahun 2013-2014 sebanyak 309 unit, terjadi penambahan posyandu pada tahun 2015-2016 sebanyak 1 posyandu menjadi 310 unit. Rasio Puskesmas, Poskesdes dan Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 45,58 dan menurun sekitar 44,17 di tahun 2016.

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013-2016 sebanyak 3 rumah sakit. Dimana Rasio Rumah Sakit Per Satuan sebesar 1,04 pada tahun 2016. Sementara Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk dari tahun 2016 sebanyak 19,67. Berikut disajikan data kinerja kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016:

Tabel 2.35 Kinerja Kesehatan Tahun 2013-2016 Kab Sidenreng Rappang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pengembangan Daerah Kesehatan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu (unit)	309	309	310	310
2	Jumlah Balita	14.216	27.208	27.388	27.833
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	21.73	11.36	12.92	12.85
4	Rasio Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes Per 100.000 Penduduk	45,58	45,18	44.17	44.17
5	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1,07	1,05	1.04	1.04
6	Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk	17,09	14,12	19.67	19.67
7	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani	73,71%	60,00%	82.80%	82.80%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pengembangan Daerah Kesehatan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
8	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,11%	91,44%	98.90%	98.90%
9	Cakupan Desa/Kel. <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	95,28%	100%	97.2%	97.2%
10	Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	46,27%	55,26%	54%	54%
12	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	90,17%	100%	97.56%	97.56%
13	Cakupan Kunjungan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	81,91%	67,67%	68%	68%

(Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017)

Pekerjaan Umum

Panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kondisi baik sepanjang 1.442.763 km, sedangkan panjang jalan dalam kondisi sedang dan rusak masing-masing 248.197 km dan 52.743 km.

Tabel 2.36 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Panjang Jalan	%
1	Kondisi Baik	Km	1.141.823	79.14
2	Kondisi Sedang	Km	248.197	17.20
3	Kondisi Rusak	Km	52.743	3.66
4	Jalan secara keseluruhan kabupaten	Km	1.442.763	100

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Tabel 2.37 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Uraian	Panjang (m)
1	Jaringan Irigasi Primer	51.482
2	Jaringan Irigasi Sekunder	51.482
3	Jaringan Irigasi Tersier	13.812
4	Total panjang jaringan irigasi	-
5	Luas lahan terairi/budidaya	12.827
	Rasio	5.70

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Tabel 2.38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2016

Jenis Infrastruktur	Hasil kinerja sampai dengan tahun 2016	
Jalan:	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
- Hotmix	502,442 km	54,444 km
- Beton	49,16 km	-
- Lapen	39,097 km	0,679 km
- Kerikil	710,569 km	29,746 km
- Paving Block	30,007 km	0,205 km
- Tanah	24,374 km	2,039 km
Jumlah jembatan dalam kondisi baik	156 unit	66 unit
Tingkat kerusakan jaringan irigasi:		
- Saluran Primer		30%
- Saluran sekunder		30%
- Bangunan Bendung		30%
- DI desa		45%

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan dan PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Perumahan

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan ini harus didukung strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase sampai dengan jalan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah yang ada di sekitar permukiman, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem

infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini data kondisi infrastruktur permukiman selama tahun 2013-2016

Tabel 2.39 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2016

Jenis Infrastruktur	Hasil Kinerja Sampai Dengan Tahun 2013			
	2013	2014	2015	2016
Gedung Kantor	9	18	5	38
MCK	4	5	8	8
Air bersih Non PDAM	25	9	7	12

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 82% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 89% penduduk; ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.40 Jumlah Infrastruktur Permukiman yang Terlayani

Jenis Infrastruktur	Hasil kinerja sampai dengan tahun 2016
Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	89%
Prasarana Air Limbah	-
Air Bersih PDAM/Non PDAM	82%
Persampahan	15%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Tabel 2.41 Presentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Bidang/Urusan	2016
1	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi	78.084
2	Jumlah Rumaah Tangga	87.735
3	Persentase	89

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017(diolah)

Penataan Ruang

Dalam hal penataan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, masih perlu pembenahan-pembenahan yang terpadu. Pembagian zona-zona masih belum teratur dalam pembangunannya, terutama pusat kegiatan lokal. Begitu pula dalam hal ketersediaan ruang publik yang masih terbatas, sehingga pemanfaatan ruang masih belum optimal. Penataan kawasan yang berbasis lingkungan berkelanjutan masih sangat minim pengendalian. Berikut kinerja Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.42 Panjang Drainase yang terbangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Drainase	4.381	7.381	5.041	16.068
Talud	2.363	8.036	3.129	15.471
Duiker	12	17	25	25
Gorong-gorong	12	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenren Rappang;2017

Tabel 2.43 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	2016
1	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	49.879
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	317639
3	Rasio Rumah Layak Huni	%	15.70

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenren Rappang;2017(diolah)

Perencanaan Pembangunan

Pemenuhan Standar Dokumen Perencanaan Pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan mengikuti perkembangan dinamika yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perencanaan. Proses dan Produk perencanaan merupakan indikator kinerja yang harus dipenuhi antara lain; penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Draft Awal RKPD, RKPD Final, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD, Penyusunan KUA-PPAS Pokok dan Perubahan sampai pada Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Penyusunan Dokumen yang mendukung perencanaan secara makro. Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan RPJMD, dll. Proses dan Produk perencanaan masih memerlukan penyempurnaan dalam mewujudkan proses dan produk perencanaan yang berkualitas, terarah, terukur sesuai kaidah-kaidah peraturan dan perundang-undangan perencanaan. Untuk mewujudkan itu semua, pada tahun-tahun mendatang diupayakan melakukan perbaikan melalui penyiapan program-program yang bersinergi dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Perhubungan

Urusan perhubungan sangatlah penting dalam hal perpindahan manusia, barang, dan informasi, antar daerah atau antar wilayah. Ketersediaan fasilitas dan kelancaran arus perpindahan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu keselamatan dalam berlalulintas juga sangat penting dalam pengaturan jalur-jalur yang dilewati kendaraan. Untuk kinerja urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.44 Data Perhubungan Tahun 2013-2016 Kab. Sidenreng Rappang

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah arus penumpang umum	667.440	700.812	742.860	701.860
2.	Jumlah izin trayek	2.537	2.528	2.496	1.985
3.	Pengujian Kelayakan angkutan umum	3.616	3.966	4.462	4.423
4.	Tingkat kepemilikan/ kelulusan keur angkutan umum	3.616	3.966	4.462	4.423
5.	Jumlah kendaraan umum melalui terminal	137.600	117.300	92.315	87.700
6.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	-	-	60	100

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi. Untuk urusan Lingkungan hidup kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Keterangan
	Taman Hijau 1 lokasi	Kel. Lakessi
	Penanaman Turus Jalan 1.400 pohon	Kota Pangkajene
	Dokumen : - UKL/UPL 20 Dok. - SPPL 402 Dok. - SLHD 1 Dok,	
	Sarana & Prasarana Persampahan: - Embun 10 titik - Sumur Resapan 15 titik - Biopori 1.588 Unit - Biogas 10 Unit - Bak Sampah 1 Unit - Mobil Dum truck 1 unit - Motora 10 Unit	Tersebar Tersebar Pangkajene Pangkajene

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang , 2017.

Tabel 2.46 Jumlah Armada Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

Uraian	2016
Jumlah Sampah yang ditangani	50.095 m ³ /tahun
TPS	2.440 unit

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenren Rappang;2017

Kependudukan Dan Catatan Sipil

Berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami fluktuasi mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dalam kurun waktu 4 tahun mengalami peningkatan sebesar 2,76 %. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan baik dari tingkat akurasi data melalui validasi data setiap tahunnya sehingga pelayanan kependudukan dan catatan sipil bisa lebih optimal . Sehubungan dengan hal itu Penyelenggaran layanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik. Sejak Tahun 2009 Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis informasi komunikasi secara online.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2016 mencapai 87,98 % dari jumlah penduduk wajib KTP, prosentase ini mengalami kenaikan 2 tahun terakhir tahun 2014-2015, pada tahun 2016 menurun menjadi 87,98%. Adapun kepemilikan akte kelahiran mengalami peningkatan 2 tahun pada tahun 2014-2015, tetapi mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 menjadi 35,18%, disebabkan karena pengambilan data pada tahun 2016 melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tabel 2.47 Kinerja Urusan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2016

Elemen Data	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	338.958	299.007	307.796	317.639
Laki Laki	168.053	148.004	152.572	157.749
Perempuan	170.905	151.003	155.224	159.890
Jumlah Penduduk Wajib KTP	236.179	207.153	207.153	229.328
Jumlah Penduduk Memiliki KTP	189.976	192.055	190.603	201.772
Kepemilikan KTP (%)	80,44	92,71	92,01	87,98
Jumlah Balita	26.243	23.404	26.007	25.180
Jumlah Bayi Lahir	1.941	2.637	4.196	3.765
Jumlah Penduduk Memiliki Akta	255.112	268.571	271.431	111.746*
Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	75,26	89,82	88,18	35,18*

Sumber data : Dinas Sosial, Adm. Kependudukan & Capil Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

*Data SIAK

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen yang besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak hal ini terbukti dengan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang merupakan penghargaan tertinggi bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan peran perempuan, demikian pula dengan anak yang merupakan generasi penerus. Berikut ini digambarkan salah satu outcomes dari kegiatan pembangunan terhadap laki laki dan perempuan

Tabel 2.48 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No.	Keterangan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Persentase Penduduk perempuan yang Bekerja (%)	90,43	-	89,74
2.	Tingkat Pengangguran Perempuan (%)	9,56	-	10,28

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016
(Data Ketenagakerjaan Tahun 2016 tidak tersedia di BPS)

Dilihat dari perkembangannya prosentase penduduk perempuan yang bekerja mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 90,43% hingga pada tahun 2015 mencapai hanya 89,74%. Demikian pula tingkat pengangguran perempuan dari tahun 2013 sebesar 9,56% hingga pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 10,28%.

Penanganan KDRT

Perlindungan bagi anak merupakan prioritas dalam pembangunan daerah utamanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak diantaranya penyediaan sarana bermain sebagai media tumbuh kembang anak serta pemenuhan kebutuhan kebutuhan anak yang terintegrasi ke dalam pelayanan pemerintah. Terkait dengan perlindungan anak beberapa regulasi tentang telah diterbitkan diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penanggulangan HIV dan Aids, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, Keputusan Bupati Nomor 731 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja (P2TP2AR) dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut disajikan Data Angkatan Kerja di bawah umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015:

Tabel 2.49 Angkatan Kerja di Bawah Umur 15-19 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun	6.618	8.496	-

Sumber: Sumber data : Dinas Sosial, Adm. Kependudukan & Capil Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017
(Data Ketenagakerjaan Tahun 2016 tidak tersedia di BPS)

Cakupan peserta KB aktif dan rasio Akseptor KB

Berikut ini digambarkan kinerja Kinerja urusan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2013-2016, pada tahun 2013 sebanyak 32.888, meningkat pada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing 35.418 dan 39.786 atau sekitar 72%, pasangan usia subur menurun dari tahun 2013 ke tahun 2015 sebanyak 49.021 menjadi 48.975, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 51.239. Peningkatan cakupan peserta KB aktif ini tidak terlepas dari upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut tabel Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Tabel 2.50 Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Akseptor KB	Jumlah	32.888	-	35.418	39.786
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jumlah	49.021	-	48.975	51.239
3	Rasio Akseptor KB	%	67	-	72	72

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib yang disediakan pemerintah daerah. Sarana sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial berupa Panti Asuhan.

Tabel 2.51 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	-	-
2	Anak Terlantar	Orang	134
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jiwa	64
4	Anak Jalanan	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Orang	91
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	-	-

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2.734
9	Penyandang Disabilitas	Orang	196
10	Tuna Susila	Orang	51
11	Gelandangan	-	-
12	Pengemis	Orang	147
13	Pemulung	Orang	119
14	Kelompok Minoritas	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	68
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	43
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	56
18	Korban Trafficking	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	126
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-
21	Korban Bencana Alam	Orang	940
22	Korban Bencana Sosial	KK & Jiwa	37 & 3
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	176
24	Fakir Miskin (FM)	RTM	11.935
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Orang	40
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Orang	0
27	Pekerja Sosial Profesional	-	-
28	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	232
29	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Orang	15
30	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Orang	4
31	Karang Taruna	KLP	105
32	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1
33	Keluarga Pioner	-	-
34	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Keluarga Masyarakat (WPKS)	-	-
35	Penyuluh Sosial	-	-

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
36	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	11
37	Dunia Usaha	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Sidrap: Tahun 2017

Dalam urusan sosial masalah penanggulangan bencana juga menjadi sangat penting, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam sering terjadi seperti banjir di sekitar Sungai Salo Bukkang, sekitar Danau Sidenreng, dan di beberapa lokasi yang tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut data peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.52 Jenis dan Jumlah kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang

NNo.	Uraian	Jumlah kejadian		
		2014	2015	2016
1.	Angin Kencang	8	2	4
2.	Kebakaran	17	8	4
3.	Banjir	-	-	-
4.	Longsor	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial, Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Sidrap: Tahun 2017

Ketenagakerjaan

Penduduk usia 15 Tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 77,39% sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 31,24%.

Tabel 2.53 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dirunci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	72.685	32.610	105.295
	Pengangguran	3.229	3.738	6.957
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (1)	75.914	36.338	112.252
2	BUKAN ANGGKATAN KERJA			
	Sekolah	8.883	9.366	18.249
	Mengurus RT	411	59.093	59.504

	Lainnya	11.505	6.360	17.865
	Jumlah Penduduk bukan Angkatan Kerja (2)	18.140	77.478	95.618
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (1)+(2)	94.054	113.816	207.870
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80.71%	31,92%	54%
4	TPT	4.25%	10.28%	6.69%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017
(Data Ketenagakerjaan Tahun 2016 tidak tersedia di BPS)

Penduduk Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)2015, jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 211.346 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 112.592 jiwa merupakan Angkatan Kerja atau sekitar 53 persen dari Penduduk Usia Kerja. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sidrap sebanyak 104.741 orang dan pengangguran sebanyak 7.851 orang. Yang dimaksud bekerja disini adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selamasatu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus.

Tabel 2.54 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kabupaten	Lapangan Usaha					Jumlah
		1	3	6	9	2,4,5,7,8	
1	Sidenreng Rappang	42.175	8.224	18.983	23.069	2.804	104.710

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2016

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan
2. Pertambangan dan Pengalihan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas, dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Pesewaan Bangunan
9. Jasa Kemasyarakatan

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2013 sebesar 51.97% dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 54,07%, taetapi menurun menjadi 53.41% pada Tahun 2015. Untuk lebih lengkapnya pada tabel berikut disajikan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

Tabel 2.55 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	Jiwa	104.006	112.252	112.592
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Jiwa	200.111	207.580	210.785
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	51.97	54.07	53,41

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016
(data Tahun 2016 belum tersedia)

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tabel 2.56 Pencari Kerja yang ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	359	402	872	630
2	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Orang	1.375	1.040	1.073	739
3	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	26,10	38.65	81.26	85.25

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Pengangguran Terbuka

Dalam tabel berikut ini disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

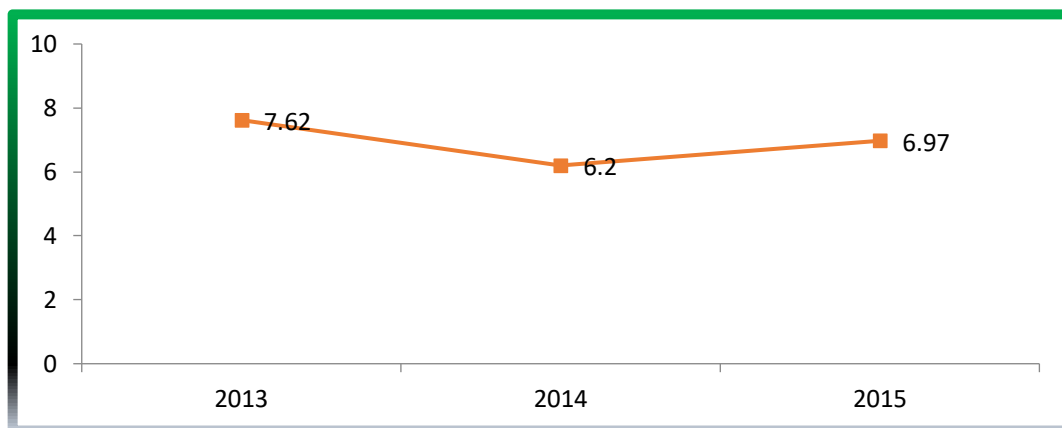
Tabel 2.57 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	7.930	6.957	7.851	7.851
2	Jumlah Penduduk usia angkatan kerja	Orang	104.006	112.252	112.592	112.592
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.62	6.20	6.97	6.97

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2016

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,62 % menurun pada tahun 2014 sebesar 6,20% tapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,97%. Untuk jumlah pengangguran Tahun 2016 tidak ada estimasi karena sampel yang di sensus kurang, oleh karena itu data Tahun 2016 sam dengan data Tahun 2015.

Gambar 2. 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015



Keselamatan Dan Perlindungan Kerja

Tabel 2.58 Keselamatan dan Perlindungan kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

NO	Bidang/urusan	Satuan	2016
A	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Perusahaan	10
B	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	900
C	Tingkat Keselamatan & Perlindungan Tenaga kerja	%	80%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Pada Tahun 2016 penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan mencapai 80%. Penerapan Norma keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan upaya menurunkan tingkat kecelakaan di tempat kerja.

Ketrasmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya tingkat pengangguran. Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 1995 sampai tahun 2017 sudah mencapai 9 UPT, UPT terbaru Lagading pada Tahun 2017 sebanyak 25 KK masih dalam proses penempatan.

Tabel 2.59 Data Ketrasmigrasian Kab Sidenreng Rappang Tahun 2017

No.	Uraian/UPT	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jumlah KK	Ket.
1.	Lombok I	Pitu Riase	1995	200	Sudah diserahkan ke Pemda April Tahun 2000
2.	Betao I	Pitu Riawa	1995	215	Sudah diserahkan ke Pemda Desember Tahun 2000
3.	Lombok II	Pitu Riase	1996	220	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2001
4.	Betao II	Pitu Riawa	1997	200	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2002
5.	Betao III	Pitu Riawa	1997	290	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2002
6.	Lampiring	Pitu Riase	1998	200	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2003
7.	Lombok III	Pitu Riase	1997	170	Sudah diserahkan ke Pemda Tahun 2001

8.	Tana Toro	Pitu Riase	2001	100	Masih dalam pembinaan
9.	Lagading	Pitu Riase	2017	25	Masih dalam proses Penempatan

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi merupakan organisasi ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu anggotanya untuk tumbuh bersama, dengan asas semangat kebersamaan dan silaturahmi, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan melainkan mensejahterakan anggotanya. Koperasi dapat menjembatani dan menyelesaikan kebutuhan dasar anggotanya antara lain; memfasilitasi Kegiatan Simpan Pinjam, Memfasilitasi pemenuhan Kebutuhan Pokok anggotanya, dll. Berikut presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

Tabel 2.60 Presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Koperasi Aktif	168	174	180	182
2	Jumlah Koperasi	359	358	365	366
3	Presentase Koperasi Aktif	46,8	48,6	49,3	49,7

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pada tahun 2013 jumlah UKM sebanyak 17.018, meningkat menjadi 22.885 pada tahun 2016, sedangkan jumlah BPR/LKM empat tahun terakhir sebanyak 222.

Tabel 2.61 Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Seluruh UKM	17.018	19.660	21.457	22.885
2	Jumlah BPR/LKM	222	222	222	222

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

UMKM

Tabel 2.62 Data Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	BIDANG/URUSAN	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
A	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah	13.547	15.985	17.575	18.810
B	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah	3.193	3.323	3.436	3.574
C	Jumlah Usaha Menengah	Jumlah	278	352	446	501
D	Jumlah UMKM	Jumlah	17.018	19.660	21.457	22.885

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;2017

Usaha Mikro dan Kecil berperan dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tabel tersebut di atas menunjukkan trend peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2013 Usaha Mikro berjumlah 13.547 menjadi 18.810 pada Tahun 2016. Demikian pula dengan Usaha Kecil mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013 berjumlah 3.193 menjadi 3.574 pada tahun 2016, sementara Usaha Menengah terjadi peningkatan dari tahun 2013 berjumlah 278 menjadi 501 pada Tahun 2016. Tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus mendorong pengembangannya melalui pembinaan pengelolaan usaha yang menerapkan prinsip

manajemen yang ditandai dengan pemenuhan syarat untuk mengakses penguatan permodalan (Bankable).

Penanaman Modal

Tabel 2.63 Jumlah Investor Berskala Nasional dan (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Keterangan
1	PT.BULI	237.300.000	Tahun 1991
2	PT.SATWA MEDIKA UTAMA	-	
3	PT. SINAR ENERGI SULAWESI	-	
4	PT.MALINDO FEEDMILL,Tbk	29.626.550.000	Tahun 2015
5	PT. SEMESTA MARGAREKSA	1.673.000.000.000	
6	PT.JAPFA COMFEED INDONESIA	-	
7	PT.BIOGUNA SUSTAINABLE POWER	-	
8	PT UPC SIDRAP BAYU ENERGI	274.942.000.000	Tahun 2016
9	PT. CAHAYA MITRA SULAWESI	-	
10	PT. BUDI SATRIA UTAMA	5.800.000.000	Tahun 1991

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang ; 2017

Kebudayaan

Dalam upaya melestarikan seni dan budaya Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun dilaksanakan Festival Seni dan Budaya serta kegiatan pelestarian situs-situs sejarah.

Tabel 2.64 Situs Budaya Kab Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	-	-	4 kali
2.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya	33 Situs Kawasan	4 33 Situs Kawasan	4 38 Situs Kawasan	4 45 Situs Kawasan
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1 Buah	1 Buah	1 Buah	4 Buah

4.	Prosentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70 %	70 %	70 %	70 %
<i>Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017</i>					

Pariwisata

Kabupaten Sidenreng Rappang selain memiliki potensi wilayah yang umumnya mendukung sektor pertanian dalam arti luas, daerah ini juga memiliki daya tarik di bidang pariwisata. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Kawasan Pariwisata dibagi atas Kawasan Pariwisata Budaya, Kawasan Pariwisata Alam, dan Kawasan Pariwisata Buatan. Agrowisata seperti Kerajinan Batu Ukir Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, Processing Beras Berkualitas PT.Pertani Sidenreng Rappang di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Peternakan Sapi Berskala Besar di Desa Bila Kecamatan Pitu Riase, Sanggar Kerajinan Tenun Sutra di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu, Wisata Agro Toddangbojo di Desa Ciro Ciroe Kecamatan Watang Pulu dan lain-lain.

Pemuda Dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terangkum dalam kegiatan seni dan olahraga yang menjadi suatu kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam tabel berikut ini disajikan Kinerja Urusan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.65 Jumlah Organisasi Pemuda per Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	Kecamatan	Kondisi Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	28	28	31	31
2	Tellu Limpoe	28	28	31	31
3	Maritengngae	28	28	31	31
4	Watang Sidenreng	28	28	31	31
5	Pitu Riawa	28	28	31	31
6	Dua Pitue	28	28	31	31
7	Pitu Riase	28	28	31	31
8	Panca Rijang	28	28	31	31
9	Kulo	28	28	31	31
10	Baranti	28	28	31	31
11	Watang Pulu	28	28	31	31

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik khususnya dalam pembinaan LSM dan Ormas dan OKP pada tahun 2014 sebanyak 13 kegiatan, tahun 2015 sebanyak 6 kegiatan dan pada tahun 2016-2017 masing-masing 12 dan 3 kegiatan. Sedangkan kegiatan pembinaan Politik Daerah sebanyak satu kegiatan pada tahun 2014-2016, tetapi meningkat pada tahun 2017 sebanyak 4 kegiatan.

Tabel 2.66 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja			
		2014	2015	2016	2017*
1.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	13	6	12	3
2.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1	1	1	4

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017
*Angka Sementara 2017

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Organisasi erangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, rinciannya bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.67 Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
Tahun 2017

No	SKPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Asisten	3
3	Kepala Bagian	10
4	Staf Ahli	3
5	Sekretariat DPRD	1
6	Dinas-Dinas	14
7	Lembaga Teknis	9
8	UPT Dinas	6
9	UPT Badan	2

10	Kecamatan	11
11	Kelurahan	38
12	Desa	68
Jumlah		166

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Tabel 2.68 Jumlah dan Nomenklatur Dinas Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017

No	Dinas	No	Dinas
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Dinas Perdagangan	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Tabel 2.69 Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

No	Lembaga Teknis Daerah	No	Lembaga Teknis Daerah
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Sekretariat DPRD
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7	Inspektorat Kabupaten
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	9	Rumah Sakit Nene' Mallomo
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	Rumah Sakit Arifin Nu'mang

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2013 sebesar 5,97 sedangkan pada tahun 2016 sebesar 5,09

Tabel 2.70 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	Orang	169	159	159	163
2	Jumlah Penduduk	Orang	283.307	286.610	289.787	320.064
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		5,97	5,55	5,49	5,09

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Penegakan PERDA

Rasio Penegakan PERDA dalam kurun 5(lima) tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 72%

Tabel 2.71 Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Jumlah
1	2013	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	8
	Jumlah Pelanggaran PERDA	11
	Rasio	72%
2	2014	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	21
	Jumlah Pelanggaran PERDA	25
	Rasio	84%
3	2015	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	24
	Jumlah Pelanggaran PERDA	27
	Rasio	88%
4	2016	
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	25
	Jumlah Pelanggaran PERDA	26
	Rasio	96%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Tabel 2.72 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2016

NO	Uraian	Jumlah
1	2013	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	4
2	2014	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	8
3	2015	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	8
4	2016	
	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan	4

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Ketersediaan Sumberdaya tenaga penyuluh dalam mengawal Potensi Lahan Pertanian kearah lebih produktif yang ditandai dengan peningkatan luas tanam, menurunnya tingkat serangan H/P, peningkatan produksi/produktivitas dan berkembangnya teknologi budidaya pertanian secara makro ditingkat petani sangat ditentukan dengan standar ratio penyuluh per luas lahan yang menjadi wilayah kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas lapangan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalokasikan kendaraan Roda 2 (dua) sampai pada tahun 2013 sebanyak 111 Unit, atau telah terpenuhi 70,2% dari 158 Penyuluh. Sedangkan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan terdiri dari 11 Kantor BPP yang tersebar pada 11 Kecamatan. Sementara alat bantu penyuluh seperti infokus, laptop dan alat peraga lainnya telah terpenuhi 75%. Dari penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang bagi aparat penyuluh. Berikut ini disajikan data perkembangan jumlah penyuluh.

Tabel 2.73 Data Penyuluh Sektor Pertanian berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

NO	SUB SEKTOR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	Tanaman Pangan dan Holtikultura	25	19	44
2	Perkebunan	12	2	14
3	Peternakan	22	12	44
4	Kehutanan	14	3	17
5	Perikanan	3	4	7
	Jumlah	76	40	126

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidnreng Rappang;2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kesediaan jumlah penyuluh dari masing-masing sektor masih sangat rendah. Dengan potensi luas areal pertanian masing-masing lahan persawahan 46.973 Ha, Kebun Campur 21.395 Ha, Kolam 765 Ha, Danau 1.636,15 Ha, Perkebunan 18.443,45 Ha, Hutan lebat 59.724,57 Ha, Hutan sejenis 1.632,94 Ha. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, adalah menambah jumlah penyuluh dan peningkatan kapasitas penyuluh secara bertahap, ditargetkan 1 (satu) desa/kelurahan di kawal minimal 1 (satu) penyuluh.

Tabel 2.74 Data Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani Tahun 2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	DATA POKTAN
1	MARITENGGAE	12	193
2	WATANG PULU	10	217
3	PANCA LAUTANG	10	149
4	TELLU LIMPOE	9	140
5	BARANTI	9	186
6	KULO	6	193
7	PANCA RIJANG	8	175
8	WATANG SIDENRENG	8	228
9	PITU RIAWA	12	224
10	DUA PITUE	10	143
11	PITU RIASE	12	247
	Jumlah	106	2.095

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidnreng Rappang;2017

Jumlah kelompok Tani mengalami peningkatan yang cukup, pada tahun 2013 berjumlah 1580 dengan jumlah petani 77.030 jiwa pada tahun 2013. Berdasarkan data tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketersediaan tenaga penyuluh, ratio kondisi yang dihadapi adalah 1 Penyuluh : 489 Jiwa Petani, demikian pula dengan ratio jumlah kelompok tani 1 penyuluh : 10 kelompok tani. Melihat ratio tersebut, terlihat ketimpangan yang cukup besar, sehingga kemampuan penyuluh melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap optimalisasi lahan pertanian sangat rendah. Tahun-tahun mendatang penting dilakukan penyesuaian ratio penyuluh dengan jumlah petani, luas lahan dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Dalam percepatan pemenuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Selain Peraturan Bupati tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor : 521/2061/IV/KP-BPKP/2013, Tanggal 17 April 2013, Perihal Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Untuk mengontrol besarnya pemanfaatan pangan lokal pada setiap wilayah kecamatan, telah disiapkan sistem informasi yang dapat memberikan gambaran daerah rawan dan aman.

Dari data yang disajikan pada tabel berikut ini memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2013-2015 mengalami surplus. Surplus tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 193.80 persen.

Tabel 2.75 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2015

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun		
			2013	2014	2015
1	Rata-rata Konsumsi beras	Kg/Kap/Th n	106,18	114	114
2	Konsumsi Beras penduduk	Kg/Tahun	25.622.316,58	32.297.000	32.297.000
3	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	193,80	85.19	88.35

Sumber: Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;2016

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri . Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Beberapa lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat desa/kelurahan yang telah terbentuk dan terbina berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LKMD yang tersebar pada seluruh desa dan kelurahan. Demikian pula dengan jumlah kelompok binaan PKK yang telah tersebar pada 106 desa/kelurahan dan pada 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini dapat dikatakan bahwa binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mencapai 100%. Dalam tabel-tabel berikut ini disajikan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2.76 Jumlah Kelembagaan Masyarakat Tahun 2013-2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kelembagaan masyarakat	38 LPM 68 LKMD	38 LPM 68 LKMD	38 LPM 68 LKMD	38 LPM 68 LKMD
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	117 Kel	117 Kel	117 Kel	117 Kel

Tabel 2.77 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2013

NO	Uraian	Jumlah
1	2009	
	Jumlah LPM	106
	Jumlah KLP Binaan LPM	212
	Rata-rata Jumlah LPM	2,00
2	2010	
	Jumlah LPM	106
	Jumlah KLP Binaan LPM	318
	Rata-rata Jumlah LPM	3,00
3	2011	
	Jumlah LPM	106
	Jumlah KLP Binaan LPM	318
	Rata-rata Jumlah LPM	3,00
4	2012	
	Jumlah LPM	106
	Jumlah KLP Binaan LPM	318
	Rata-rata Jumlah LPM	3,00

NO	Uraian	Jumlah
5	2013	
	Jumlah LPM	106
	Jumlah KLP Binaan LPM	424
	Rata-rata Jumlah LPM	4,00

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Tabel 2.78 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

NO	Uraian	Jumlah
1	2009	
	Jumlah PKK	2.040
	Jumlah KLP Binaan PKK	4.962
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK	2,43
2	2010	
	Jumlah PKK	2.040
	Jumlah KLP Binaan PKK	5.042
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK	2,47
3	2011	
	Jumlah PKK	1.806
	Jumlah KLP Binaan PKK	6.008
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK	3,33
4	2012	
	Jumlah PKK	1.806
	Jumlah KLP Binaan PKK	3.716
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK	2,06
5	2013	
	Jumlah PKK	1.689
	Jumlah KLP Binaan PKK	3.640
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK	2,15

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Tabel 2.79 PKK Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

NO	Uraian	Jumlah
1	2009	
	Jumlah PKK	2.040
	Jumlah PKK aktif	1.836
	% PKK Aktif	90,00
2	2010	
	Jumlah PKK	2.040
	Jumlah PKK aktif	1.856
	% PKK Aktif	91,00
3	2011	
	Jumlah PKK	1.806
	Jumlah PKK aktif	1.662
	% PKK Aktif	92,00

NO	Uraian	Jumlah
4	2012	
	Jumlah PKK	1.806
	Jumlah PKK aktif	1.680
	% PKK Aktif	93,00
5	2013	
	Jumlah PKK	1.689
	Jumlah PKK aktif	1.680
	% PKK Aktif	100

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Perpustakaan Dan Arsip

Pengelolaan Arsip dan Peningkatan SDM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 s.d 2016

Tabel 2.80 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	BIDANG URUSAN					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Perpustakaan	11	232	128	38	398
	a. SD/MI	0	132	15	38	245
	b. SMP/MTsN	0	58	-	-	58
	c. SMA/MA/SMK	0	10	11	-	21
	d. SLB	0	1	-	-	1
	e. Puskesmas	0	1	-	-	1
	f. Desa/Kelurahan	11	30	42	-	83
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	169	201	154	131	-
3	Jumlah Koleksi Buku	1.015	1.034	1.027	1.055	4.131

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Dalam menjamin keselamatan arsip dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik. Dilihat dari perkembangan Pengelolaan Arsip secara baku di kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 baru mencapai 5,00% hingga pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 40,00%.

Tabel 2.81 Perkembangan Pengelolaan Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

NO	BIDANG URUSAN	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
1	Pengelolaan Arsip secara Baku	%	5,00	20,00	30,00	40,00
2	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	106	-	1	-

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan pengelolaan kearsipan yang handal dan profesional. Untuk itu dibutuhkan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahunnya.

Tabel 2.82 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perpustakaan	11	232	128	38
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	169	201	154	131
3	Jumlah Koleksi Buku	1.015	1.034	1.027	1.055

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Komunikasi Dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pengawasan terhadap media dan pembangunan tower telekomunikasi. Sampai dengan tahun 2013 jumlah tower telekomunikasi sebanyak 99 buah.

Pertanian

Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 diperoleh angka kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 34.82 persen terhadap total PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun ini memberikan kontribusi tertinggi selama

kurun waktu empat tahun yaitu 34.82 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya transformasi kontribusi pada sektor lain terutama sektor jasa-jasa. Berikut ini dapat dilihat Tabel Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu empat tahun 2013-2016.

Tabel 2.83 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

No.	Sektor	2013	2014	2015	2016*
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.06	34.06	33.35	34.82
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	32.85	32.76	32.01	33.54
	• Tanaman Pangan	20.98	20.97	20.55	21.79
	• Tanaman Holtikultura semusim	0.89	0.88	0.84	0.83
	• Perkebunan Semusim	0.26	0.26	0.26	0.25
	• Tanaman Holtikultura Tahunan dan lainnya	0.88	0.89	0.88	0.87
	• Perkebunan Tahunan	4.78	4.96	4.75	4.82
	• Peternakan	4.23	4.00	3.93	4.17
	• Jasa Pertanian dan Perburuan	0.81	0.80	0.79	0.80
		0.02	0.02	0.02	0.02
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.18	1.28	1.32	1.26
3.	Perikanan				

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017.

*Angka sementara 2016

Tabel 2.84 Tabel Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan, Palawija, Hortikultura Tahun 2013-2016.

No.	Jenis Komoditas	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Padi				
	Hasil Produksi (ton)	461,617.45	488,883.45	536,012.00	587,982.51
2	Jagung				
	Hasil Produksi (ton)	39,950.00	72,267.00	58,634.00	96,348.30
3	Buah-buahan				
	Hasil Produksi (ton)	18,849.30	28,096.60	14,465.80	656.380
4	Sayur-sayuran				
	Luas Panen (HA)	118.00	397.00	657.00	
	Hasil Produksi (ton)	3,126.00	1,192.30	2,503.00	
5	Ubi Jalar				
	Luas Panen (HA)	10,473.00	19.00	3.00	

No.	Jenis Komoditas	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
6	Hasil Produksi (ton)	42,496.13	2,198.00	42.32	17.73
	Ubi Kayu				
	Luas Panen (HA)	67.00	41.00	65.00	
	Hasil Produksi (ton)	1,514.00	7,175.00	1,609.34	1,476.14
7	Kacang Tanah				
	Luas Panen (HA)	209.00	276.00	124.00	131.44
	Hasil Produksi (ton)	445.00	4,427.04	165.00	
	Kacang Kedelai				
	Luas Panen (HA)	34.00	455.00	121.00	13
	Hasil Produksi (ton)	42.00	5,191.55	181.00	65.57
9	Kacang Hijau				
	Luas Panen (HA)	28.00	29.00	251.00	108
	Hasil Produksi (ton)	45.00	379.00	355.92	100.33

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi hasil produksi padi memperlihatkan tren peningkatan produksi dari tahun 2013-2016. Komoditi ini sangat besar peranannya dalam menjaga Nilai PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian daerah di tahun-tahun mendatang. Jika komoditi ini gagal, perekonomian daerah ini dipastikan melambat. Demikian juga sebaliknya jika komoditi ini mengalami peningkatan produksi minimal 5% per tahun, dipastikan pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat. Untuk mendukung peningkatan kontribusi Tanaman Bahan Makanan dalam Sektor Pertanian, maka komoditi palawija (jagung dan kedelai) serta hortikultura akan terus dilakukan upaya peningkatan produksi melalui penyediaan program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Berikut ini disajikan Data Pendukung Sektor Pertanian khususnya Tanaman Pangan dan Palawija selama kurun waktu tiga tahun.

Tabel 2.85 Penggunaan pupuk kurun waktu tiga tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENIS PUPUK	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Urea	Ton	1,295,963.20	7,176.00	15,959.55	19,881.20

NO	JENIS PUPUK	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
2	Za	Ton	3,490.00	1,116.00	3,451.45	3,572.75
3	TSP/SP 36	Ton	3,383.00	1,222.50	3,168.60	2,850.93
4	KCL	Ton	-	-	-	-
5	Organik	Ton	635.5	1,552.02	525.08	389,70
6	NPK	Ton	7,654.35	4,752.00	10,086.75	11,574.20

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend penggunaan pupuk masih sangat fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun. Hal tersebut akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap Peningkatan Produksi serta Degradasi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama unsur kimia dan fisik tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus adalah dengan penerapan pupuk berimbang serta pemberian pupuk organik secara massal terhadap lahan persawahan. Tahun-tahun mendatang sudah saatnya dilakukan suatu penelitian secara bertahap terkait peta kesesuaian lahan terutama pada daerah sentra pengembangan komoditi pertanian padi.

Tabel 2.86 Data Sebaran Penggilingan Padi Besar Selama Kurun Waktu Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	DATA PENDUKUNG	KECAMATAN	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	
Penggilingan Beras (Unit)							
●	Penggilingan Besar (Unit)	Padi	Panca Lautang	2	1	4	12
			Tellu LimpoE	17	2	6	19
			Wattang Pulu	-	6	54	68
			Baranti	3	4	7	3
			Panca Rijang	9	2	1	6
			Kulo	2	1	2	2
			MaritengaE	6	5	16	-
			Wattang Sidenreng	11	7	18	10
			Pitu Riawa	-	7	4	-
			Dua PituE	2	4	2	3
			Pitu Riase	2	2	3	4
			(Jumlah)	54	41	117	127
			●	Penggilingan Kecil dan Sedang (Unit)	Padi	Panca Lautang	22
Tellu LimpoE	-	21				13	-

NO	DATA PENDUKUNG	KECAMATAN	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
		Wattang Pulu	-	33	30	-
		Baranti	51	32	37	29
		Panca Rijang	5	9	10	-
		Kulo	9	13	8	7
		MaritengaE	-	20	21	-
		Wattang Sidenreng	34	39	24	24
		Pitu Riawa	32	38	24	-
		Dua PituE	75	29	9	15
		Pitu Riase	16	8	4	-
		(Jumlah)	244	250	201	75
	● Rice Milling (Unit)	Panca Lautang	3	3	-	29
		Tellu LimpoE	8	8	-	-
		Wattang Pulu	8	8	-	27
		Baranti	10	10	-	25
		Panca Rijang	6	6	-	8
		Kulo	6	6	-	1
		MaritengaE	5	5	-	-
		Wattang Sidenreng	5	5	-	10
		Pitu Riawa	8	8	-	6
		Dua PituE	8	6	-	97
		Pitu Riase	11	11	-	18
		(Jumlah)	78,00	76	-	221

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Data tersebut menunjukkan bahwa, penggilingan padi dari semua skala hampir seluruhnya tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggilingan padi sangat diharapkan dapat berperan dalam mendorong peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Sektor Industri Pengolahan pada tahun-tahun mendatang. Jumlah gabah yang diproses melalui penggilingan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih besar daripada produksi padi daerah ini. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah mobil angkutan/truk yang memuat gabah masuk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sumbernya dari kabupaten tetangga antara lain; Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Luwu, Palopo dan Luwu Utara. Untuk mengoptimalkan produksi industri penggilingan dalam menjaga kualitas, kuantitas serta harga beras, telah terbangun beberapa *Sylo Dryer* yang dilakukan oleh sebagian pemilik penggilingan. Dalam mensinergikan peran masyarakat terhadap eksistensi penggilingan beras, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan membangun suatu kawasan industri yang didalamnya

terbangun gudang *Buffer Stock* beras yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara/resi gudang.

Tabel 2.87 Data Perkembangan Perintisan Jalan Tani Selama Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1	Panca Lautang	Meter	1,817.08	5,246.00	10,870.00	4,740.00
2	Tellu LimpoE	Meter	1,879.00	2,900.00	2,935.00	2,119.00
3	Watang Pulu	Meter	-	2,656.00	4,082.00	1,229.00
4	Baranti	Meter	1,000.00	4,211.00	3,252.00	6,005.00
5	Panca Rijang	Meter	3,320.00	1,126.00	3,543.00	0.00
6	Kulo	Meter	908	5,505.00	5,306.00	10,428.00
7	MaritengngaE	Meter	1,020.00	2,539.00	11,763.00	6,614.00
8	Watang Sidenreng	Meter	630	4,540.00	7,829.00	4,991.00
9	Pitu Riawa	Meter	2,720.00	8,003.00	6,537.00	6,832.00
10	Dua PituE	Meter	818	2,153.00	8,673.00	2,827.00
11	Pitu Riase	Meter	-	2,170.00	5,372.00	15,379.00
	(Jumlah)	Meter	14,112.08	41,049.00	70,162.00	61,164.00

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung sektor pertanian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat petani dalam mengangkut sarana dan prasarana usaha tani ketingkat lapang, maka pada Tahun 2016 telah terbangun jalan tani (Farm Road) sepanjang 61,164.00 Meter yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dampak daripada pembangunan jalan tani tersebut telah dirasakan oleh masyarakat petani, oleh karena berpengaruh terhadap ketepatan waktu penggunaan sarana produksi, tingginya frekuensi kunjungan ke lahan usaha tani, memudahkan angkutan hasil produksi dan lain-lain. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menjadikan prioritas untuk dilakukan kegiatan pembangunan jalan tani.

Tabel 2.88 Sebaran Perkembangan Alat Mekanisasi Pertanian Tahun 2013-2016
di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
Combine Harvester	Panca Lautang	Unit	7	17	17	19
	Tellu LimpoE	Unit	15	24	16	29
	Wattang Pulu	Unit	8	11	17	37
	Baranti	Unit	4	6	15	29
	Panca Rijang	Unit	-	16	36	60
	Kulo	Unit	10	12	12	12
	MaritengaE	Unit	52	87	92	103
	Wattang Sidenreng	Unit	89	97	105	109
	Pitu Riawa	Unit	22	83	113	127
	Dua PituE	Unit	30	45	63	138
	Pitu Riase	Unit	3	12	12	8
	(Jumlah)	Unit	240	410	508	671
	Traktor Roda Dua	Panca Lautang	Unit	319	325	336
Tellu LimpoE		Unit	161	170	175	117
Wattang Pulu		Unit	324	328	343	360
Baranti		Unit	509	517	530	573
Panca Rijang		Unit	328	344	410	450
Kulo		Unit	446	528	534	550
MaritengaE		Unit	346	406	480	702
Wattang Sidenreng		Unit	1.027	1,047	1,267	1,296
Pitu Riawa		Unit	763	974	989	1,020
Dua PituE		Unit	350	235	394	407
Pitu Riase		Unit	185	282	287	309
(Jumlah)		Unit	4,758	5,156	5,745	6,189
Traktor Roda Empat		Panca Lautang	Unit	3	3	3
	Tellu LimpoE	Unit	-	-	-	-
	Wattang Pulu	Unit	1	-	2	3
	Baranti	Unit	-	-	-	-
	Panca Rijang	Unit	10	-	-	-
	Kulo	Unit	-	-	-	-
	MaritengaE	Unit	-	-	-	-
	Wattang Sidenreng	Unit	-	-	3	3

NO	KECAMATAN	SATUAN	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
	Pitu Riawa	Unit	-	-	-	-
	Dua PituE	Unit	29	10	32	42
	Pitu Riase	Unit	1	2	2	-
	(Jumlah)	Unit	44	15	42	51

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Alat Mekanisasi pertanian merupakan alat yang sangat penting peranannya dalam mendukung kegiatan usaha tani masyarakat baik pada tingkat on-farm/pengolahan tanah maupun pasca panen/panen. Berdasarkan data perkembangan hand traktor menunjukkan jumlah yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun.

Komoditi Perkebunan

Perkembangan produksi dan luas panen komoditi perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.89 Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

No.	Jenis Komuditas	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jambu Menté				
	Luas Panen (HA)	5,448.56	5,331.96	3,755.87	2,792.67
	Hasil Produksi (ton)	2,297.92	2,297.90	1,857.71	1,667.68
2	Lada				
	Luas Panen (HA)	155.48	163.48	324.80	220.55
	Hasil Produksi (ton)	80.07	80.07	80.25	83.65
3	Kelapa Dalam				
	Luas Panen (HA)	2,619.10	2,613.24	1,767.91	992.88
	Hasil Produksi (ton)	1,467.22	1,467.21	817.97	961.73
4	Kelapa Hibrida				
	Luas Panen (HA)	464.55	453.55	448.00	405
	Hasil Produksi (ton)	427.58	427.58	424.00	425.20
5	Cengkeh				

No.	Jenis Komuditas	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
	Luas Panen (HA)	1,974.33	2,107.33	2,554.13	1,862.03
	Hasil Produksi (ton)	510.36	510.36	696.75	702.04

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa lima komoditi memperlihatkan trend fluktuatif pada hasil produksi dari tahun 2013 sampai tahun 2016, demikian juga dengan luas panen. Komoditi ini akan tetap dilakukan upaya peningkatan produksi dan luas panen, mengingat komoditi ini sangat resisten dengan pengaruh ekonomi. Potensi pengembangannya masih sangat luas terutama pada daerah perbatasan Kabupaten Enrekang, Wajo, Soppeng, Barru dan Kabupaten Luwu yang meliputi Kecamatan Pitu Riawa, Kulo, Kecamatan Pitu RiasE dan Panca Lautang serta beberapa kecamatan lainnya yang berpeluang untuk dilakukan pengembangan

Peternakan Dan Perikanan

Peternakan

Berikut ini data perkembangan populasi ternak selama kurun waktu 2013-2016.

Tabel 2.90 Data Perkembangan populasi Ternak Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NAMA POPULASI	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Sapi	45.425	49.960	54.950	60.433
Kerbau	2.569	2.711	2.853	3.004
Kuda	1.072	630	599	579
Kambing	11.217	11.893	12.726	13.489
Ayam buras	1.517.236	1.558.960	1.714.855	1.886.342
Ayam ras pedaging	2.496.604	2.553.135	2.757.386	3.148.932
Ayam ras petelur	4.041.027	5.717.872	5.889.408	5.977.751
Itik	461.529	521.185	397.084	428.849

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan populasi ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat, kecuali ternak kuda memperlihatkan trend populasi menurun, pada tahun 2013 populasi mencapai 1.072 ekor

menjadi 579 pada tahun 2016. Khusus untuk ternak sapi dan unggas ayam petelur yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang, terus dipacu peningkatannya di tahun-tahun mendatang melalui dukungan program yang berkaitan dengan peningkatan populasi dan nilai tambah.

Tabel 2.91 Data Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1.	PRODUKSI TELUR (Kg)				
	Ayam Ras	30.550.164	59.037.028	60.808.138	61.720.279
	Itik	2.159.956	2.601.756	1.982.243	2.140.810
	Ayam Buras/Lokal	637.239	654.763	720.239	792.264
2.	PRODUKSI DAGING (Kg)				
	Sapi Potong	706.678	734.079	1.091.672	880.595
	Kambing	18.645	12.593	11.565	17.685
	Ayam				
	- Petelur	527.354	746.182	768.568	780.097
	- Pedaging	1.086.023	1.110.614	1.199.463	1.369.785
	- Buras	571.998	587.728	646.500	711.151
	- Itik	179.996	203.260	55.163	167.251

Sumber : Data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Tahun 2017

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, perkembangan produksi telur di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2013-2016 cenderung meningkat, sedangkan produksi daging sapi dan kambing cenderung fluktuatif.

Perikanan

Tabel 2.92 Data Perkembangan Luas Area Budidaya Perikanan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NAMA AREA BUDI DAYA	LUAS AREA BUDI DAYA PERIKANAN (Ha)			
	2013	2014	2015	2016

KOLAM	382,84	394,07	412,76	433,56
MINA PADI	224,96	287,60	251,55	292,03
JUMLAH	607,8	681,67	664,31	725,59

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

Pengembangan Budidaya Kolam memperlihatkan tren peningkatan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2013 luas area pengembangannya 382.84 Ha meningkat menjadi 433,56 Ha pada tahun 2016. Sementara luas area Budidaya Mina Padi juga mengalami peningkatan luas area. Pada tahun 2013 luas area 224.96 Ha dan mencapai 292,03 Ha pada Tahun 2016.

Tabel 2.93 Data Perkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2013-2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	TAHUN				JUMLAH
	2013	2014	2015	2016	
Maritenggae	4	2	5	1	12
Watang pulu	12	3	17	2	34
Panca lautang	-	-	2	-	2
Tellu limpoe	1	-	2	-	3
Baranti	13	1	3	4	21
Kulo	5	1	2	1	9
Panca rijang	14	5	7	-	26
Watang sidenreng	-	1	4	1	6
Pitu riawa	1	-	5	-	6
Dua pitue	2	-	3	1	6
Pitu riase	-	-	3	-	3
	52	13	53	10	128

Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang 2017.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, minat masyarakat terhadap pengembangan Budidaya Ikan masih sangat rendah, terlihat dari tren perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu empat tahun 2013-2016. Jika dibandingkan dengan jumlah kelompok pembudidaya tahun 2013 ke tahun 2016 mengalami penurunan 42 Kelompok Pembudidaya Ikan. Tahun-tahun mendatang, akan terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan sosialisasi agribisnis budidaya ikan. Dengan cara itu, dapat membantu mempercepat peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan ikan.

Tabel 2.94 Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 2013-2016
di Kabupaten Sidenreng Rappangkan

PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP		
NO	TAHUN	PRODUKSI (TON)
1	2013	2.768,3
2	2014	3.065,9
3	2015	2.320,4
4	2016	3.219,9

Sumber Data: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan produksi perikanan tangkap fluktuatif, nilai tertinggi untuk produksi perikanan tangkap sebanyak 3.219,9 ton di tahun 2016. Untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan di Danau Sidenreng sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir danau, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus melakukan upaya penambahan populasi ikan di tahun-tahun mendatang.

Perindustrian Dan Perdagangan

Kontribusi sektor Industri Pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016 sebesar 14,35 persen. Angka persentase tersebut menurun jika dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 14,43 persen. Industri Pengolahan diharapkan mendorong percepatan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru.

Tabel 2.95 Perkembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Perusahaan	4,040	4,185	4,595
Tenaga Kerja	13,018	12,969	16,364
Nilai Produksi (Rp.000)	68,679,075	73,712,310	20,959,000
Nilai Bahan Baku (Miliar Rp)	76,941,277	-	-
Investasi (Rp.000)	35,325,692	23,776,968	-

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016
(Data Tahun 2016 belum tersedia)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, Selama kurun waktu 2013-2015 jumlah perusahaan industri cenderung mengalami peningkatan. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 mencapai 4,040 perusahaan, tahun 2014 meningkat menjadi 4,185 perusahaan, tahun 2015 mencapai 4,595 perusahaan.

Nilai produksi yang diperoleh dari perusahaan industri selama tiga mengalami penurunan sampai mencapai 20 milyar lebih pada tahun 2015.

Tabel 2.96 Data Perkembangan Industri

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
I Industri Pangan					
1	Pengolahan dan pengawetan daging	7	21	480.605	305.000
2	Pengupasan dan pembersihan biji-bijian	181	420	1.800.000	2.091.000
3	Pengupasan dan Pembersihan Kacang kacang	10	37	295.500	577.000
4	Berbagai macam tepung dari padi-padian, kacang-kacangan dan sejenisnya	21	64	1.249.500	10.539.520
5	Ransum Makanan Ternak/ikan	55	120	510.545	5.315.000
6	Konsentrat dan pakan ternak	5	23	490.225	778.500
7	Roti, kue kering dan sejenisnya	20	65	157.755	597.500
8	Gula Merah	599	1 630	125.900	1.710 .000
9	Es Batu/Balok	3	10	126.500	106.600
10	Garam Beryodium	3	12	40.005	284.000
11	Minuman Ringan	12	50	1.571.953	182.050
12	Industri penggilingan padi	338	2.582	482.367.473	2.258.450.000
Jumlah		1254	824.582	2227.035	2830.65
II. Industri Sandang					
1	Industri Pemintalan Benang	79	201	173.498	-

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
2	Industri Pertenunan	1.256	2.230	445.498	-
3	Industri Pakaian Jadi dari tekstil	269	729	685.000	2.375.550
4	Industri Percetakan	38	106	599.500	3.443.100
5	Industri Vulkanisir Ban	4	15	32.100	6.800.000
6	Industri Barang-barang dari tanah liat untuk keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	155	420	28.390	79.263
7	Industri Batu Bata dari Tanah Liat	692	3.918	10.526.250	92.260.000
8	Reparasi Mobil	21	82	525.000	425.000
9	Reparasi Motor	75	290	562.500	348.200
	Jumlah	1254	824.582	2227.035	2830.65
III Industri KBB					
1	Industri Penggergajian Kayu	52	198	6.921.650	16.646.977
2	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya	39	89	567.150	-
3	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan dari Kayu	30	165	1.900.800	1.821.200
4	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	2	53	2.315.120	5.939.438
5	Industri Pupuk Alam Organik	16	676	39.093.771	34.667.508
6	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	9	45	125.000	1.010.885
7	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	11	70	100.250	532.300
	Jumlah	159	1296	792.4	532.3
IV Industri LE					
1	Penerbitan dalam Media Rekaman	2	10	9.140	74.500
2	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	53	239	1.972.000	1.641.550
3	Industri Alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam /Pandai Besi	236	824	1.206.258	8.135.000

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Niali Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Nilai 000)
4	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	10	65	497.372	902.794
5	Jasa Penunjang Industri Pertanian dan Kehutanan	31	169	292.600	794.000
6	Industri Kompur dan Alat Pemanas Tanpa Menggunakan Listrik	10	72	605.288	267.530
7	Reparasi Radio/Receiver	15	36	100.000	105.000
8	Bengkel Las	48	172	1.620.239	6.549.333
	Jumlah	405	1587	1504.4	2143.824
V	Industri Kerajinan				
1	Industri Bordir/Sulaman	9	21	50.000	100.500
2	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	110	415	268.804	690.800
3	Industri Barang dari Batu Batu untuk Keperluan Rumah Tangga	3	9	209.000	78.840
4	Industri Furniture dan Kayu	138	637	960.948	2.988.520
5	Industri Furniture dan Logam	14	36	121.500	1.500.000
6	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	33	122	475.015	2.150.000
7	Industri Barang Perhiasan Imitasi untuk Keperluan Pribadi dari Bukan Logam Mulia	31	62	175.550	300.500
	Jumlah	338	1302	2260.817	1170.64

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

(Data Tahun 2016 belum tersedia)

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto menempati urutan ketiga setelah sektor Pertanian dan Jasa-Jasa. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2016 Jumlah surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terbitkan sebanyak 211 buah yang terdiri dari Perdagangan Kecil (PK) sebanyak 124 buah, Perdagangan

Menengah (PM) sebanyak 87 buah dengan Total Tenaga Kerja sebanyak 396 orang dan Modal mencapai 30,7 Milyar. Sektor ini terus didorong dalam pemenuhan administrasi perizinan melalui pembinaan dan sosialisasi.

Ketrasmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya tingkat pengangguran. Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 1995 sampai tahun 2017 sudah mencapai 9 UPT, UPT Lagading Kecamatan Pitu Raise pada tahun 2017 masih dalam proses penempatan dengan jumlah KK sebanyak 25.

Tabel 2.97 Data Ketrasmigrasian

No.	Uraian/UPT	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jumlah KK	KET.
1.	Lombok I	Pitu Riase	1995	200	Sudah diserahkan ke Pemda 12 April 2000
2.	Betao I	Pitu Riawa	1995	215	3 Desember 2000
3.	Lombok II	Pitu Riase	1996	220	2001
4.	Betao II	Pitu Riawa	1997	200	2002
5.	Betao III	Pitu Riawa	1997	290	2002
6.	Lampiring	Pitu Riase	1998	200	2003
7.	Lombok III	Pitu Riase	1997	170	2001
8.	Tana Toro	Pitu Riase	2001	100	Masih dalam Pembinaan
9.	Lagading	Pitu Raise	2017	25	Masih dalam proses penempatan

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;2017

d. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Aspek Daya saing (*competitiveness*) mengukur kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu daerah. Tolok ukur keberhasilan daya saing menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan

tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, pengeluaran per kapita masyarakat kabupaten sidenreng rappang terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perekonomian yang terus membaik sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. Untuk melihat Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentasenya mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.98 Persentase Konsumsi Pangan & Non Pangan

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita	Persentase Konsumsi Makanan Pangan & Non Pangan (%)	
			Makanan Pangan	Makanan Non Pangan
1.	2013	564.509	56.46	43.54
2.	2014	647.113	53.92	46.08
3.	2015	740.184	52.23	47.77

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016.

Berdasarkan table tersebut di atas menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi makanan pangan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2013-2015 memperlihatkan trend persentase penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa, pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang masih memprioritaskan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, sedangkan persentase pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non pangan cenderung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Luas Wilayah Terkena Banjir

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya disebabkan oleh luapan danau sidenreng, sehingga titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang wilayah administratifnya berada di sekitar danau sidenreng dan wilayah kecamatan Dua Pitue diakibatkan luapan sungai Tanru Tedong. Selain itu berdasarkan data

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditinjau dari segi luas genangan bahwa masih ada sekitar 32,4% dari total luas genangan sebesar 1.455 Ha di areal permukiman yang terjadi banjir secara rutin

FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Tabel 2.99 Daftar Izin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PROSES PELAYANAN
1.	Izin Mandirikan Bangunan (IMB)	7 Hari
2.	Izin Gangguan Tempat Usaha	3 Hari
3.	Izin Pemasangan Reklame	1 Hari
4.	Trayek Angkutan Kota	1 Hari
5.	Izin Usaha Perikanan	3 Hari
6.	Izin Usaha Peternakan	3 Hari
7.	Izin Usaha Pertanian	3 Hari
8.	Izin Usaha Konstruksi	3 Hari
9.	Izin Penelitian	1 Hari
10.	Izin Kegiatan	2 Hari
11.	Izin Klinik	15 Hari
12.	Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat	15 Hari
13.	Izin Usaha Perdagangan	3 Hari
14.	Tanda Daftar Perusahaan	3 Hari
15.	Tanda Daftar Gudang	3 Hari
16.	Tanda Daftar Industri	3 Hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, transparansi terhadap waktu penyelesaian mulai dari proses sampai penerbitan setiap perizinan yang menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipublikasikan kepada seluruh masyarakat luas. Informasi ini sangat penting dalam mendorong minat masyarakat untuk melengkapi perizinannya sesuai dengan kebutuhan baik skala perorangan, kelompok maupun usaha. Batas Waktu Proses di atas, setelah administrasi pendukung yang menjadi persyaratan telah dipenuhi.

Tabel 2.100 Jenis –Jenis Retribusi Pendapatan Asli Daerah

No.	Jenis Retribusi	SKPD Pengelola
1	Pajak Daerah	
1.1	Pajak Hotel	Dispenda
1.2	Pajak Restoran	Dispenda
1.3	Pajak Hiburan	Dispenda
1.4	Pajak reklame	Dispenda

No.	Jenis Retribusi	SKPD Pengelola
1.5	Pajak penerangan jalan	Dispenda
1.6	Pajak air bawah tanah	Dispenda
1.7	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Dispenda
1.8	BPHTB	Dispenda
2	Retribusi Daerah	
<u>2.1</u>	<u>Retribusi jasa umum</u>	
2.1.1	Retribusi jasa pelayanan kesehatan	
2.1.1.a	<i>-Pelayanan kesehatan di puskesmas</i>	Dinas Kesehatan
2.1.1.b	<i>-Pelayanan kesehatan RSUD Nene mallomo</i>	RSUD Nene Mallomo
2.1.1.c	<i>-Pelayanan kesehatan RSUD Arifin Nu'mang</i>	RSUD Arifin Nu'mang
2.1.2	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.3	Retribusi penggantian biaya KTP/ akte capil	Dinas Kependudukan & Capil
2.1.4	Retribusi tempat parkir tepi jalan umum	Dinas Perhubungan
2.1.5	Pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan
2.1.6	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Dinas Perhubungan
<u>2.2</u>	<u>Retribusi Jasa Usaha</u>	
2.2.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
2.2.2.a	<i>-Retribusi hasil pengolahan traktor besar</i>	Dinas Pertanian/perkebunan
2.2.2.b	<i>-Retribusi pemakaian kekayaan daerah Bina Marga</i>	Dinas Bina Marga
2.2.2.c	<i>-Retribusi rumah potong hewan</i>	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.2.d	<i>-Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos</i>	BPKD
2.2.2.e	<i>-Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos</i>	Perwakilan
2.2.2.f	<i>-Penjualan hasil pertanian</i>	Badan Penyuluh & Ketahanan Pangan
2.2.3	Retribusi Pasar	Dispenda
2.2.4	Retribusi terminal	Dinas Perhubungan
2.2.5	Retribusi tempat khusus parkir	Dinas Perhubungan
2.2.6	Retribusi tempat rekreasi/olahraga	Dinas Pemuda & Olahraga
2.2.7	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	
2.2.7.a	<i>-BBI Passeno</i>	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.7.b	<i>-BBI Majjelling</i>	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.7.c	<i>-BBI Pangkajene</i>	Dinas Peternakan & Perikanan
2.2.7.d	<i>-BBI Kalosi</i>	Dinas Peternakan & Perikanan

No.	Jenis Retribusi	SKPD Pengelola
2.2.8	Retribusi Penerimaan alat berat	Dinas PSDA
2.3	<u>Retribusi perizinan tertentu</u>	
2.3.1	Retribusi izin mendirikan bangunan	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang
2.3.2	Retribusi izin gangguan	Badan Lingkungan Hidup
2.3.3	Retribusi izin trayek	Dinas Perhubungan

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah, 2014

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2016 target PAD sebesar 132,5 Milyar dengan realisasi 106,5 Milyar atau sebanyak 80.37%.

Tabel 2.101 Angka Kriminalitas

No.	Jumlah Tindak Kriminal	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	Kasus	53	86	82	111
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	Kasus	3	1	2	5
3	Jumlah Kasus Seksual	Kasus	4	2	5	9
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	Kasus	38	62	94	91
5	Jumlah Kasus Pencurian	Kasus				
	Curas	Kasus	1	2	0	2
	Curat	Kasus	16	18	8	4
	Curanmor	Kasus	21	33	24	15
	Curwan	Kasus	1	1	3	1
	Curi Biasa	Kasus	8	33	20	16
6	Jumlah Kasus Penipuan	Kasus	11	13	22	27
7	Jumlah kasus pemalsuan surat	Kasus	3	5	2	3
	Jumlah		159	256	262	284
No.	Jumlah Tindak Kriminal yang Tertangani	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kasus Narkoba	Kasus	80	110	109	149
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	Kasus	4	1	2	5
3	Jumlah Kasus Seksual	Kasus	5	0	3	7
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	Kasus	18	53	51	57
5	Jumlah Kasus Pencurian					
	Curas	Kasus	0	3	0	1
	Curat	Kasus	15	12	4	7
	Curanmor	Kasus	5	10	9	9
	Curwan	Kasus	1	0	1	4
	Curi Biasa	Kasus	5	18	18	14

No.	Jumlah Tindak Kriminal	Satuan	2013	2014	2015	2016
6	Jumlah Kasus Penipuan	Kasus	5	11	20	19
7	Jumlah kasus pemalsuan surat	Kasus	4	1	3	4
	Jumlah		142	219	220	276

Sumber: Data Polres Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, tingkat kriminilitas di Kabupaten Sidenreng Rappang fluktuatif selama kurun waktu Tahun 2014-2016. Kasus yang memperlihatkan trend peningkatan adalah kasus Narkoba, dengan jumlag terbanyak 111 kasus terjadi pada tahun 2016. Sementara kasus pembunuhan, penganiayaan, seksual, pencurian, dan penipuan cenderung fluktuatif. Kasus yang dapat menjadi ancaman pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam mendorong kegiatan investasi adalah kasus pembunuhan, penipuan, pencurian dan penganiayaan.

FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Pendidikan

Terkait dengan aspek daya saing sumber daya manusia, angka kependidikan yang terdiri atas penduduk 10 tahun keatas menurut kemampuan membaca dan menulis, angka pendidikan yang ditamatkan penduduk dan angka partisipasi menurut kelompok umur adalah instrumen untuk menilai aspek daya saing suatu daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.102 Tabel Indikator Pendidikan Tahun 2014-2016

NO	URAIAN	2014	2015	2016
1	Penduduk 10 Tahun keatas menurut kemampuan membaca dan menulis :	94,07	93,23	90,66
	▪ Laki-laki	96,05	95,15	92,37
	▪ Perempuan	92,24	91,44	89,09
2	Pendidikan yang ditamatkan penduduk usia di atas 10 tahun :			
	▪ Tidak/belum tamat SD	27,29	30,89	
	▪ Tamat SD	28,65	25,84	
	▪ Tamat SLTP	16,41	19,06	

NO	URAIAN	2014	2015	2016
	▪ Tamat SMU/SMA Kejuruan	20,59	17,30	
	▪ Tamat Diploma I/II	0,50	0,43	
	▪ Tamat Diploma III/Sarjana Muda	0,68	1,16	
	▪ Tamat Diploma IV/S1/S2/S3	5,87	5,32	
3	Angka Partisipasi Sekolah :			
	▪ 7 – 12 tahun	99,20	98,75	99,75
	▪ 13 – 15 tahun	92,96	91,83	99,11
	▪ 16 – 18 tahun	98,57	98,01	99,06
	▪ 19 – 24 tahun	32,21	24,34	

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

Data menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 94.07 persen menjadi 93.23 persen pada tahun 2015. Untuk potensi sumber daya manusia menurut pendidikan yang ditamatkan penduduk diatas 10 tahun didominasi oleh penduduk yang tamat sekolah dasar, dan tidak/belum tamat sekolah dasar, sedangkan nilai paling kecil yaitu tamat Diploma I/II sebesar 0.50 persen.

Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menerus melalui sosialisai dan upaya lain oleh SKPD terkait lebih memotivasi dan mengarahkan lulusan sekolah menengah pertama sederajat untuk lebih condong melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah kejuruan. Disamping melaksanakan dan menindaklanjuti program nasional untuk memaksimalkan lulusan sekolah kejuruan juga selaras dengan program pendidikan gratis pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang serta menekan jumlah pengangguran dengan ketersediaan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan yang memiliki daya saing.

Terkait dengan kemampuan baca tulis juga menjadi aspek yang berhubungan dengan kedua tabel diatas serta dilengkapi dengan data angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja serta data bukan angkatan kerja berikut ini :

Tabel 2.103 Tabel Keadaan Penduduk berdasarkan Kemampuan Baca Tulis, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2016

Tingkat kependidikan Membaca & menulis		Angkatan kerja		Bukan angkatan kerja		
Dapat Membaca & Menulis	Buta Huruf	Bekerja	Tidak Bekerja	Bersekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
270.630	8.45	104.741	7.851	20.679	62.383	15.692

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2017

Dari jumlah penduduk Tahun 2015 sebesar 289.787 jiwa sebanyak 272.602 jiwa telah dapat membaca dan menulis artinya telah bebas buta huruf latin sebanyak 94.07 persen, tersisa 17.185 jiwa atau 5.93 persen yang belum dapat membaca dan menulis yang umumnya adalah golongan lanjut usia. Untuk angkatan kerja sebanyak 112.592 jiwa yang bekerja atau sebesar 93.03 persen dan sebanyak 7.851 jiwa angkatan kerja yang tidak bekerja atau 6,97 persen dari keseluruhan angkatan kerja tahun 2015. Sementara untuk penduduk bukan angkatan kerja dikelompokkan dalam penduduk yang masih bersekolah atau usia sekolah sebanyak 20.679 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebanyak 62.383 jiwa dan kelompok lainnya sebanyak 15.692 jiwa.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Selain indikator kependidikan, aspek daya saing daerah lainnya adalah rasio ketergantungan atau dependency ratio suatu daerah. Angka dependency ratio menunjukkan rasio antara penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Berikut ini tersaji angka rasio ketergantungan tahun 2013-2015.

Tabel 2.104 Tabel Rasio Ketergantungan Tahun 2013-2015

NO.	KELOMPOK UMUR	Tahun		
		2013	2014	2015

1	0-14 Tahun	83.196	79.030	79.002
2	15-64 Tahun	181.854	194.138	190.890
3	65 Tahun Ke Atas	18.257	13.442	19.895
Rasio Ketergantungan		55.78%	47.63%	51.9%

*Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2016
(Data Ketenagakerjaan Tahun 2016 tidak tersedia di BPS)*

Ratio ketergantungan Tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan angka yang fluktuatif atau naik turun. Pada Tahun 2013 rasio ketergantungan 55,78 persen, Tahun 2014 turun menjadi 47,63 persen, Tahun 2015 kembali naik menjadi 51,9 persen. Angka dependency ratio atau rasio ketergantungan 51,9 persen pada tahun 2015 memiliki arti bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung sekitar 51,9 penduduk usia tidak produktif (usia 0-15 dan 65 tahun keatas).

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas

pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Selain itu Guna melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Sumber penerimaan daerah terdiri atas : **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; **2) Dana Perimbangan** yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan **3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** meliputi Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Bagi Hasil Retribusi Provinsi. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan Pemerintah Pusat dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian, untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan dari piutang daerah. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota. Kinerja pelaksanaan APBD

Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp. 657 Milyar lebih pada tahun 2012 menjadi Rp. 1,18 Triliyun lebih pada tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,41 persen.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang struktur pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan pendapatan lain lain pendapatan daerah yang sah. Berikut gambaran secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata rata pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	PENDAPATAN	657,567,422,265.86	745,706,400,450.20	820,880,887,909.21	1,064,876,798,940.66	1,184,966,741,717.52	16.12
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	36,158,851,507.94	37,920,943,980.29	64,628,526,309.80	76,076,376,303.64	98,400,923,153.52	30.59
1.1.1	Pajak Daerah	6,589,876,415.00	8,303,004,976.00	16,679,705,196.00	21,125,803,135.00	21,806,810,527.00	39.19
1.1.2	Retribusi Daerah	20,727,510,195.05	21,227,956,226.50	33,184,946,772.20	34,549,479,482.55	28,598,806,071.00	11.41
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3,831,400,320.30	3,699,111,152.00	3,885,895,413.00	4,538,586,580.12	5,051,864,996.00	7.43
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	5,010,064,577.59	4,690,871,625.79	10,877,978,928.60	15,862,507,105.97	42,943,441,559.52	85.52
1.2.	Dana Perimbangan	514,053,343,267.00	578,000,237,211.00	609,321,207,844.00	772,746,112,784.00	974,121,056,622.00	17.68
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38,661,885,466.00	35,046,333,708.00	20,579,510,096.00	17,992,461,750.00	17,108,242,897.00	(17.03)
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,149,117,801.00	1,422,820,503.00	3,330,537,748.00	2,234,894,034.00	7,532,389,437.00	90.51
1.2.3	Dana Alokasi Umum	432,894,860,000.00	499,699,753,000.00	533,655,220,000.00	574,364,767,000.00	618,402,978,000.00	9.38
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	41,347,480,000.00	41,831,330,000.00	51,755,940,000.00	178,153,990,000.00	331,077,446,288.00	88.74
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	107,355,227,490.92	129,785,219,258.91	146,931,153,755.41	216,054,309,853.02	112,444,762,592.40	8.30
1.3.1	Hibah	-	179,640,000.00	-	16,047,848,000.00	2,701,245,000.00	(45.79)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	23,483,543,150.92	27,206,210,658.91	37,397,840,875.41	35,375,722,446.00	49,136,259,250.40	23.05

No.	Uraian	Tahun (Rp)					Rata rata pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	dan Pemerintah Daerah Lainnya						
1.3.4	Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	9,848,756,807.02	-	(25.00)
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59,854,189,000.00	81,102,451,000.00	95,364,599,000.00	138,187,381,000.00	50,720,487,500.00	8.33
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24,017,495,340.00	-	-	-	-	(25.00)
1.3.7	Pendapatan Lainnya	-	21,296,917,600.00	14,168,713,880.00	16,594,601,600.00	9,886,770,842.00	(14.19)

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016

Sebagaimana terlihat dari tabel 3.1 bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap APBD tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata per tahun sebesar 6,78 persen yang dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih terlalu kecil. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk masih lemah, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan masih terlalu besar, yaitu rata-rata sekitar 76,94 persen sementara dana lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki kontribusi rata-rata sebesar 16,28 persen.

Tabel 3.2 berikut menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah untuk periode RPJMD yang telah dilalui yaitu tahun 2014 - 2016.

Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2016

NO	URAIAN	TARGET (MILYAR RP)			REALISASI (MILYAR RP)			% CAPAIAN		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
A	Pendapatan Asli Daerah	82.74	86.93	104.80	64.63	76.08	98.40	78.11	87.52	93.89
1	Pajak Daerah	15.26	16.80	18.45	16.68	21.13	21.81	109.28	125.75	118.19
2	Retribusi Daerah	54.88	57.51	73.71	33.18	34.55	28.60	60.47	60.08	38.80
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.70	4.70	4.70	3.89	4.54	5.05	82.68	96.57	107.49
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.89	7.92	7.94	10.88	15.86	42.94	137.79	200.33	540.72
B	Dana Perimbangan	618.83	688.22	789.21	609.32	772.75	974.12	98.46	112.28	123.43

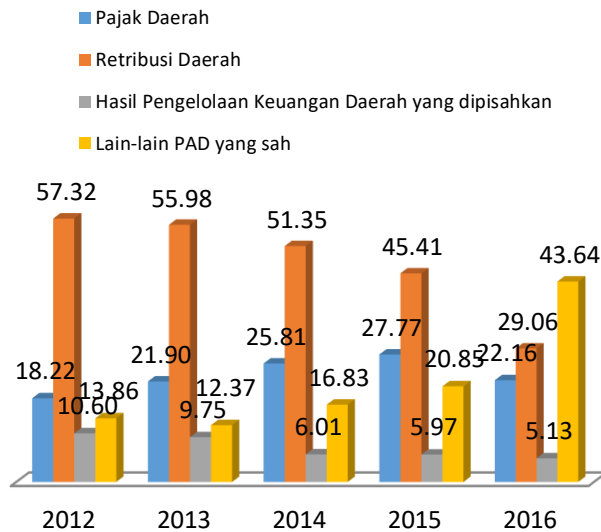
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.42	15.00	15.00	20.58	17.99	17.11	61.59	119.95	114.05
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0.00	0.00	0.00	3.33	2.23	7.53	0.00	0.00	0.00
3	Dana Alokasi Umum	533.66	613.70	705.76	533.66	574.36	618.40	100.00	93.59	87.62
4	Dana Alokasi Khusus	51.76	59.52	68.45	51.76	178.15	331.08	100.00	299.32	483.70
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149.73	156.38	170.52	146.93	216.05	112.44	98.13	138.16	65.94
1	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	2.70	0.00	0.00	0.00
2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.80	38.27	42.10	37.40	35.38	51.04	107.48	92.43	121.23
4	Dana Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	93.73	103.11	113.42	95.36	138.19	48.81	101.74	134.02	43.04
6	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.20	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	14.17	16.59	9.89	61.59	119.95	114.05
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		851.29	931.53	1064.53	820.88	1064.88	1184.97	96.43	114.31	111.31

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2016, diolah

Dari tabel 3.2 menggambarkan capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap target periode RPJMD yang telah dilalui yaitu dari tahun 2014 – 2016 memperlihatkan trend peningkatan yang cukup signifikan dimana pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah peningkatannya fluktuatif hal ini terlihat pada beberapa komponen yang tidak ditargetkan namun terdapat realisasi begitupun sebaliknya terdapat komponen yang ditargetkan namun tidak terealisasi seperti Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu: **1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.** Dari keempat jenis pendapatan asli daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, komponen yang memiliki rata-rata kontribusi yang sangat besar adalah Retribusi Daerah yakni sekitar 47,83 persen, disusul pajak daerah sekitar 23,17 persen, selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar 21,51 persen dan komponen yang memiliki rata-rata kontribusi sangat rendah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya berkontribusi sekitar 7,49 persen selama kurun waktu 2012 – 2016. Berikut diagram trend perkembangan kontribusi komponen pendapatan asli daerah selama kurun waktu lima tahun.



Gambar 3. 1 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 – 2016

Diagram di samping menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang selama dua tahun terakhir (2015 dan 2016) penerimaan dari retribusi daerah tidak mengalami peningkatan yang cukup hal ini dikarenakan pengalihan pendapatan yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang semula masuk jenis pendapatan retribusi daerah, namun ketika

berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah, pendapatannya dikategorikan dalam jenis pendapatan Lain Lain PAD yang Sah. Selain itu penerapan program jaminan kesehatan nasional (JKN) serta pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan yang beralih ke lain-lain PAD yang sah sedangkan penerimaan dari pajak daerah sebagai akibat beralihnya pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB-P) pada tahun 2014 menjadi bagian dari pajak daerah. Selama kurun waktu lima tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 6,78 persen.

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan** Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari empat komponen yakni, **1) Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK)**. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu

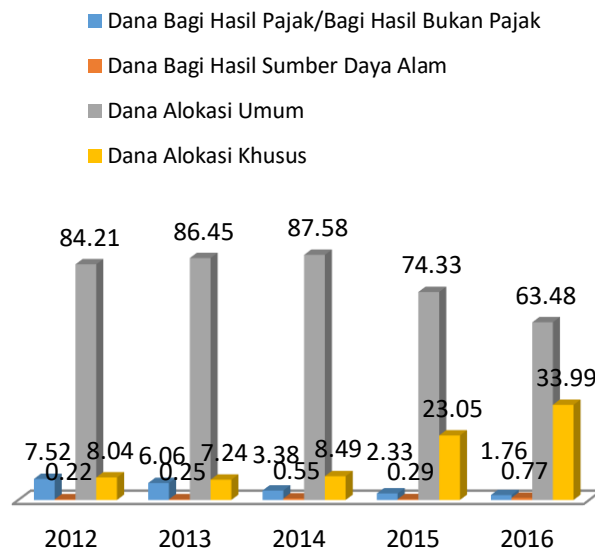
daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dari keempat komponen Dana Perimbangan tersebut selama kurung waktu 2012-2016, yang memiliki kontribusi yang besar yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar 79,21 persen atau setara dengan Rp. 531,80,- Milyar. Hal ini dapat dilihat dari trend perkembangan komponen dana perimbangan pada diagram di samping:

3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

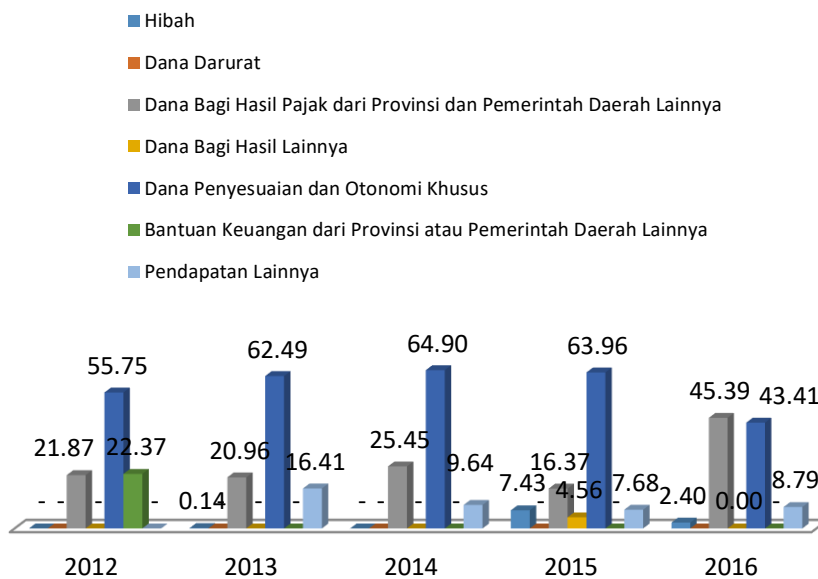
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari tujuh komponen, yakni terdiri dari 1) Pendapatan Hibah,

2) Dana Darurat, 3) Dana Bagi hasil

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, 4) Dana Bagi Hasil Lainnya, 5) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, 6) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya serta 7) Pendapatan Lainnya. Selama kurun waktu 2012-2016, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang memiliki rata-rata kontribusi yang sangat besar ditempati oleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 58,10 persen atau setara dengan Rp. 84,66 Milyar sementara kontribusi yang paling rendah atau kurang ditempati oleh Dana Bagi Hasil Lainnya sebesar 0,91 persen atau setara dengan Rp. 1,97 Milyar. Dari beberapa komponen tersebut terdapat komponen yang tidak memiliki kontribusi sama sekali yaitu Dana Darurat. Berikut trend perkembangan proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Proporsi Dana Perimbangan Tahun



Gambar 3. 3 Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012 - 2016

3.2.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Belanja Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

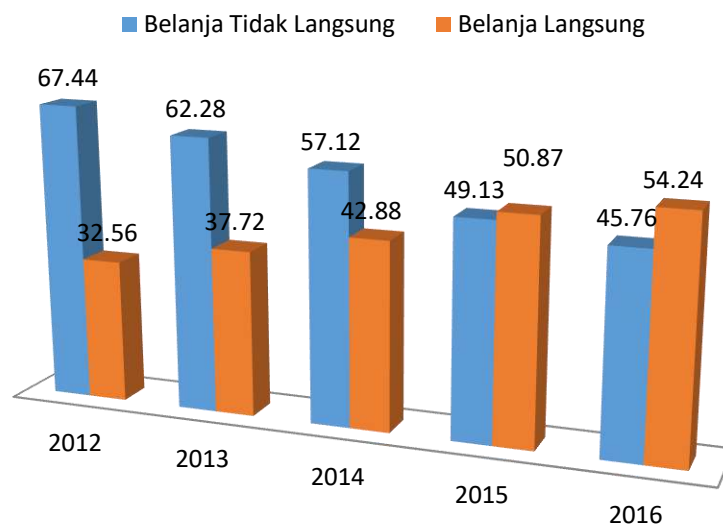
Perkembangan Belanja daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurung waktu lima tahun yaitu tahun 2012-2016 menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu pada tahun 2012 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 566,462,997,278.66,- meningkat menjadi Rp. 1,205,672,318,639.00,- pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,09 persen. Secara lebih rinci realisasi belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Belanja Tidak Langsung	382,028,968,577.66	460,053,698,813.00	464,176,423,051.00	513,151,817,450.00	549,507,937,545.00
1.1	Belanja Pegawai	358,023,660,973.00	408,388,438,897.00	437,988,120,889.00	476,527,635,191.00	486,191,159,461.00
1.2	Belanja Bunga	6,768,554,506.00	2,395,751,706.00	2,207,839,516.00	2,019,927,327.00	1,861,284,527.00
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	185,000,000.00	22,957,644,199.00	3,923,433,713.00	-	4,046,800,000.00
1.5	Belanja Bagi Hasil	-	8,306,851,507.00	15,216,191,751.00	2,269,234,350.00	2,624,841,515.00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,416,000,000.00	16,267,650,000.00	836,659,755.00	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	8,719,014,228.00	467,641,512.00	-	31,990,370,582.00	53,711,052,592.00
1.8	Belanja Tidak Terduga	1,916,738,870.66	1,269,720,992.00	4,004,177,427.00	344,650,000.00	1,072,799,450.00
2	Belanja Langsung	184,434,028,701.00	278,598,122,679.00	348,491,615,045.00	531,346,388,459.92	651,391,758,327.00
2.1	Belanja Pegawai	22,428,640,830.00	33,173,964,512.00	43,755,516,170.00	53,764,985,236.14	40,929,925,166.00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	81,892,247,472.00	118,373,927,466.00	115,829,872,746.00	150,608,675,623.78	190,734,473,461.00
2.3	Belanja Modal	80,113,140,399.00	127,050,230,701.00	188,906,226,129.00	326,972,727,600.00	419,727,359,700.00
	Total Belanja Daerah	566,462,997,278.66	738,651,821,492.00	812,668,038,096.00	1,044,498,205,909.92	1,200,899,695,872.00

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap belanja daerah masih lebih besar yaitu sekitar 50,67 persen atau setara dengan Rp.508.95,- Milyar dibanding Belanja Langsung yaitu sekitar 49,33 persen atau setara dengan Rp. 466,81,- Milyar. Namun pada tahun 2015 dan 2016 proporsi belanja tidak langsung lebih kecil dibanding belanja langsung. Secara grafis, perbandingan proporsi antara belanja Langsung dan Tidak Langsung dalam kurun tahun 2012-2016 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Proporsi Belanja Daerah Tahun 2012 - 2016

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa alokasi dana untuk belanja pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun mendatang boleh dilakukan.

3.1.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, (h) Belanja Tidak terduga.

3.1.1.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja Barang Dan Jasa, (c) Belanja Modal.

Pada tahun 2016, proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja Kabupaten Sidenreng Rappang hanya mencapai 73,68 persen. Realisasi untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 86,86 persen dan belanja langsung sebesar 65,32 persen. Berikut tampilan proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurung waktu tiga tahun 2014 – 2016 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014- 2016

No	Uraian	Tahun (Juta Rp)								
		2014			2015			2016		
		Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	%
1	Belanja Tidak Langsung	479,248.12	464,176.42	96.86	546,619.19	513,151.82	93.88	632,651.38	549,507.94	86.86
1.1	Belanja Pegawai	448,947.24	437,988.12	97.56	504,979.66	476,527.64	94.37	561,255.86	486,191.16	86.63
1.2	Belanja Bunga	2,654.00	2,207.84	83.19	2,654.00	2,019.93	76.11	2,654.00	1,861.28	70.13
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	4,945.85	3,923.43	79.33	1,356.00	-	-	4,046.80	4,046.80	100.00
1.5	Belanja Bagi Hasil	15,263.18	15,216.19	99.69	-	-	-	3,411.72	2,624.84	76.94
1.6	Belanja Bantuan Sosial	937.86	836.66	89.21	-	-	-	-	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	34,629.53	34,259.60	98.93	56,283.00	53,711.05	95.43
1.8	Belanja Tidak Terduga	6,500.00	4,004.18	61.60	3,000.00	344.65	11.49	5,000.00	1,072.80	21.46
2	Belanja Langsung	458,822.26	348,491.62	75.95	702,900.86	531,346.39	75.59	997,255.32	651,391.76	65.32
2.1	Belanja Pegawai	57,475.89	43,755.52	76.13	60,431.51	53,764.99	88.97	51,833.46	40,929.93	78.96
2.2	Belanja Barang dan Jasa	148,183.09	115,829.87	78.17	176,803.90	150,608.68	85.18	278,709.01	190,734.47	68.43
2.3	Belanja Modal	253,163.28	188,906.23	74.62	465,665.45	326,972.73	70.22	666,712.85	419,727.36	62.95
	Total Belanja Daerah	938,070.38	812,668.04	86.63	1,249,520.05	1,044,498.21	83.59	1,629,906.70	1,200,899.70	73.68

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016, diolah

3.2.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap elemen utama Neraca Pemerintah Daerah diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang

berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Unsur yang dicakup oleh neraca tersebut digambarkan sebagai berikut :

3.2.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam lima komponen, yang terdiri dari; i) aset lancar, ii) investasi jangka panjang, iii) aset tetap, iv) dana cadangan dan v) aset lainnya. Pada tahun 2016, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki aset senilai Rp.2.506.466.328.019,41,- dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp.2.371.836.715.629,69,-. Rata-rata pertumbuhan Aset Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kurun waktu tahun 2012-2016 hanya mencapai 1,60 persen, hal ini diakibatkan dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dan hanya pada tahun 2016 kondisi Aset Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan pertumbuhan yang positif dan pada tahun ini juga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh **predikat Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

3.2.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena peningkatan pegawai yang bekerja pada pemerintahan atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum atau sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban di kelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban

jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Pada Tahun 2016, total kewajiban dalam neraca daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.353.509.047.580,48,- dengan rincian kewajiban jangka pendek Rp.327.351.563.525,68,- dan kewajiban jangka panjang Rp. 26.157.484.054,80,-. Dengan rata-rata pertumbuhan kewajiban lima tahun terakhir sebesar 46,49 persen.

3.2.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Dana lancar, yaitu selisih antara asset lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara asset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Ekuitas Dana Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp.2.152.957.280.438,93,- pada tahun 2016. Pada tahun 2015 dan 2016 perhitungan ekuitas dana tidak dirinci lagi karena sudah berbasis akrual sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2012-2016 mengalami trend pertumbuhan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	ASET						
1	ASET LANCAR	8,447,421,613.19	8,685,365,175.84	16,455,049,765.69	43,329,053,992.65	33,872,864,422.67	58.44
	Kas	246,014,638.28	1,382,655,108.48	7,070,876,852.69	29,500,353,787.43	8,520,218,334.35	279.88
	Kas di Kas daerah	136,642,512.28	1,111,798,656.48	6,586,853,005.69	25,545,199,269.43	2,696,533,580.35	351.12
	Kas di Bendahara Penerimaan	5,287,500.00	206,162,746.00	700,000.00	300,000.00	5,500,000.00	1,343.90
	Kas di Bendahara Pengeluaran	104,084,626.00	64,693,706.00	19,735,193.00	37,296,789.00	19,139,032.00	(16.76)
	Kas di BLUD	-	-	-	-	4,706,462,312.00	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	-	-	-	-	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	-	-	-	-	-	-
	Kas Lainnya	-	-	-	3,093,473,313.00	455,719,275.00	(21.32)
	Kas di Bendahara JKN	-	-	463,588,654.00	824,084,416.00	636,864,135.00	13.76
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Saham	-	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
	Deposito Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Piutang	3,346,860,370.50	1,998,866,926.50	2,753,574,279.00	4,807,840,165.22	12,746,283,918.32	59.30
	Piutang Pajak	529,041,230.00	110,933,516.00	2,442,684,510.00	4,144,075,250.00	5,879,282,029.00	533.61
	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	(801,357,829.92)	(1,612,454,352.18)	25.30
	Piutang Retribusi	1,065,544,715.00	697,340,627.00	695,678,073.00	950,870,498.00	1,112,022,972.00	4.71

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	(518,909,680.38)	(886,341,497.50)	17.70
	Penyisihan Piutang			(1,348,186,051.50)	-	-	(25.00)
	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
	Piutang Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-
	Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	17,576,000.00	-	-	-	-	(25.00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
	Piutang Lain-lain	1,734,698,425.50	1,190,592,783.50	963,397,747.50	1,880,683,784.50	8,836,342,128.50	103.65
	Penyisihan Piutang Lain-lain				(847,521,856.98)	(582,567,361.50)	(7.82)
	Piutang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Persediaan	4,854,546,604.41	5,303,843,140.86	6,630,598,634.00	9,020,860,040.00	12,606,362,170.00	27.52
	Persediaan	4,854,546,604.41	5,303,843,140.86	6,630,598,634.00	9,020,860,040.00	12,606,362,170.00	27.52
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	35,842,214,238.94	34,355,578,001.72	33,455,536,380.72	32,497,573,997.72	34,214,182,198.72	(1.09)
	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-
	Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
	Penyisihan Dana Bergulir Tidak dapat/Diragukan Tertagih	(5,084,551,738.00)	(5,016,222,988.00)	(5,001,376,988.00)	(4,753,361,301.00)	(4,656,581,370.00)	(2.16)
	Investasi Non Permanen Lainnya	5,084,551,738.00	5,016,222,988.00	5,001,376,988.00	4,753,361,301.00	4,656,581,370.00	(2.16)
	Investasi Permanen	35,842,214,238.94	34,355,578,001.72	33,455,536,380.72	32,497,573,997.72	34,214,182,198.72	(1.09)
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35,842,214,238.94	34,355,578,001.72	33,455,536,380.72	32,497,573,997.72	34,214,182,198.72	(1.09)
	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
3	ASET TETAP	2,240,045,007,840.00	2,235,574,607,131.00	2,188,390,507,434.99	1,840,889,906,422.24	2,371,836,715,629.69	2.66
	Tanah	367,004,655,157.00	403,348,077,330.00	407,887,624,335.00	420,635,697,612.21	709,860,648,443.02	20.73
	Peralatan dan Mesin	222,679,752,537.00	208,925,188,896.00	237,803,611,689.54	203,126,767,819.96	242,500,541,477.96	3.11

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Gedung dan Bangunan	495,582,106,586.00	527,853,793,062.00	558,105,024,952.00	630,715,611,448.49	716,045,271,508.13	9.70
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,113,024,225,438.00	1,076,485,652,567.00	827,928,604,909.60	1,106,994,266,602.44	1,473,423,482,887.53	10.11
	Aset Tetap Lainnya	18,879,222,340.00	11,513,440,578.00	19,219,900,628.00	90,301,116,612.90	32,188,675,756.26	83.35
	Konstruksi dalam Pengerjaan	22,875,045,782.00	7,448,454,698.00	137,445,740,920.85	91,554,608,581.24	60,193,238,571.50	402.55
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	(702,438,162,255.00)	(862,375,143,014.71)	5.69
4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
5	ASET LAINNYA	185,054,544,155.00	-	23,404,987,056.46	28,791,339,901.00	66,542,565,768.33	13.53
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-	183,250,000.00	260,250,000.00	794,641,000.00	61.84
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	(67,925,000.00)	(101,045,366.67)	12.19
	Aset Lain-lain	185,054,544,155.00	-	23,221,737,056.46	28,599,014,901.00	65,848,970,135.00	13.35
	JUMLAH ASET	2,469,389,187,847.13	2,278,615,550,308.56	2,261,706,080,637.86	1,945,507,874,313.61	2,506,466,328,019.41	1.60
							-
B	KEWAJIBAN	99,107,353,553.33	81,746,401,509.08	101,458,123,323.33	158,236,416,760.48	353,509,047,580.48	46.49
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	63,853,944,734.13	48,767,079,193.48	70,752,466,261.33	129,804,846,202.08	327,351,563,525.68	64.28
	Utang Pihak Ketiga						-

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	42,028,061.00	51,481,016.00	6,402,193.00	20,806,088.00	19,122,191.00	37.95
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Utang BLUD	-	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3,344,841,503.60	3,344,841,503.60	3,422,341,500.93	3,422,341,503.60	3,422,341,503.60	0.58
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	587,436,064.67	416,709,319.17	(7.27)
	Utang Kepada Pihak Ketiga						-
	Utang Beban				10,476,729,046.00	72,002,080,160.70	146.81
	Utang Jangka Pendek Lainnya	60,467,075,169.53	45,370,756,673.88	67,323,722,567.40	115,297,533,499.81	251,491,310,351.21	53.20
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	35,253,408,819.20	32,979,322,315.60	30,705,657,062.00	28,431,570,558.40	26,157,484,054.80	(7.19)
	Utang Dalam Negeri	27,289,038,043.20	25,014,951,539.60	30,705,657,062.00	20,466,778,532.40	18,192,692,028.80	(7.51)
	Utang Dalam Negeri-Non Perbankan	-	-		7,964,792,026.00	7,964,792,026.00	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	7,964,370,776.00	7,964,370,776.00				(25.00)
C	EKUITAS DANA	2,375,366,386,031.80	2,201,885,371,787.48	2,160,064,707,314.53	1,787,271,457,553.13	2,152,957,280,438.93	(1.50)
	Ekuitas Dana Lancar	(55,406,523,120.94)	(40,081,714,017.64)	(54,297,416,495.64)	-	-	(23.05)
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran	198,699,077.28	1,125,011,346.48	7,063,774,659.69	-	-	223.52
	Cadangan Piutang	3,346,860,370.50	1,998,866,926.50	2,753,574,279.00	-	-	(25.63)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Cadangan Persediaan	4,854,546,604.41	5,303,843,140.86	6,630,598,634.00	-	-	(16.43)
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka pendek	(63,811,916,673.13)	(48,715,598,177.48)	(70,746,064,068.33)	-	-	(19.61)
	Pendapatan Piutang yang Ditanggungkan	5,287,500.00	206,162,746.00	700,000.00	-	-	899.85
	Ekuitas Dana Investasi	2,430,772,909,152.74	2,241,967,085,805.12	2,214,362,123,810.17	-	-	(27.25)
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	40,926,765,976.94	39,371,800,989.72	33,455,536,380.72	-	-	(29.71)
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,240,045,007,840.00	2,235,574,607,131.00	2,188,390,507,434.99	-	-	(25.58)
	Dininvestasikan dalam Aset Lainnya	185,054,544,155.00	-	23,221,737,056.46	-	-	(50.00)
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(35,253,408,819.20)	(32,979,322,315.60)	(30,705,657,062.00)	-	-	(28.34)
	Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Ekuitas	-	-	-	1,787,271,457,553.13	2,152,957,280,438.93	5.12
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,474,473,739,585.13	2,283,631,773,296.56	2,261,522,830,637.86	1,945,507,874,313.61	2,506,466,328,019.41	1.54

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

No.	URAIAN	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
A. Rasio Likuiditas						
1	Rasio Lancar	13.23	17.81	23.26	33.38	10.35
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	5.63	6.93	13.89	26.43	6.50
B. Rasio Solvabilitas						
1	Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset	4.01	3.59	4.49	8.13	14.10
2	Rasio Total Kewajiban Terhadap Ekuitas	4.17	3.71	4.70	8.85	16.42

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016, diolah

3.2.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan yaitu rasio cair (Quick Ratio). Rasio Cair dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Secara umum angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada. Sementara itu angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang baik.

Dari tabel 3.6 di atas menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini diakibatkan karena pada tahun ini jumlah aset lancar lebih kecil dibanding tahun sebelumnya sementara kewajiban jangka pendeknya selama kurun waktu lima tahun (2012-2016) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan rasio lancar di tahun 2016 menurun sebesar 10,35 persen. Secara keseluruhan kinerja keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang berada dalam kategori masih kurang baik.

Sementara Rasio cair (*quick ratio*) lebih akurat dibanding rasio lancar (*current ratio*) karena mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Namun berdasarkan perhitungan *quick ratio* pada tabel 3.6 menunjukkan nilai yang diperoleh tahun 2012 hanya mencapai 5,63 persen sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang hanya mencapai 26,43 persen, sementara di tahun 2016 kembali menurun dengan nilai 6,50 persen. Hal ini menggambarkan kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat rendah sehingga sangat sulit untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (utang lancar).

3.2.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang digunakan yaitu: (1) Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio); dan (2) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada tabel 3.6 diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2012-2014 sebesar 0,04 (4%) menunjukkan bahwa kreditor mendanai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 4 persen dari total aset yang dimiliki pemerintah, pada tahun 2015 sebesar 0,08 (8,13%) dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,14 (14 persen).

Sementara Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dalam membiayai pembangunan. Dari tabel 3.6 diperoleh perhitungan rasio total kewajiban terhadap ekuitas selama kurun waktu lima tahun (2012-2016) mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2013 menunjukkan nilai yang sama, sebesar 0,04 (4%), hingga pada tahun 2016 mencapai 0,16 (16%) yang artinya pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang

dibiayai oleh utang yang nilainya 16 persen dari total ekuitas. Hasil perhitungan rasio ekuitas dana terhadap aset pada kurun waktu tahun 2012 - 2016 menunjukkan besaran nilai yang seluruhnya berada di bawah 100 persen. Angka ini jauh dari 100 persen yang berarti kurang baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari pinjaman bukan dari dana hasil aktivitas operasi.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Kebijaksanaan Pelaksanaan Belanja Aparatur

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sangat menentukan hasil pembangunan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga perlu mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah. Dilihat dari Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menunjukkan bahwa prosentase dari tahun 2014 – 2016 menurun dari 59,11 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 sebesar 45,54 persen hingga pada tahun 2016 mencapai 40,37 persen. Meskipun pada tahun 2015 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan dari Rp. 481,74 Milyar pada tahun 2014 menjadi Rp. 477,11 Milyar pada tahun 2015 atau mengalami pengurangan sebesar 4,63 Milyar (0,96%). Sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 486,43 Milyar (2,04%). Selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2016

No	Uraian	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100 %
1	Tahun anggaran 2014	481,743,637,059.00	814,942,124,596.00	59.11
2	Tahun anggaran 2015	477,110,529,691.00	1,047,772,292,408.92	45.54
3	Tahun anggaran 2016	486,843,207,461.00	1,205,875,026,715.00	40.37

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016, diolah

Data di atas menunjukkan porsi belanja aparatur masih sangat besar. Meskipun demikian, data tersebut juga memperlihatkan porsi belanja aparatur yang terus menurun. Hal ini berarti porsi belanja untuk pembangunan semakin membesar.

3.2.1.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Informasi pembiayaan sangat penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat dalam rangka pengelolaan APBD secara optimal.

Kondisi pembiayaan daerah dipengaruhi oleh sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kurun waktu 2012-2016, APBD Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata mengalami surplus anggaran namun pada tahun 2016 mengalami defisit anggaran. Pada tahun 2012 surplus anggaran sebesar Rp.91.104.424.987,20,- dan pada tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp.15.932.954.154,08,- hal ini disebabkan karena total Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 1.184.966.741.717,92,- lebih kecil dibanding total belanja daerah sebesar Rp. 1.200.899.695.872,00,- sehingga terjadi defisit anggaran.

Penerimaan Pembiayaan mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Transfer dari Dana Cadangan; (3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi; dan (4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Transfer ke Dana Cadangan; (2) Investasi/Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo; dan (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun 2012-2016 rata-rata mengalami peningkatan dari Rp.30.877.390.742,08 tahun 2012 namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yang hanya mencapai Rp.198.699.077,28 namun pada tahun 2014-2016 kembali meningkat menjadi Rp.28,953,661,865.43 pada tahun 2016. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun yang lalu namun hanya pada tahun 2012 terdapat penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 30.000.000.000,00.

Adapun perkembangan pengeluaran pembiayaan daerah kurun waktu tahun 2012-2016 bersifat fluktuatif namun masih relatif jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai penerimaan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 121,783,116,652.00 dan pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 4,975,330,843.00. Penggunaan utama pengeluaran pembiayaan terutama untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (Investasi) Pemda. Dalam perkembangannya setiap tahun, pelaksanaan pembangunan

daerah setiap tahunnya menyisakan SILPA yang selanjutnya dijadikan sumber penerimaan daerah untuk penyelenggaraan pembangunan tahun berikutnya. Berikut perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 8 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Penerimaan pembiayaan daerah	30,877,390,742.08	198,699,077.28	1,125,011,346.48	11,849,155,333.69	28,953,661,865.43
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	877,390,742.08	198,699,077.28	1,125,011,346.48	11,849,155,333.69	28,953,661,865.43
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30,000,000,000.00	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Hutan	-	-	-	-	-
B	Pengeluaran pembiayaan daerah	121,783,116,652.00	6.128.266.689.00	2,274,086,500.00	3,274,086,499.00	4,975,330,843.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	1,000,000,000.00	2,701,244,350.00
3	Pembayaran Pokok Utang	121,783,116,652.00	6.128.266.689.00	2,274,086,500.00	2,274,086,499.00	2,274,086,493.00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Pembayaran Utang Pemda	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	(90,905,725,909.92)	(5.929.567.611,72)	(1,149,075,153.52)	8,575,068,834.69	23,978,331,022.43
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	198,699,077.28	1,125,011,346.48	7,063,774,659.69	28,953,661,865.43	8,045,376,868.35

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016, diolah

Terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang termasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung) dan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sementara itu pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meliputi pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok hutang. Perkembangan Belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Pegawai	358,023,660,973.00	408,388,438,897.00	437,988,120,889.00	476,527,635,191.00	486,191,159,461.00
2	Belanja Bunga	6,768,554,506.00	2,395,751,706.00	2,207,839,516.00	2,019,927,327.00	1,861,284,527.00
3	Belanja bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	-	8,306,851,507.00	15,216,191,751.00	2,269,234,350.00	2,624,841,515.00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	8,719,014,228.00	467,641,512.00	-	34,259,604,932.00	53,711,052,592.00
B	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	121,783,116,652.00	6,128,266,689.00	2,274,086,500.00	2,274,086,499.00	2,274,086,493.00
	TOTAL	495,294,346,359.00	425,686,950,311.00	457,686,238,656.00	515,081,253,949.00	546,662,424,588.00

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2016, diolah

3.2.1.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 (dua) tahun ke depan. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Hasil pengkajian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan pengelolaan yang belum optimal. Oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sangat memungkinkan dimaksimalkan penerimaannya melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk meningkatkan kegiatan-kegiatan pengawasan.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendanai pembangunan daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, dengan kenaikan rata-rata 10 persen. Pada tahun 2017 anggaran untuk pendapatan dan belanja daerah tidak diproyeksikan namun diambil dari APBD pokok 2017 mengingat revisi RPJMD

dilaksanakan pada tahun ini sementara tahun 2018 diprediksikan naik 10 persen dari tahun 2017 dengan kenaikan sebesar Rp.136.687.878.900,00.

Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang termasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, dan Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati (pada pos belanja tidak langsung) dan belanja pegawai pada pos belanja langsung meliputi Honorarium Non PNS, Belanja Barang Pakai Habis, Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Biaya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sementara itu pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yaitu pembayaran pokok utang.

Dengan memperhatikan kinerja selama tahun 2012-2016, pengeluaran belanja tidak langsung yang bersifat wajib dan mengikat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling besar adalah pada belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai dipengaruhi oleh peningkatan gaji berkala, gaji ke-13 dan gaji ke-14 serta tunjangan pegawai.

Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait restrukturisasi organisasi pemerintah serta perubahan status PNS pada beberapa OPD yang menjadi PNS propinsi dan PNS pusat secara langsung juga akan berpengaruh terhadap komposisi pendanaan belanja tidak langsung. Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap besaran penerimaan Dana Alokasi Umum.

Tabel 3. 10 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018

No	Uraian	Tahun (Rp)	
		2017	2018 (Proyeksi)
A	Belanja Tidak Langsung	500,025,328,756.00	550,027,861,632.00
1	Gaji dan Tunjangan PNS	497,861,328,756.00	574,647,461,632.00
2	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2,164,000,000.00	2,380,400,000.00
B	Belanja Langsung	209,278,311,000.00	230,206,142,100.00
1	Honorarium Non PNS	79,485,000.00	87,433,500.00
2	Belanja Barang dan Jasa	209,198,826,000.00	230,118,708,600.00
C	Pembiayaan Pengeluaran	3,754,000,000.00	3,754,000,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Pembayaran pokok utang	3,754,000,000.00	3,754,000,000.00
TOTAL (A+B+C)		713,057,639,756.00	783,988,003,732.00

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, diolah

Alokasi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diproyeksikan mengalami peningkatan sementara pembayaran pokok utang pada pembiayaan pengeluaran dianggap tetap. Namun demikian harus dipastikan bahwa kebijakan pengangkatan PNS di Kabupaten Sidenreng Rappang akan dilakukan untuk menggantikan pegawai yang telah mencapai masa pensiun dan boleh melakukan penerimaan pegawai baru.

Pada sisi lain, peningkatan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang sangat berkontribusi signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian yang masih menjadi sektor andalan bagi perenomanian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada Tahun 2016 terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara lain : sektor pertanian sebesar 34,82 persen, disusul sektor industri pengolahan sebesar 14,35 persen dan sektor konstruksi sebesar 14,34 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 diproyeksikan mencapai angka sepuluh persen dari tahun 2017. Berikut rincian proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dengan mengacu pada anggaran pokok tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018

No.	Uraian	Poyeksi	
		2017	2018 (Proyeksi)
1	PENDAPATAN	1,366,878,789,000.00	1,503,566,667,900.00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	122,573,041,000.00	134,830,345,100.00
1.1.1	Pajak Daerah	29,754,256,878.00	32,729,682,565.80
1.1.2	Retribusi Daerah	26,129,638,000.00	28,742,601,800.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5,738,586,000.00	6,312,444,600.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	60,950,560,122.00	67,045,616,134.20
1.2.	Dana Perimbangan	929,701,829,000.00	1,022,672,011,900.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24,200,000,000.00	26,620,000,000.00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Umum	618,402,978,000.00	680,243,275,800.00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	287,098,851,000.00	315,808,736,100.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	314,603,919,000.00	346,064,310,900.00
1.3.1	Hibah	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50,323,859,000.00	55,356,244,900.00
1.3.4	Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	216,736,556,000.00	238,410,211,600.00
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45,543,504,000.00	50,097,854,400.00

No.	Uraian	Poyeksi	
		2017	2018 (Proyeksi)
1.3.7	Pendapatan Lainnya	-	-

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, diolah

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 2 (dua) tahun ke depan, Tahun 2017 diambil dari anggaran pokok sementara tahun 2018 diproyeksikan akan meningkat sepuluh persen dari Tahun 2017. Berikut kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai keuangan daerah dua tahun ke depan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2018

Uraian	Tahun (Rp)	
	2017	2018 (Proyeksi)
Pendapatan	1,366,878,789,000	1,503,566,667,900
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	28,963,661,000	31,860,027,100
Penerimaan bagi hasil kemitraan	-	-
Total Penerimaan	1,395,842,450,000	1,535,426,695,000
Dikurangi		
Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	713,057,639,756	783,988,003,732
Kapasitas Riil kemampuan keuangan	682,784,810,244	751,438,691,268

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 dan 2018 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017-2018

NO	Uraian	Proyeksi	
		2017	2018
I	Kapasitas Kemampuan Keuangan	682,784,810,244	751,438,691,268
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I		
II.a	Belanja Langsung	717,929,697,000	789,722,666,700
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Dikurangi:		
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	209,278,311,000	230,206,142,100
II.d	pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	3,754,000,000	3,754,000,000
II	Total rencana pengeluaran prioritas (II.a+II.b-II.c-II.d)	504,897,386,000	555,762,524,600
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	177,887,424,244	195,676,166,668
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II		
III.a	Belanja Tidak Langsung	672,158,753,000	739,374,628,300
	Dikurangi:		
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	500,025,328,756	550,027,861,632
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	172,133,424,244	189,346,766,668
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	5,754,000,000	6,329,400,000

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari rencana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah dikurangi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan selama tahun 2017 dan 2018 terjadi anggaran surplus.

Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program pembangunan daerah yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program penyelenggaraan urusan lainnya.

3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung, seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Tidak Terduga.

**Tabel 3. 14 Pendanaan Prioritas
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018**

No	Kelompok Prioritas	Tahun	
		2017	2018 (Proyeksi)
1	Kelompok Prioritas I	283,509,950,500	311,860,945,550
2	Kelompok Prioritas II	434,419,746,500	477,861,721,150
3	Kelompok Prioritas III	661,615,518,000	727,777,069,800
	Total	1,379,545,215,000	1,517,499,736,500

Sumber: BPKD dan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, diolah

Berdasarkan kebijakan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi tentatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I, Kelompok Prioritas II dan Kelompok Prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapat Prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapat alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

2.

Kelompok Prioritas	KETENTUAN UMUM
<p>PRIORITAS I (KP I)</p>	<p>Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku.</p> <p>Program KP I terdiri dari kebijakan prioritas yaitu Gratis SPP 1 Tahun bagi mahasiswa baru, Bantuan 1.000 Hand Tractor, Pembangunan 200 Km Jalan Usaha Tani, Menciptakan 15,000 lapangan kerja baru, menciptakan 10,000 Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) baru, Melanjutkan Pendidikan Gratis dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SMA, Melanjutkan kesehatan gratis, Peningkatan Insentif bagi Muballigh, Imam Masjid dan Pegawai Syara, Guru Mengaji, dan Umroh Gratis bagi para Imam Masjid</p> <p>Kapasitas Infrastruktur Daerah; Program Pengembangan Kawasan Strategis; dan Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi. Disamping itu, KP I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>PRIORITAS II (KP II)</p>	<p>Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran dari analisis per urusan.</p> <p>KP II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu</p>
<p>PRIORITAS III (KP III)</p>	<p>KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.</p>

**Tabel 3. 15 Jumlah Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2014 – 2018**

NO.	URAIAN	T A H U N (Rp)	
		2017	2018 (PROYEKSI)
1.	BELANJA LANGSUNG	717,929,697,000	789,722,666,700
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	672,158,753,000	739,374,628,300
TOTAL BELANJA		1,390,088,450,000	1,529,097,295,000
SURPLUS/DEFISIT		(23,209,661,000)	(25,530,627,100.00)

Sumber: BPKD dan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, diolah

**Tabel 3. 16 Kebijakan Alokasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017-2018**

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN (Rp)	
		2017	2018 (PROYEKSI)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	345,608,450,000	380,169,295,000
	Belanja Langsung	25,174,203,000	27,691,623,300
	Belanja Tidak Langsung	320,434,247,000	352,477,671,700
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,477,210,000	97,324,931,000
	Belanja Langsung	53,060,000,000	58,366,000,000
	Belanja Tidak Langsung	35,417,210,000	38,958,931,000
3	RSUD Nene Mallomo	40,128,939,350	44,141,833,285
	Belanja Langsung	23,297,319,000	25,627,050,900
	Belanja Tidak Langsung	16,831,620,350	18,514,782,385
4	RSUD Arifin Nu'mang	26,948,317,650	29,643,149,415
	Belanja Langsung	16,728,617,000	18,401,478,700
	Belanja Tidak Langsung	10,219,700,650	11,241,670,715
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	381,067,656,000	419,174,421,600
	Belanja Langsung	375,149,491,000	412,664,440,100
	Belanja Tidak Langsung	5,918,165,000	6,509,981,500
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	40,594,300,000	44,653,730,000
	Belanja Langsung	33,157,666,000	36,473,432,600
	Belanja Tidak Langsung	7,436,634,000	8,180,297,400
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	28,766,934,000	31,643,627,400
	Belanja Langsung	24,866,721,000	27,353,393,100
	Belanja Tidak Langsung	3,900,213,000	4,290,234,300
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,544,391,000	3,898,830,100
	Belanja Langsung	2,031,800,000	2,234,980,000
	Belanja Tidak Langsung	1,512,591,000	1,663,850,100
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,232,119,000	9,055,330,900
	Belanja Langsung	4,892,528,000	5,381,780,800
	Belanja Tidak Langsung	3,339,591,000	3,673,550,100
10	Dinas Sosial, Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,658,902,000	16,124,792,200
	Belanja Langsung	12,043,121,000	13,247,433,100
	Belanja Tidak Langsung	2,615,781,000	2,877,359,100

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN (Rp)	
		2017	2018 (PROYEKSI)
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,648,628,000	2,913,490,800
	Belanja Langsung	966,048,000	1,062,652,800
	Belanja Tidak Langsung	1,682,580,000	1,850,838,000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	10,944,053,000	12,038,458,300
	Belanja Langsung	8,335,865,000	9,169,451,500
	Belanja Tidak Langsung	2,608,188,000	2,869,006,800
13	Dinas Komunikasi & Informatika	9,730,189,000	10,703,207,900
	Belanja Langsung	7,573,953,000	8,331,348,300
	Belanja Tidak Langsung	2,156,236,000	2,371,859,600
14	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,040,783,000	6,644,861,300
	Belanja Langsung	3,471,351,000	3,818,486,100
	Belanja Tidak Langsung	2,569,432,000	2,826,375,200
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,580,280,000	3,938,308,000
	Belanja Langsung	1,861,268,000	2,047,394,800
	Belanja Tidak Langsung	1,719,012,000	1,890,913,200
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	26,175,934,000	28,793,527,400
	Belanja Langsung	23,595,613,000	25,955,174,300
	Belanja Tidak Langsung	2,580,321,000	2,838,353,100
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,852,081,000	3,137,289,100
	Belanja Langsung	931,876,000	1,025,063,600
	Belanja Tidak Langsung	1,920,205,000	2,112,225,500
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	26,772,936,000	29,450,229,600
	Belanja Langsung	13,090,408,000	14,399,448,800
	Belanja Tidak Langsung	13,682,528,000	15,050,780,800
19	Dinas Perdagangan	6,568,729,000	7,225,601,900
	Belanja Langsung	2,661,079,000	2,927,186,900
	Belanja Tidak Langsung	3,907,650,000	4,298,415,000
<u>SEKRETARIAT DAERAH</u>			
20	Bagian Pemerintahan Umum	645,804,000	710,384,400
	Belanja Langsung	645,804,000	710,384,400
	Belanja Tidak Langsung	-	-
21	Bagian Hukum	364,900,000	401,390,000
	Belanja Langsung	364,900,000	401,390,000
	Belanja Tidak Langsung	-	-
22	Bagian Pembangunan	492,632,000	541,895,200
	Belanja Langsung	492,632,000	541,895,200
	Belanja Tidak Langsung	-	-
23	Bagian Kerjasama	460,842,000	506,926,200
	Belanja Langsung	460,842,000	506,926,200
	Belanja Tidak Langsung	-	-
24	Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	684,261,000	752,687,100
	Belanja Langsung	684,261,000	752,687,100
	Belanja Tidak Langsung	-	-
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9,052,707,000	9,957,977,700
	Belanja Langsung	9,052,707,000	9,957,977,700
	Belanja Tidak Langsung	-	-

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN (Rp)	
		2017	2018 (PROYEKSI)
26	Bagian Umum	14,276,386,000	15,704,024,600
	Belanja Langsung	14,276,386,000	15,704,024,600
	Belanja Tidak Langsung	-	-
27	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	813,066,000	894,372,600
	Belanja Langsung	813,066,000	894,372,600
	Belanja Tidak Langsung	-	-
28	Bagian Organisasi	641,622,000	705,784,200
	Belanja Langsung	641,622,000	705,784,200
	Belanja Tidak Langsung	-	-
29	Bagian Keuangan	20,511,706,000	22,562,876,600
	Belanja Langsung	10,518,957,000	11,570,852,700
	Belanja Tidak Langsung	9,992,749,000	10,992,023,900
30	Sekretariat DPRD	19,060,693,000	20,966,762,300
	Belanja Langsung	16,583,495,000	18,241,844,500
	Belanja Tidak Langsung	2,477,198,000	2,724,917,800
KECAMATAN			
31	Maritengngae	5,906,318,000	6,496,949,800
	Belanja Langsung	1,758,006,000	1,933,806,600
	Belanja Tidak Langsung	4,148,312,000	4,563,143,200
32	Panca Rijang	4,499,929,000	4,949,921,900
	Belanja Langsung	1,160,435,000	1,276,478,500
	Belanja Tidak Langsung	3,339,494,000	3,673,443,400
33	Baranti	4,618,576,000	5,080,433,600
	Belanja Langsung	1,310,929,000	1,442,021,900
	Belanja Tidak Langsung	3,307,647,000	3,638,411,700
34	Kulo	1,531,325,000	1,684,457,500
	Belanja Langsung	308,860,000	339,746,000
	Belanja Tidak Langsung	1,222,465,000	1,344,711,500
35	Watang Sidenreng	3,565,478,000	3,922,025,800
	Belanja Langsung	916,243,000	1,007,867,300
	Belanja Tidak Langsung	2,649,235,000	2,914,158,500
36	Dua Pitue	2,702,514,000	2,972,765,400
	Belanja Langsung	736,469,000	810,115,900
	Belanja Tidak Langsung	1,966,045,000	2,162,649,500
37	Pitu Riawa	2,988,414,000	3,287,255,400
	Belanja Langsung	754,081,000	829,489,100
	Belanja Tidak Langsung	2,234,333,000	2,457,766,300
38	Pitu Riase	2,887,734,000	3,176,507,400
	Belanja Langsung	725,362,000	797,898,200
	Belanja Tidak Langsung	2,162,372,000	2,378,609,200
39	Tellu Limpoe	4,933,873,000	5,427,260,300
	Belanja Langsung	1,585,250,000	1,743,775,000
	Belanja Tidak Langsung	3,348,623,000	3,683,485,300
40	Panca Lautang	3,371,244,000	3,708,368,400
	Belanja Langsung	936,392,000	1,030,031,200
	Belanja Tidak Langsung	2,434,852,000	2,678,337,200
41	Watang Pulu	6,139,747,000	6,753,721,700
	Belanja Langsung	1,585,811,000	1,744,392,100
	Belanja Tidak Langsung	4,553,936,000	5,009,329,600

NO.	KELOMPOK PRIORITAS	TAHUN (Rp)	
		2017	2018 (PROYEKSI)
42	Inspektorat	6,748,019,000	7,422,820,900
	Belanja Langsung	1,750,000,000	1,925,000,000
	Belanja Tidak Langsung	4,998,019,000	5,497,820,900
43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7,332,863,000	8,066,149,300
	Belanja Langsung	3,850,938,000	4,236,031,800
	Belanja Tidak Langsung	3,481,925,000	3,830,117,500
44	Badan Pengelola Keuangan Daerah	37,098,505,000	40,808,355,500
	Belanja Langsung	18,647,817,000	20,512,598,700
	Belanja Tidak Langsung	18,450,688,000	20,295,756,800
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6,218,324,000	6,840,156,400
	Belanja Langsung	3,999,784,000	4,399,762,400
	Belanja Tidak Langsung	2,218,540,000	2,440,394,000
46	DPRD	8,166,238,000	8,982,861,800
	Belanja Langsung	-	-
	Belanja Tidak Langsung	8,166,238,000	8,982,861,800
47	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	567,662,000	624,428,200
	Belanja Langsung	-	-
	Belanja Tidak Langsung	567,662,000	624,428,200

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGI

- **Permasalahan pembangunan daerah**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Isu strategies adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, maka visi pembangunan daerah yang ingin dicapai yaitu **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025.”**

Sasaran pokok pembangunan yang ingin dicapai meliputi: (1) Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Optimal; (2) Terwujudnya Sistem agribisnis Yang Mapan; (3) Terwujudnya Kemandirian Daerah; (4) Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Religius;

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005 – 2025 dapat di lihat dari table berikut :

Tabel 4. 1 Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
1	Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Optimal	Terkelolanya Sumber Daya Alam secara seimbang,berkelanjutan dan bertanggung jawab	kurangnya komitmen pelestarian lingkungan dalam pengelolaan SDA	Mempertimbangkan daya dukung alam dan lingkungan
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam	rendahnya kualitas Sumber daya manusia	Peningkatan kualitas SDM, Penguatan kelembagaan Masyarakat
		Terkendalinya Pencemaran dan kerusakan lingkungan	menurunnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan
		Berkembangnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam	terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan	Pengembangan teknologi ramah lingkungan, Regulasi yang tepat
2	Terwujudnya sistem agribisnis yang mapan	Terwujudnya Sistem Agribisnis yang terintegrasi	masih kurangnya koordinasi antar sektor pertanian,peternakan, perikanan perkebunan dan kehutanan dalam hal pembangunan kawasan industri	peningkatan koordinasi antar sektor, Pengembangan wilayah dan
				pembangunan kawasan industri terpadu
		meningkatnya daya saing produk-produk hasil usaha agribisnis	melemahnya daya saing komoditas di pasar internasional	Peningkatan kualitas produksi, peningkatan promosi produksi
				peningkatan teknologi produksi, penguatan asosiasi komoditas

NO	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		terwujudnya usaha-usaha agribisnis yang berkerakyatan	kurangnya akses pelaku agribisnis terhadap sumber daya dan pasar	penguatan kelembagaan, peningkatan akses dan pembinaan kewirausahaan
		terwujudnya usaha-usaha agribisnis yang berkelanjutan	kurang tanggap dalam merespon pasar, masih kurang inovasi terkait agribisnis	kemampuan merespon perubahan pasar, inovasi teknologi
		terbentuknya usaha-usaha agribisnis yang desentralistis	potensi agribisnis yang belum optimal pemanfaatannya	pengembangan pelaku ekonomi lokal
		terciptanya iklim investasi yang kondusif	rendahnya kemampuan investasi, kurang dinamisnya regulasi terkait investasi	penyusunan profil investasi daerah, penyederhanaan perijinan investasi
		terbentuknya pusat informasi kegiatan agribisnis	kurangnya informasi terkait potensi, komoditas unggulan, peluang pasar, harga	pembangunan sarana dan prasarana pusat informasi
		berdirinya pusat penelitian dan pengembangan agribisnis	kurangnya kerjasama dengan lembaga riset terkait agribisnis	pengembangan kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi
		tersedianya infrastruktur penunjang dan pelayanan jasa pendukung	sarana dan prasarana dasar masih terbatas dan belum merata	pembangunan terminal agribisnis, pembangunan balai latihan kerja
		terbangunnya kawasan industri terpadu	masih terbatasnya infrastruktur pendukung	penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung
3	Terwujudnya kemandirian daerah	Terbangunnya jaringan kerjasama antar daerah dan internal daerah	belum ada sinergitas dalam penanganan masalah berskala regional	penetapan zona pengembangan agribisnis, identifikasi peluang kerjasama

NO	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		bertumbuhnya wilayah wilayah strategis	belum berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	sinkronisasi pengembangan kawasan antar sektor pemerintah, dunia usaha, & masyarakat
		meningkatnya kapasitas fiskal dan kemampuan pembiayaan pembangunan	masih rendahnya kapasitas fiskal	meningkatkan penerimaan daerah, kerjasama kemitraan dengan swasta
		meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia	masih rendahnya kualitas sumber daya manusia	pengembangan pendidikan, pelatihan fungsional, sistem magang
		terimplementasinya konsep tata ruang yang bersifat komprehensif dan terpadu	kurangnya pemahaman tentang Geographic Information System (GIS)	penyusunan peta tata ruang, sarana dan prasarana pendukung GIS
		terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan	penerapan prinsip pembangunan, pemulihan dan rehab lingkungan hidup
		meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan belum optimal	pengembangan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan
		terkendalinya aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan	sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal	pencegahan pembalakan hutan, konsep pembangunan wawasan lingkungan
		membaiknya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	sarana & prasarana pendidikan belum merata, terbatasnya tenaga pengajar	perbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya beli

NO	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
			distribusi tenaga kesehatan tidak merata, sarana dan prasarana kesehatan	
			belum terdistribusi secara proporsional	
		Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan	rendahnya indeks pembangunan gender	sosialisasi pengarusutamaan gender, peningkatan kegiat pemberdayaan perempuan
		Menurunnya angka kemiskinan	terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan pasar	peningkatan anggaran dan pengembangan kebijakan yang berpihak pada kaum miskin,
			belum diimplementasikan kebijakan pro kemiskinan	pembangunan komite pemberantasan kemiskinan
4	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan religious	Lestarnya nilai nilai budaya lokal	lemahnya pemahaman terhadap budaya asli daerah	peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal
		Lestarnya kebudayaan dan kesenian lokal	terbatasnya ruang pementasan seni dan budaya daerah	pelaksanaan kegiatan dan promosi kebudayaan dan kesenian secara berkala
		Tergalinya dan berkembangnya nilai nilai kearifan lokal	kurangnya pemahaman terhadap nilai nilai kearifan lokal	identifikasi, publikasi dan aktualisasi nilai kearifan lokal,
		Berkembangnya budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi	lemahnya penerapan nilai budaya yang terkikis globalisasi	pengembangan budaya membaca dan menulis

NO	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
		Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama	masih ada potensi konflik antar umat beragama	peningkatan peran dan fungsi badan keagamaan dan tokoh agama, dialog lintas agama
		Terimplementasinya nilai nilai agama	rendahnya aktualisasi nilai ajaran agama	pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pembinaan keagamaan secara dini

Jika dicermati pencapaiannya sampai saat ini, maka seluruh sasaran yang tertuang dalam RPJPD tersebut di atas masih belum mampu dicapai secara optimal. Permasalahan yang dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, pencapaian provinsi maupun dengan pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan urusan pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAH DAERAH

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,00 % berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi	9,3%	9,00 %	Melampaui target		Produksi pertanian tanaman pangan, palawija tumbuh 5% pertahun melalui modernisasi pengelolaan teknologi pertanian. Meningkatnya luas areal komoditi perkebunan/pertanian. Populasi Ternak Sapi bertambah 5000 ekor Per tahun. Terbukanya kesempatan kerja. Terselenggaranya Event nasional di bidang otomotif Investasi di bidang pembangkit listrik tenaga angin (UPC) pembangunan kawasan pariwisata

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
							Pembangunan Kawasan Industri.
1.2	Laju Inflasi	Menekan laju inflasi dibawah rata-rata nasional. Tahun 2016 laju inflasi nasional 3,02%	3,10%	2,94%	Mencapai Target	Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya, menurunnya daya beli)	Pemanfaatan Bahan Baku Lokal untuk kegiatan Home Industri. Meningkatkan kesadaran menabung pada masyarakat Pengendalian harga dan distribusi barang melalui operasi pasar dan kegiatan pasar murah.
1.3	PDRB per kapita	Pendapatan perkapita signifikan meningkat, namun masih dibawah rata-rata provinsi	35,910,000	37,380,000	Melampaui target		Membuka lapangan kerja Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian. terdatanya Pergerakan barang yang keluar masuk. Harga Komoditi Pertanian mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Penduduk tidak lebih dari 1% per tahun. Sektor pertanian tumbuh dan tidak melambat. Penurunan Angka Kemiskinan
1.4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Penduduk Miskin cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 Penduduk Miskin mencapai 15.920 jiwa atau 5,45% berada	4,00%	5,45% (15.920 jiwa)	Belum Mencapai Target, (Target Pada Tahun 2018 sebesar 0%)	Kurangnya lapangan kerja baru Rendahnya Tingkat Keterampilan.	Mengembangkan kewirausahaan UMKM Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Kemudahan dalam mengakses permodalan melalui KUR.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		dibawah rata-rata provinsi.					Optimalisasi Lahan tidur untuk kegiatan usaha tani Bantuan faktor produksi pada aktifitas ekonomi masyarakat miskin
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	Perubahan Metodologi dan indikator IPM yg menyebabkan level IPM model baru lebih rendah dibanding IPM metode lama, Variable metode baru (angka Harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah pengganti melek huruf, rata rata lama sekolah, pengeluaran perkapita) Capaian IPM tahun 2016 69,39 Poin	77,36 poin (masih menggunakan tahun dasar 2000) 71,80 % Target IPM metode baru 2018	69,39 poin	Belum Mencapai Target, lebih rendah dari IPM provinsi	AHH dan Rata rata lama sekolah masih rendah	peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan status kesehatan masyarakat
1.6	Angka kriminalitas	Jumlah angka kriminalitas di kabupaten sidenreng		284 Kasus kriminalitas yang		Angka kriminalitas didominasi kasus narkoba	Mengaktifkan kantibmas.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		rappang cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan kondisi tahun 2012 angka kriminilitas mencapai 407 kasus, sementara pada tahun 2016 menurun menjadi 284 kasus.		tertangani 276 kasus		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, keamanan dan ketertiban melalui pendirian Pos Siskamling.	Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek huruf	Target Pada Tahun 2018 (95,60%)	95,60 %	93,23% (Tahun 2015)	Belum Mencapai Target	Banyaknya Lansia tidak bisa membaca	Mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat untuk dibina baca tulis, berhitung dan Kewirausahaan Peningkatan pelaksanaan Paket A
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah, target pada tahun 2018 sebesar 8,45 Tahun	8,45 Tahun	7,32 Tahun (tahun 2015)	belum mencapai target	Masih rendahnya tingkat partisipasi Sekolah pada semua jenjang pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.3	Angka Partispasi Kasar SD/MI (%)	Tahun 2016 sebesar 102,40 %, di bawah Provinsi : 108,37 % dan Nasional : 108,00 %	106,10%	102,57%	di bawah target	Capaiannya relatif optimal dan mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih berada dibawah provinsi dan Nasional.	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SD/MI terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpenci
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	Tahun 2016 sebesar 104,64 %, di atas Provinsi : 101,59 % dan Nasional : 100,72 %	99,90%	107,71%	Melampaui target	Masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA (%)	Tahun 2016 sebesar 82,29 %, di atas Provinsi : 79,63 % dan Nasional : 76,45 %	82,35%	82,36%	Melampaui target	Masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/MA	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
1.6	Angka Partispasi Murni SD/MI (%)	Tahun 2016 sebesar 85,69 %, di bawah Provinsi : 93,62 % dan Nasional : 93,38 %	93,80%	85,69%	di bawah target	Banyaknya Usia Sekolah SD/MI sudah berada di jenjang SMP/MTs (13 tahun)	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SD/MI terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil Penerapan standar pelayanan minimal di jenjang satuan pendidikan

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						Masih terdapat peserta didik di bawah usia 7 tahun	Meningkatkan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SD/MI
1.7	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (%)	Tahun 2016 sebesar 60,71 %, di bawah Provinsi : 80,56% dan di bawah Nasional : 81,01 %	67,70%	60,71%	di bawah target	Masih terdapat lulusan jenjang SD yang berusia di bawah usia 13 tahun adanya anak usia 13 - 15 tahun yang tidak bersekolah	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMP/MTS terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil Penerapan standar pelayanan minimal di jenjang satuan pendidikan
1.8	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%)	Tahun 2016 sebesar 46,88 %, di bawah Provinsi : 62,46 % dan Nasional : 59,10 %	50,71 %	46,88%	di bawah target	Banyaknya Usia Sekolah SMA/SMK/MA bersekolah di luar Kabupaten Sidrap	Peningkatan pada layanan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terutama pada perluasan aksesibilitas pada wilayah-wilayah terpencil Penerapan standar pelayanan minimal di jenjang satuan pendidikan
						Permasalahan Ekonomi, Akses	Peningkatan kondisi Perekonomian Masyarakat
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	AKHB 3 tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung menurun	999	995	di bawah target	Rendahnya pemerataan dan keterjangkauan Pelayanan Kesehatan. Serta faktor sosial ekonomi	Pemerataan dan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan taraf hidup masyarakat

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		(2014 ; 999) (2015 :994) (2016 ; 995)					Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan anak
2.2	Angka Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan (2014 ; 68,07) (2015 :68.53)	69.13	68.75	belum mencapai target	Masih adanya kasus kematian bayi/balita dan Ibu yang mempengaruhi usia harapan hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan anak
2.3	jumlah kematian bayi (jiwa)	Tahun 2015 terdapat 30 kasus, tahun 2016 menurun menjadi 25 kasus	20 kasus	25 kasus	belum mencapai target	Kurangnya kesadaran Masyarakat terutama ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin	Meningkatkan pemahaman terkait pemeriksaan dini kehamilan dan pola hidup sehat terhadap Ibu Hamil
2.4	Angka Kematian Bayi	Mengalami penurunan pada tahun 2015 : 5,77 per 1.000 KH dan pada tahun 2016 : 4,99 per 1.000 KH	0%	4,99%	belum mencapai target	Masih terdapatnya kematian bayi	Meningkatkan kualitas pelayanan terutama Ibu dan Anak
2.5	Angka Kematian Balita	Pada tahun 2015 : 0,13 per 1.000 KH dan pada tahun 2016 : 0,08 per 1.000 KH	0%	0,08%	belum mencapai target	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	Memberikan Pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap Ibu Hamil dan menyusui
2.6	Angka Kematian Ibu	Pada Tahun 2015 : 76,98 per 100.000 KH dan pada tahun 2016 : 59,86 per 100.000 KH	0%	59,86%	belum mencapai target	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan Ibu Hamil	

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persentase Balita Gizi Buruk Selama 3 tahun terakhir fluktuatif akan tetapi pada tahun 2016 tidak ada kasus	0,03%	0%	melampaui target	Persentase Gizi kurang yang meningkatkan setiap tahunnya	Adanya regulasi dalam rangka penguatan koordinasi/kerjasama dengan lintas sektor terkait untuk penanganan kasus gizi buruk Peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan gizi yang bermutu
3	Pertanahan						
3.1	Penyelesaian kasus tanah negara	Sudah 90% kasus tanah Negara selesai	100%	90%	Belum mencapai target	Masih adanya masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah Negara di beberapa lokasi	Pelaksanaan pendekatan intensif secara kekeluargaan kepada masyarakat
4	Ketenagakerjaan						
4.1	Tingkat pengangguran	Persentase Pengangguran Berkurang, kondisi awal tahun 2013 sebesar 7,62%. Target 5,12 % di tahun 2018	5,12 % (4.333 jiwa)	6,97% (7.851 jiwa)	Belum mencapai target	menurunnya lapangan kerja terutama di sektor pertanian. Rendahnya keterampilan Masyarakat	Perlunya alternatif kewirausahaan mendirikan balai pelatihan kerja peningkatan kualitas pendidikan
4.2	Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah	Jumlah UMKM pada tahun 2013 mencapai 17.018,	18.234	Jumlah UMKM pada tahun 2016 mencapai 22.885,	Melampaui target	Rendahnya sumberdaya pengelola UMKM.	Peningkatan kompetensi/kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		yang terbagi atas usaha mikro 13.547, Usaha kecil 3.193, dan Usaha menengah 278.		yang terbagi atas usaha mikro 18.810, Usaha kecil 3.574, dan Usaha menengah 501.		Wawasan kewirausahaannya masih rendah. Kemampuan produksi dan akses pasar masih sangat terbatas. Rendahnya kemampuan mengakses penguatan modal.	Memfasilitasi penyediaan kredit melalui perbankan.
Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan						
1.1	Jumlah Grup Kesenian	12 grup kesenian pada tahun 2013	18	15	Belum Mencapai Target	Masih rendahnya manajemen grup kesenian Belum terorganisir grup kesenian yang ada	Perlu dilakukan pembinaan sanggar seni di Kab. Sidrap
1.2	Jumlah sarana Gedung Kesenian	Tidak ada				Belum adanya gedung kesenian yang persentatif	Dukungan untuk pembangunan gedung kesenian.
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	jumlah lapangan di tahun 2016 sebanyak 1.272	290 lapangan	1.272 lapangan	Melampaui target	Sarana dan prasarana masih kurang terpelihara	Ketersediaan lahan, Pelibatan Pihak Swasta , Banyaknya ajang kompetisi olahraga

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		yang terdiri dari lap. Sepakbola 106, lap. Basket 92, lap. Volley 535, bulu tangkis 535, kolam renang 4.					ketersediaan lahan, Perlibatan pihak swasta, banyaknya kompetisi olahraga
2.2	Jumlah Klub Olah Raga	99 Klub Tahun 2013	205 klub	144 Klub	belum mencapai target	Belum optimalnya pembinaan klub olahraga	Pembinaan bagi klub olahraga Penyediaan sarana & prasarana bagi klub olahraga Partisipasi masyarakat dalam pengembangan klub olahraga.
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Dasar ;						
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD	Angka Partisipasi Sekolah (SD/ MI) telah mencapai 99,75% (2016) .	99,85 %	99,75%		Besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah	Pemerataan Kesempatan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
							Peningkatan Taraf hidup Masyarakat
1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMA	Angka Partisipasi Sekolah (SMA/SMK/ MA) telah mencapai 99,06% (2016) .	99,06%	99,06%	Kewenangan Provinsi		
1.1.3.	Rasio guru/murid SD/MI	Rasio Guru/murid menunjukkan tingkat kecukupan Guru Tahun 2013 yaitu 1 : 12. Rasio ini berada di atas SPM yaitu 1 : 32	1 : 20	1 : 13	sesuai standart SPM	Masih terdapat ketidak seimbangan jumlah guru dalam satu kelas di beberapa sekolah, terutama di sekolah madrasah dan sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang diakibatkan tidak meratanya penempatan guru	Perlu dibangun sistem pemerataan berbasis sistem Informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi
						Adanya daerah terpencil yang kurang diminati oleh tenaga pendidik	Perlunya Peningkatan Insentif Guru pada daerah terpencil
1.1.4	Rasio Siswa/Kelas SD/MI	Rasio Siswa/Kelas tahun Tahun 2013 yaitu 22 :1 hasil tersebut sesuai SPM 32 : 1	30 : 1	19 : 1	sesuai standart SPM		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.1.5	Rasio Siswa/Sekolah SD/MI	Jumlah Rasio Siswa/Sekolah Tahun 2013 : 147 menunjukkan angka kecukupan sekolah pada jenjang sekolah SD/MI		129.65 : 1			Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
1.2	Pendidikan Menengah ;						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah SMP	Angka Partisipasi Sekolah (SMP/ MtS) telah mencapai 99,11% (2016) .	99,50%	99,11%		Besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah	Pemerataan Kesempatan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Peningkatan Taraf hidup Masyarakat
1.2.2	Rasio Guru terhadap murid	Keadaan tahun 2013-2014 menunjukkan Rasio 1 : 11 artinya bahwa satu guru membina 11 Siswa, hal ini hanya menunjukkan perbandingan secara umum	1:19	1 : 11	sesuai standart SPM	Ketersediaan guru dengan kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan	Perlu dibangun system pemerataan berbasis system informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi Perlunya peningkatan insentif guru pada daerah terpencil
1.2.3	Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs	Rasio Siswa/Kelas Tahun 2013-2014 sebesar 25 : 1 berarti hasil tersebut memenuhi sesuai SPM yaitu 36 : 1	33 : 1	20 : 1	sesuai standart SPM		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.2.4	Rasio Siswa/Sekolah SMP/MTs	Rasio Siswa/sekolah menunjukkan kecukupan sekolah pada jenjang SMP/MTs Tahun 2013 : 209		218 : 1			Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
1.2.5	Rasio Siswa/Guru SMA/MA	Keadaan Tahun 2013-2014, menunjukkan rasio 10 : 1 artinya bahwa satu guru membina 11 siswa, hal ini menunjukkan perbandingan secara umum	18 : 1	12 : 1	Belum Mencapai Target		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
1.2.6	Rasio Siswa/Kelas SMA/MA	Rasio Siswa/Kelas pada Tahun 2013- 2014 sebesar 29 : 1 berarti memenuhi SPM yaitu 36 :1	36 : 1	26 : 1	sesuai standart SPM		Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
1.2.7	Rasio Siswa/Sekolah SMA/MA	Rasio Siswa/Sekolah telah menunjukkan angka kecukupan sekolah pada jenjang SMA/MA Tahun 2013 : 317		294 : 1			Perlu adanya regulasi yang mengatur penerimaan murid baru
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;						
1.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Tahun 2014 : 87,33 %	56,00 %	55,72 %	Belum Mencapai Target	Ketersediaan Lembaga PAUD masih kurang	Sosialisasi tentang Pendidikan Anak Usia Dini

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						Partisipasi Masyarakat yang kurang	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
1.4	Angka Putus Sekolah ;						
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Tahun 2013 : 0,4	0,20%	0.25%	Melampaui target	Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI berfluktuasi, Masih kurang kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah dan faktor ekonomi	Bantuan kepada siswa miskin perlu ditingkatkan
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Tahun 2013 : 0,53	0,48%	0.89%	Belum Mencapai Target	Angka Putus Sekolah tingkat SMP/MTs berfluktuasi, Sebagian penduduk Usia SMP/MTs tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari pekerjaan. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah dan faktor ekonomi	Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.4.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	Tahun 2013 : 2,10	0,95%	0.94%	Melampaui target	<p>Angka Putus Sekolah tingkat SMA/MA berfluktuasi setiap tahunnya.</p> <p>Sebagian penduduk Usia SMA/MA tidak melanjutkan pendidikannya karena mencari pekerjaan.</p> <p>Masih kurang kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih rendah dan faktor ekonomi</p> <p>Adanya Pernikahan dini</p>	Meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan
1.5	Angka Kelulusan ;						
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Tahun 2013 : 96,32	100	100%	sesuai target	Angka Kelulusan tingkat SD/MI berfluktuasi	<p>Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik</p> <p>Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas</p>
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Tahun 2013 : 99,14	100	100%	sesuai target		Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
							Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
1.5.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Tahun 2013 : 97,70	100	100%	sesuai target		Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas
1.5.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka Melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs menurun dari tahun 2009 mencapai 96,18 % menjadi 76,64 % pada tahun 2013	100%	103,11%	Melampaui target	Terbatas kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anak di luar dari biaya pendidikan formal (gratis)	Fasilitasi bantuan pembiayaan khususnya masyarakat miskin
1.5.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka Melanjutkan untuk SMP/MTs ke SMA/MA menurun dari tahun 2008 mencapai 95,81 % menjadi 86,19 % pada tahun 2013		88,34%		Terbatas kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anak di luar dari biaya pendidikan formal (gratis)	Fasilitasi bantuan pembiayaan khususnya masyarakat miskin
1.5.6	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	Tahun 2013 : 4193 guru	94,50%	93,88%	Belum Mencapai Target	Mengalami peningkatan setiap tahunnya	Program pendidikan gratis dan peningkatan kualitas tenaga pendidik
2	Kesehatan						

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.1	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio Rumah sakit	0.92%	1.04%	belum mencapai target	Dilihat dari rasio Rumah Sakit terhadap penduduk belum mencukupi	Perlunya peningkatan kelas Rumah Sakit.
		Tahun 2013 : 0,9 /100 ribu penduduk artinya 1 Rumah Sakit melayani lebih dari 100.000 penduduk					
2.2	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Rasio Dokter 2013 : 26,00 /100.000 penduduk artinya 1 Dokter melayani kurang dari 100.000 penduduk	19.64%	17,59%	belum mencapai target		Perlu dibuat aturan agar perekrutan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
		Rasio dokter spesialis 3,56/100.000 penduduk; dokter umum 11,03/100.000 penduduk					Penyediaan fasilitas Dokter di daerah terpencil
							Perlu ada aturan tersendiri untuk penempatan dokter spesialis
2.3	Rasio Puskesmas,Pustu dan Poskesdes	Rasio Puskesmas,Pustu dan Poskesdes pada tahun 2016 : 4,94/100 ribu	45.43%	44,17%	belum mencapai target	Rasio Puskesmas,Pustu dan Poskesdes terhadap jumlah penduduk belum mencukupi	Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan khususnya daerah terpencil

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		artinya 1 Puskesmas melayani lebih dari 100 ribu penduduk (puskesmas 14, pustu 42, poskesdes 72 unit)				serta fasilitas kesehatan.	Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas
2.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Tahun 2009 : 22,67	100%	82,80 %	belum mencapai target	Kemampuan bidan untuk menangani komplikasi masih rendah	Peningkatan kapasitas bidan
		Tahun 2013 : 98,69					Penguatan puskesmas Poned
2.5	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Capaian Tahun 2013 : 96,11 %, tahun 2012 : 96,75% di atas capaian provinsi 93,68% tahun 2012	100%	98,90%	belum mencapai target	Tidak semua bidan desa menetap di wilayah kerjanya	Peningkatan SDM Kesehatan
						ANC (antenatal care) terpadu yang belum optimal	Peningkatan fasilitas pelayanan KIA disarana pelayanan kesehatan
2.6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Tahun 2012 cakupan UCI : 99,06%, 2013 : 95,28 % berada di atas target UCI Sulsel 2012 : 90%	100%	97,2%	belum mencapai target	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberian Imunisasi	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor baik Pendidikan, PBMPD dan BKBPP untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian Imunisasi
							Menjamin ketersediaan petugas yang terampil

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.7	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	Capaian 2014-2016 telah mencapai 100 %	100%	100%	Mencapai target	Sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan	Penanganan Gizi Buruk di tingkat Rumah tangga (Pasca perawatan) Penanganan medis secara intensif
2.8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Capaian Tahun 2014- 2016 : mencapai 100 %	100%	54%	belum mencapai target	Pemahaman masyarakat tentang penyakit TBC BTA masih rendah	Mengefektifkan AKMS (advokasi, komunikasi, Mobilisasi Sosial) program TB
2.9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Capaian Tahun 2009-2013 : 100 % melampaui capaian provinsi 2012 : 67,12%	100%	97,56%	belum mencapai target		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.
2.10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Capaian Tahun 2013 : 85 %	100%	68%	belum mencapai target	Masih sering terjadi penambahan biaya masyarakat miskin khususnya obat dan darah	Peningkatan ketersediaan obat dan darah di Rumah Sakit
2.11	Cakupan Kunjungan Bayi	Tahun 2013 : 100 %	100%	100%	mencapai target	Sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana.
2.12	Cakupan Puskesmas	Jumlah puskesmas 14 unit tersebar pada 11 Kecamatan		14 puskesmas		Akses keterjangkauan pada daerah terpencil	Pemerataan ketersediaan sarana Puskesmas dan SDM

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
3	Pekerjaan Umum						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Hasil kinerja kondisi jalan sampai dengan Tahun 2013 adalah panjang jalan 1442.762 Km, dimana kondisi baik 320,436Km, sedang 121,427 km, rusak ringan 52,910 k dan rusak berat 1534 km	90,93%	kondisi jalan Tahun 2016 adalah panjang jalan 1442.763 Km, dimana kondisi baik 1141,823Km (79,14%), sedang 248,197 km (17,20%), rusak 52,743 km(3,66%)	belum mencapai target	Laju Kerusakan jalan tidak sebanding dengan intensitas perbaikan jalan. Tidak ada pembatasan beban kendaraan	Prioritas Peningkatan infrastruktur dan pembangunan jalan di daerah terisolir yang memiliki potensi dan membuka akses antar desa, antar kecamatan. Penegakan aturan batas maksimum muatan angkutan barang.
3.2	Kinerja Jaringan Irigasi	Kinerja jaringan irigasi saat ini untuk saluran primer dalam kondisi rusak 50%, saluran sekunde 45%, bangunan bendung 50% dan irigasi desa 67%		Kinerja jaringan irigasi untuk tahun 2016 untuk saluran primer dalam kondisi rusak 30%, saluran sekunder 30%, bangunan bendung 30% dan irigasi desa 45%		Masih rendahnya kinerja jaringan irigasi, terutama di irigasi desa	Peningkatan kinerja jaringan irigasi terutama daerah-daerah hilir

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4	Perumahan						
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai 9,40% yang menunjukkan bahwa 54.147 RT sudah terlayani oleh air bersih, dimana PDAM Sebanyak 5.195, sisanya Non PDAM.	100%	82,6 % (46.928 Rumah tangga terlayani)	belum mencapai target	Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	Jumlah pelanggan listrik sebesar. 24.165 Pelanggan		31.776		Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil	Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi.
4.3	Rumah tangga berakses sanitasi	Rumah tangga berakses sanitasi adalah 78.084 . Jumlah rumah tangga yang belum mengakses sanitasi adalah 9.651 .	100%	89%	belum mencapai target	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.	Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas pemukiman kumuh 22,405 Ha. Yang sudah tertangani 3,52 Ha (15,7%)	22,405 ha	15,7% (3,52Ha)	belum mencapai target	Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh;	Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh;
						Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.	Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat
4.5	Rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2016 sebanyak 49.879 Unit atau 15,70%, target sampai 2018 sebanyak 58.397 Unit, sisa target sebesar 9058 Unit	58.937 Unit	49.879 Unit	Di bawah target	Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.	Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun; dan Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR;
4.6	Penataan Lingkungan Permukiman	Penataan lingkungan permukiman masih sebatas perbaikan infrastruktur dasar permukiman	27.940 m	22.140 m	belum mencapai target	Masih banyak lokasi yang perlu untuk penataan permukiman yang komprehensif	Peningkatan kualitas lingkungan yang layak dan nyaman

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4.7	Lingkungan Pemukiman	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	27.940 m	22.140 m	belum mencapai target	Belum optimalnya cakupan pelayanan dan jumlah parasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman	Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman.
4.8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 76,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 24% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.	85% akses layak	89%	melampaui target	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.	Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak
			15% akses dasar				Peningkatan kesadaran masyarakat tentang sanitasi yang layak baik di tatanan rumah tangga maupun di tatanan sekolah.
5	Penataan Ruang						
5.1	Luas Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang terbangun hingga tahun 2013 adalah 165,14 Ha	166,5 Ha	166 Ha (tambahan 0,86 Ha s/d 2016)	belum mencapai target	Belum terealisasinya Luas RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang	Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan
6	Perencanaan Pembangunan						

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia Dokumen Perencanaan RPJPD Kabupaten Sidenereng rapping	1 Dok	1 Dok	mencapai target	Belum optimalnya sinergitas program, tujuan, dan sasaran dengan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan.	Peningkatan sinergitas program, tujuan dan sasaran RPJPD dengan RPJMD 2014-2018.
6.2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedianya dokumen RPJMD 2008-2013 Perda nomor 1 tahun 2009.	1 Dok	1 Dok	mencapai target	Belum optimalnya capaian kinerja SKPD terhadap target dan sasaran dalam RPJMD.	Peningkatan kualitas program yang disusun SKPD untuk dituangkan ke dalam RPJMD 2014-2018.
6.3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia dokumen perencanaan tahunan RKPd 2013.	5 Dok	4 dok	belum mencapai target	Rendahnya kualitas Rencana Kerja SKPD.	Peningkatan kualitas Renja SKPD dalam mendukung RKPd.
6.4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	Konsistensi perencanaan SKPD yang harus terjaga (Rencana strategis dan Kerja SKPD) .				Masih terdapat program SKPD yang tidak mendukung target dan sasaran RKPd.	Peningkatan kualitas perencanaan SKPD.
7	Perhubungan						
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang umum mengalami penurunan dari 30.740 tahun 2009 menjadi 6.300 tahun 2012	670.987	701.860	Tercapai	Jumlah Penumpang semakin meningkat setiap tahun	Peningkatan pelayanan dan kapasitas transportasi umum melalui peningkatan keterpaduan transportasi antar wilayah serta peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan terminal

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
7.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Data KIR kendaraan di Kab. Sidrap Tahun 2013 adalah 3616	3.903	4.423	Tercapai		Tersedianya sarana pengujian yang memadai
8	Lingkungan Hidup						
8.1	Pencemaran status mutu air	Sampai tahun 2013 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai yang ada di Kab. Sidenreng Rappang, Danau sidenreng dan air sumur	38 Sungai dan Danau	7 sungai , 1 danau	belum mencapai target	Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi
8.2	Jumlah Sampah yang tertangani	Timbulan sampah pada tahun 2012 sudah mencapai 678,6 m ³ /hari.	34.990 m ³	50.095 m ³ / Tahun	Tercapai	Penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbulansampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan
8.3	Jumlah cakupan layanan persampahan bagi penduduk	Jumlah cakupan layanan persampahan pada tahun 2013 baru 10% dan hanya	100%	15%	belum mencapai target	Masih rendahnya cakupan layanan persampahan secara langsung, dan belum terpilahnya	Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional;

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		melayani 2 kecamatan				pengelolaan sampah di masyarakat	Mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
8.4	Luas Taman Kota dan Hutan Kota	Luas Taman Kota yang telah dibangun sebesar 0.25 Ha dan Luas Hutan Kota sebesar 2 Ha	Taman 1,5 Ha	Taman 1,11 Ha	belum mencapai target	Masih banyak lokasi yang membutuhkan penghijauan untuk penataan ruang kota yang berkelanjutan.	Peningkatan kualitas penataan ruang kota melalui penataan kota yang berkelanjutan.
			2,5 Ha Hutan Kota	1,11 Ha Hutan Kota	belum mencapai target		
8.5	Pencemaran status mutu udara ambient	Sampai tahun 2013 telah dilakukan pemantauan kualitas udara ambient di Kab. Sidenreng Rappang				Belum optimal dan meratanya pemantauan kualitas udara ambient	Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan evaluasi
9	Kependudukan dan Catatan Sipil						
9.1	Kepemilikan KTP	Tahun 2013 : 80,44 % dari jumlah Penduduk wajib KTP, jumlah penduduk wajib ktp tahun 2016 sebanyak 229.328 , jumlah penduduk yang sudah memiliki ktp sebanyak 201.772	100%	87,98%	belum mencapai target	Keterjangkauan masyarakat daerah terpencil untuk mengakses administrasi pelayanan kependudukan Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
9.2	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	Tahun 2013 : 75,3 % dari bayi yang baru lahir dan jumlah penduduk lainnya	100%	35,18%	belum mencapai target	Keterjangkauan masyarakat daerah terpencil untuk mengakses administrasi pelayanan Akta Kelahiran	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan Data Base Kependudukan yang berkualitas dan akurat.
10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10.1	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	% Partisipasi Perempuan di lembaga Legeslatif baru mencapai 6,66% pada tahun 2013	30%	2,86%	belum mencapai target	Rendahnya persentase perempuan di Lembaga Legeslatif	Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan masyarakat dan lembaga
		% Partisipasi di Lembaga Pemerintah Kab. Sidrap : 74,25% tahun 2013	16%	15%	belum mencapai target	Partisipasi perempuan lebih besar dari pada laki-laki yang bekerja pada lembaga pemerintah	Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan aktivis organisasi perempuan dan tokoh perempuan
		% Partisipasi Perempuan di jabatan Struktural Pemerintah (eksekutif) mencapai 360 dari Jumlah PNS perempuan 3143		11,43%		Masih rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan strategis di pemerintahan dilihat dari % partisipasi perempuan di pemerintahan	Perlu adanya kebijakan yang memberi ruang yang setara antara aparatur perempuan dan laki-laki yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
10.2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Partisipasi angkatan kerja Perempuan : 35,33% pada tahun 2012 lebih rendah dibanding laki-laki : 81,52% pada tahun 2012	98%	98%	mencapai target	Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja karena penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang masuk kedalam angkatan kerja lebih rendah daripada laki-laki.	Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan disektor strategis.
10.3	Tingkat Pengangguran Perempuan (%)	Tingkat pengangguran Perempuan tahun 2012 : 12,62% lebih tinggi dari pengangguran laki-laki tahun 2012 : 4,27		9,10%		Masih rendahnya skill dan keterampilan yang dimiliki perempuan	Peningkatan skill dan keterampilan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan.
10.4	Persentase Penduduk Perempuan yang bekerja (%)	Persentase Penduduk Perempuan yang Bekerja Tahun 2012 : 87,38% lebih rendah dibanding laki-laki : 95,73% pada tahun 2012	8%	7%	belum mencapai target	Rendahnya skill dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja perempuan	Meningkatkan skill dan kemampuan keterampilan perempuan
11	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera						
11.1	Cakupan peserta KB aktif		53.163	72% (39.980)		Masih rendahnya partisipasi KB pria	Mendorong kepesertaan KB pria

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Jumlah Akseptor KB 39.980 orang tahun 2016			belum mencapai target		Membangun kemitraan dengan lintas sektor baik itu Kesehatan, BPMPD untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB
12	Sosial						
12.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	tahun 2013 : 4 LKS yaitu 3 Panti Asuhan dan 1 SLB				Masih kurangnya lembaga kesejahteraan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana sosial
13	Ketenagakerjaan						
13.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2012 : 57,19%	64,89%	54%	belum mencapai target	Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja relatif masih rendah	Pembinaan melalui BLK
13.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2012 : 6,99% atau sebesar 7.851	4,33%	6,97% (tahun 2015)	belum mencapai target	Menurunnya ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian bagi tenaga kerja	Perlunya pengembangan alternatif kewirausahaan bagi tenaga kerja
14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
14.1	Persentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 182 atau 49,7%. dari jumlah koperasi sebanyak 359.	52,76%	49,7%	belum mencapai target	Rendahnya kualitas pengurus Koperasi. Rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.	Peningkatan kompetensi pengurus koperasi melalui pembinaan dan pelatihan. Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang mendukung koperasi.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi.	
15	Penanaman Modal						
15.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PT BULI, PT Malindo feedmill, PT Semesta Margareksa, PT UPC Sidrap Bayu Energi, PT Budi Satria Utama		5 investor		sarana dan infrastruktur daerah serta regulasi	Peningkatan infrastruktur dan perbaikan regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi
15.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Total Nilai Investasi tahun 2016 sebesar Rp. 1.983.605.850.000		Rp. 1.983.605.850.000		Informasi potensi dan peluang investasi yang masih kurang	Penyusunan potensi dan peluang investasi yang lengkap. Promosi dan pelayanan perizinan yang cepat
16	Kebudayaan						
16.1	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya 5 kali dalam setahun		4 kali		Masih banyak event daerah yang belum dilaksanakan	Perlu inventarisasi event daerah yang belum dilaksanakan.
16.2	Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan	1 Situs	7 situs	4 situs	Belum Mencapai Target	Masih banyaknya warisan budaya yang belum dilestarikan	Perlu pelestarian warisan budaya
17	Kepemudaan dan Olahraga						

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
17.1	Lapangan Olahraga	jumlah lapangan di tahun 2016 sebanyak 1.272 yang terdiri dari lap. Sepakbola 106, lap. Basket 92, lap. Volley 535, bulu tangkis 535, kolam renang 4.	290 lapangan	1.272 lapangan	Melampaui target	Sarana dan prasarana masih kurang terpelihara	Ketersediaan lahan, Pelibatan Pihak Swasta , Banyaknya ajang kompetisi olahraga ketersediaan lahan,Perlibatan pihak swasta, banyaknya kompetisi olahraga
18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
18.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Dilaksanakan 2 kegiatan pada tahun 2010				Masih rendahnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Peningkatan Intensitas kegiatan pembinaan
18.2	Kegiatan Pembinaan politik Daerah	Dilaksanakan 1 kegiatan pada tahun 2011				Masih rendahnya pembinaan politik daerah	Peningkatan intensitas wawasan kebangsaan
19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
19.1	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi	7,9-8,4	9,00	Melampaui target		Produksi pertanian tanaman pangan, palawija tumbuh 5% pertahun melalui modernisasi pengelolaan teknologi pertanian. Meningkatnya luas areal komoditi perkebunan/pertanian. Populasi Ternak Sapi bertambah 5000 ekor Per tahun. Terbukanya kesempatan kerja. Terselenggaranya Event nasional di bidang otomotif

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
							Investasi di bidang pembangkit listrik tenaga angin (UPC) pembangunan kawasan pariwisata Pembangunan Kawasan Industri.
19.2	Kemiskinan	2010 : 19,301 jiwa dan tahun 2012 ;16.700 jiwa yang hidup di bawah GK	4%	15.920 jiwa	belum mencapai target	Masih adanya penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan	Peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat miskin
19.3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah						
19.2	Penegakan PERDA	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda 25 dr 26 pelanggaran	100%	96%	belum mencapai target	Terbatasnya PPNS penegak Perda	Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan
19.3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	792 pada tahun 2013		20		Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas Satpol PP Masih kurangnya sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol petugas Satpol PP
19.4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten	51,95 % pada tahun 2013				Masih kurangnya tenaga penyidik.	Ketersediaan Tenaga Penyidik

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
19.5	Petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	31 orang pada tahun 2013				Belum berimbang jumlah dengan penduduk	Penempatan Linmas sesuai dengan kebutuhan
20	Ketahanan Pangan						
20.1	Regulasi ketahanan pangan	Dalam mendukung percepatan pemuatan pangan , pemkab sidrap telah mengeluarkan perbup nomor 15 tahun 2012 tentang gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local. Surat Edaran Bupati nomor 521/2061/IV/KP- BPKP/2013, perihal percepatan diversifikasi konsumsi pangan.	1	1	terlaksana	Regulasi ketahanan pangan masih kurang. Sosialisasi tentang pentingnya ketahanan pangan masih kurang.	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi terhadap peraturan yang ada dalam mendorong percepatan pemuatan pangan pada tingkat masyarakat.
20.2	Ketersediaan pangan utama	Sebagai penghasil beras dan penyangga stock pangan nasional, maka daerah ini mengalami surplus	280.034,18 ton	277.655,31 ton	belum mencapai target	Diversifikasi dan panganekaragaman produk pengganti beras masih rendah.	Peningkatan kompetensi masyarakat dalam menyediakan produk makanan olahan yang berbahan baku non beras.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		di atas 170 ribu ton beras per tahun.					
21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
21.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah kelompok binaan 2013:38 LPM dan 68 LKMD pada 106 Desa/Kelurahan.	100%	70%	belum mencapai target		Peningkatan pembinaan terhadap kelompok binaan pada setiap Desa/Kelurahan
21.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah Kelompok Binaan PKK : 117 kelompok Binaan PKK dari 106 desa/kelurahan dan 11 Kecamatan.	100%	60%	belum mencapai target		Mengoptimalkan fungsi dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar rutin membina kelompok binaan PKK pada masing-masing POKJA
21.3	PKK aktif	177 Kelompok PKK dari 106 Desa/Kelurahan dan 11 Kecamatan	100%	90%	belum mencapai target	Desa/Kelurahan yang letaknya terpencil sulit untuk di bina oleh TP PKK Desa, Kecamatan dan Kabupaten	Memperlancar akses transportasi dan komunikasi pada setiap Desa/Kelurahan yang terpencil agar rutin dilakukan pembinaan
21.4	Posyandu Aktif	309 Posyandu dari 14 Puskesmas	100% (309 Posyandu)	95% (294 Posyandu)	belum mencapai target	Masih ada sebagian posyandu yang belum memiliki kader yang terlatih dan sarana dan prasarana yang layak.	Meningkatkan SDM kader Posyandu serta pengembangan PAUD Holistik Integratif melalui pengintegrasian kegiatan BKB, Posyandu dan pendidikan secara terpadu
21.5	Jumlah Posyandu	Tahun 2013 : 309 Unit		309			Pengembangan pelayanan posyandu melalui PAUD Integratif Holistik

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
24	Kearsipan						
24.1	Pengelolaan Arsip secara Baku	Pada Tahun 2016 sebesar 40 %	100%	40%	belum mencapai target	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan pada SKPD	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas
						Tidak ketersediaannya sarana dan prasarana dan belum terlaksananya kearsipan yang baku	Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip
24.2	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	1 Kegiatan pada tahun 2013	1 Kegiatan	1 kegiatan (tahun 2015)	mencapai target	Ketersediaan kapasitas SDM pengelola arsip belum memadai	Peningkatan dan pengetahuan dan minat aparatur tentang pentingnya pengelolaan kearsipan
						Belum optimalnya pengarsipan di SKPD	Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan
25	Komunikasi dan Informatika						
25.1	Jumlah jaringan komunikasi	Pada Tahun 2013 sebanyak 81 tower telekomunikasi		99 tower telekomunikasi		Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi
25.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Masih rendahnya rasio wartel/warnet terhadap jumlah penduduk		23 warnet		Masih banyak wilayah yang belum terjangkau wartel/warnet yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana di wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi
							Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
25.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas surat kabar nasional/lokal	24 media cetak lokal/nasional, 3 tv lokal/nasional	30 Media cetak lokal/ nasional	Melampaui target	Keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date masih terbatas	Peningkatan jumlah dan kualitas surat kabar nasional/lokal
26	Perpustakaan						
26.1	Jumlah Perpustakaan	jumlah Perpustakaan pada tahun 2016 sebanyak 398, SD/MI 245, SMP/MTsN 58, SMA/MA/SMK 21, SLB 1, Puskesmas 1, Desa/ Kel 83.		398		Jumlah perpustakaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan belum memadai Terbatasnya pendanaan untuk pendanaan perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang berkualitas
26.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	1706 Pengunjung pada tahun 2013		131 pengunjung		Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat	Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat.
26.3	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	1015 Buku pada tahun 2013		4131 buku		Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi dalam pengadaan bahan bacaan.
Fokus Layanan Urusan Pilihan							

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	Pertanian						
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produktivitas padi masih rendah. Pada tahun 2013 produktivitas padi mencapai 5,6 Ton/Ha, di atas rata-rata provinsi dan nasional. Disisi lain Luas Panen berada pada kisaran 78 Ribu Ha per tahun.	589,200 ton	587.982 ton	belum mencapai target	<p>Penyediaan sarana produksi tepat waktu.</p> <p>Kurang maksimalnya Penerapan Teknologi Pertanian baik pada tingkat on farm maupun pasca panen.</p> <p>Penekanan Tingkat Serangan OPT.</p> <p>Optimalisasi Pemanfaatan lahan sawah Irigasi.</p> <p>Terbatasnya penggunaan Benih Unggul.</p>	<p>Produktivitas dan produksi padi meningkat.</p> <p>Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi.</p> <p>Pembangunan Infrastruktur jalan Tani.</p> <p>Fasilitasi Penyediaan Alat Mekanisasi Pertanian (Hand Tractor, Alat Tanam dan Combine).</p> <p>Berkembangnya Sistem Tanam Legowo.</p> <p>Pengendalian OPT dan pengawalan teknologi pertanian pada tingkat usahatani.</p> <p>Ketersediaan dan penggunaan Pupuk dan ZPT yang memenuhi prinsip 5 T.</p> <p>Fasilitas Permodalan dan pembiayaan usahatani melalui KKP.</p>
1.2		Kontribusi sektor pertanian		34,82 %			Peningkatan jalan penghubung dari kantong produksi ke pasar industri.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	memperlihatkan angka persentase fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2014 34,06% 2015 menjadi 33,35% dan pada tahun 2016 menjadi 34,82%.					Penyediaan Bibit pertanian yang bermutu dan memiliki nilai ekonomi/eksport. Perbaikan dan Peningkatan Mutu hasil pertanian. Fasilitas Permodalan dan pembiayaan usahatani melalui KKP.
1.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB berada pada kisaran 4,5% ke atas.		1) Perekebunan Tahunan ; 4,82 %, 2) Perekebunan Musiman ; 0,83 %		Kontribusi Sektor Perkebunan selama 5 (lima) tahun terkahir cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2008 6,50% menjadi 4,53% pada tahun 2012.	Peningkatan jalan penghubung dari kantong produksi ke pasar industri. Penyediaan Bibit Perkebunan yang memiliki nilai ekonomi/eksport. Perbaikan dan Peningkatan Mutu hasil Perkebunan. Pendataan Luas Areal Komoditi Perkebunan (kelapa sawit). Fasilitas Permodalan dan pembiayaan usahatani melalui KKP.
1.5	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB belum teridentifikasi.				Belum tersedianya data dan informasi terkait produksi kelompok petani terhadap PDRB. Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam peningkatan pendapatan.	Penyediaan data dan informasi kontribusi kelompok petani terhadap PDRB. Peningkatan dan kapasitas pengetahuan kelompok petani agar dapat berkontribusi optimal dalam PDRB.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						Belum optimalnya peran dan fasilitas pemerintah dalam memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.	Peningkatan peran dan fasilitas pemerintah guna memacu peningkatan kontribusi kelompok petani.
1.6	Cakupan bina kelompok petani	Cakupan Kelompok Tani dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi melalui pembinaan masih sangat rendah. Jumlah Kelompok Tani Tanaman Pangan pada tahun 2013 berjumlah 1.234.	100 klp	80 klp	belum mencapai target	<p>Terbatasnya Sumber daya penyuluh untuk melakukan kegiatan pembinaan.</p> <p>Jumlah kelompok tani dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.</p>	<p>Peningkatan jumlah tenaga penyuluh.</p> <p>Penempatan Penyuluh 1 Desa/Kelurahan.</p> <p>Peningkatan Kapasitas dan pengetahuan Kelompok Tani.</p> <p>Peningkatan Peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai tempat pertemuan petani dan tempat uji coba penerapan teknologi.</p>
15.4	Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB	Kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan mendominasi sektor pertanian, berada pada angka 31,5% ke atas per tahun.		21,79 %		<p>Kontribusi Sub sektor tanaman bahan makanan cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2008 kontribusinya mencapai 33,92%, sementara tahun</p>	<p>Ketersediaan Sarana Prasarana Produksi memenuhi unsur 5 Tepat.</p> <p>Pengembangan dan pembangunan kantong penampungan air (embung dan cekdam) pada daerah pengembangan Palawija dan hortikulura.</p> <p>Penyediaan POMPA.</p>

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						2012 mencapai 36,00%.	Penerapan Teknologi Pertanian spesifik lokasi. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usahatani lainnya.
15.12	Produksi daging dari berbagai komoditas ternak	Pada tahun 2013 Produksi Daging sapi potong mencapai 706.678 Kg, kambing 18.645 Kg, unggas 2.365.371 Kg.	Daging sapi potong mencapai 750.108 Kg, kambing 19.791 Kg, unggas 10.063.277 Kg, telur 53.714.547	Daging sapi potong mencapai 880.595 Kg, kambing 17.685 Kg, unggas 3.087.860 Kg, telur 65.415.925	belum mencapai target	Belum optimalnya populasi ternak (kecil maupun besar dan unggas), yang berimplikasi terhadap tingkat ketersediaan dan produksi daging masih rendah. Sementara areal pengembangan cukup memadai.	Meningkatnya Hasil Produksi Peternakan melalui pengembangan IB, terkendalinya penyakit ternak, pengembangan lahan Hijauan Makanan Ternak dan padang penggembalaan, sosialisasi Biosecurity bahaya AI, dll.
2	Kehutanan						
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas Lahan Kritis 31.213 Ha.. Luas Hutan Lindung yang telah direhabilitasi sebesar 1935 Ha, Hutan produksi sebesar 495 Ha, dan Kebun Bibit rakyat sebesar 7876 Ha				Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi	Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
2.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Kerusakan hutan sebesar 350Ha				Besarnya laju deforestasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan	Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan
2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Kontribusi sektor kehutanan sebesar 0.03 %,	0.03%	0.02%	66.67	Secara ekonomi kontribusi sektor kehutanan masih rendah namun kontribusi intangiblenya tidak dihitung	Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Pertambangan tanpa ijin	Luas penambangan liar yang ditertbkan tahun 2012 adalah 3.5 Ha, dari luas penambangan liar sebesar 4 Ha.				Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reencana tata ruang	Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum
3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertambangan masih 0%		4,84 %		Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan reencana tata ruang	Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensipemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum
4	Pariwisata						

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
4.1	Kunjungan wisata	pada tahun 2016 kunjungan wisatawan asing 250 orang, wisatawan domestik 15.950 orang	25.000 orang	15.950 orang	belum mencapai target	Belum optimalnya objek wisata	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
						Rendahnya koordinasi dari pemerintah pusat dan provinsi	Promosi
						Kurangnya promosi pariwisata	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pengembangan potensi wisata
9.5	Jumlah Objek Wisata	Terdiri 4objek wisata seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata agro	wisata alam 8, wisata sejarah 4, wisata budaya 4 dan wisata agro 5, wisata sport 2	wisata alam 7, wisata sejarah 4, wisata budaya 4 dan wisata agro 5, wisata sport 2	belum mencapai target	Masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan	Peningkatan pengembangan potensi wisata
							Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan potensi wisata daerah
4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rata-rata 0,03% per tahun	0,3%	0,2%	belum mencapai target	Masih rendahnya pengembangan objek wisata	Peningkatan pengembangan objek wisata
							promosi
5	Kelautan dan Perikanan						
5.1	Produksi perikanan	Tahun 2013 Jumlah produksi perikanan budidaya	806,80 ton	708,79 ton	belum mencapai target	Rendahnya minat masyarakat u pengembangan budidaya perikanan.	Optimaliasi produksi perikanan budidaya dan perairan umum.
		2.760.417 ekor, sementara jumlah produksi perikanan tangkap 2790,66 Ton.	3.561 ton	3.220 ton	belum mencapai target	Rendahnya pengasawan penggunaan alat tangkap pada area perikanan umum.	Meningkatkan Restocking.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						Mutu Produksi perikanan kurang berdaya saing.	Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan baik pada tingkat budidaya maupun perairan umum.
							Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan melalui pembentukan kelompok masyarakat 1 (satu) setiap tahunnya.
							Pengembangan areal budidaya perikanan yang orientasi pasar.
5.3	Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah	Jumlah Kelompok Perikanan pada tahun 2013 mencapai kurang lebih 160.	170	166	belum mencapai target	Rendahnya jumlah kelompok perikanan.	Peningkatan jumlah kelompok perikanan budidaya.
						Rendahnya Sumberdaya nelayan dalam mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola budidaya perikanan dan nilai tambah produksi hasil perikanan.
5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah	Pada tahun 2013 Produksi Perikanan kelompok nelayan perairan umum mencapai 2762,7 ton.	3561 ton	3220 ton	belum mencapai target	Belum optimalnya produksi ikan pada perairan umum yang luasnya mencapai 2.890 HA.	Peningkatan produksi Ikan pada perairan umum sebesar 10% pertahun.
		Sementara Pembudidaya ikan memproduksi 2.760.417 ekor	806,80 ton	708,79 ton	belum mencapai target	Sementara perikanan budidaya mencapai 423 Ha.	Peningkatan populasi ikan pada tingkat budidaya perikanan 5%.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Industri olahan hasil perikanan belum optimal.				Peningkatan kapasitas sumberdaya kelompok pengolah hasil perikanan	Pengembangan luas areal dan jumlah kelompok budidaya perikanan .
							Pengerukan danau sidenreng 5 ha per tahun.
							Peningkatan jumlah restocking.
							Berkembangnya produk olahan hasil produksi perikanan dalam mendorong nilai tambah.
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2014 sebesar 9,74%, 2015 sebesar 9,54% di tahun 2016 sebesar 9,12 %	9,22%	9,10%	belum mencapai target	Belum optimalnya data pendukung terhadap nilai sektor perdagangan, sehingga persentase kontribusinya cenderung menurun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari 11,62% pada tahun 2008 menjadi 10,67% pada tahun 2012.	Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB melalui koordinasi dan pendataan jumlah barang masuk dan keluar.
6.2	Ekspor bersih perdagangan						
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal					Masih terbatasnya data jumlah kelompok pedagang dan usaha informal	Peningkatan upaya pendataan kelompok pedagang dan usaha informata yang aktif dan mandiri.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
						yang aktif dan mandiri	
						Masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha	Peningkatan upaya pembinaan dan fasilitasi kelompok pedagang dan usaha informal
							Peningkatan keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha..
7	Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri selama kurun waktu 5 (lma) tahun berada pada kisaran 6,54% ke atas.	14,75%	14,46%	belum mencapai target	Kurangnya Data Olahan gabah menjadi beras oleh industri penggilingan	Tersedianya data olahan gabah menjadi beras dan data home industri
						Kurangnya Data kelompok Home industri	Terbangunnya kawasan industri.
						Rendahnya kapasitas pengelola home industri	
						Kurangnya investasi sektor industri pengolahan.	
						Belum tersedia Kawasan Industri sebagai tempat penyimpanan dan olahan produksi.	
7.3	Pertumbuhan Industri	Pada sektor industri, kontribusi tertinggi	3,89%	3,82%		Kurangnya investasi sektor	Peningkatan jumlah investasi industri bukan migas.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		ada pada industri bukan migas. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun memperlihatkan angka fluktuatif. Kisaran angkanya berada pada 5,54% - 6,65%.			belum mencapai target	industri olahan bukan migas.	Peningkatan Investasi Industri listrik tenaga terbarukan.
ASPEK DAYA SAING							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Pengeluaran konsumsi rumah tangga jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan sebesar 9,47%. Tahun 2011; 54,52% sementara 2012; 45,99%.				Terjadi pergeseran persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga ke konsumsi non pangan.	Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi non pangan.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Pada tahun 2012 Pengeluaran konsumsi non pangan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi persentase konsumsi rumah tangga, tahun 2011 mencapai 45,48%, tahun 2012 meningkat menjadi 54,01%.				Konsumsi Non Pangan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.	Peningkatan peran dan fasilitas pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi non pangan.
1.3	Produktivitas total daerah	Nilai PDRB selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2008-2012 berdasarkan ADHK meningkat rata-rata 19,74 %.		Nilai PDRB berdasarkan ADHK 3 Tahun terakhir 2014-2016 rata-rata bertumbuh 8,28%		Rendahnya kontribusi Nilai PDRB pada sektor lain. Masih didominasi sektor pertanian yang mencapai 2,243 Triliun dari total 4,932 Triliun tahun 2012.	sektor Industri Pengolahan disektor pertanian meningkat. Tersedianya kasawan industri. Peningkatan investasi pada sektor industri.
2	Pertanian						

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
15.3	Nilai Tukar Petani	Nilai tukar petani di kabupaten sidenreng rappang berada pada kisaran 112,86% - 132,91%. Pada Tahun 2012 Nilai Tukar Petani mencapai 117,17% diatas dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 108,11%.				Rendahnya produktivitas sektor pertanian.	Peningkatan Produktivitas sektor pertanian.
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW masih sangat rendah	Revisi Perda RTRW	Peninjauan Kembali Perda RTRW	belum terlaksana	Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor antar wilayah yang mengacu pada RTRW	Pelaksanaan program mengacu pada RTRW
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Peningkatan dan pemerataan jumlah bank dan jenis bank.		6 bank (2015, BPS)		Jenis dan jumlah bank belum merata	Tingginya kesadaran masyarakat menggunakan jasa perbankan. Jumlah dan tabungan masyarakat meningkat.
3.3	Jenis, kelas dan jumlah restoran	Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha restoran.		106 Restoran/Rumah Makan (2015, BPS)		Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan restoran yang sehat.	Jumlah dan tabungan masyarakat meningkat.

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Meningkatnya minat masyarakat yang berkunjung ke restoran.		107 Restoran /Rumah Makan (2015, BPS)		Masih terbatasnya jumlah restoran yang terdaftar	
3.4	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel	Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha penginapan, pemodokan dan hotel. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas penginapan dan hotel.		3 Hotel 12 Penginapan (2015, BPS)		Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan penginapan dan hotel.	Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan penginapan/hotel.
Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jenis pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah berjumlah 25 jenis pajak dan retribusi.		8 jenis pajak 16 jenis retribusi		Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Belum optimalnya penggalian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah berjalan dengan baik. Peningkatan target Pajak dan Retribusi Daerah. Penegakan Perda yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah

NO.	URUSAN/IKK	INTERPRETASI CAPAIAN TARGET	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA S/D 2016	CAPAIAN TAFSIRAN REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.5	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda yang berkaitan dengan investasi belum mendukung iklim usaha di sidenreng rappang.				Kurangnya Perda yang mengatur iklim berinvestasi.	Peningkatan jumlah perda yang mengatur investasi.
1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa						
Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan						
7.3	Persentase Penduduk yang bekerja	Pada tahun 2016 : 93,02% atau sebanyak 104.741 jiwa dari 112.592 jiwa angkatan kerja		93,02%		Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan optimalisasi balai latihan kerja (BLK)
7.4	Persentase pencari kerja lulusan akademi/universitas	2012: 65,26% dari pencari kerja				Ketersediaan lapangan kerja yang masih rendah	Pembukaan lapangan kerja berbasis kompetensi

Agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah maka diperlukan penelahaan RPJMD daerah lain dengan maksud :

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategies yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/ kawasan pembangunan

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional selain itu perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan rencana jangka menengah atau program kewilayahan daerah lain dapat selaras, untuk itu dilakukan identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD Kabupaten tetangga yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3 Identifikasi RPJMD Kabupaten Lain

No	Daerah lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Soppeng	2016-2021	Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Revitalisasi / Pengerukan endapan sedimentasi danau tempe untuk dijadikan pulau buatan
2	Kota Madya Pare Pare	2013-2018	Optimalisasi kota pare pare sebagai sentra kawasan ekonomi terpadu	Menjalin hubungan kerjasama antar daerah untuk menggairahkan sektor niaga dan jasa
				Pengembangan kawasan strategis nasional KAPET Pare pare yang mencakup wilayah ajatappareng (Kota Pare Pare, Kab.Sidrap, Kab.Pinrang, Kab.Enrekang, Kab.Barru)
3	Kabupaten Wajo	2013-2018	Revitalisasi Revitalisasi rawa dan pesisir danau serta mengefektifkan pengaturan air danau.	Koordinasi dari ketiga kabupaten (Wajo, Sidrap, Soppeng) yang berada di Danau Tempe dalam rangka menangani pengelolaan ekosistem danau dan ekosistem kawasan disekitar danau terkait pengerukan sedimen untuk pembuatan pulau buatan
4	Kabupaten Pinrang	2014-2019	Pengelolaan jaringan irigasi sekunder/tersier Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya	Keberadaan infrastruktur vital Bendungan Benteng dan pemeliharaan jaringan irigasi D.I Saddang di Kabupaten Pinrang secara langsung ikut mengairi areal persawahan dan meningkatkan produktivitas pertanian terutama komoditas beras

No	Daerah lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
				kabupaten tetangga khususnya Kabupaten Wajo dan Sidrap selaku lumbung pangan nasional lainnya di Sulawesi Selatan.
5	Kabupaten Enrekang	2013-2018	Pendayagunaan potensi sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan embung	Pembangunan Bendung Boya yang akan mengairi sektor pertanian di kabupaten enrekang dan kabupaten sidrap

- **Isu Strategis**

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam dua tahun ke depan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu global.

4.2.1 Isu Global

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan didaerah :

1. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik

berbasis *online*. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

2. SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs adalah singkatan atau kepanjangan dari *sustainable development goals*, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Jadi, negara-negara di dunia menyepakati sebuah *platform* baru dengan terminologi baru, yakni SDGs. Baik SDGs maupun MDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita. Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun, ada hal yang lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang.

Ada delapan poin di dalam MDGs itu yang penting untuk dicermati, yakni:

1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. menurunkan angka kematian anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu;
6. memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sementara itu, Ada 17 poin penting di dalam SDGs, yakni terciptanya dunia dengan:

1. tanpa kemiskinan;
2. tanpa kelaparan;
3. kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. pendidikan berkualitas;
5. kesetaraan gender;
6. air bersih dan sanitasi;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
9. industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. pengurangan kesenjangan;
11. keberlanjutan kota dan komunitas;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. aksi terhadap iklim;
14. kehidupan bawah laut;
15. kehidupan di darat;
16. institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
17. kemitraan untuk mencapai tujuan.

4.2.2 Telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN 2015 – 2019)

Telaahan kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk mengetahui prioritas pembangunan nasional yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD daerah, sebagai upaya untuk menciptakan konsistensi perencanaan.

4.2.2.1 Agenda Prioritas

A. Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

- **Meminimalisasi Dampak Globalisasi**, melalui arah kebijakan Mendorong peranan dan partisipasi aktif pemerintah dan swasta dalam meminimalkan dampak negatif dan

memaksimalkan dampak positif globalisasi ekonomi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

- **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan,** dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.

- **Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan pembangunan,** dengan sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dengan sasaran : meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.
- **Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)** dengan sasaran meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- **Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik,** dengan sasaran : meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

- **Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris, dengan sasaran** terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - **Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia,** dengan sasaran Terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
 - **Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat dengan sasaran :** Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*); Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi, Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat; Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas; Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif.
- 4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.**
- **Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dengan sasaran** Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan system hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
 - **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan Sasaran** Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- **Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar, dengan sasaran** Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar.
- **Pemberantasan Narkoba dan Psicotropika dengan Sasaran** Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.
- **Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah dengan sasaran:** Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar pertanahan; dan Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada Tahun 2015.
- **Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal dengan Sasaran** tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak, dan kelompok marjinal.

5. Meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia.

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dilaksanakan melalui: (1) pembangunan kependudukan dan KB; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.

- **Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan**

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda.

- **Membangun Transportasi Massal Perkotaan**

Meningkatnya Pelayanan angkutan massal perkotaan

- **Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar**

Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan

- **Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur**

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur maka pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan lainnya, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara umum, sasaran yang ingin dicapai pada RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019 adalah menjadikan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai development approach dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

- **Penguatan Investasi**

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis dan kedua adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestic.

- **Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan**

Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian.

- **Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi**

Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas iptek

- **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai melalui: (1) peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (3) akselerasi pertumbuhan pariwisata; (4) akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; dan (5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

- **Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016**

Meningkatnya data dan informasi statistic di bidang ekonomi.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- **Peningkatan Kedaulatan Pangan.**

Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedele diutamakan untuk mengamankan pasokan

pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.

- **Kedaulatan Energi**

kebijakan ketahanan energi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ketersediaan energi dalam negeri, meningkatkan penggunaan sumberdaya energi untuk kebutuhan lokal mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat, meningkatkan produksi sumberdaya energi lain terutama energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi penggunaan/ konsumsi energi.

- **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**

- **Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan**

- **Penguatan Sektor Keuangan**

Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah: i) meningkatkan ketahanan/daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsi intermediasi/penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (financial deepening). Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, diupayakan pula sasaran peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan dalam rangka mengembangkan jasa keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

- **Penguatan Kapasitas Fiskal Negara**

Penguatan kapasitas fiskal negara akan dicapai melalui: (1) sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran; (2) evaluasi kinerja kenaikan penerimaan pajak seiring dengan potensinya (seperti pertumbuhan PDB); (3) merancang ulang lembaga pajak, berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan; (4) melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia; (5) peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan; (6) pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah; (7) pengurangan utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB mengecil; (8) utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-

budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen).

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Kebhinekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta merebaknya kekerasan berbasiskan keagamaan.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan (RPJMD Provinsi Sulawesi – Selatan 2013 – 2018)

Kebijakan pembangunan untuk 3 tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017.

Akselerasi dilakukan pada kebijakan – kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Adapun Prioritas kebijakan pada tahun ini adalah :

- Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
- Pengembangan pendidikan,kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan ;
- Pembangunan Kesehatan ;
- Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
- Pengembangan kawasan strategies;
- Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2013 – 2018. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Gubernur secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/ kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2018. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah :

- Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
- Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan;
- Pembangunan kesehatan;
- Pembangunan kawasan strategies;
- Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;

Secara rinci program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Gratis SPP mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS;
2. Bantuan 5 Juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan 100 juta bibit tanaman hutan;

3. Gratis modal pengembangan usaha mikro kecil;
4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;
5. Dukungan untuk fasilitasi dan regulasi pembangunan/ pengembangan industri minimal 24 unit sesuai potensi kab/ kota di Sulawesi selatan;
6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru;
7. Gratis paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin;
8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA;
9. Melanjutkan kesehatan gratis;
10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan;
11. Beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas;
12. Gratis peningkatan kualitas engajar melalui Boarding School untuk : Guru SD, SMP, SMA , guru mengaji, mubalig, khatib dan alim ulama;

4.2.4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu global.

Selain isu global, penyusunan Perubahan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dilakukan guna mengakomodasi dinamika regulasi tersebut yang berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan.

4.2.4.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kebijakan pelaksanaan SPM yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membatasi jumlah SPM hanya pada 6 (enam) bidang urusan yaitu pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

a. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s/d 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s/d 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

SPM bidang kesehatan mencakup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar dan penerimanya di Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) pelayanan kesehatan balita;
- 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Bidang Sosial

SPM bidang sosial meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;

- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 4.4

Keselarasn Isu Strategis Pembangunan Daerah

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
	(1)	(2)	(3)
Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar			
1.	Urusan Pendidikan		Pendidikan
1.	Belum tercapainya Standar pelayanan Minimal Pendidikan	1. Masih tingginya angka buta aksara;	1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas;
2	Masih rendahnya rata rata lama sekolah;	2. Angka partisipasi sekolah cenderung menurun;	2. Peningkatan kualitas pembelajaran
3	Belum Optimalnya Aksesibilitas, sarana dan prasarana pendidikan.	3. Belum optimalnya peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah;	
		4. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana pendidikan.	
2.	Urusan Kesehatan		Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1	Belum optimalnya capaian Angka Harapan Hidup	1. Terbatasnya sumberdaya kesehatan;	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia;
2	Masih terdapatnya angka kematian Ibu, bayi dan balita	2. Belum optimal pelayanan kesehatan	2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018	RPJMN 2015-2019
3	Terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan		3. Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
4	Masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular, serta penyakit degeneratif.		4. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
5	Kesadaran masyarakat masih kurang untuk melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	3.	Masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degeneratif;
		4.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
		5.	Masih diperlukan upaya perbaikan gizi masyarakat termasuk melalui Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) dan Gerakan 1000 hari pertama kehidupan;
		6.	Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
		7.	Percepatan perbaikan status gizi masyarakat;
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Pekerjaan Umum
1	Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan,	1.	Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi
		1.	Meningkatkan aksesibilitas akibat ketidakterediaan prasarana dan sarana infrastruktur

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
	konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.		
2	Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana sampai dengan tahun 2016 Kondisi jaringan irigasi untuk saluran sekunder 30% dalam kondisi rusak karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain disebabkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi	2. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasana sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan Sulsel;	2. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS
3	Mengembalikan fungsi SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir dan longsor.	3. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi;	3. Belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur;

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
	Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada komisi irigasi, dinas yang terkait dengan pengelolaan irigasi, petani pemakai air dan pengelola irigasi lainnya.		
4	Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.	4.	Belum berkualitasnya pemenuhan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak;
5	Mempertimbangkan isu perubahan iklim	5.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah
6	kondisi jalan sampai Tahun 2016 adalah panjang jalan 1442,762 Km, dimana kondisi baik 1141,823Km (79,14%), sedang 248,197 km (17,20%), rusak 52,743 km(3,66%). Pada umumnya kerusakan jalan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu repetisi atau pengulangan beban dan genangan air.		

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
7	kurangnya aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil			
8	Meningkatkan /mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan			
9	Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor primer.			
10	Kondisi jumlah jembatan dalam kondisi baik 92,15% dari target sebesar 98,19%.			
				Tata Ruang
1	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan RTBL	6.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;	1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2	Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau	7	Rencana Tata Ruang belum dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan;	2. RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektor

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
3	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal		
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi
1.	Perubahan iklim menyebabkan penanganan drainase yang relatif lebih sulit dan memerlukan biaya yang lebih mahal.	1. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.	1. Pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman);
2.	Pemanfaatan energi terbarukan secara cerdas, arif dan bijaksana	2. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman;	2. Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman
3.	Pembangunan sistem drainase utama dan lokal yang belum terpadu terutama pada sistem drainase yang dibangun oleh swasta/pengembang yang tidak selaras dengan pembangunan drainase makro yang lingkupnya lebih luas dari wilayah tersebut. Terbatasnya Master Plan drainase, seringkali pihak	3. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang	

No	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	Isu Strategis		
		RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
	pengembang tidak punya acuan untuk sistem lokal misalnya data penanggulangan banjir, sehingga penanganan sifatnya hanya parsial untuk wilayah yang dikembangkannya saja.			
4.	Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.			
5	Pencapaian target SDGs poin ke sebelas yaitu keberlanjutan kota dan komunitas			
6	Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin.			
7	Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman.			
8	Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan			

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
	permukiman. ditopang oleh belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.		
9	Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dengan perda bangunan gedung di kabupaten		
10	Peningkatan akses air minum yang layak dan sehat		
11	Peningkatan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air minum		
12	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum		
13	Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman		
14	Cakupan layanan persampahan baru 15%		

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
	dan terbatas hanya di beberapa kecamatan			
15	Rendahnya kesadaran masyarakat dan belum diberdayakannya potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah serta terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman berbasis masyarakat			
16	Masih rendahnya kapasitas SDM, kurang koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah, serta belum adanya lembaga khusus penanganan air limbah.			
				Infrastruktur dan Globalisasi
				1. Percepatan pembangunan perumahan
5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Politik Dalam Negeri

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018	RPJMN 2015-2019
1.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan, dan masih adanya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat.	1. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan;	1. Penguatan peran lembaga demokrasi;
		2. Belum terpenuhinya rasio optimal ketersediaan polisi pamong praja	2. Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat
		3. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang	
6.	Urusan Sosial		Sosial
1.	Masih tingginya angka kemiskinan. Menuju target 4,5% kemiskinan.	1. Optimalisasi pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	1. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
2.	Masih tingginya pengangguran serta Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)	2. Belum optimalnya upaya penanganan konflik sosial di masyarakat;	
	Kurangnya pembinaan pada Lembaga Kesejahteraan sosial	3. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;	
		4. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
			dan pemanfaatan panti-panti sosial;
		5.	Belum optimalnya upaya rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak dan perempuan.
	Urusan Wajib Pemerintah Bukan Pelayanan Dasar		
7.	Urusan Lingkungan Hidup		Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan
1.	Adanya perubahan iklim	1	Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan
		2.	Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku
		3.	Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
		4.	Masih diperlukannya upaya antisipasi terhadap dampak pemanasan global.
8.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		Pemuda dan Olahraga
1.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga serta pembinaan pemuda dan olahraga	1.	Sarana dan prasarana olah raga telah mencukupi, namun penyebarannya belum merata;

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018	RPJMN 2015-2019
		2. Belum optimalnya pembinaan kepemudaan;	1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
2	Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga	3. Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga	2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
9.	Urusan Penanaman Modal		Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN
1	Investasi belum optimal;	1. Belum optimalnya pengelolaan investasi.	1. Peran BUMN sebagai pendukung penyedia bahan kebutuhan pokok/pangan, penunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerap angkatan kerja yang masih belum optimal;
2	Promosi potensi keunggulan daerah belum berkembang;	2. Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;	2. Beberapa BUMN masih belum menunjukkan kinerja yang baik
3	Cetak biru (master plan) penanaman modal belum terealisasi;	3. Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas	
4	Minimnya regulasi investasi dan birokrasi yang kurang efektif		

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018		RPJMN 2015-2019
5	Masih minimnya sistem informasi bidang penanaman modal;			
10.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
1	Kerjasama pengembangan usaha besar, kecil dan menengah belum terwujud;	1.	Belum optimalnya pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;	1. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki asset dan produktivitas yang rendah
2	Penanganan pendukung usaha bagi mikro, kecil dan menengah belum optimal;	2.	Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;	2. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan
3	Kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi masih kurang;	3.	Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;	3. Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan
4	Rendahnya SDM pengelola koperasi;			4. anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat
5	Rendahnya kualitas dan kuantitas UMKM yang meliputi manajemen organisasi, tatalaksana			

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
	usaha, kelembagaan dan SDM;			
6	Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan IKM;			
7	Kurangnya pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan;			
11.	Urusan Kependudukan dan catatan Sipil			Kependudukan dan Keluarga Berencana
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan	1.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.	1. Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga
2	Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk	2.	Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	
12.	Urusan Ketenagakerjaan			Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja
1	Masih terbatasnya lapangan kerja	1.	Masih terbatasnya lapangan kerja,	1. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan dalam tiga tahun terakhir (2010-2013)
2	Daya saing dan kualitas tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar	2.	Masih terbatasnya ketersediaan lembaga peningkatan mutu dan	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
			keterampilan tenaga kerja;
		3.	Masih tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal
		4.	Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar
			2. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah;
13	Urusan Ketahanan Pangan		
1	Kapasitas sumber daya penyuluh;	1.	Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,
2	Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas;	2.	Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun
3	Rekrutmen tenaga penyuluh PNS;		
4	Kurangnya dukungan sarana & prasarana (peralatan) bagi penyuluh pertanian, perikanan dan ketuhanan;		
5	Dukungan lahan bagi penyuluh di dalam rangka penerapan paket teknologi tepat guna;		

No	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	Isu Strategis			
		RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019	
6	Konsumsi pangan masyarakat masih bertumpu pada beras;				
7	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga masih kurang;				
8	Penanganan daerah rawan pangan masih sangat terbatas;				
9	Gapoktan sebagai pelaksana lembaga distribusi pangan masyarakat belum optimal;				
10	Kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum berfungsi secara optimal;				
11	Masih kurangnya penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;				
12	Masih kurangnya koordinasi dan monev dibidang pertanian,				

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
	perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;			
13	Kurangnya regulasi tentang upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;			
14	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1	Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.	Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
2	Masih adanya bentuk kekerasan , perlakuan salah pada anak dan perempuan	2.	Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak;	
		3.	Belum optimalnya penanganan anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah;	
		4.	Belum optimalnya upaya peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
		5. Tingginya bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah pada anak dan perempuan.	
15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
1	Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi	1. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;	
2	Potensi pertumbuhan jumlah penduduk cukup besar	2. Masih tingginya angka kelahiran	
		3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana	
16	Urusan Perhubungan		
1	Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal;	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;	1. Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
2	Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari	2. Masih rendahnya sarana dan prasarana transportasi massal	2. Pembangunan transportasi massal perkotaan

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
	sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan;			
		3.	Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi	
		4.	Jaringan lalu lintas angkutan jalan belum terintegrasi antar moda yang mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang.	
17	Urusan Komunikasi dan Informasi			
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal;	1.	Belum optimalnya implementasi e-government;	
		2.	Masih terbatasnya jangkauan jaringan internet	
		3.	Belum optimalnya penyediaan pusat informasi desa	
18	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian			Bidang Aparatur
1	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;	1.	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018	RPJMN 2015-2019
2	Kurangnya peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan;	2. Kompetensi aparatur sipil negara masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil	2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3	Kurangnya efektifitas kerjasama dengan pemerintah daerah;	3. OPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;	3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
4	Kurangnya sosialisasi pemberdayaan masyarakat;	4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi keuangan daerah;	4. Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
5	Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment sering menimbulkan bias yang disebabkan pengkotakan pelaksanaan program;	5. Belum optimalnya penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan;	5. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
6	Kurangnya pembinaan kepada pengurus FPK dan FKUB;	6. Belum optimalnya dukungan infrastruktur pelaksanaan reformasi birokrasi;	
7	Kurangnya pembinaan kepada pengurus FPK dan FKUB;	7. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik;	
8	Belum tersedia data rupabumi desa/kelurahan dan kecamatan dalam	8. Penataan kelembagaan instansi Pemerintah yang mencakup	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018	RPJMN 2015-2019
	wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;		penataan fungsi dan struktur organisasinya
9	peta rawan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang;	9.	Pengembangan dan penerapan E-Government masih terbatas
10	Belum adanya peraturan pelimpahan kewenangan dan pelayanan terpadu kepada camat;	10	Pengalokasian pegawai pada setiap OPD belum merata dan belum disesuaikan dengan kompetensi aparatur
11	Rendahnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa;		
12	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;		
13	Rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;		
14	Kualitas penyusunan LKPJ bupati masih rendah		
15	Kualitas LPPD dan I-LPPD belum optimal setiap tahunnya;		
16	Rendahnya kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai		

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
	(distribusi yang tidak proporsional sesuai beban kerja dan kelangkaan tenaga untuk job tertentu seperti dokter umum dan dokter spesialis, dll);		
17	Rendahnya kualitas sistem rekrutmen pegawai (sistem rekrutmen pegawai belum menjamin seleksi yang objektif, transparan dan bebas KKN);		
18	Rendahnya kualitas pembinaan disiplin pegawai (jumlah pelanggaran disiplin pegawai masih tinggi termasuk rendahnya kesadaran pegawai menepati ketentuan jam masuk kerja);		
19	Rendahnya jumlah PNS yang berlatar pendidikan Formal S.1, S-2 dan S-3 (Pasca Sarjana);		
19	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013-2018	RPJMN 2015-2019
1	Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan serta tata kelola pemerintahan	1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.	1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah
2	Perlunya penyiapan kelembagaan di Desa/Kelurahan yang mandiri sebagai bentuk antisipasi berakhirnya program PNPM.	2. Terbatasnya akses masyarakat akan informasi, sarana, modal, dan pasar;	
20	Urusan Kebudayaan		Kebudayaan
1	Minimnya sumber daya manusia khususnya tenaga yang ahli dalam pelestarian warisan budaya	1. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;	1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam pelestarian warisan budaya		2. Pelestarian warisan budaya
		2. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;	3. Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
		3. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya;	

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019
		4.	Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;	
		5.	Terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan local.	
21	Urusan Statistik			Data dan Informasi Statistik
1	Keterlambatan publikasi data statistik	1.	Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.	1. Kurangnya jumlah SDM statistik yang professional
		2.	Belum terintegrasinya data dan informasi antar sektor	
22	Urusan Kearsipan			
1	Belum memadainya sumberdaya kearsipan	1.	Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan.	
2	Belum memadainya sarana prasarana kearsipan	2.	Masih rendahnya penanganan arsip statis dan dinamis	
		3.	Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;	
		4.	Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal;	
		5.	Belum sinergi pengelolaan kearsipan	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
		antar tingkatan pemerintah.	
23	Urusan Perpustakaan		Perpustakaan
1	Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana prasarana perpustakaan	1. Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana prasarana perpustakaan;	1. Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
2	Masih rendahnya minat baca masyarakat	2. Masih rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak sekolah;	
3	Pengelolaan Perpustakaan yang belum optimal	3. Pengelolaan perpustakaan yang belum professional;	
4	Bahan bacaan perpustakaan yang masih minim	4. Ketersediaan bahan bacaan perpustakaan yang masih minim.	
24	Urusan Perencanaan Pembangunan		Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
1	Rendah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan lemahnya pembinaan terhadap lembaga masyarakat yang terkait dengan perencanaan pembangunan;	1. Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;	1. Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
2	Rendah kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah;	2. Masih rendahnya dukungan data dan informasi dalam mendukung kualitas	2. Sinergi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
			dokumen perencanaan daerah;
3	Rendahnya kualitas SDM Aparatur perencana.	3.	Masih rendahnya ketaatan OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Urusan Pilihan Pemerintah Daerah			
25	Urusan Kelautan dan Perikanan		
1	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan;	1.	Belum optimalnya penanganan kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya;
		2.	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kelautan, tata kelola kelautan dan keamanan laut;
2	Menurunnya populasi ikan di danau;	3.	Masih rendahnya penerapan regulasi terkait <i>illegal fishing</i> ;
3	Rendahnya produksi hasil perikanan tangkap;	3.	Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
		3.	Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasaran hasil perikanan/petambak garam;

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
		4. Implikasi penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan urusan perikanan dan kelautan dari kabupaten/kota ke provinsi belum terlaksana	4. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan
		5. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan	
26	Urusan Pertanian		
1	Masih ditemukannya pelanggaran penyaluran pupuk dan pesisida yang belum mengacu pada prinsip enam tepat;	1. Penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi pertanian, perkebunan, peternakan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas masih terbatas;	1. Pengembangan industri berbasis logistik; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung
2	Masih terjadinya fluktuasi/anjloknya harga hasil produksi pertanian;	2. Masih tingginya laju alih fungsi lahan pertanian;	
3	Lahan pertanian tanaman pangan mengalami degradasi dan penerapan teknologi tanaman pangan belum maksimal;	3. Masih tingginya biaya produksi dibanding dengan harga jual.	
4	Produksi dan produktivitas komoditi perkebunan masih rendah;	4. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi untuk pertanian	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
5	Infrastruktur jalan pertanian pada sentra-senta produksi masih relatif kurang;	5. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	
6	Masih terdapat lahan pertanian yang belum dikelola secara optimal;	6. Masih tingginya pemotongan ternak ruminansia betina produktif	
7	Teknologi mekanisasi pertanian belum seimbang pada semua subsistem agribisnis;		
8	Sumber daya lahan pertanian pangan semakin berkurang akibat alih fungsi lahan;		
9	Ketersediaan sarana produksi ditingkat usaha tani;		
10	Kurangnya modal petani dalam mengolah usahatani;		
11	Terbatasnya akses pemasaran dan permodalan serta rendahnya skala usaha ditingkat pelaku usaha agribisnis;		

No	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	Isu Strategis			
		RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019	
12	Tingginya kehilangan hasil dan rendahnya mutu beras yang dihasilkan;				
13	Rendahnya minat pelaku usaha pertanian mendaftarkan usahanya;				
14	pemasaran produk pertanian local Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal;				
15	Rendahnya pencatatan terhadap harga komoditi pertanian;				
15	Daya dukung infrastruktur irigasi tingkat usaha tani cenderung menurun terhadap peningkatan produksi				
27	Urusan Kehutanan				
		1.	Masih tingginya degradasi hutan dan lahan;	1.	Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan
		2.	Belum optimalnya penanganan konflik pemanfaatan kawasan hutan;	2.	Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS

No	Isu Strategis			
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019	
		3.	Belum optimalnya penanganan <i>illegal logging</i> ;	
		4.	Belum optimalnya penanganan lahan kritis	
28	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral			
		1.	Masih banyaknya penambangan tanpa ijin;	
		2.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan;	
		3.	Implikasi penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan urusan energi dan sumber daya mineral dari kabupaten/kota ke provinsi belum terlaksana	
29	Urusan Pariwisata		Peningkatan Pariwisata	
1	Rendahnya pengembangan objek wisata	1.	Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata;	1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata
2	Rendahnya kunjungan wisata	2.	Belum optimalnya kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW;	
		3.	Belum optimalnya kualitas SDM petugas	

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
			dan pelaku usaha pariwisata;
		4.	Masih rendahnya keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata;
		5.	Masih rendahnya upaya promosi ODTW;
		6.	Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ODTW
30	Urusan Industri		Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan
1	Belum optimalnya sentra industri kecil;	1.	Masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM;
		2.	Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata;
		3.	Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha
31	Urusan Perdagangan		Mendorong Perdagangan Dalam Negeri

No	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	Isu Strategis			
		RPJMD Provinsi 2013- 2018		RPJMN 2015-2019	
1	Masih rendahnya perlindungan konsumen , tata niaga serta tingkat efisiensi perdagangan dalam negeri	1.	Rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun global;	1.	Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi;
		2.	Belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis;	2.	Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri;
		3.	Kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional	3.	Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik;
				4.	Belum optimalnya upaya perlindungan konsumen
				Peningkatan Daya Saing Ekspor	
				1.	Sebagian besar ekspor merupakan komoditas primer;
				2.	Masih rendahnya tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor;
				3.	Masih rendahnya daya saing ekspor jasa;
				4.	Meningkatnya hambatan non tarif;
				5.	Fasilitasi ekspor yang belum optimal

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kab. Sidrap 2014-2018	RPJMD Provinsi 2013- 2018	RPJMN 2015-2019
32	Urusan Ketransmigrasian		Kawasan Transmigrasi
1	Terpusatnya mobilitas penduduk di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan, sehingga terjadi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang potensial.	1. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, fasilitasi penyediaan dan sertifikasi bidang tanah pada lokasi-lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
		2. Masih kurangnya keterpaduan penanganan kawasan transmigrasi	2. Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Secara sederhana, VISI adalah suatu gambaran kondisi ideal yang diinginkan atau yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan MISI adalah cara atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan tersebut. Oleh karena itu Visi dan Misi memiliki dimensi jangka waktu tertentu dan berorientasi masa depan.

Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Dalam Perda itu periodisasi perencanaan jangka menengah dibagi dalam empat tahapan yaitu; Tahap Pertama Tahun 2005-2009, Tahap Ke dua 2010-2014, tahap ke tiga Tahun 2015-2019, dan tahapan ke empat tahun 2020-2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Periode Masa Jabatan Bupati Tahun 2013-2018 berada dalam tahapan masa pembangunan jangka menengah ke tiga.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 adalah;

“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI SALAH SATU KABUPATEN TERKEMUKA DI INDONESIA TIMUR TAHUN 2025”

dengan Tiga Keunggulan Yaitu ;

1. SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS,
2. SEBAGAI WILAYAH YANG MANDIRI,
3. MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN RELIGIUS.

Sebagai Pusat Pengembangan Agri Bisnis: mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di sulawesi selatan. Mencakup empat kegiatan utama yaitu Aspek Produksi, Pengolahan, Pemasaran dan Jasa-jasa.

Sebagai wilayah yang mandiri: mengandung makna Kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui interkoneksi antar dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi, maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infra

struktur, pembiayaan pembangunan, dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.

Masyarakat yang berbudaya dan religius: dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan pada nilai nilai budaya dan agama.

Visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD, harus searah dengan Visi jangka panjang tersebut. Oleh karena itu substansi utama dari visi Kepala daerah dan Wakil kepala daerah harus dijabarkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar visi yang telah disampaikan dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kaidah sistem perencanaan pembangunan sekaligus searah dengan visi jangka panjang daerah.

Dalam konteks tersebut, Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut ;

“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.”

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu ;

MAJU: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural ke arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat. Didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan Ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktifitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TERKEMUKA: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah

yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. Tidak hanya pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. Berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan.

RELIGIUS: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaen Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

B. Misi

Misi disusun untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada. Adapun rumusan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 beserta penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 5. 1 keterkaitan Visi dan Misi Kepala daerah

VISI	MISI
<p style="text-align: center;">TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT</p>	<p>Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan</p>
	<p>Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM</p>
	<p>Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan</p>
	<p>Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah</p>
	<p>Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif</p>
	<p>Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.</p>

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan.

Sektor Pertanian merupakan tulang punggung Perekonomian Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Rata-rata 48 s/d 50 persen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari Sektor Pertanian. Oleh karena itu maka sektor pertanian menjadi kunci utama pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi ini terkait dengan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian baik melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi maupun Diversifikasi produk pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Diharapkan terjadi

keterpaduan dalam pengelolaan usaha tani, Terpadu dalam pengertian ada integrasi mulai dari Hulu dan Hilir terpadu antara sub sektor sehingga tercipta modal pertanian Zero Waste (tanpa limbah) karena limbah yang dihasilkan oleh sub sektor tertentu misal jerami dari usaha tani padi akan dimanfaatkan secara optimal sebagai input produksi sebagai pakan pada sub sektor usaha peternakan sapi, jagung menjadi produk utama menyisahkan batang dan daun untuk hijauan ternak sapi. Kotoran sapi dan ayam sebagai limbah ternak, menjadi pupuk organik untuk usaha tani tanaman pangan, dan perkebunan, dan seterusnya. Misi ini mencakup segala upaya dilakukan untuk membina para petani sehingga dari waktu ke waktu dalam mengelola usaha taninya, menggunakan teknologi pertanian mutakhir, berorientasi pasar dan menggunakan manajemen yang baik. Selanjutnya mencakup pula upaya yang dilakukan untuk mendorong implementasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha tani, berkembangnya pertanian organik dan upaya-upaya mempertahankan serta meningkatkan tingkat kesuburan lahan, kelestarian sumber daya air dan daya dukung lingkungan.

2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Memproduksi bahan mentah tidak memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, karena nilai tambah sektor industri pengolahan dan jasa lebih tinggi daripada sektor produksi bahan mentah, maka untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi harus didorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan jasa berbasis produk pertanian dan sumber daya lokal. Oleh karena itu, maka misi ini menggambarkan upaya implementasi sistem petik, olah dan jual. Memfasilitasi tumbuhnya usaha-usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah yang mengolah hasil produksi pertanian dan sumber daya lokal yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah secara maksimal, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, menciptakan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan.

3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.

Tersedianya sumber daya alam efektif dan efisien, sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang sehat secara fisik, cerdas, dan terampil serta mempunyai kualitas spiritual yang kuat, upaya ini searah dengan upaya menghadirkan Perguruan Tinggi Negeri berbasis Pertanian (Akademi Komunitas). Upaya pembinaan kehidupan keagamaan dan fasilitasi terciptanya hubungan antar umat beragama yang Harmonis.

4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.

Searah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infra struktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai sehingga memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Infra Struktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. Efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas.

5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif

Salah satu prosyarat untuk dapat melaksanakan Program-program Pembangunan adalah Keamanan dan Ketertiban yang terkendali. Oleh karena itu misi ini mencakup seluruh upaya yang akan ditempuh untuk menghadirkan kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali di tengah-tengah masyarakat. Menekan angka kriminalitas dan meminimalisir potensi konflik yang ada.

6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Tugas utama pemerintah adalah melayani dan memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Misi ini menggambarkan segala upaya yang dilakukan untuk menghadirkan Kinerja Pemerintah yang mampu menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam merumuskan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, salah satu referensi utama adalah RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 2 Kesesuaian Misi RPJPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

MISI RPJMD 2014-2018	MISI RPJPD 2005-2025
----------------------	----------------------

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM	Mengembangkan sistem agrobisnis.
Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan	Membangun kehidupan Sosial Budaya
Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah	Membangun kemandirian masyarakat.
Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Mengaktualisasikan nilai-nilai agama.
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.	Membangun pemerintahan yang baik.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan daerah secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau dapat dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran 3 halaman 50 tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran itu berada pada Tataran Dampak (Impact) yang dipahami sebagai hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari Pencapaian Outcome (Hasil), Atau dapat juga diungkapkan sebagai “Apa yang ingin diubah”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Meningkatkan produksi sektor pertanian secara umum.1	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan.1
		Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.2
	Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.2	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir.3
		Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sup sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.4
	Mengembangkan Modernisasi Pertanian.3	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir.5
		Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani.6
		Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar.7
	Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.4	Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif.8
		Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.9
		Meningkatnya kelestarian sumber daya air.10
		Berkembangnya produk pertanian organik.11
Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM	Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur perekonomian daerah.5	Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian.12
		Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur perekonomian daerah.13
	Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.6	Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif.14
		Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM berbasis pertanian.15
		Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.16
	Meningkatkan daya saing daerah.7	Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.17
		Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.18
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.19
		Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan klaster

Misi	Tujuan	Sasaran	
		unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas.20	
Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.8	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit.21	
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.22	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi.23	
		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.24	
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk.25	
	Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.9	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat.26	
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.27	
		Berkembangnya pendidikan tinggi.28	
		Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya.29	
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama.10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat.30	
		Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.31	
	Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur.11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh.32
			Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah.33
Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai.34			
Meningkatnya ketersediaan infra struktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas.35			
Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin.36			
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah.37			
Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai.38			
Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.39			

Misi	Tujuan	Sasaran
Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas.12	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat
		berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.40
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.	Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.13	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi.41
		Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan.42
		Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.43
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.44
	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat.14	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat.45
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.46
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.15	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.47
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.48
	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.16	Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.49
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.50

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu target kinerja dalam jangka 5 (lima) Tahun. Metodologi itulah yang disebut sebagai strategi.

6.1 Strategi

Strategi adalah rumusan pernyataan yang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan rangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) Pembangunan Daerah, hal ini sangat penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan apakah suatu strategi dianggap berhasil atau gagal. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi sekaligus membiasakan budaya berpikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua (2), yaitu; (1) **Perencanaan Strategik** yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. (2) **Perencanaan Operasional** yaitu Perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan strategik sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Agar suatu rumusan strategik dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi tersebut minimal memiliki empat perspektif, yaitu:

- 1) **Perspektif masyarakat/layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.

- 2) **Perspektif proses internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*).
- 3) **Perspektif kelembagaan:** strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
- 4) **Perspektif keuangan:** strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi :			
Terwujudnya Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Reigius dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat			
Misi I :			
Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Berbasis Sistem Pertanian Terpadu, Modern dan Berkelanjutan.			
1	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian secara umum	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan.	Penguatan Dukungan Ketersediaan Sarana Produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas.
		Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.	
2	Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir.	Penguatan Kerjasama antara stakeholder usaha tani untuk saling mendukung dan bertukar informasi
		Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sub sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.	
3	Mengembangkan Modernisasi Pertanian.	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir.	Penguatan kapasitas dan peran lembaga penyuluhan pertanian
		Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani.	
		Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar.	
4	Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.	Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif.	Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Pencetakan Sawah Baru.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Terkendalinya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.	Pengendalian Penggunaan Input Produksi dari Bahan Kimia yang berlebihan
		Meningkatnya kelestarian sumber daya air.	Peningkatan Kualitas Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air secara Efektif dan Efisien.
		Berkembangnya produk pertanian organik.	Pengembangan Demplot Produk Pertanian Organik.
Misi II :			
Mewujudkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM			
1	Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur perekonomian daerah.	Meningkatnya nilai produksi asing-masing sektor perekonomian.	Penguatan dukungan Infrastruktur dan Regulasi serta terciptanya Aglomerasi dalam Produksi dan Pemasaran
		Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur perekonomian daerah.	
2	Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.	Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif.	Peningkatan Jumlah UMKM Baru dan Peningkatan Kapasitas UMKM yang telah ada.
		Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM berbasis pertanian.	Penguatan Dukungan akses Permodalan dan Pemasaran Produk-Produk UMKM

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.	
		Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.	
3	Meningkatkan daya saing daerah.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.	Penguatan dukungan layanan pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama Penelitian dan Pengembangan
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal.
		Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan kluster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas.	Penguatan Pengembangan Kluster Tanaman Pangan dan Ternak sapi Terintegrasi dengan Pengembangan Kawasan Strategis Kapet Pare-Pare.
Misi III :			
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi Berdasarkan Keimanan dan Ketakwaan			
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit.	Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.	Mendorong Keikutsertaan masyarakat dalam sistem Penjaminan Kesehatan Nasional

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi.	Peningkatan Kualitas Penanganan Komprehensif Usia 1000 Hari Pertama Kehidupan.
		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.	Penanaman nilai dan norma Pola Hidup Sehat serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kesehatan.
		Terkendalnya pertumbuhan penduduk.	Peningkatan Wawasan Pembangunan Berbasis Kependudukan.
2	Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat.	Pementasan Buta Huruf secara terpadu dan Peningkatan Minat Baca
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Gratis dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat
		Berkembangnya pendidikan tinggi.	Inisiasi Pendirian Akademi Komunitas dan dukungan Pembinaan Mahasiswa Tahun Kedua sebagai lanjutan dukungan Pemerintah Provinsi Pada Tahun Pertama.
		Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya.	Pengembangan Prestasi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya termasuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat.	Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan dalam Pembinaan Umat Beragama
		Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.	Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Tokoh Agama dalam Pemeliharaan Situasi Kondusif bagi Kehidupan Beragama
Misi IV :			
Pengembangan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Memperlancar Aksesibilitas Antar Wilayah			
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infra struktur.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh	Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jemnbatan Berbasis Akses Wilayah antar desa/kelurahan dan Kecamatan, termasuk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh.
		Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam rangka mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Hubungan antar wilayah di Luar kabupaten Sidenreng Rappang
		Tersedianya layanan dan akses informasi serta komunikasi yang memadai	Peningkatan Jaringan Komunikasi bagi masyarakat dan Perusahaan Telekomunikasi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya ketersediaan infra struktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas	Percepatan Dukungan Jangkauan Infrastruktur Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih yang berkualitas.
		Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin	Peningkatan dukungan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Miskin
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah	Penguatan Keterpaduan Hulus Hilir dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Irigasi.
		Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai	Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral.
		Tersedianya infra struktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Penguatan Koordiansi dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Lain serta partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana.
Misi V : Memantapkan Iklim Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Kondusif			
1	Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas.	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat.	Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.	
Misi VI : Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan Kebijakan yang <i>pro gender, pro poor, pro job</i> dan <i>pro environment</i>.			
1	Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang <i>pro gender, pro poor, pro job</i> dan <i>pro environment</i>	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan	Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur
		Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Penataan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai Penguatan Sistem Monitoring dan Pengawasan Internal
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	Penataan dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
2	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat.	Penguatan Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kerangka Otonomi Desa.
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.	Penguatan Koordinasi antar Instansi penegak Hukum dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Hukum dan Norma Sosial
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.	Meningkatkan Pembinaan Partai Politik dan Pengembangan Kondisi yang lebih Kondusif untuk Kualitas Kehidupan Demokrasi
4	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.	Mengarusutamakan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.	

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD berkenaan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan sesuai dengan waktu atau tahun perencanaan yang dimaksud dalam tahapan RPJMD. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tentu akan tetap dilanjutkan dan mendapat perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Kesinambungan dari satu periode ke periode tahun berikutnya harus terjaga dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD, walaupun prioritas penekanan kebijakan pada setiap tahun atau tahapan berbeda-beda. Program-program operasional SKPD yang dimaksudkan untuk memenuhi penyelenggaraan semua urusan pemerintahan tetap berjalan dengan penekanan prioritas yang lebih rendah. Disamping itu arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat meraih dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun ke tahun.

Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2014:

Tahun 2014 adalah masa transisi dari periode RPJMD sebelumnya, oleh karena itu fokus pertama adalah melanjutkan pencapaian target periode RPJMD sebelumnya. Kemudian kedua, meletakkan dasar-dasar yang kokoh untuk menjalankan fokus pembangunan RPJMD periode saat ini. Kebijakan pembangunan pada tahun 2014 diarahkan pada:

- 1) Pembangunan infrastruktur wilayah
 - a) Peningkatan jalan dan jembatan
 - b) Pemeliharaan jalan dan jembatan
 - c) Percepatan pembangunan sanitasi dan air bersih
 - d) Penataan kondisi dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah
- 2) Pembangunan ekonomi kerakyatan:

- a) Peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan
 - b) Peningkatan produksi/populasi ternak, khususnya unggas dan sapi
 - c) Peningkatan produksi perikanan
 - d) Pembinaan dan pengembangan UMKM
 - e) Penguatan penyuluhan dan pengembangan penerapan teknologi pertanian
 - f) Peningkatan kemandirian penyediaan benih unggul secara mandiri
 - g) Perlindungan lahan pangan berkelanjutan
 - h) Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan masyarakat
- 3) Pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan
- a) Melanjutkan pemberian bantuan SPP gratis untuk tahun kedua kepada mahasiswa yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan gratis
 - c) Pengembangan organisasi, kegiatan olahraga dan kepemudaan
- 4) Pembangunan Bidang Kesehatan
- a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis
 - b) Penguatan jaminan kesehatan masyarakat
 - c) Penguatan upaya kesehatan promotif dan preventif
 - d) Pengembangan Puskesmas dan Poskesdes
 - e) Penanganan komprehensif Ibu dan Anak Seribu Hari Pertama kehidupan
 - f) Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
 - g) Peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan
- 5) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi:
- a) Penegakan hukum dan norma sosial
 - b) Dukungan penyelenggaraan Pemilu
 - c) Pembinaan Partai Politik
 - d) Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak

- e) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan
- 6) Penanggulangan Kemiskinan:
 - a) Peningkatan partisipasi masyarakat
 - b) Pembukaan lapangan kerja baru
 - c) Penguatan kapasitas lembaga ekonomi pedesaan
 - d) Pemetaan kondisi dan potensi masyarakat miskin
- 7) Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015

Pada tahun 2015 merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga pembangunan diarahkan untuk penguatan dasar-dasar yang telah dimulai pada tahun sebelumnya, melanjutkan hasil yang telah dicapai, serta melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi di tingkat pusat dan propinsi.

- 1) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan Kecamatan
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - c) Peningkatan kapasitas terminal angkutan darat
 - d) Perintisan kawasan industri terpadu
 - e) Pengembangan jaringan informasi dan perhubungan
 - f) Pengembangan kawasan cepat tumbuh
 - g) Peningkatan kawasan perkotaan, pengembangan permukiman dan perumahan
 - h) Perintisan pembangunan bendung baru (Bendung Boya) dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi
 - i) Pendayagunaan sumber-sumber energi terbarukan
 - j) Peningkatan kualitas kawasan hutan
 - k) Peningkatan kapasitas penanganan bencana

- 2) Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan
- 3) Melanjutkan Dan Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Kebudayaan
- 4) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan:
 - a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis pemberdayaan perempuan dan potensi/keunggulan lokal.
 - b) Peningkatan dan pengembangan UMKM
 - c) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - d) Penguatan pengembangan populasi ternak sapi sebagai ikon komoditi unggulan ketiga setelah beras dan telur
 - e) Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul.
 - f) Mendorong pengembangan produk pertanian organik.
- 5) Pembinaan dan Pengentasan Kemiskinan
 - a) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif
 - b) Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran
 - c) Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah sosial.
- 6) Penguatan Sruktur Perekonomian Daerah
 - a) Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan jasa berbasis produk pertama
 - b) Pengembangan sistem pelayanan investasi dan perizinan yang efektif dan efisien.
- 7) Peningkatan Kelestarian dan Penanggulangan Dampak Lingkungan
- 8) Reformasi Birokrasi dan Penguatan *Good Governance*
- 9) Pemantapan Kehidupan Beragama

c. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2016

Pada tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang diasumsikan bahwa dasar seluruh program prioritas sudah cukup memadai sebagai pondasi dalam melanjutkan program-program yang signifikan terhadap pencapaian sasaran jangka menengah, sekaligus mampu merespon dinamika lingkungan eksternal dan internal. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada :

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
- 3) Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
- 4) Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
- 5) Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
- 6) Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik
- 8) Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

d. Arah Kebijakan pembangunan Tahun 2017

Pada tahun 2017, kebijakan pembangunan akan lebih diarahkan untuk percepatan pencapaian target-target sasaran yang realisasinya relatif tertinggal dan berpotensi tidak tercapai di akhir periode RPJMD 2014-2018. Pada periode prioritas berjalan diarahkan pada :

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Melanjutkan penguatan ekonomi kerakyatan
- 3) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
- 4) Pemantapan kondisi kawasan industri
- 5) Pengembangan sistem pertanian modern, terpadu, dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, kebudayaan dan pembangunan kesehatan.
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

e. Arah kebijakan pembangunan tahun 2018

Tahun 2018 adalah akhir masa jabatan Bupati sekaligus akhir masa RPJMD periode 2014-2018 sehingga disamping melanjutkan percepatan pencapaian target sasaran yang belum tercapai, kebijakan terkait dengan ketertiban dan demokrasi menjadi perhatian serius. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2018 adalah :

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Pengembangan dan pengaturan ekonomi kerakyatan
- 3) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
- 4) Penguatan kinerja sektor industri, pengolahan dan jasa berbasis pertanian
- 5) Penguatan implementasi sistem pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, dan pembangunan kesehatan.
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
Visi :								
Terwujudnya Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Reigius dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat								
Misi I :								
Meningkatkan Produktivitas dan nilai tambah sektor Pertanian Berbasis Sistem Pertanian Terpadu, Modern dan Berkelanjutan.								
1	Meningkatkan produksi sektor pertanian secara umum	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan.	Penguatan Dukungan Ketersediaan Sarana Produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas.	Peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, populasi ternak, dan produksi perikanan	Peningkatan produksi dan prduktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.	Pengembangan sistem pertanian terpadu, dan berkelanjutan	Penguatan implementasi sistem pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan
		Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.			Penguatan pengembangan populasi ternak sapi sebagai ikon komoditi unggulan ketiga setelah beras dan telur			
2	Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir.	Penguatan Kerjasama antara stakeholder usaha tani untuk saling mendukung dan bertukar informasi		Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul.			
		Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sub sektor Pertanian,			Mendorong pengembangan produk			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.			pertanian organik.			
3	Mengembangkan Modernisasi Pertanian.	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir.	Penguatan kapasitas dan peran lembaga penyuluhan pertanian	Penguatan Penyuluhan dan Pengembangan Penerapan teknologi pertanian				
		Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani.						
		Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar.						
4	Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.	Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif.	Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Pencetakan Sawah Baru.	Peningkatan Kemandirian Penyediaan benih unggul secara mandiri				
		Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.	Pengendalian Penggunaan Input Produksi dari Bahan Kimia yang berlebihan	Perlindungan lahan pangan berkelanjutan				
		Meningkatnya kelestarian sumber daya air.	Peningkatan Kualitas Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air secara Efektif dan Efisien.					

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		Berkembangnya produk pertanian organik.	Pengembangan Demplot Produk Pertanian Organik.	Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat				
Misi II :								
Mewujudkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Keunggulan Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM								
1	Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur perekonomian daerah.	Meningkatnya nilai produksi asing-masing sektor perekonomian.	Penguatan dukungan Infrastruktur dan Regulasi serta terciptanya Aglomerasi dalam Produksi dan Pemasaran	Pembinaan dan Pengembangan UMKM	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis pemberdayaan perempuan dan potensi/keunggulan lokal.	Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan	Melanjutkan penguatan ekonomi kerakyatan	Pengembangan dan pengaturan ekonomi kerakyatan
		Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur perekonomian daerah.			Peningkatan dan pengembangan UMKM	Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran	Pemantapan kondisi kawasan industri	Penguatan kinerja sektor industri, pengolahan dan jasa berbasis pertanian
2	Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi dan UMKM.	Meningkatnya jumlah UMKM, koperasi aktif dan produktif.	Peningkatan Jumlah UMKM Baru, koperasi aktif dan Peningkatan Kapasitas UMKM, koperasi yang telah ada.		Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM dan koperasi berbasis pertanian	Penguatan Dukungan akses Permodalan dan Pemasaran Produk-Produk UMKM					
		Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.						
		Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.						
3	Meningkatkan daya saing daerah.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.	Penguatan dukungan layanan pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama Penelitian dan Pengembangan					
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal.					

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan klaster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas.	Penguatan Pengembangan Kluster Tanaman Pangan dan Ternak sapi Terintegrasi dengan Pengembangan Kawasan Strategis Kapet Pare-Pare.					
Misi III :								
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi Berdasarkan Keimanan dan Ketakwaan								
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit.	Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bidang kesehatan	Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan	Pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, kebudayaan dan pembangunan kesehatan.	Pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan kebudayaan, dan pembangunan kesehatan
		Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.	Mendorong Keikutsertaan masyarakat dalam sistem Penjaminan Kesehatan Nasional	Penguatan jaminan kesehatan masyarakat	Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan kebudayaan			
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi.	Peningkatan Kualitas Penanganan Komprehensif Usia	Penguatan upaya kesehatan promotif dan preventif				

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
			1000 Hari Pertama Kehidupan.					
		Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.	Penanaman nilai dan norma Pola Hidup Sehat serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Kesehatan.	Pengembangan Puskesmas dan Poskesdes				
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk.	Peningkatan Wawasan Pembangunan Berbasis Kependudukan.	Penanganan komprehensif Ibu dan Anak Seribu Hari Pertama kehidupan				
				Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera				
				Peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan				
2	Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat.	Pementasan Buta Huruf secara terpadu dan Peningkatan Minat Baca					
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan	Melanjutkan pemberian bantuan SPP				

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		wajib belajar 12 tahun.	Pendidikan Gratis dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat	gratis untuk tahun kedua kepada mahasiswa yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				
		Berkembangnya pendidikan tinggi.	Inisiasi Pendirian Akademi Komunitas dan dukungan Pembinaan Mahasiswa Tahun Kedua sebagai lanjutan dukungan Pemerintah Provinsi Pada Tahun Pertama.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan gratis				
		Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya.	Pengembangan Prestasi Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya termasuk Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pengembangan organisasi, kegiatan olahraga dan kepemudaan				
3	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat.	Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan dalam Pembinaan Umat Beragama					

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
	dan antar umat beragama.							
		Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.	Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Tokoh Agama dalam Pemeliharaan Situasi Kondusif bagi Kehidupan Beragama					
Misi IV :								
Pengembangan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi Untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan Memperlancar Aksesibilitas Antar Wilayah								
1	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infra struktur.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh	Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Berbasis Akses Wilayah antar desa/kelurahan dan Kecamatan, termasuk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh.	Peningkatan jalan dan jembatan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan Kecamatan	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah	Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah
		Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam rangka	Pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis		

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
			mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Hubungan antar wilayah di Luar kabupaten Sidenreng Rappang					
		Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai	Peningkatan Jaringan Komunikasi bagi masyarakat dan Perusahaan Telekomunikasi	Percepatan pembangunan sanitasi dan air bersih	Peningkatan kapasitas terminal angkutan darat			
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas	Percepatan Dukungan Jangkauan Infrastruktur Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih yang berkualitas.	Penataan kondisi dan kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah	Perintisan kawasan industri terpadu			
		Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin	Peningkatan dukungan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Miskin		Pengembangan jaringan informasi dan perhubungan			
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta	Penguatan Keterpaduan Hulus Hilir dalam Pengelolaan		Pengembangan kawasan cepat tumbuh			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		pemanfaatan air tanah	Sumber Daya Air serta Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Irigasi.					
		Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai	Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral.		Peningkatan kawasan perkotaan, pengembangan permukiman dan perumahan			
		Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Penguatan Koordiansi dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Lain serta partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana.		Perintisan pembangunan bendung baru (Bendung Boya), dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi			
					Pendayagunaan sumber-sumber energi terbarukan			
					Peningkatan kualitas kawasan hutan			
					Peningkatan kapasitas penanganan bencana			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
Misi V : Memantapkan Iklim Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.								
1	Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas.	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat.	Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman	Penegakan hukum dan norma sosial	Pemantapan kehidupan beragama	Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi	Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi	Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
		Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.		Dukungan penyelenggaraan Pemilu				
				Pembinaan Partai Politik				
				Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak				
				Pemeliharaan ketertiban dan keamanan				
Misi VI : Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan Kebijakan yang Pro Gender, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment.								
1	Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan	Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat miskin untuk	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
	Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment	kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi			mampu melakukan kegiatan-kegiatan produktif	pemerintahan yang baik.	pemerintahan yang baik.	pemerintahan yang baik.
		Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan	Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur	Pembukaan lapangan kerja baru	Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah sosial.			
		Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Penataan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai Penguatan Sistem Monitoring dan Pengawasan Internal	Penguatan kapasitas lembaga ekonomi pedesaan	Pengembangan system pelayanan investasi dan perizinan yang efektif dan efisien			
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan	Penataan dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender	Pemetaan kondisi dan potensi masyarakat miskin	Peningkatan kelestarian dan penanggulangan dampak lingkungan			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
		masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan					
2	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat.	Penguatan Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.		Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance			
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kerangka Otonomi Desa.					
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.	Penguatan Koordinasi antar Instansi penegak Hukum dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Hukum dan Norma Sosial					
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.	Meningkatkan Pembinaan Partai Politik dan Pengembangan Kondisi yang lebih					

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2014	2015	2016	2017	2018
			Kondisif untuk Kualitas Kehidupan Demokrasi					
4	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.	Mengarusutamakan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan					
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.						

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum merupakan pondasi perencanaan yang menjadi rujukan dalam menyusun program-program yang secara langsung mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Sehingga perumusan kebijakan menjadi sangat penting untuk diperhatikan secara komprehensif. Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah.

Program prioritas dirumuskan sesuai dengan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun janji kampanye Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yaitu, duabelas (12) prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2013-2018, meliputi:

1. Gratis SPP 1 Tahun Bagi Mahasiswa Baru;
2. Bantuan 1.000 Hand Tractor;
3. Pembangunan 200Km Jalan Usaha Tani ;
4. Menciptakan 15.000 lapangan kerja baru ;
5. Menciptakan 10.000 Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Baru ;
6. Melanjutkan Pendidikan Gratis dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat SMA;
7. Melanjutkan Kesehatan Gratis;
8. Peningkatan Insentif bagi muballigh, Imam Masjid & Pegawai Syara, Guru Mengaji & Umroh Gratis bagi para Imam Masjid ;
9. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah ;
10. Program pengembangan kawasan strategis ;
11. Program pengelolaan sumber daya air & peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
12. Pendirian perguruan tinggi negeri;

Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan. Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra).

Program-program pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2014-2018 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing Arah kebijakan. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2018 Kabupaten Sidenreng Rappang ditampilkan pada tabel berikut ini:

MISI 1 :
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH SEKTOR PERTANIAN BERBASIS SISTEM
PERTANIAN TERPADU, MODERN DAN BERKELANJUTAN

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan	Penguatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas	Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi meningkat sampai 5 % per tahun	Ton	461,617.00	589,200.00	587,982.51	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Produktivitas Padi	Ku/Ha	55,16	65,00	-		
					Produksi Jagung meningkat 2% per tahun	Ton	39,950.00	44,200.00	96,348.30		
					Produktivitas Jagung	Ku/Ha	39,85	40,45	-		
					Produksi Kedelai meningkat 1% / Tahun	Ton	595.00	65,50	65.57		
					Produksi Melon Meningkat 1% / Tahun (Ton)	Ton	843.00	48.10	48,10		
					Produksi Cabe Meningkat 1,5% / Tahun (Ton)	Ton	268.50	289.00	942		
					Produksi Kakao meningkat 3% / Tahun (Ton)	Ton	7.261,62	7.700,00	7.526,98		
					Produksi Jambu Mete meningkat 2% per tahun (Ton)	Ton	2,297.00	1.000.00	1,667.68		
					Produksi Cengkeh meningkat 5 % per tahun (ton)	Ton	510.38	651.00	702.04		
					Produksi Lada meningkat 3 % per tahun (Ton)	Ton	80.07	85	83.65		
					Berkembangnya pertanaman kelapa sawit	Ha	-	200	-		
					Kelompok plasma kebun karet	Klp	-	12	-		
					Kontribusi sektor pertanian (Tanaman makanan dan perkebunan terhadap PDRB)	%	40,53	41,5	-		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018				
					PERDA tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Buah	-	1 Perda 1 Perbup	1 Perda	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah klp tani yg mengakses permodalan	Klp	93	106	96	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Skala usaha	Klp/Org	0	15	-	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Cakupan wirausaha kelompok wanita tani, UMKM dan koperasi	Klp	-	54	-	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Jumlah BP3K yang mengikuti sosialisasi peningkatan produksi pertanian	BP3K	-	11	-	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Sarana dan prasarana	Hand Tractor (Unit)	4758	5758 = (1000)	411	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Mesin tanam (Unit)	2	42	64				
					Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan.	%	-	85	-	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
			Meningkatkan kualitas hasil produksi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Padi (Tingkat Kehilangan Hasil)	%	10%	8.71%	7,7 %	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
						Jagung (Tingkat Kehilangan Hasil)	%	7%	5.75%	5,8%	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
						Kualitas rendemen meningkat	%	53	57	59,4%	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Peningkatan Pemasaran hasil produksi	Promosi komoditi	Kali	0	4	-	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
				pertanian/perkebunan							
			Meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Sumber air tambahan untuk lahan areal sawah tadah hujan dan perkebunan	paket	22	102	-	Pekerjaan Umum	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
2	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan		Meningkatkan produksi sektor peternakan dan perikanan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan					Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi Sapi	Ekor	45.425	73.091	60.433	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi Kerbau	Ekor	2.569	3.329	3.004	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi Kuda	Ekor	1.072	1.138	579	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi Kambing	Ekor	11.271	15.083	13.489	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi ayam ras pedaging	Ekor	2.496.604	3.668.330	3.148.932	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi ayam buras	Ekor	1.517.236	2.282.474	1.886.342	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Populasi ayam ras petelur	Ekor	4.041.027	5.407.806	5.977.751	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
					Populasi Itik	Ekor	461.529	678.138	428.849	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Produksi daging sapi	Kg	706.677	750.094	880.595	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB:	Rp	579.021.060.000	871.898.560.000	766.871.670.000	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Konsumsi/kapita/tahun	Kg	2,54	2,70	3,17	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
			Mencegah perkembangan dan penularan penyakit ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	%	10	15	47,50	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
			Meningkatkan akses pemasaran	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah rumah potong hewan	Unit	1	9		Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Jumlah Kelompok Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Klp/org	1 Klp 30 org	11 klp	9 klp		Pertanian
			Meningkatkan produktifitas perikanan budi daya dan tangkap	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Ton	632,18	806,80	708,79	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton Ikan	2,768.3	3,562.0	3,219.9	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018				
					Konsumsi ikan	Kg	40.32	44.49	40.00	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Rp	10.621.454.000	13.556.080.000	-	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Cakupan bina kelompok nelayan	Klp	9,61	37,34		Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
					Cakupan Bina Kelompok Budidaya	Klp	40,9	68	10,17	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
				Mengembangkan teknologi peternakan	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Klp	1	4		Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
				Mengembangkan kawasan perikanan budi daya dan budi daya tangkap	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau dan Air Tawar	Jumlah ikan yang ditebar	Ekor	2.788,300	4.128.450	3.405.000	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
3	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir	Penguatan kerjasama antara stakeholder	Meningkatkan akses transportasi	Pembangunan jalan tani dan jembatan	Panjang jalan tani terbangun	meter	150.439	350.439	142.812	Pekerjaan Umum	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	
4	Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sub sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	usaha tani untuk saling mendukung dan bertukar informasi	Pengembangan kapasitas pelaku usaha tani	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan	paket	1	2	2	Kelautan dan Perikanan	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
5	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir	Penguatan kapasitas dan peran lembaga penyuluhan pertanian	Meningkatkan penerapan teknologi pertanian secara optimal	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan.	Kelompok	35	150		Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
6	Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani		Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah penyuluh yang ikut pelatihan dasar dan teknis	Orang		267	163	Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok		100	80		
7	Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar	Meningkatkan akses pemasaran	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Cakupan fasilitasi perumusan kebijakan	%	40%	100%		Pertanian	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Kelompok penangkaran benih padi	Kelompok	-	40		Pertanian
8	Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif	Pengendalian alih fungsi lahan dan pencetakan sawah baru	Mempertahankan daya dukung hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Terlaksananya penanaman/reboisasi pada kawasan hutan seluas 1.300 Ha	Ha	Masih terdapat lahan kritis	Lahan kritis sudah di rehabilitasi seluas 1.300 Ha			
9	Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan	Pengendalian penggunaan input produksi dari bahan kimia yang berlebihan	Mencegah kerusakan sumber daya alam	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Koordinasi dan rumusan kebijakan sumber daya alam	%	Tidak dilaksanakan tahun 2013	100		Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
10	Meningkatnya kelestarian sumber daya air	Peningkatan kualitas kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya air secara efektif dan efisien	Meningkatkan daya dukung sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Tersedianya Sumber Air Permukaan dan Air tanah dalam untuk kebutuhan pada Lahan sawah tadah hujan dan Perekbunan	Unit	22	102	98	Pekerjaan Umum	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
			Menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya air	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, jaringan pengairan lainnya	Cakupan pelayanan jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani	Ha	11.840	13.105	12.791	Pekerjaan Umum	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
11	Berkembangnya produk pertanian organik	Pengembangan demplot produk pertanian organik	Mendorong peningkatan produksi pertanian ramah lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup	%	0	100		Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Mendorong pengembangan produk pertanian organik	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Cakupan penggunaan pupuk organik	Ha	0	80 Ha		Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan
					Demplot produk pertanian organik	Ha/Klp	0	20 Ha/20 Klp		Pertanian	Dinas pertanian, ketahanan pangan & perikanan

MISI 2 :
MEWUJUDKAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAN KEUNGGULAN LOKAL
MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DAN UMKM

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
1	Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian	Penguatan dukungan infrastruktur dan regulasi serta terciptanya aglomerasi dalam produksi dan pemasaran	Menjamin perlindungan konsumen	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan perlindungan konsumen	Buah	6.456	34.769	14.404	Perdagangan	Dinas Perdagangan
					Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan	%	50	100		Perdagangan	Bagian Perekonomian dan Sumber daya alam
			Meningkatkan daya saing UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelaksanaan promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM	kegiatan	2	8	17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur PDRB		Mengembangkan infrastruktur pendukung	Program Penataan Struktur Industri	PERDA	perda	-	1 perda	-	Perindustrian	Dinas Perdagangan
					Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	1225	3106			
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan peningkatan pelaku industri	%	63	72	71,59	Perindustrian	Dinas Perdagangan
3.	Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif	Peningkatan jumlah UMKM baru dan	Meningkatkan produktifitas UMKM	Program Pembangunan	Cakupan jumlah IKM aktif dan produktif	%	32	49		Perindustrian	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
		peningkatan kapasitas UMKM yang telah ada		Industri Kecil dan menengah							
					Cakupan jumlah IKM baru					Perindustrian	
					Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,60	-	14,35	Perindustrian	
					Pertumbuhan industri					Perindustrian	
			Meningkatkan akses informasi	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan industri	%	-	100		Perindustrian	Dinas Perdagangan
4	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM dan koperasi berbasis pertanian	Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM	Mengembangkan kemampuan permodalan	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan layanan fasilitas pembiayaan UMKM	Unit usaha	1.706	1.931		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Jumlah UMKM yang mendapat layanan fasilitas pembiayaan	UMKM	1.706	225	80		
				Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif dari jum. Koperasi	%	48.7%	53.8%		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase koperasi aktif	%	46,8% dari 359 koperasi	52,76%	49,70%		
5	Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM	Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM	Mengembangkan produktifitas masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (New Inisiatif)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	29,52	82		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
6	Berkembangnya dukungan lembaga	Penguatan dukungan akses	Mengembangkan produktifitas	Program Pengembangan	Daya Saing UMKM	%	25 Unit Usaha	34.3%			Dinas Koperasi, UMKM,

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
	keuangan dan perbankan untuk UMKM	permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM	masyarakat miskin	Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perindustrian dan Perdagangan
					Pelaksanaan Promosi Pameran Dan Pengembangan Jaringan UMKM	kegiatan	2	8	8		
7	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Penguatan dukungan layanan pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama penelitian dan pengembangan	Mengembangkan produktifitas masyarakat miskin	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Sistem informasi PM & promosi	%	50	100		Penanaman Modal	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
					Terwujudnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	0	100		Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Koordinasi, perumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD	%	50	100		Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Jumlah dan nilai PMDN serta PMA (org dan IDR/dollar)	Miliar/Rp	1.879.04	1.674.94	274.94	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif	Iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	%	50	100		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
8	Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi 1500 AK	%	75	78,34	77	Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapatkan perlindungan hukum	%	50	100		Ketenagakerjaan	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA (2014 – 2016)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
					jumlah lembaga ketenagakerjaan yang mendapatkan perlindungan hukum	lembaga	25	50	50		
9	Terwujudnya kerja sama antar kabupaten / kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan klaster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas	Penguatan pengembangan kluster tanaman pangan dan ternak sapi terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis kapet pare-pare	Meningkatkan dukungan pengembangan kapet pare-pare sebagai kawasan strategis nasional	Program penelitian dan pengembangan potensi produk unggulan daerah	Meningkatnya informasi tentang potensi dan prospek pengembangan potensi produk unggulan daerah	unit	0	5		Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah

MISI 3 :
MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING
TINGGIBERDASARKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
1.	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit	Mendorong peningkatan kualitas pelayan rumah sakit	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase kepuasan pasien	%	71	90		Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RS Nene' Mallomo dan RS Arifin Nu'mang
					Cakupan SPM Kesehatan	%	70	95	90		
					Rumah Sakit lulus akreditasi	Terakreditasi	Versi 2012	Pratama	Pratama		
			Meningkatkan kapasitas pelayanan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase pasien rawat inap :	%	75	80			
					* BOR	%	52	80	70		
					* Av LOS	hari	4	6 - 9	6-9		
					* BTO	kali	45	40-50	40-50		
					* TOI	hari	4	1-3	2		
					* NDR	%	25	15	19		
					* GDR	%	39	30	28		
					Jumlah kunjungan RITL	pasien	6.493	7743	10.188		
					Jumlah kunjungan RJTL	pasien	23.316	24.566	35.879		
					Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20 jam (SPM RS)	%	10	60			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
2	Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat	Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	Program upaya kesehatan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	%	81,8	85	84	Kesehatan	RS. Arifin Nu'mang
					Pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas	%	16	100			Dinas Kesehatan, Penduduk dan Keluarga Berencana
					Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar (Akreditasi Puskesmas)	Puskesmas	0	14	7		Dinas Kesehatan, Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi	Peningkatan kualitas penanganan komprehensif usia 1000 hari pertama kehidupan	Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemantauan Status Gizi	%	80	100	17	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Kasus	4	3			
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Terpeliharanya kesehatan anak	%	16	80	10	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Balita	3	5			
				Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Terlaksananya penyuluhan	%	17	85	10	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu	Angka kematian ibu	4	11			
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat	Presentase Kematian Ibu, Bayi dan Anak	Kegiatan	14	-		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
4	Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan,	Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan	Pemerataan pembangunan kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang menggunakan air minum layak dan berkelanjutan	%	89	98	96	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018				
	dan kesehatan lingkungan	dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan	Perlindungan kesehatan makanan	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	terjaminnya keamanan makanan	%	-	80		Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat	%	80	85				
5	Terkendalnya pertumbuhan penduduk	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan	Penguatan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Program Keluarga Berencana	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Kab.Sidrap dari 2,44 ke 2,6 di tahun 2018	TFR	TFR : 2,44	TFR 2,25	TFR 2,35	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Rata-rata Jumlah anak per keluarga =2			10				
				Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB aktif	%	67.09%	80.00%	75.20%		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
6	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat	Pementasan buta huruf secara terpadu dan peningkatan minat baca	Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase Jumlah pengunjung perpustakaan	%	30	70	48	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
7	Meningkatnya akses dan mutu penyelenggara wajib belajar 12 tahun	Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan gratis dan pelibatan peran serta masyarakat	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru berkualifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan	%	83.00	100	93	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	43.00	55.00				

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
8	Berkembangnya pendidikan tinggi	Inisiasi pendirian akademik komunitas dan dukungan pembinaan mahasiswa tahun kedua sebagai lanjutan dukungan pemerintah	Mengembangkan akses pelayanan pendidikan	Program Layanan Pendidikan Tinggi (DIKTI)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta kualifikasi/kwalitas tenaga pendidik (Dosen) dan kependidikan yang berkompetensi	%	-	50	66,87		
9	Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya	Pengembangan prestasi pemuda, Olahraga dan seni budaya termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya	Peningkatan akses dan minat keolahragaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana olahraga	Lapangan	281	302	1.272	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Cakupan sarana dan prasarana olahraga efektif yang berfungsi	-	80	39	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
			Pelestarian kekayaan budaya local	Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pementasan tim kesenian	%	86	87	100	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	situs	4	13	2	Kebudayaan
			Peningkatan akses pariwisata	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan kunjungan wisata domestik dan mancanegara	%	55 (12.600org)	100 (25.000org)	16.210 org	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pemberdayaan kelompok pemuda	Peningkatan peran serta Pemuda	Cakupan anggota kelompok Paskibraka yang terpilih dan dilatih	%	40	100		Pemuda dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
					Cakupan pemuda yang dibina/ difasilitasi, dilatih	orang		10.000	4.730		
10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-	Peningkatan peran lembaga keagamaan dalam	Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan	Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Keagamaan	Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballigh, Tassbeh dan KIPRA	%	45	100		Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
	nilai ajaran agama dalam masyarakat	pembinaan umat beragama									
11	Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama	Penguatan kerja sama pemerintahan dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Menciptakan kaharmonisan umat beragama	Peningkatan pembinaan FKUB	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama		Tingkat kabupaten	Tingkat kabupaten		Urusan Wajib	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

MISI 4 :
**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERNILAI TAMBAH TINGGI UNTUK MENDORONG PERCEPATAN
 PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN MEMPERLANCAR AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan berbasis akses wilayah antar desa/kelurahan dan kecamatan termasuk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh.	Meningkatkan dan Memelihara Kualitas prasarana Jalan dan Jembatan serta prasarana pendukung	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	46,05	90,93	79,14	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
						%	81,57	98,19	92,15		
			Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Terlaksananya pembangunan Drainase/ Gorong- Gorong	%	70	94	80		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
				Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur jalan	%	29,87	32,18	31,42		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan	%	5,80	16,50	11,28		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan	%	24,26	35,00	32,57		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
2	Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam rangka mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Hubungan antar wilayah di Luar kabupaten Sidenreng Rappang	Meningkatkan dan membangun infrastruktur yang membuka akses antar wilayah	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan	%	16,70	23,50			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan,
					Panjang jalan lingkungan yang terbangun	Meter	14.300	13.640		Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
3	Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai	Peningkatan Jaringan Komunikasi bagi masyarakat dan Perusahaan Telekomunikasi	Mengembangkan akses layanan komunikasi dan informasi Membangun kerjasama dengan media massa Membangun prasarana informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Peningkatan perencanaan, pengawasan, monitoring & pelaporan	%	65	100		Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Jumlah kunjungan pengawasan, monitoring dan pelaporan Menara			990	594		
				Program kerjasama dengan media massa	Pembinaan KIM dan internet keliling	KIM		10	6		
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Percepatan Dukungan Jangkauan	Membangun prasarana dasar	Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan	Tersedianya dokumen perencanaan umum	Paket	6	32		Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018				
	permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas	Infrastruktur Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih yang berkualitas	infrastruktur Permukiman	Pengendalian Mutu						Pekerjaan Umum	Ruang dan Perhubungan	
				Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan penanganan kasus kebakaran	%	85	100	100		Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Meningkatkan cakupan layanan air bersih	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Terlaksananya Pembangunan Drainase/ Gorong – gorong	%	70	94	80		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	
					Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	8,62	51	10.90			
			Meningkatkan cakupan layanan sanitasi	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah des/ke/ yang terlayani air bersih	Desa/ke/	21	27	19			
					Pengembangan, Pengeloaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rumah tangga pengguna air bersih	Desa/ke/	6	25		19	
						Rumah tangga ber Sanitasi	Desa/ke/	5	25			
						Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya infrastruktur jalan perdesaan	m	14.300		27.940	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	Jumlah desa/ke/ yang terbangun infrastruktur perkotaan	Desa/ke/	12		60	

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
				Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Besar	Tersedianya dokumen perencanaan sanitasi	dok	1	1	1	Perencanaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan cakupan layanan persampahan	%	10	70	63	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
				Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Ratio rumah tangga pengguna listrik	%	93	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup		
5	Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin	Peningkatan dukungan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Miskin	Penataan kawasan Kumuh	Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah/Permukiman Layak Huni	%	90	100		Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
	Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Tertatanya ruang Kota Pangkajene yang efektif, efisien, dan berkelanjutan	Penyelenggaraa penataan ruang yang terpadu	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	Dokumen.	11	17	15		
				Pemanfaatan Ruang	Ratio RuangTerbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Lokasi	1	8	5		
			Penataan ruang publikdan ruang Terbuka Hijau yang efektif dan efisien	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau	%	20	100	50	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
					Terpeliharanya Taman dalam kab. Sidrap		lokasi	8	4	0	Pekerjaan Umum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
				Pengelolaan areal pemakaman	Ratio TPU per satuan penduduk	Lokasi	1	1			Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang	unit	0	1			
					Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kab/kota	Dok	1	1	-	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah
6	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah	Penguatan Keterpaduan Hilir dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Irigasi.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem partisipatif	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi	%	3,45	3,45		Pekerjaan Umum	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
					Jumlah daerah irigasi	Jumlah DI	94	100	100		
					Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri	Ha	11.299	13.000 13.600	12.827		
				Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku	Rasio jaringan irigasi	%	3,45	3,45			
				Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55	80	70		
				Program Pengendalian banjir	Cakupan areal terdampak yang tertangani	paket	-	35	25		

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif yang dilaksanakan	%	45	70	65		
7	Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai	Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral.	Mengembangkan sumber-sumber energy terbarukan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketanagalistrikan	Terkelolanya sumber-sumber energi terbarukan	Reactor biogas	3	110		Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
8	Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana	Penguatan Koordiansi dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Lain serta partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana.	Peningkatan koordinasi dan Mitigasi bencana alam	Program peningkatan mitigasi bencana alam geologi	Tersedianya data-data untuk meng- antisipasi bencana alam geologi	Dok	0	5			
				Program Kedaruratan dan Logistik	Cakupan Penanganan kedaruratan dan logistik		keg	-	125	75	
				Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan rekonstruksi		paket		51	35

MISI 5 :

MEMANTAPKAN IKLIM KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG KONDUSIF

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
1	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, dalam masyarakat	Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Pol PP	169	250	175	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang tertangani	%	51.95	80	70		
					Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	%	50	80			
					Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Linmas	31	31	31		
					Rasio fasilitas sarana dan prasarana pos kamling	Pos kamling/des/kel	3	5			
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah orkesmas yang terdaftar	orkesmas	18	61	31		
					Kapasitas FKUB dan FPK	Seminar/Talk Show & diskusi panel/tahun	3 kali	23 kali			
					Jumlah ORMAS/LSM	Klp	2	14	6		
					Cakupan peningkatan orkesmas	kegiatan		13	1		
					2	Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum	Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan jam patroli petugas satpol PP dalam sehari tingkat kabupaten		Jam
Cakupan jam patroli petugas satpol PP dalam sehari tingkat kecamatan	Jam	0	3 jam dalam sehari per Kec.								

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
					Angka kriminalitas	%	70	30			
					Deteksi dini dan pencegahan tindak kriminal	kegiatan		83	58		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MISI 6 :
MEWUJUDKAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK,
PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN YANG PRO GENDER, PRO POOR, PRO
JOB, DAN PRO ENVIRONMENT

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
1	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung reformasi birokrasi	Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang kelembagaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100		Otonomi Daerah	Bagian Organisasi
				Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang telah melaksanakan system dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur	%	100	100			
2	Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkelanjutan	Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)	%		100		Otonomi Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
					Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	cpns	750	615	527		
				Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	pns	70	62	22	Otonomi Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
				Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional bagi PNS Daerah	Pns	375	390	350			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
					Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS			Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat			
					Pendidikan dan Pelatihan Formal		350	285	245		
3	Terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Penataan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai Penguatan Sistem Monitoring dan Pengawasan Internal	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkat Dari 60% Menjadi 100%	%	60	100		Rutin	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP	%	50	80		Rutin	Inspektorat
4	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsive gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	Penataan dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Status Pelayanan Kabupaten Pelayanan terhadap anak (Kabupaten Layak Anak)	%	AKB = 33 ; AKI = 4 ; Sekolah ramah anak=2,34% ; Taman Bermain Anak(TBA)= 18,18	AKB=18 ; AKI=1 ; Sekolah ramah anak=30% ; TBA 70%	9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30% (2011)	%	13,30%	100%	11,43%		
					Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta = 6,76%	%	6,76%	8%			

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
					Partisipasi angkatan kerja perempuan = 97,14%	%	97,14%	98%	90,01%		
					Presentase SKPD yang menerapkan PPRG	%	20%	100%	16%		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PUG dan perlindungan Anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender	%	55,56	85	22		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat	Penguatan Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang berstatus Swakarsa	%	0	100	26	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	%	33	100	6		
6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kerangka Otonomi Desa.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	14		
7	Meningkatnya kepatuhan masyarakat	Penguatan Koordinasi antar Instansi	Peningkatan Ketaatan terhadap	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan-	Tertib pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan	%	59,70	100		Otonomi Daerah	Bagian Hukum

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
	terhadap hukum dan norma sosial	penegak Hukum dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Hukum dan Norma Sosial	Peraturan Perundang-Undang	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Presentase Peraturan Daerah	%	65	100	24		Sekretariat DPRD
					Tersusunnya Propemperda	keputusan		40			
				Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah (NEW)	Persentase penyelesaian kasus/penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan bupati	%	70	90	Otonomi Daerah		
8	Meningkatnya kualitas kehidupan dan politik	Meningkatkan Pembinaan Partai Politik dan Pengembangan Kondisi yang lebih Kondusif untuk Kualitas Kehidupan Demokrasi	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Wawasan Kebangsaan	kegiatan	-	15	7	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Kapasitas FKUB	Kali	3	19			
9	Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan	Mengarusutakan makan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan	Meningkatkan Pengurus Utama Gender dan Perlindungan Anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender	%	55,56	85	22	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
10	Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak	Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan	Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak	Program peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, Rasio KDRT = 0,01	%	55,56	100			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2014-2016	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
							KONDISI AWAL 2013	TARGET KONDISI AKHIR 2018			
			Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase jumlah anggota BKB, BKR, BKL yang ber-KB	%	47	-		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

2.5.1 Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014 -2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja per tahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan.

2.5.2 Selain program prioritas seperti penyajiannya pada Tabel Bab VII yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pada Bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah daerah.

2.5.3 Indikasi rencana program pembangunan bagi OPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masing-masing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPM yang dimaksud. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu anggaran dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritasnya. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yang terlihat pada indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang disajikan berdasarkan urusan dan OPD Penanggungjawab pada tabel 8.1 berikut :

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah dan Kebutuhan Pendanaannya

X 1000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
1	2	3	4	5			6	7		8		9		10		11	
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1 1.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					20,173,595,098			2,778,050,988		5,918,597,950		3,435,712,500		5,064,344,660		2,976,889,000
		APK PAUD	6.76%	57.00	Persen			31.32		34.04		55.72		56.00		57.00	
		Satu desa satu PAUD	97.50%	100	Persen			99		100		100		100		100	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pementasan Tim Kesenian	86%	87	Persen	533,650	1	87	92,473,400	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan.	4 situs	13	Situs	220,625,400	1	-	-	1	31,020,000	2	57,121,400	4	55,215,000.00	6	77,269,000
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					118,959,077,861			17,748,853,802		32,201,910,639		23,535,802,450		21,397,723,970.00		24,074,787,000
		APK SD/MI/SDLB/Paket A	105.92%	101.46	Persen			104.61		103.73		102.57		102.00		101.46	
		APM SD/MI/SDLB/Paket A	93.23%	87.80	Persen			89.70		84.22		85.69		86.65		87.80	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		APS SD/MI/SDLB	99.6%	99.85	Persen		99.55		99.49		99.75		99.80		99.85		
		APS SMP/MTs/SMP LB	99.47%	99.50	Persen		99.25		99.22		99.11		99.30		99.50		
		APK SMP/MTs/SMP LB/Paket B	94.25%	102.90	Persen		101.84		103.95		107.71		104.70		102.90		
		APM SMP/MTs/SMP LB/Paket B	67.66%	65.50	Persen		70.89		57.89		60.71		63.40		65.50		
		Rata-rata lama sekolah semua jenjang pendidikan	9.37 Tahun	9.10	Tahun		9.30		9.25		9.20		9.15		9.10		
		Rasio Guru/Murid SD/MI sesuai SPM 1:32	1:12	1:15	Guru/Murid		1:12		1:13		1:13		1:14		1:15		
		Rasio Guru/Murid SMP/MTs sesuai SPM 1:36	1:11	1:13	Guru/Murid		1:10		1:10		1:11		1:12		1:13		
		Kelulusan UAN SD/MI/SDLB	96.32%	100	Persen		99.48		99.9		100		100		100		
		Kelulusan UAN SMP/MTS/SMP LB	99.14%	100	Persen		98.5		99.6		100		100		100		
		Ruang belajar berkualitas baik TK/RA	71.08%	60	Persen		59.75		59.8		59.85		59.90		60		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Ruang belajar berkualitas baik SD/MI	74.01%	60	Persen			57.5		58.1		58.8		59.5		60	
		Ruang belajar berkualitas baik SMP/MTs	67.23%	67.5	Persen			67.25		67.35		67.4		67.45		67.5	
		Rasio Ruang Belajar dan murid yang sesuai SPM 1:32 SD/MI	1:22	1:22				1:21		1:20		1:19		1:21		1:22	
		Rasio Ruang Belajar dan murid yang sesuai SPM 1.36 SMP/MTs	1:25	1:22				1:22		1:24		1:20		1:21		1:22	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pementasan Tim Kesenian	85	100	Persen	1,465,527,437	1	-	-	88	116,148,750	99	227,702,687	99	345,037,000	100	776,639,000
	Program Pendidikan Non Formal					3,669,554,000			296,375,000		446,578,000		890,577,000		1,940,220,000		95,804,000
		Angka melek huruf	89.90%	92.50	Persen			95.50		91.65		93.23		92.48		92.50	
		Pengembangan vokasional (life skill/kursus)	9 Program	16	Program			11		12		13		14		16	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					2,644,748,014			17,143,000		69,404,000		1,173,160,014		984,975,000.00		400,066,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Guru berkwalifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan	83.00%	100	Persen		92.5		93		93.5		94		94.5		
		Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	43.00%	55,00	Persen		48.85		49.5		49.5		49.9		51		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersedianya SIM yang berkualitas, jaringan ICT yang memadai serta meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan Jardiknas serta terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan	38.27%	50.1	Persen	1,084,184,169	38.45	107,817,900	39.33	184,444,500	48.05	245,612,769	49.45	214,308,000	50.1	332,001,000	
	Program Layanan Pendidikan Tinggi (DIKTI)	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta kualifikasi/kwalitas tenaga pendidik (Dosen) dan kependidikan yang berkompetensi	-	50	Persen	3,509,412,700	81.48	415,556,500	36.02	797,417,500	65	891,983,700	65.5	482,450,000	70	922,005,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		55	Persen	184,157,000									106,673,000	55	77,484,000.00
	Program Layanan Pendidikan Menengah					29,255,418,265		11,243,457,797		13,790,296,726		2,120,173,781		2,101,489,961			-
		APK SMA/SMK/MA /SMALB/Paket C	73.27%	82.36	Persen		70.57		79.42		82.36		-		-		
		APM SMA/SMK/MA /SMALB/Paket C	50.66%	46.88	Persen		43.37		43.96		46.88		-		-		
		APS SMA/SMK/MA /SMALB/Paket C	97.9%	99.06	Persen		98.57		98.01		99.06		-		-		
		Rasio Guru/Murid SMA/SMK yang sesuai SPM 1:36	1:10	1:12			1:09		1:11		1:12		-		-		
		Angka Kelulusan UAN SMA/SMK	97.7%	100	Persen		99.29		99.29		100		-		-		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Ruang Belajar berkualitas baik	70.81%	72	Persen			70.85		70.9		71.2		71.05		72	
		APK SMA/SMK/MA /SMALB/Paket C	73.27%					78		83		93					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		40	Persen			10	91,116,500	20	103,020,000	-	-	40	17,440,000	-	-
	Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	Peningkatan mutu dan fasilitas Pendidikan		100	Persen	37,391,819,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,391,819,000
2	1.02.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA																
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan	84	90	Persen	18,019,055,136		18	2,049,085,582	18	1,558,253,946	18	3,849,794,208	18	7,574,932,900	18	2,986,988,500
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar (akreditasi Puskesmas)	0	14	puskesmas akreditasi	43,336,677,054		1	4,687,416,301	1	5,508,588,891	5	5,055,549,412	4	15,543,317,350	3	12,541,805,100

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program pengawasan obat dan Makanan	peningkatan Mutu, keamanan obat, makanan/minuman dan bahan berbahaya	Toko obat 36, apotek 33, IRTP 124, kantin sekolah 283, total 476	100	Persen	586,628,100		20	46,421,000	20	47,957,100	20	283,011,000	-	-	20	209,239,000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	17559 rumah tangga	23000	rumah tangga	227,285,000		4000	34,426,000	4000	77,826,500	5000	428,651,267	-	-	5000	126,220,000
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	4 gizi buruk	100	Persen	259,623,000		100	63,566,750	100	157,669,220	100	1,171,191,000	100	-	100	1,018,230,000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang menggunakan air minum layak dan berkelanjutan	89%	100	Persen	568,937,000		92	105,900,600	94	101,361,700	96	191,972,500	97	5,700,000	100	185,514,000
	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular	Persentase penderita baru BTA positif yang ditemukan dibanding dengan jumlah perkiraan kasus baru	46.27%	70	Persen	352,984,000		55.26	66,332,000	54.00	11,932,600	54.00	724,479,500	70	60,000,000	70	593,532,000
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	cakupan SPM Kesehatan	70%	95	Persen	51,865,000		74.09	9,978,000	32.05	5,594,000	90	6,062,300	95	17,742,000	95	20,192,000

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas persatuan (100.000) penduduk	45.58	45.43	Persen	37,739,164,000	45.18	6,902,250,400	44.17	7,761,080,295	44.17	38,940,910,132	45.43	21,491,080,350	45.43	10,996,276,400	
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	seluruh masyarakat miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan	82.362 jiwa	144939	Peserta	34,289,186,000	82362	6,640,941,382	22638	7,753,182,789	22638	20,628,162,662	8651	30,317,732,100	8651	30,994,809,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	3 kasus kematian	5	Kasus	103,183,000	-	-	3	44,656,000	3	35,526,000	-	-	3	77,500,000	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dari 68.05 ke 69.13	68.05 Tahun	69.13	Tahun	126,583,000	-	-	73.44	23,288,000	-	-	-	-	69.13	12,000,000	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Capaian tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat	80	85	Persen	88,668	-	-	82	13,439,500	83	14,840,500	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Kematian Ibu mengalami penurunan	4 Ibu	11	kematian ibu	266,120	3	33,878,000	3	306,963,000	2	309,987,000	-	-	1	2,817,104,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Prima Kesehatan	Partisipasi aktif masyarakat desa dan kelurahan di bidang kesehatan	106 Desa/Kel.	106	Desa/Kelurahan	522,001		106	189,835,000	106	90,256,500	106	221,868,500	-	-	106	25,000,000
	Program Penataan Perundang-undangan	Jumlah Perda Sistem Kesehatan Kabupaten (Perda kawasan tanpa rokok)		1	Perda	100,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program penyakit Tidak Menular dan kesehatan mata	peningkatan Posbindu	10 Posbindu	8	Posbindu	33,455,147		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Sumber daya manusia kesehatan	peningkatan mutu standarisasi sumber daya manusia kesehatan	0	2	Kegiatan	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Alat Kesehatan dan PKRT	Pemenuhan kebutuhan dan kalibrasi alat kesehatan 14 puskesmas	0	2	Kegiatan	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Keluarga Berencana	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,44 ke 2,25	2.44	2.25	Persen	2,335,795,000		2.43	281,927,000	2.39	624,939,500	2.34	259,694,500	-	-	2.25	2,778,890,000
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR)	Persentase Usia Kawin Pertama Bagi Perempuan di bawah 20	3,89 %	22904	Jiwa	457,320,000	2	-	-	-	-	22904	287,500	-	-	22904	10,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Peserta KB Aktif	67.09%	80	Persen	430,000,000		86.29	-	75.87	25,000,000	75.20	40,766,500	77.00	6,250,000	80.00	25,000,000
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio Akseptor KB AKTIF = 67 PUS dari 100 PUS	67.00%	70.05	Persen	2,209,000,000	2	-	103,829,000	72.00	68,297,000	72.00	163,451,000	69.23	-	70.05	85,550,000
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatkan jumlah anggota BKB, BKR, BKL yang ber-KB 47% di tahun 2014 ke 70% tahun 2018	47%	-	Pasangan	475000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok BKB yang holistik integratif 5 Klp	11 Klp BKB	55	klp BKB	222,000	2	11	100,777,500	-	-	11	16,806,000	-	-	11	24,000,000
	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (New Inisiatif)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,52%	82	Persen	380000	2	-	-	25	8,990,000	27	32,272,000	-	-	30	35,000,000
	Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan	Sosialisasi Kesehatan, Ibu,Bayi dan Anak		1	kegiatan	60,990,000			60,990,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.02.02 RUMAH SAKIT NENE MALLOMO																

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							7,437,882,225		10,967,207,541.92		3,162,434,512		11,834,495,000		9,000,000,000	
		Cakupan SPM Rumah Sakit	82%	95	Persen	54,647,312,500		85		88		91		94		97	
		- Persentase pasien rawat inap :				47,008,800,000			10,252,200		10,852,200		11,452,200		12,052,200		12,652,200
		* BOR	BOR 52	80	Persen			60		65		70		75		80	
		* TOI	TOI 4 hari	TOI 1-3 hari	Hari			1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari	
		- Angka kematian umum :															
		* NDR	NDR 25	15	NDR	0		23	0	21	0	19	0	17	0	15	0
		* GDR	GDR 39	33	GDR	0		38	0	37	0	35	0	32	0	30	0
		- Jumlah kunjungan RITL	6.493 pasien	7743	Pasien	0		6743	0	6993	7549	7243	3692	7493	3700	7743	3750
		- Jumlah kunjungan RJTL	23.316 pasien	24566	Pasien	0		23566	0	23816	15573	24066	9129	24566	9200	24566	9250

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Lulus akreditasi versi 2012 tingkat pratama	Terakreditasi dasar	100	Terakreditasi Pratama	763,401,000,000		50	76,477,350	99	121,253,000	100	145,047,900	100	112,382,000	100	219,070,000
		Persentase kepuasan pasien	71%	90	Persen	0		74		78		82		86		90	
	Program Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar	28%	83	Persen	15,065,551,000	P2	31	2,767,111,500	45	1,715,048,550	69	10,474,125,733	76	14,460,706,000	83	26,732,180,000
		Status pengelolaan keuangan Rumah Sakit (Pencapaian BLUD)	Belum BLUD	100	BLUD	0		0	0	100		100		100		100	
		Baku mutu limbah cair :															
		* BOD	BOD 32 mg/l	BOD < 30 mg/l				32 mg/l		< 30 mg/l		< 30 mg/l		< 30 mg/l		< 30 mg/l	
		* COD	COD 419 mg/l	COD < 80 mg/l				419 mg/l		< 80 mg/l		< 80 mg/l		< 80 mg/l		< 80 mg/l	
		* PH	PH 7,16	PH 6-9				7		42895		42895		42895		42895	
		Persentase pengolahan limbah padat berbahaya	50%	100	Persen			50		50		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		sesuai dengan aturan (SPM)															
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pengelolaan keuangan Rumah Sakit	0%	75	Persen	78,750,000,000	P2	-	-	-	-	50	23,347,088,039	75	36,094,587,000	75	34,446,593,000
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Media Informasi	1	19		70000	P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program pengembangan lingkungan sehat					250,000,000					25,000,000		181,600,000		181,600,000		200,000,000
		- Dokumen UKL/UPL/DPLH	Belum ada	Ada			P2	Belum ada	-	Ada		Ada	-	Ada	-	Ada	-
		- Izin pengelolaan limbah B3	Belum ada	Ada				Belum ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit					550,000,000			5,000,000		-		44,977,500		-		-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Persentase ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana RS	75	100	PERSEN		P2	80		85		90		95		100	
		Persentase alat yang terkalibrasi tepat waktu (SPM)	16	100	Persen			25		46		61		96		100	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BPJS)	Persentase pasien rawat inap :				29,997,977	P2		6,216,492,586		14,909,956,284		4,401,085,518		-		-
		* BOR	BOR 52	BOR 80				60		65		70		75		80	
		* Av LOS	Av LOS 4 hari	Av LOS 6 - 9 hari				6 - 9 hari		6 - 9 hari		6 - 9 hari		6 - 9 hari		6 - 9 hari	
		* BTO	BTO 45 kali	BTO 40-50 kali				40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali	
		* TOI	TOI 4 hari	TOI 1-3 hari				1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari	
		- Angka kematian umum :															
		* NDR	NDR 25	15	NDR			23		21		19		17		15	
		* GDR	GDR 39	30	GDR			38		37		35		32		30	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		- Jumlah kunjungan RITL	6.493 pasien	7743	Pasien			6743		6993		7243		7493		7743	
		- Jumlah kunjungan RJTL	23.316 pasien	24566	Pasien			23566		23816		24066		24316		24566	
		- Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20 jam (SPM RS)	10%	60	Persen			20		30		40		50		60	
4	1.02.03 RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG																
	Program Upaya kesehatan Masyarakat	Persentase Jumlah Pasien Rawat Jalan sebesar 85 %	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 81,8 %	85	Persen	6,430,223,000	1	82	3,021,557,404	83	3,986,263,662	84	2,858,058,821	-	-	85	4,437,962,000
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Penambahan gedung ruang rawat inap, peningkatan BOR : 70%,	Gedung perawatan belum memenuhi syarat, BOR 67,3 %	80	Persen	24,124,347,000	1	40	1,673,759,221	50	2,305,944,789	70	13,134,963,575	75	16,594,575,000	80	3,819,890,000
AvLos 3 Hari																	
TOI 2 Hari																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Rumah Sakit lulus akreditasi Versi 2012	RS belum terakreditasi versi 2012			642,139,000	1	-	-	-	-	75%	279,777,220	100%	40,998,000	-	-
		Status BLUD	Status kualitas pengelolaan keuangan (status BLUD)	RS menjadi BLUD		107,500	2	-	50	100%	57.5	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit			2	Kegiatan								1	16,917,174,000	1	16,917,174,000
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terjalannya kerjasama Antara Pihak RS dan Pihak BPJS	BOR : 67,3% Avlos : 3 TOI : 2 GDR : 3 NDR : 1 BTO : 76	MoU dengan BPJS tetap terjalin		10,378,887,000	1	BOR : 70% Avlos : 3 TOI : 2 GDR : 3 NDR : 1 BTO : 72	5,202,644,943	BOR : 73% Avlos : 3 TOI : 2 GDR : 2 NDR : 1 BTO : 69	5,572,563,783	BOR : 75% Avlos : 3 TOI : 2 GDR : 2 NDR : 1 BTO : 65	10,028,205,243	BOR : 78% Avlos : 3 TOI : 2 GDR : 1 NDR : 1 BTO : 61	51,883,000	BOR : 80% Avlos : 3 TOI : 2 GDR : 1 NDR : 1 BTO : 58	-
5	1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN																
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan							43,050,708,340		52,374,611,499		46,820,483,432		203,183,667,000		88,273,9

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		dalam kondisi Baik														84,000	
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi Baik	46,05% Jalan :	90,93	Persen	301,670,167	1	76.10		78.93		79.14		86.91		90.93	80,911,900,000
			81,57% Jembatan :	98,19	Persen	116,207,661		86.10		89,12		92,15		95,17		98,19	7,362,084,000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan cakupan layanan persampahan	10%	70	Persen		1	40	3,149,429,500	-	-	-	-	65		70	5,538,917,000
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terlaksananya Pembangunan Drainase / Gorong-gorong	70,00%	94,00	Persen	3,830,000,000	1	75	4,590,579,400	77.50	3,346,880,750	80.00	10,888,900,400	87.50	3,292,765,000	94.00	1,201,096,000
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pelayanan Penggunaan Angkutan umum dan pengguna jalan lainnya	50%	100	persen	284,490,000	P1	70	56,578,000	80	106,440,000	90	85,113,000	95	126,685,000.00	100	197,642,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Terbangunnya talud untuk memperkuat Infrastruktur Jalan	29,87%	32,18	persen	9,507,447,000	1	-	-	30.94	1,529,812,800	31,42	2,086,331,250	31,84	1,834,655,000	32,18	5,971,190,000
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	5,80%	16,50	persen	185,169,564	1	7.46	15,419,076,110	10.00	64,860,096,275	11.28	95,153,500,797	13,70	173,717,175,000	16,50	183,090,517,000
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pengadaan rambu-rambu, marka jalan, warning light dan traffic light	70%	100	persen	2,320,360,000	P1	79	449,027,700	85	636,785,000	90	894,125,600	95	10,000,000	100	357,320,000
	Program Peningkatan kelaikan dan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase pengadaan buku uji dan flat uji kendaraan umum	80%	100	persen	359,840,000	P1	80	59,446,000	60	45,435,500	90	55,600,000	95	74,378,000	100	79,128,000
	Program Pembangunan system Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Tersusunnya data Jalan dan Jembatan	100%	100	persen	150,000	1	-	-	-	-	-	-	100	1,000,000,000	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	41,93%	100	persen	15,688,187	1	61.29	5,331,435,144	77.42	1,861,415,023	87,09	819,156,025	96,77	4,989,382,000	100	610,393,000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penyusunan RTH	0	2	dok	167,000,000	1	-	-	-	-	-	-	1	2,210,379,000	1	140,170,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku	Terwujudnya Penyediaan air bersih dan sehat													5,310,664,000		5,540,203,000
		Rasio Jaringan Irigasi	3,45 %	3,45	persen	600	P1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Taman yang dipelihara	8 taman	40	taman	9,555,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di Wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan	24,26%	35,00	persen	48,929,449,000	1	27.93	15,211,919,105	30.49	49,269,523,498	32.57	46,419,070,922	33.96	81,040,598,000	35.00	49,739,696,000
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan	16,70%	23,50	persen	126,560,000	1	-	-	-	-	-	-	21,20	4,890,400,000	23,50	6,881,875,000
	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang	11 Dokumen	17	dok	5,139,407,000	1	7	1,349,565,000	6	944,596,300	2	896,592,212	2	743,609,000	2	436,827,500
	Pemanfaatan Ruang	Ratio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	1	8	lokasi	14,078,234	1	2	519,260,145	1	1,946,928,322	2	1,647,527,880	1	851,658,000	2	1,466,369,000
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terdatanya Kondisi jalan dan Jembatan	100%	100	persen	135,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu	Jumlah Dokumen	6 Paket	32	paket	3,800,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase pembangunan terminal dan halte bus	70%	100	Persen	283,711,500		-	-	-	-	50,80	144,147,500	-	-	49,19	139,564,000
	Program Peningkatan SDM Bidang Perhubungan Darat	Persentase SDM bidang perhubungan darat	50%				P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan rambu-rambu Lalu Lintas			100	Persen		20	17,410,000	20	77,882,250	20	48,558,008	20	37,813,000	20	100,910,000
	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Pelayanan Penggunaan Angkutan umum dan penggunaan jalan lainnya		100	Persen	982,000,050		-	-	17.6	173,671,900	81,81	803,398,150	0,50	4,930,000	-	-
	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dok data keciptakaryaan		2	dokumen	78,100,000		-	-	-	-	-	-	-	-	2	78,100,000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terwujudnya Pembangunan Sanitasi Lingkungan		5	Desa/Kel	608,915,500		-	-	-	-	-	-	-	-	5	608,915,500

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Berbasis Masyarakat															
6	1.03.03 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)																
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya								14,159,681,700		37,574,485,078		45,804,155,269		86,443,782,000		18,711,865,000
		Jumlah Daerah Irigasi	94 DI	100	DI	103,294,472	P1,2	94		98		100		100		100	12,091,314,000
		Cakupan Luas Areal yang dialiri	11.299 Ha	13.000	Ha	25,868,020	P1,2	11,299		11.299		12.827		12.827		13.000	6,620,551,000.00
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	55%	80	Persen	55,143,413,000	P1,2	60	4,232,102,300	65	380,046,500	-	-	70	216,683,000	75	1,100,714,000
	Program Pengendalian banjir	Cakupan areal terdampak yang ditangani	0	35	Paket	15,000,000,000	P1,2	-	-	15	1,064,768,050	15	7,734,968,000	-	-	5	1,500,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Kegagalan Perencanaan dan Konstruksi dengan metode partisipatif	45%	75	Persen	5,286,638,000	P1,2	50	959,244,400	55	1,171,334,300	60	1,204,708,410	65	1,229,725,000	75	890,500,000
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air	Terlaksananya kegiatan pengelolaan air yang baik dan benar		1	Kegiatan	137,274,000		-	-	1	137,274,000	-	-	-	-	-	-
7	1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																
	Pengembangan Data/Informasi	Perengkapan Pengembangan Sistem Pendataan Pembangunan infrastruktur Keciaptakaryaan	1 dok	8	dok	520,000,000	1	2 dok	116,416,500	2 dok	58,805,500	2 dok.	267,060,500	-	-	2 dok.	29,015,000
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan sampah	31%	100	Persen	6,762,008,000	P1	17	4,465,493,100	45	3,792,600,250	55	4,704,133,900	78	1,071,951,000	100	1,115,690,000
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,62 %	12.27	persen	55,800,000,000	1	9.5	4,590,579,400	10.2	3,346,880,7	-	-	11.68	12,012,053,000	12.27	3,232,441,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Jalan		100	Persen	63,090,000,000		-	-	-	-	-	-	68,30%	4,738,260,000	100	1,700,932,000
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup	13%	100	Persen	3,193,854,000	P1	7	189,905,500	26	1,001,182,650	47	383,454,350	75	327,700,000	100	1,213,745,000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa/kel yang terbangun infrastruktur perkotaan	12 Desa/kel. Dalam kec. MaritengaE	12	60	2,977,600	1	12	436,939,250	12	127,072,000	12	329,647,500	12	776,960,000	12	652,340,000
	Program penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kelengkapan pendukung penggugat menjadi 100%	100%	100	Persen	221,694,000	P6	-	-	-	-	-	-	100	22,118,000	100	38,222,000
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Koordinasi dan rumusan kebijakan sumber daya alam	Tidak dilaksanakan tahun 2013	100	Persen	58,000,000	P1	-	-	50	540,152,650	80	780,449,350	90	71,161,000	100	74,844,000
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Persentase Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	5%	100	Persen	1,695,995,000			179,410,000		126,623,500	55	162,137,000	76	132,315,000	100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
								10		29							230,503,000
	Perlindungan dan Konservasi SDA	Persentase Perlindungan dan Konservasi SDA	4%	100%	1,900,500,000	P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pengendalian Polusi	0%	100%	172,500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Besar	Jumlah dokumen perencanaan sanitasi	Dokumen BPS dan SSK	10	Dokumen	14,283,300,000	1	2	145,431,750	2	230,251,050	2	304,974,150	2	192,075,000	2	170,050,000
	Pengelolaan areal pemakaman	Ratio TPU per satuan penduduk	19,5 %	5	lokasi	920,000,000	1	-	-	-	-	-	1 lokasi	96,805,000	4 lokasi	330,808,000	
	Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah/Permukiman Layak Huni dibangun	20.93%	29.07	Persen	11,300,000,000	1	21.00	-	21.08	-	22.51	18,633,900	27.45	447,115,000	29.07	323,025,000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20%	100	Persen	3,142,200,000	P1	20	1,601,334,400	25	1,932,026,042	50	4,310,673,395	75	1,779,416,000	100	1,580,880,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	10%	60	Persen	323,000,000	P1	-	-	40	6,955,000	60	6,654,500	-	-	-	-
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Rumah tangga ber Sanitasi	69.00	100	Persen	12,578,900,000	1	73.79	1,162,892,150	79.83	1,444,178,050	89.09	2,363,339,198	93.00	2,218,380,000	100	18,295,115,000
	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	14.300 m	13,640	meter	27,651,100,000	1	1,240	1,385,333,700	3,300	1,251,762,900	3,300	3,079,367,250	3,300	5,016,492,000	2,500	827,997,000
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah desa/kel yang terlayani air bersih	21 desa/kel.	27	Desa/ Kel	16,840,000,000	1	9	588,211,050	5	2,007,110,573	5	1,900,819,850	-	-	-	-
	Pengembangan, Pengeloaaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rumah tangga pengguna air bersih	6	25	Desa/ Kel	3,175,000,000	1	6	737,079,000	10	943,014,100	3	805,030,500	3	2,620,967,000	3	7,152,982,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Perencanaan, pengawasan, pengujian, dan pengendalian mutu	Jumlah dokumen perencanaan keciptakaryaan	3 dok	17	Dok	2,340,000,000	1	3	288,476,850	7	36,001,600	7	313,139,605	-	-	-	-
	Penerangan Lampu Jalan	Titik Lampu Jalan	3.854	4.625	Titik	37,500,000	1	-	-	4,104	15,364,272,136	4,304	14,523,867,680	4,454	11,270,092,000	4.625	10,267,786,000
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	sistem informasi tata ruang	-	1	Program	241,176,400	1	1	145,845,850	1	74,765,550	1	20,565,000	-	-	-	-
	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Ratio rumah tangga pengguna listrik	93%	-	titik	5,326,947,800	1	3882	5,297,030,000	22	29,917,800	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%)	-	100%		40,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kontribusi Retribusi Persampahan & IMB terhadap PAD	2,33 %	1,12 %		301.08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Perencanaan, pengawasan, pengujian, dan pengendalian mutu	Perencanaan, pengawasan, pengujian, dan pengendalian mutu		70%		390,250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	31 Linmas	31	Linmas	224,624,700		31	1,350,000	31	11,274,700	31	115,000,000	31	62,000,000	31	35,000,000
		Rasio Fasilitas Sarana dan Prasarana Pos Kamling	3 Pos Kamling	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Peran Aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan Kenyamanan lingkungan	6 Kegiatan	3	Kegiatan	-		-	-	-	-	-	3	94,875	3	95,000	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Deteksi Dini dan Pencegahan Tindak Kriminal	70%	83	persen	1,895,199,000		14	331,046,000	14	197,574,000	16	289,965,000	25	817,880,816,935,000	14	490,227,000
	Program pengembangan wawasan								27,591,500		12,725,000		-		188,656,500		102,274,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Kapasitas FKUB	3 Kali	19	Kali	358,985		3 Kali	56,985,000	4 Kali	74,000,000	4 Kali	75,000,000	4 Kali	76,000	4 Kali	77,000
		Cakupan Peningkatan Kapasitas Wawasan Kebangsaan	0	15	Kegiatan	486,217		2	69,010	1	13,025	2	57,599	5	171,582.5	5	175,000
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					572,811,500			9,781,500		-		29,150,000		212,425,000		321,455,000
		Jumlah Orkesmas yang terdaftar	18 Orkesmas	61	Orkesmas	340,407,750		13	4,890,750	-	-	12	29,150,000	15	106,212,500	15	160,727,500
		Cakupan Peningkatan Kapasitas Orkesmas (org)	0	13	orang	271,830,750		1	4,890,750	-	-	-	-	6	106,212,500	6	160,727,500
	Program Pendidikan politik masyarakat														211,850,000		1,046,037,500
		Pembinaan kepada Parpol	11 Parpol	15		943,415,625		-	-	-	-	-	-	11	158,887,500	15	784,528,125

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat		10	kegiatan	314,471,875		-	-	-	-	-	-	5	52,962,500	5	261,509,375
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan								188,054,000		68,920,000		-		-		-
		Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	31	31	Linmas			31	141,040,500	31	51,690,000	31	-	31	-	31	-
		Peningkatan Peran Aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan Kenyamanan lingkungan		2	Kegiatan			1	47,013,500	1	17,230,000	-	-	-	-		-
9	1.05.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan					5,220,807,900			381,602,400		631,768,000		555,895,000		1,048,185,000		2,603,357,500
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	169 Pol PP	250	Pol PP	3,041,400,000	1	189	0	159	751,600,000	159	763,000,000	175	763,000,000	250	763,000,000
		Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	31 Linmas	31	Linmas	388,900,000		31	12700	31	169,050,000	31	69,050,000	31	-	31	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang tertangani	50%	80	Persen	90,600,000		65	3588	68	21,600,000	70	230,00,000	76	23,000,000	80	23,000,000
		Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	50%	80	Persen	572,660,000		54	396,080	60	31,080,000	67	40,500,000	74	50,000,000	80	55,000
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan penanganan kasus kebakaran	100%	100	Persen	12,000,000	1	100	1,554,327,100	100	1,711,295,950	100	3,156,198,341	100	2,194,270,500	100	523,471,000
	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan		100	Persen	2,531,020,500		39.8	1,008,960,000	12.0	304,742,500	11.7	296,655,000	10.5	265,907,500	25.8	654,755,500
	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Penyelesaian Kasus/Penyelidikan Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati		90	Persen	1,383,195,407		-	-	19.7	364,683,657	4.0	75,327,500	25.3	467,781,000	25.7	475,403,250
10	1.06.01 DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial; 16.727 PMKS	20.754	11.709	Jiwa	253,498,500	Bantuan Sosial (Ban sos) / Belanja Hibah	18.129	22,927,000	11.582	-	11.709	-	11.709	61,150,000	11.709	169,421,500
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		100	Persen	4,123,742,200	P1	70	420,873,000	80	217,927,000	89	338,832,000	95	1,303,012,200	100	1,843,098,000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bantuan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial 13.965 orang	85%	85	Persen	15,312,130,200	P1	84	514,761,000	84	132,938,300	85	271,913,500	85	3,165,411,300	85	11,227,106,100
	Program Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat	Tersedianya Website Kependudukan	-	100	Persen	107,753,0000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pembinaan dan penanganan penyandang penyakit sosial pada 11 kec. 2.200 orang	83%	83	Persen	1,441,414,000	P1	4	8,394,000	-	-	-	-	63	242,000,000	83	1,191,020,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, 110 LKS	63%	63	Persen	3,720,288,260	P1	4	635,123,652	16	549,763,375	31	628,817,233	47	965,890,000	63	940,694,000
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pelatihan para penyandang cacat dan eks trauma		100	Persen	162,966,000								100	40,600,000	100	122,366,000
11	1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan	0	37	kegiatan	112,594,700	P2	-	-	9	45,040,500	9	18,318,500	8	49,235,700	11	56,542,000
	Program kedaruratan dan Logistik	Cakupan kedaruratan dan logistic	0	125	kegiatan	837,486,850	P2	29	211,713,900	22	96,357,100	24	59,017,850	24	239,468,000	26	230,930,000
	Program rehabilitasi dan rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan rekonstruksi	0	51	paket	16,188,394,300	P2	13	86,930,700	11	57,099,900	11	15,916,434,400	8	83,725,300.	8	44,204,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	Cakupan penanggulangan bencana dan tanggap darurat	0	10	kegiatan	34,940,000	P2	10	34,940,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya Peta Rawan Bencana menjadi 100%		1	peta	300000	P6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
12	2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang berstatus Swakarsa	Lembaga dan organisasi masyarakat : 0 %	100	Persen	5,508,296,492		1	414,376,500	19	527,006,904	27	525,917,688	27	2,175,086,400	100	1,865,909,000
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender	55,56%	85	Persen	658,543,200	2	15	156,907,200	16	89,891,500	16	137,518,500	27	77,511,000	27	196,715,000
	Program fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	terselesaikannya permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilaporkan kepada P2TP2A	125 kasus	125	kasus	186,603	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan perempuan	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, Rasio KDRT = 0,01	55,56%	100	Persen	471,392,600		25	149,980,000	25	55,950,000	-	-	25	150,000,000	25	115,462,500
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	Kelompok Binaan LKMD/ LPM 33%	100	Persen	3,235,354,450		22	655,161,500	22	541,429,400	20	426,583,550	19	1,023,180,000	18	589,000,000
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					1,525,786,900			112,961,000		281,595,000		336,625,400		466,668,000		327,937,500
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	13,30%	100	Persen	5,011,560		4	184,560	18	927,000	20	1,300,000	26	1,300,000	26	1,300,000
		Partisipasi angkatan kerja perempuan = 97,14%	97,14%	98	Persen	5,011,560		4	184,560	18	927,000	20	1,300,000	26	1,300,000	26	1,300,000
		Presentase SKPD yang menerapkan PPRG	20%	100	Persen	167,216		20	50,000	20	23,075	20	27,508	20	16,633	20	50,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES yang dibina	2 desa	66	desa	111,041,000		8	39,041,000	-	-	-	-	-	-	17	72,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya	100%	76	Persen	645,051,000		12	216,690,000	17	60,937,000	21	325,924,500	-	-	26	41,499,500
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan					369,199,500			22,200,000		187,854,000		39,624,500		31,021,000		88,500,000
		Status Pelayanan Kabupaten Pelayanan terhadap anak (Kabupaten Layak Anak)	AKB = 33 ; AKI = 4 ; Sekolah ramah anak=2,34% ; Taman Bermain Anak(TBA)=18,18	AKB= 18 ; AKI=1 ; Sekolah ramah anak=30% ; TBA 70%		305,000,000	2	AKB = 33 ; AKI = 4 ; Sekolah ramah anak=2,34% ; TBA=18,18	15,000,000	AKB=27 ; AKI=3 ; SRA= 7% ; TBA=30%	100,000,000	AKB=25 ; AKI=2 ; SRA=10% ; TBA=40%	20,000,000	AKB=23 ; AKI=1 ; SRA=15% ; TBA=55%	20,000,000	AKB=18 ; AKI=1 ; SRA=30% ; TBA=70%	150,000,000
		jumlah tenaga kerja dibawah umur	2.212.8	2.903.47	Jiwa	160,699,500		2.257.06	7,200,000	2.736	87,854,000	2.846.53	19,624,500	2.903.47	11,021,000	2.903.47	35,000,000
13	2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah	Jumlah Data/Informasi untuk Perencanaan		5	Buku	150,971,000		-	-	-	-	-	-	5	84,862,000	5	66,109,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		dan Pembangunan															
	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Jumlah Kunjungan pengawasan, monitoring & pelaporan Menara		198	Kunjungan	1,888,411,750	P1	-	-	-	-	-	-	198	1,888,411,750	-	-
		Jumlah Perangkat dan Sistem TIK yang terpasang dan berfungsi		60	Titik	3,935,000								40	1,435,000	20	2,500,000
	Program kerjasama dengan media massa	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan internet keliling		10	KIM	274,240	P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Terwujudnya SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		100	Persen	241,561,000	P1	-	-	-	-	-	-	-	-	100	24,561,000
	Program kerjasama informasi dengan mass media	Jumlah Pendistribusian Informasi melalui media massa dan media lainnya		129	Media	7,257,391	P1	24	15,947,500	25	19,310,000	29	21,652,500	24	2,742,507,000	27	1,730,726,500
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi														914,140,000		936,864,000
		Tewujudnya sistem informasi				314,140,000	1								314,140,000		

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		layanan gerak dan aduan															
		Tersedianya media untuk pengolahan, analisis data dan publikasi		6	Media	1,400,000,000	P1							3	600,000,000	3	800,000,000
		Tersedianya Arsip Informasi sandi yang aman dan akuntabel		5760	Surat	4,500,000	P1									5760	45,000,000
		Tersedianya sarana dan prasarana informasi sandi di Kecamatan		11	Kec	60,000,000	P1									11	60,000,000
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensi bidang jurnalistik dan alat-alat studio		4	Orang	1,076,475,750	P1	1	100,994,500	1	289,309,000	1	173,192,250	-	-	1	512,980,000
14	2.11.01 DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Porsi pengembangan transmigrasi baru 100 KK	100 KK	100	KK	658,184,800		20	97,551,000	20	186,557,300	20	58,241,500	20	46,785,000	20	296,050,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi 1500 AK	75%	78.34	Persen	284,874,000		76	41,059,000	77	42,407,800	-	-	78.34	3,300,000		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	17.018 UMKM	7982	UMKM	3,025,537,000		2642	42,895,000	1815	51,896,500	1410	53,283,000	1000	202,037,000	1115	193,925,000
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja								211,708,000		46,850,000		1,044,162,300		2,620,696,000		1,024,690,000
		Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan penempatan; 857 tenaga kerja	70%	100	Persen	1,872,240,000	P1	77%	211,708,000	80.40	46,850,000	85.30	414,448.00	91.80	414,448	100	414,448
		Peningkatan kompetensi usaha bagi kelembagaan mikro dan koperasi serta usaha kecil dan menengah		20		3,500,000,000				5	500	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelaksanaan Promosi, Pameran dan Pengembangan Jaringan UMKM	2 kali	8	Kali	5,582,000,000		1	217,468,000	1	71,602,599	2	104,145,300	2	178,700,000	2	1,900,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapatkan perlindungan hukum	25 lembaga	50	Lembaga	85,636,165	P1	10	706,000	10	8,234,665	10	4,745,500	10	60,000,000	10	11,950,000
	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	46.80% dari 359 kop	52.76%	Persen	1,254,153,000		46.80	54,661,000	49.30	46,883,000	49.70	48,519,550	51.32	-	52.76	35,299,000
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi	Prosentase pengelola koperasi yang mengikuti penyuluhan/pelatihan	3.34% dari 1.795 Orang	25.10%	Persen	465,888,000		-	-	12	25,327,800	16.40	29,711,000	-	-	25.10	20,194,000
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang mendapat layanan fasilitas	1.706 UMKM	1,931 UMKM	UMKM	3,200,000		-	-	-	-	50	25,000,000	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pelaksanaan promosi, pameran pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM	24%	95	Persen	158,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	95	158,000,000
15	2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Koordinasi, perumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD	0	2	Kegiatan	225,243,000	P1		141,949,850	-	-	-	-	1	1,434,000.00	1	81,144,000
	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi		50%	100		720,655,000	P1								74,500,000.00		89,400,000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0	18	Investor		P1	-	-	-	-	-	-	4		5	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Program Baru)					895,000		-	-	-	-	-	-		91,396,000.00		655,000,000
		Proses Penyelesaian Pelayanan dapat terpenuhi sesuai Standar	0	11800	izin									4800		7000	
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan perizinan		80.25	%			-	-	-	-	-	-	77.80		80.25	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan (Program Lama)								293,998,300		463,878,000		730,030,600		-		493,793,000
		Proses Penyelesaian Pelayanan dapat terpenuhi sesuai Standar		10500	izin			2000		4000		4500		-			
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan perizinan		76.5	%			65.5	-	70.52	-	76.5	-	-			
	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Perizinan		3	Kegiatan	1,486,292,000	1	-	-	-	-	-	3	51,392,000.00	3	80,470,000	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Program Lama)	Terwujudnya Sistem Informasi Layanan Gerak dan Aduan		3/1	Aplikasi/Perangkat	430,000,000	1	3	80,000,000	1	28,248,000	-	2	50,000,000.00	-	-	
16	2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																
	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.	Cakupan kebijakan kepemudaan		5	Kebijakan	7,181,981,610		-	-	-	-	5	7,181,981,610	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		yang dikembangkan/d iserasikan															
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pemuda yang dibina/difasilitasi/dilatih		10,000	orang	9,420,322,441	1	1000	575,510,000.00	1500	2,472,636,700	2000	3,319,925,741	2500	1,733,495,000	3000	1,318,755,000
	Pengembangan wawasan	Cakupan Anggota Kelompok PASKIBRAKA yang terpilih dan dilatih	40	30	orang	237659	1	30	224,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan & Kecakapan Hidup Pemuda	Cakupan pemuda yang dilatih	0	350	orang	3,408,641,500	1	50	31,562,500	-	-	-	-	150	1,562,714,000	150	1,814,365,000
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan jumlah atlet dan pelatih olahraga yang dibina/difasilitasi	86	25000	orang	10,552,110,	1	5000	1,442,549,000	5000	981,167,650	5000	839,223,500	5000	3,477,920,000	5000	3,811,250,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Sarana dan prasarana Olahraga	-	80	unit	54,118,443,908	1	20	4,399,872,798	20	7,181,981,610	20	13,054,160,500	20	25,222,199,000	20	4,260,230,000
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Kunjungan wisata Domestik dan Mancanegara	12600	25000	orang	481,495,000	1	-	-	-	-	20000	6,550,000.	22500	333,480,000	25000	141,465,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Cakupan banyaknya objek/tujuan wisata yang dikembangkan	1	3	objek wisata	332,042,600	1	1	20,810,900	1	27,690,600	2	44,205,100	3	239,336,000	-	-
	Pengembangan Kemitraan	Cakupan banyaknya pemilihan putra putri Bertalenta		100	orang	31,485,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100	31,485,000
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip secara baku	5%	45	Persen	70,568,300	P1	10	31,970,800	20	7,417,500	35	16,250,000	40	14,930,000	-	-
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Presentase Volume Arsip dan Dokumen Daerah yang di data, ditata, diolah dan disimpan	10%	60	Persen	30,000,000	P1	-	-	-	-	-	-	40	18,210,000	60	10,483,000
	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase Jumlah pengunjung perpustakaan	30%	70	Persen	700,000,000		35	69,966,000	40	16,422,000	45	73,537,000	50	204,280,000	70	81,904,500
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kualitas Sumber Daya Pengelola Arsip	30%	80	Persen	200,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	80	35,160,000
3 URUSAN PILIHAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
18	3.03.01 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN																
	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Terlaksananya program IPDMIP		11	Kecamatan	3,160,500,000		4	182,511,500		-		-		-	7	907,782,000
	Perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu					1,233,175,000			40,750,000		618,830,000		387,347,000		-		-
	Pengembangan, Pengelolaan dan KONSERVASI Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya embung dan bangunan air lainnya		100	persen	30,119,773,858		0,27	81,712,750	81,71	12,748,544,578	12,74	5,349,348,530	25,62	7,718,106,000	14,01	4,222,062,000
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier		11	kecamatan	8,350,930,275				2	7,783,432,075	8	547,592,200	1	19,906,000		
	Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Kakao, Jambu Mente, Cengkeh dan Lada				11,626,423,000			427,366,700		3,237,555,950		2,368,895,200		1,161,651,000		2,186,257,000
		Produksi Padi (ton)	461.617 Ton	589,200	Ton			488.883		536.012			587.982		561,100		589,200

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Produksi Jagung (Ton)	39.950 Ton	44,200	Ton			72.267		58.634		42,200		43,300		44,200	
		Produksi Kedelai (ton)	595 Ton	65.50	Ton			519.16		181		65.50		-		-	
		Produksi Melon (Ton)	174.3 Ton	48.10	Ton			82.20		48.10		-		-		-	
		Produksi Cabe (Ton)	1.037.1 Ton	289	Ton			1.227		1.105		941.50		285		289	
		Produksi Kakao (Ton)	7.261,62 Ton	8,418	Ton			7,480		7,704		7,935		8,418		8,418	
		Produksi Jambu Mente (Ton)	2.297 Ton	2,537	Ton			2,343		2,390		2,438		2,487		2,537	
		Produksi Cengkeh (Ton)	510,38 Ton	651	Ton			536		563		591		620		651	
		Produksi Lada (Ton)	80,07 Ton	92.82	Ton			82.47		84.95		87.49		90.12		92.82	
	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Partisipatif P3A	51 Klp	52	Kelompok	3,160,500,000		-	-	9	520,526,210	10	111,580,778	10	384,019,000	-	-

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Perencanaan Pengawasan, pengujian dan pengendalian mutu	survey, investigasi, dan Desain Infrastruktur Pertanian	5 Paket	25	Paket	1,233,175		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau	Pembangunan dan Penyediaan Embung dan pompa untuk pengairan sawah tadah hujan															
		Pembangunan Embung	22 Unit	102	Unit			-		20		20		20		20	
		Air Irigasi Pompanisasi	-	60	Unit			-		20		10		10		10	
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa	Cakupan pelayanan Jaringan Irigasi Tersier Tingkat Usaha Tani	11840 Ha	13,105	Ha	1,400,000		-		-		-		-		-	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Usaha tani dan Jalan Produksi (Meter)	150,439.92	350,439.92	meter	41,027,828,000		33,000	7,145,041,800	31,000	6,604,682,750	30,000	2,944,058,000	40,000	2,426,596,300	66,000	480,854,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)					2,480,700,200			335,347,350		682,174,750		758,259,100		182,663,000		522,256,000
		Tingkat Kehilangan Hasil dan Rendemen				260,250,000			60,350,000		60,350,000		60,350,000		60,350,000		60,350,000

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Susut Panen Padi	10%	8.71	Persen			9.96		9.96		9.21		8.96		8.71	
		Susut Panen Jagung	7%	5.75	Persen			6.75		6.5		6.25		6		5.75	
		Kualitas Rendemen Padi Meningkat	53%	57	Persen			55		56		56		56.5		57	
		Meningkatnya Jumlah daftar Usaha Tani dari 94 Izin Usaha (Izin)	94 Izin	128	izin			103		108		115		121		128	
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					3,689,202,200			85,774,400		1,569,826,800		1,245,236,000		149,152,000		639,213,000
		Pemberdayaan penyuluh dan Pembinaan Kelompok tani				1,153,638			-		1,256,312		1,649,979		270,000		270,000
		Jumlah Penyuluh yang ikut pelatihan dasar dan Pelatihan teknis (Orang)		70	Orang			0		67		64		66		70	
		Jumlah Kelompok yang dibina (Klp)		100	Kelompok			0		80		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan	Pembinaan Pelatihan dan Penerapan Teknologi Mesin Tanam dan Alat Pengolahan			1,457,110,800			74,384,050		29,420,750		6,870,000		948,223,000		398,213,000	
		Mesin Tanam (Unit)	2 Unit	42	Unit				10		10		10		10		
		Hand Traktor (Unit)	4.758 Unit	5758	Unit				200		200		200		200		
	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna		4	kelompok			-		1	32,993,000		2	56,811,000		31,469,000	
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok tani yang mengakses Permodalan (Klp)	93 Klp	101	Kelompok	1,050,344,000	pertanian	95	169,128,650	97	18,915,450	99	32,944,200	101	8,268,000	-	
	Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					83,816,950			15,901,300		27,901,950		29,863,700		5,150,000	5,000,000	
		Jumlah Kelompok tani yang mengakses Pemasaran (Klp)	0 Klp	15	Kelompok			3		3		3		3		3	
		Tersedianya Informasi harga pasar (Bulan)	12 Bulan	12	Bulan			12		12		12		12		12	
	program peningkatan produksi hasil peternakan (ekor)	Meningkatnya produksi sektor peternakan dan perikanan				4,791,493,500			884,698,000		972,185,800		2,222,478,700				

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
														248,100,000		464,031,000	
		Sapi (ekor)	45.425 ekor	73091	ekor		49,958		54,944		60,428		66,485		73,091		
		Kerbau (ekor)	2.569 ekor	3329	ekor		2,706		2,850		3,001		3,161		3,329		
		Kuda (ekor)	1.072 ekor	1138	ekor		558		565		571		1124		1138		
		Kambing (ekor)	11.271 ekor	15083	ekor		11,947		12,664		13,424		14,229		15,083		
		Ayam ras pedaging (ekor)	2.496.604 ekor	3668330	ekor		2,696,332		2,912,039		3,145,002		3,396,602		3,668,330		
		Ayam buras (ekor)	1.375.144 ekor (1.517.236 ekor RPJMD)	2,443,524	ekor		1,512,658		1,663,924		1,886,324		2,221,386		2,443,524		
		Ayam ras petelur (ekor)	4.041.027 ekor	5407806	ekor		4,283,489		4,540,498		4,812,928		5,101,703		5,407,806		
		Itik (ekor)	461.529 ekor	678138	ekor		498,451		538,327		581,394		627,905		678,138		
		Produksi daging sapi (Kg)	706.677 Kg	750094	Kg		715,158		723,740		732,425		741,214		750,108		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (Rp)	579.021.060.000	8.71899E+11	Rupiah		628,026,760,000		681,396,880,000		739,528,155,000		802,865,775,000		871,889,560,000		
		Konsumsi/Kapita/Tahun (Kg)	2,54 Kg	2.7	Kg		2.58		2.59		2.64		2.67		2.70		
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	10%	15	persen	1,380,325,556	11	284,801,000	12	321,823,000	13	591,436,556	5,885,000	15	176,380,000		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Kelompok Hasil produksi Peternakan (klp)	1	9	Kelompok	170,320,000	6	71,695,000	2	48,300,000	1	50,325,000	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							1,789,697,450		2,461,863,000		1,736,984,000		1,687,471,000		1,810,586,000	
		Produksi perikanan budidaya (Ton)	632,18 ton	806.80	Ton	11,295,337,000	663.78	2,133,505	696.96	2,214,126	731.80	2,260,629	763.39	2,318,701	806.80	2,368,376	
		Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	40,32 Kg	44.49	Kg		41.13		41.94		42.77		40		40		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Kontribusi Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Budidaya (Rp 000)	10,621,454	13,556,080	Rupiah		11,152,662		11,710,253		12,295,765		12,910,553		13,556,080		
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya	9,61%	37.34	Persen		37.34		37.34		37.34		2		8.9		
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					2,526,453,420		489,883,970		571,267,000		190,536,450		1,274,766,000			
		Produksi perikanan tangkap	2.768.3 Ton Ikan	3,562	Ton		3,065,9		2,320,4		3,219,9		3,392		3,562		
		Kontribusi Sub sektor Perikanan terhadap PDRB (Rp 000)	50,404,450	64,330,268	Rupiah		52,924,672		55,570,905		58,349,450		59,516,439		60,706,767		
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	40,9%	68	Persen		68		68		68		8.5		11.7		
	Program Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Ikan yang ditebar	2.788.300 ekor benih	4,128,450	ekor	1,433,557,000	3,068,130	609,195,000	3,345	322,377,000	3,624,790	216,475,000	240,000	192,512,000	300,000	92,998,000	
	Program	Sarana dan prasarana	1 Paket	2	Paket	165,195,000		32,835,000	-	-	1	-	-	-	-	-	

REVISI RPJMD KAB. SIDENRENG RAPPANG 2014-2018

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-										
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018		
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	
	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	penyuluhan perikanan						1						132,360,000				
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (Paket)		1	Paket	869,822,000		30	42,992,000	1	156,340,000	1	540,540,000	1	129,950,000	-	-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan (Ketahanan Pangan)					309,475,000			-		138,055,100		171,419,900					
		Ketersediaan energi dan protein perkapita		4	Laporan			-		1		1		-		-		
		Penguatan Cadangan Pangan	12 Klp	2	Kelompok					1		1						
		Meningkatnya Komsumsi Pangan Beragam dan Berimbang		20	Kelompok			-		10		10		-		-		
		Cakupan Wirausaha Kelompok Usaha tani, UMKM dan Koperasi (Klp)		24	Kelompok			-		12		12		-		-		
		Terciptanya Lembaga Usaha pangan Masyarakat di tingkat Gapoktan		2	Kelompok			-		1		1		-		-		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-											
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018			
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)		
		Tersedianya Data Pasokan dan Harga pangan		48	Laporan					48			48			-		-	
	Program Peningkatan Produksi Peternakan					93,925,700			93,925,700			-		-		-		-	
19	DINAS PERDAGANGAN																		
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat UTTP	6.456 Buah	34769	Buah	94,159,500		6622	17,300,500		6788	15,790,000	6954	16,069,000	7120	21,000,000	7285	24,000,000	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 100% dari 200 menjadi 400 orang)	-	400	orang	74,200		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					18,379,933,100			304,744,150			2,127,617,750		3,310,817,700		5,348,353,000		7,288,400,500	
		Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	760 Buah	4400	Buah			800			840		880		920		960		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Revitalisasi pasar/pembangunan pasar	4 unit	17	unit			2		4		3		3		5	
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	-	1	perda	14,899,500		1	14,899,500	-	-	-	-	-	-	0	0
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					852,060,000			-		104,832,000		336,646,000		171,863,000		238,719,000
		Cakupan bina kelompok IKM		12400	kelompok			0		4		35		40		45	
		Cakupan Jumlah IKM aktif dan produktif	32%	49	persen			34		37		43		46		49	
		Cakupan Jumlah IKM baru	48 IKM (4040)	1000	IKM			200		200		200		200	0	200	
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13.38%	14.75	persen			13.75		14		14.25		14.5	0	14.75	
		Pertumbuhan industry	0.99%	3.89	persen			0.54		0.65		0.8		0.9	0	1.00	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri (Org)	63%	72	persen	499,199,400		70	110,764,000	70	346,936,400	71	17,431,000	-	-	72	24,068,000
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								-		-		-		511,757,000		323,121,000
		Penerimaan PAD (Retribusi Daerah)		7,500,000	Ribu Rupiah	0	P2	6219760	704281	6500000	685486.84	6700000	685486.84	7200000	1,500,000,000	7500000	1,500,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Porsi retribusi terhadap PAD (%)	5.27%		persen		P2	10	0	9.82	0	10	0	7	0	6	0
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																	
20	4.01.04.01 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM																
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Masih kurangnya batas wilayah yang belum disepakati menjadi 100 %	100%	100	Persen	200,000,000	P6	100	11,513,000	100	49,650,500.00	-	-	100	29,298,000	100	27,389,000
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kualitas Sistem Pengawasan dan pelaksanaan kecamatan dan kelurahan	100%	100	Persen	117,850,500	P6	-	-	-	-	-	-	100	33,928,000	100	33,585,000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitas data pendukung Penyusunan LKJP menjadi 100 %	100%	100	Persen	275,000,000	P6	-	-	100	37,695,000	100	79,821,500	100	71,262,000	100	81,961,000
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas data penyusunan LPPD dan I-LPPD menjadi 100%	100%	100	Persen	1,248,376,988	P6	100	390,751,588	100	250,342,700	100	374,165,700	100	119,930,000	100	113,187,000
			100%	100	Persen		P6	-	-	-	-	-	-	100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penerbitan Peraturan Bupati menjadi 100%			72,615,000										36,799,000		35,816,000
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kualitas Kelengkapan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah menjadi 100%	100%	100	Persen	9,888,792,000	P6	100	8,877,379,756	100	171,615,000	100	98,525,000	-	-	-	-
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kualitas data pendukung penyusunan nama rupabumi	100%	100	Persen	19,688,000	P6	100	19,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	4.01.04.02 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak	Penguatan Organisasi Gender dan Anak	45%	95	Persen	135,477,500	P1	50	20,616,500	75	21.020.000	85	23,786,000	95	91,075,000	-	-
	Program Usaha Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Sekolah Sehat Kecamatan, Kab., Propinsi dan Nasional, Raker dan	45%	100	Persen	972,405	P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Jambore Nasional															
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Kesehatan Lingkungan Sekolah		5	Kegiatan	1,048,673,750		1	116,276,200	1	139.662.500	1	208,002,000	1	372,170,500	1	352,225,050
	Program Pendidikan Luar Biasa	Cakupan Pembinaan dan pendalaman agama dan mental spiritual	20%	100	Persen	18,644,933,250	P1	25	1,237,604,000	50	3,174,218,850	75	3,439,365,500	90	3,852,891,500	100	6,940,853,400
	Program Penataan Adm. Kependudukan	Kualitas data pendukung Administrasi Kependudukan meningkat dari menjadi 100 %	100%	100	Persen	118,982,000	P6	100	28,349,000	100	10,380,000	100	29,105,500	-	-	100	51,147,500
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keagamaan	Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballigh, Tasseh dan KIPRA	45%	100		15,082,913,500	P1	-	-	-	-	-	-	95	4,522,818,000	100	10,560,095,500
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kesos		110	Lks	13,191,785,100			4,976,668,600		4,472,071,500		3,743,045,000				
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi					32,485,000											32,485,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					42,005,000.00											42,005,000.00
22	4.01.04.03 BAGIAN KERJASAMA																
	Program Kerjasama Pembangunan					109,768,000									58,137,000		51,631,000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Penguatan Kelembagaan ekonomi Pedesaan	15%	40	Persen	145,000,000	P2	20	4,813,500	25	12,229,700	-	-	35	41,012,800	40	44,543,000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					298,979,700			103,544,000						96,166,700		99,269,000
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA																
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan	50%	100	Persen	387,077,500	P2	65	82.428.500	75	149.226.000	85	126,046,500	95	146,826,000	100	114,205,000
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Koordinasi Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup	-	100	Persen	23,227,000	P1	-	-	50	19.798.750	-	-	80	9,651,000	100	13,576,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terwujudnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		100	Persen	64,709,000	1	-	-	100	45.094.000	-	-	-	-	100	19,615,000
	Program peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan	Koordinasi dan Rumusan Kebijakan Sektor Pertanian	Pelaksanaan setiap 4 tahun	100	Persen	335,210,250	P2	-	-	100	61,694,250	100	70,978,000	100	109,000,000	100	93,538,000
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					1,108,991,804			207.044.000		337,736,504		296,863,300		237,196,000		237,196,000
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Koordinasi dan Rumusan Kebijakan teknologi pertanian	Pelaksanaan setiap 4 tahun	100	Persen	34,663,350	P2	100	34,663,350	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Koordinasi dan Rumusan Kebijakan peternakan	Tidak dilaksanakan tahun 2013	100	Persen	46,728	P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan	Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan	40%	80	Persen	59,484,000	P2	60	58.070.600	70	25,467,000	80	34,017,000	-	-	-	-
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif	Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan dalam penciptaan iklim	50%	80	Persen	84,637,000	P1	-	-	-	-	80%	84,637,000	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		UKM yang kondusif															
	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Koordinasi, perumusan kebijakan dan fasilitasi kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	50%	100%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Koordinasi, perumusan kebijakan, fasilitasi dan pelaporan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	50%	100	Persen	38,380,50000	P1	-	-	-	-	80	38,380,50000	-	-	-	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	50%	100		488,944,000		-	-	-	-	-	-	10,470,000		38,474,000	
24	BAGIAN PEMBANGUNAN																
	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data perkembangan kinerja penyedia jasa konstruksi	0	6	Laporan	134,319,000		3	6.131.000					3	53,744,000		
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM	Persentase SDM Bidang		70		34,300,000			74.046.000		142,260,000		152,520,000				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Bidang Komunikasi Dan Informasi	Komunikasi dan Informatika															
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		16	Laporan	317,335,500			4	37,695,000	4	79,821,500	4	65,638,000	4	134,181,000	
	Program optimalisasi teknologi informasi	cakupan transparansi informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	60%	48	Bulan	87,456,900	P2		12	250,342,700	12	374,165,700	12	128,748,500	12	123,200,000	
	Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan	meningkatnya pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi	60%	8	Kegiatan	2,636,133,000			2	440,223,300	2	693,555,494	2	43,618,000	2	34,595,000	
25	4.01.04.06 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	tertatanya kapasitas sumber daya aparatur											100	13,767,800	100	12,650,000	
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	terpeliharanya data dan dokumen/arsip yang tertata dengan baik											100	8,631,350	100	7,065,000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan	terpenuhinya fasilitasi kelompok kerja dan terlaksananya analisa dan koordinasi penyelesaian sanggahan pengadaan barang dan jasa												100	553,030,100	100	494,411,000
26	4.01.04.07 BAGIAN ORGANISASI																
	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang telah melaksanakan system dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur	100%	100%	Persen	185,048,000	P2	100	34.119.000	-	-	100	19,192,000	100	25,000,000	100	45,000,000
	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang kelembagaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang2an yang berlaku	100%	100	Persen	828,707,997	P2	100%	104.942.000	100	24,990,000	100	242,761,997	100	262,156,000	100	298,800,000
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah SDM aparatur yang profesional dan melayani serta penempatan SDM aparatur yang proporsional	100%	100	Persen	388,075,000	P2	100	31.112.000	100	32,040,000	-	-	100	68,566,000	100	150,000,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Penataan Perundang-undangan	Persentase capaian perda kelembagaan yang disusun berdasarkan revisi PP 41 tahun 2007	ada	100%		188,125	P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4.01.04.08 BAGIAN HUKUM																
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Gugatan masyarakat kepada Pemda	93%	100	Persen	1,080,000,000		95	168.000.000	95	133,000,000	95	143,000,000	95	190,000,000	100	150,000,000
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan-Undangan	Tertib pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan	59,70%	100	Persen	1,474,175,000		100	254.242.900	100	132,907,863	100	555,356,064	100	194,270,000	100	246,066,000
	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemulihan kerugian keuangan daerah	75,94 %	90	Persen	827,343,000		76	184.099.500	78	173,684,500	80	176,218,070	85	163,900,000	90	214,020,000
28	4.01.04.09 BAGIAN UMUM																
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah								2.180.785.750		2,114,599,669		1,773,191,909		2,086,320,000		1,943,912,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	70%	100	persen	9,280,000	II	70	1,420,000	75	1,520,000	80	1,840,000	90	2,150,000	100	2,350,000
		Penanganan masalah isu aktual	45%	85	persen	82,000	P2	50	-	60	20,000	70	20,000	80	20,000	85	22,000
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		0%	75	persen	90,000	0	-	-	-	-	-	-	0.6	40,000,000	0.75	10,000,000
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan kerjasama pengaduan masyarakat	0%	100	persen	235,000	P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensi bidang protocol	55%	100	persen	484,550	P1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	4.01.04.10 BAGIAN KEUANGAN																
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota													12	35,458,000	12	30,310,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													45,640,500		43,255,000	
30	4.01.05 SEKRETARIAT DPRD																
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ditetapkannya Peraturan Daerah	100%	80	Perda	34,714,037		10	4,946,687,800	14	6,348,142,920	16	8,779,856,751	20	8,428,430,500	20	9,071,751,000
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Tersusunnya Propemperda	-	40	Keputusan	1,639,629		8	238,372,000	8	194,622,000	8	266,635,500	8	415,794,000	8	433,878,000
31	4.01.07 KECAMATAN																
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peran Serta Gender dalam Pembangunan	50%	100%	Persen	34,000		100	26,980,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peran Serta Kepemudaan	100%	100%		31,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	100%		441,605,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100	Persen	136,226,000		-	-	100	136,226,000	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Terciptanya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100%	100	Persen	216,566,000		100	156,609,500	100	59,956,500	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100	Persen	2,230,127,200		-	-	100	1,166,346,000	100	1,063,781,200	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terciptanya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100%	100	Persen	488,171,592		100	244,302,092	100	243,869,500	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			100	Persen	215,280,000		50	20,980,000	75	5,000,000	100	9,300,000	-	-	100	18,000,000
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peran Serta Kepemudaan	100%	100	Persen	32,827,500		100	15,490,000	-	-	-	-	-	-	100	17,337,500

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	100%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100	Persen	11,815,604,000						100	1,177,147,000	100	4,957,557,000	100	5,700,900,000
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			100	Persen	20,000,000							100	20,000,000.00			
32	4.02.01 INSPEKTORAT																
	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK RI atas laporan keuangan Pemda	WDP	WTP		3,571,164,900	P1	WTP	1,293,500,000	WTP	306,883,000	WTP	386,264,500	WTP	506,861,400	WTP	1,077,656,000
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	kualitas sumber daya aparatur pengawasan	17,77%	61,0		651,260,000	P1		65,554,000		48,137,500	42,96	97,500,700	53,0	154,439,100	61,0	254,886,500
8	4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	terlaksananya koordinasi dengan stakeholder dalam pengembangan potensi daerah		100	Persen									100	63,338,500	100	111,306,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan	40%	100	Persen	1,241,824,000		20	113,883,000	20	57,030,000	20	54,783,000	20	60,677,000	20	55,252,000
	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah	100%	80	Persen	187,934,000		20	9,426,500	20	28,477,000	-	-	20	52,875,000	20	15,617,000
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin	52 desa/kel.	82	Desa/Kelurahan	134,524,000	P1	6	21,965,000	6	15,244,000	6	10,633,000	6	37,685,000	6	37,750,000
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)			100	Persen	552,753,000							50	89,609,000	50	463,144,000	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	60%	4 dok	Dok	272,422,700		2	74,766,700	-	-	-	-	-	-	2	197,656,000
	Program Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar	75%	100	Persen	1,195,228,000	P1	80	214,127,600	85	197,625,550	90	281,597,100	95	160,325,000	100	136,202,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPDP Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	0%	20	ASN	40,324,000	P1	-	-	-	-	-	-	20	40,324,000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPDP) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi	8 dok	19	Dok	2,738,321,800		2	333,925,250	3	414,377,050	4	647,562,500	6	579,302,000	4	763,155,000
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan Pembangunan Ekonomi	40%	100	Persen	901,353,680		20	40,963,300	20	184,992,400	20	195,567,900	20	146,797,000	20	333,033,000
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya	40%	100	Persen	338,289,000		20	21,294,500	20	97,060,500	20	32,533,000	20	87,225,000	20	100,176,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program perencanaan prasarana Wilayah & sumber daya alam	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri	70%	100	Persen	1,719,259,000	P1	80	285,697,750	85	226,251,000	90	169,763,000	95	251,452,000	100	278,175,000
	Program Perencanaan Tata Ruang																560,300,000
		Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	1	Dokumen Revisi & Perda RTRW	500,000	P1	-	-	-	-	-	-	1	500,000	1	500,000
		Terlaksananya sosialisasi Perda RT RW	-	1	Dok	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
	Program Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa & Kelurahan	0%	100	Persen	286,491,250		20	24,766,500	20	138,354,250	20	17,697,500	20	52,549,000	20	53,124,000
	Program Pengendalian pemanfaatan ruang	Terpenuhinya SPM bidang Penataan Ruang	20%			70325,400	P1		70,325,400	-	-	-	-	-	-	-	-
29	4.04.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD, Dokumentasi Regulasi Keuangan Daerah Lainnya	60%	100	Persen	10,245,272,000	P2	70	2,861,209,947	80	6,513,344,560	90	7,011,000,336	95	7,746,493,000	100	5,906,697,000.
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	60%	100	Persen	4,210,776,648	P2	70	949,302,600	80	683,473,800	90	743,829,248	95	1,149,900,000	100	684,271,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya	60%	100	Persen	2,394,375,000	P2	70	598,444,717	80	309,901,900	90	325,324,900	95	515,044,000	100	284,927,000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	60%	100	Persen	131,198	P2	70	25,628,000	-	-	90	13,930,000	95	15,000,000	100	4,500,000
	Program Pendidikan Tinggi					1,767,873,000		-	-	-	1,767,873,000	-	-			-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					7,500,000			7,500,000	-		-		-		-	
24	4.05.12 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH																
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Disiplin Aparatur									709,661,941.00						
		Proses Izin Cerai/Permasalahan Keluarga	50 Orang	63	Orang	36,932		27	6,547,000	-	-	19	4,747,000	10	6,291,000	7	5,104,000
	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Fasilitasi Pindah Purna tugas PNS															
		Proses Pensiun Janda/Duda dan Yatim serta Pensiun atas Permintaan Sendiri	425 Orang	418	Orang	125,166		97	22,706,000		90	43,113,500	94	36,390,000	137	25,712,200	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					5,121,310,300			301,173,000		1,439,881,500		992,399,500		360,273,100		2,328,756,200
		Kapasitas Sumber Daya Aparatur							1,038		2,703		-		2,983		2,983

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	350 Orang	285	orang			93		107	20,000	45	361,000,000	20	24,200	20	26,620
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	750 Orang	615	orang		Prioritas	169	784,097,950	356	519,800	0	-	0	800,000	90	800,000
		Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	70 Orang	62	orang		Prioritas	-	165,630	-	165,630	22	523,069,500	20	165,630	20	165,630
		Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional bagi PNS Daerah	375 Orang	390	orang		Prioritas	100	55,307,000	50	2,000,000	200	108,330,000	20	2,000,000	20	2,000,000
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS		100%	Persen		Prioritas	100%	17,250	100%	17,250	-	-	100%	17,250	100%	17,250
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Pembinaan manajemen olahraga	100 Persen	100	Persen	178,356,200		100	57,550,000	-	-	100	53,750,000	-	-	100	67,056,200
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					3,736,306,488			965,484,497		709,661,941		277,201,250		862,926,900		921,031,900
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	75 Orang	15	Orang	234,340,000		-	7,250,000	-	-	-	-	5	99,400,000	10	127,690,000
		Seleksi Penerimaan Calon PNS	195 Orang	219	Orang	635,639,697		54				90		-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
								548,531,347			78,440,850		8,667,500				
		Penempatan PNS	9989 Orang	8252	Orang	1,184,406,891		2,293	210,046,000	1,210	200,907,291	985	199,351,500	1887	297,761,100	1877	276,341,000
		Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	0 Orang	0		580,200			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.	9985 Orang	10,115		333,331,300		2,011	7,800,000	1,993	196,826,800	2,211	8,650,000	2,000	53,659,500	1,900	66,375,000
		Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS		100%					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar		100%					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	923 Orang	910	Orang	402,594,400		193	124,044,400	152	185,783,000	267	13,793,000	132	39,259,000	166	39,715,000
		Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	624 Orang	486	Orang	148,454,250		3	13,529,000	137	33,839,000	334	35,474,250	7	30,494,000	5	35,118,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
		Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	0 Orang	0					-		-		-		-		-
		Seleksi Penerimaan IPDN, STKS, PGSBD	20 Orang	10	Orang	57,028,750			45,173,750		8,755,000		3,100,000		-		-
		Proses penyempahan CPNS menjadi PNS	2665 Orang	685	Orang	81,565			9,110,000		5,110,000		8,165,000	50	2,625,000	90	9,377,000
		Proses pemberian KPE bagi PNS	20 Orang	0		31,500			-		-		-		-		-
		Penyusunan Syarat Jabatan													294,130,600		293,904,900
		Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan Pengangkatan Pegawai Perjanjian Kontrak													45,597,700		72,511,000
	Program penataan dan pengendalian program pembangunan	Rumusan kebijakan	60%	77%		-	P2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-									
				K	Satuan	Dana (Rp)		2014		2015		2016		2017		2018	
								Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Presentase kewirausahaan purna bakti PNS		100%		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
NON URUSAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100		223,852,819	P1	100	39,357,691,403	100	40,389,086,690	100	47,845,996,381	100	52,710,994,200	100	53,109,669,100
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100		176,410,493	P1	100	34,471,655,320	100	28,882,949,902	100	25,658,133,614	100	33,305,941,500	100	26,553,864,300
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100%	100		5,179,205	P1	100	908,583,000	100	506,998,000	100	443,399,000	100	312,908,000	100	17,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100		13,851,826	P1	100	1,532,100,630	100	2,753,438,525	100	2,829,386,668	100	2,043,272,150	100	3,578,586,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase capaian kinerja keuangan	60%	100		364,114,339	P1	100	987,484,100	100	1,062,374,150	100	954,487,750	100	1,315,820,859	100	1,330,210,700,000

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan			Prioritas	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun ke-								
								2014		2015		2016		2017		2018
				K	Satuan	Dana (Rp)		Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi	Dana (Rp)	Realisasi
	Capaian Kinerja dan keuangan															
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					165,464,000										165,464,000

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan indikator khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah.

4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan target-target yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, serta memperhatikan capaian pada tahun terakhir. Terkait dengan adanya beberapa indikator pada tahun berjalan yang mengalami perubahan metode perhitungan, maka perubahan tersebut akan disesuaikan pada Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD).

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014 sampai 2016 merupakan capaian pembangunan dan tahun 2017 sampai dengan 2018 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD yang menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018**

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.93	7.87	7.92	9.00	9.02	9.10	9.10
2	Laju Inflasi	%	6.31	9.38	1.58	2.11	3.20	3.10	3.10
3	PDRB Per Kapita	Juta	24.48	28.07	32.10	36.76	37.50	42.22	42.22
4	Presentase penduduk miskin	%	6.30	5.82	5.55	5.45	5.00	4.00-4.50	4.00-4.50
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67.15	68.14	69.00	69.39	70.22	71.07	71.07
II	Fokus Kesejahteraan Sosial								
	Pendidikan								
1	Angka melek huruf	%	89.90	95.50	91.65	93.23	92.48	92.50	92.50
2	Harapan Lama Sekolah	%	12.16	12.80	12.88	13.26	13.65	14.05	14.05
3	Rata-rata lama sekolah semua jenjang pendidikan	Tahun	9.37	9.30	9.25	9.20	9.15	9.10	9.10
	Kesehatan								
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.05	68.07	68.57	68.75	68.94	69.13	69.13

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintahan Daerah								
	Pendidikan								
1	Angka partisipasi kasar								
	a. SD/Sederajat	%	105.92	104.61	103.73	102.57	102.00	101.46	101.46
	b. SLTP/Sederajat	%	94.25	101.84	103.95	107.71	104.70	102.90	102.90
	c. SLTA/Sederajat	%	73.27	70.57	79.42	82.36	-	-	82.36
2	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	a. SD/Sederajat	%	93.23	89.70	84.22	85.69	86.65	87.80	87.80
	b. SLTP/Sederajat	%	67.66	70.89	57.89	60.71	63.40	65.50	65.50
	c. SLTA/Sederajat	%	50.66	43.37	43.96	46.88	-	-	46.88
3	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	6.76	31.32	34.04	55.72	56.00	57.00	57.00
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)								
	a. SD	%	99.6	99.55	99.49	99.75	99.80	99.85	99.85
	b. SMP	%	99.47	99.25	99.22	99.11	99.30	99.50	99.50
	c. SMA/SMK	%	97.9	98.57	98.01	99.06	-	-	99.06
5	Rasio guru per murid								
	a. SD	guru : Murid	1:12	1:12	1:13	1:13	1:14	1:15	1:15

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
	b. SMP	guru : Murid	1:11	1:10	1:10	1:11	1:12	1:13	1:13
	c. SMA/SMK	guru : Murid	1:10	1:09	1:11	1:12	-	-	1:12
6	Rasio murid per kelas rata-rata								
	a. SD	Kelas : Murid	1:22	1:21	1:20	1:19	1:21	1:22	1:22
	b. SMP	Kelas : Murid	1:25	1:22	1:24	1:20	1:21	1:22	1:22
7	Angka Kelulusan								
	a. SD	%	96.32	99.48	99.9	100	100	100	100
	b. SMP	%	99.14	98.5	99.6	100	100	100	100
	c. SMA	%	97.7	99.29	99.29	100	-	-	100
	Kesehatan								
1	Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	-	999.20	994.23	995.01	997.00	999.00	999.00
2	Jumlah kematian bayi	Kasus	33	4	30	25	22	20	20
3	Presentase balita gizi buruk	%	0.07	0.06	0.08	0	0.04	0.03	0.03
4	Jumlah kematian balita	Kasus	33	6	3	2	22	5	5
5	Status gizi buruk	Jiwa	10	15	2	0	6	3	3
6	Status gizi kurang	Jiwa	581	451	386	454	450	445	445
7	Persentase cakupan gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani	%	73.71	60.00	82.80	82.80	68.00	66.00	66.00
9	Persentase kelurahan UCI	%	95.28	100.00	97.20	97.20	99.00	100	100.00

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
10	Penemuan pasien baru TBC BTA positif	%	46.27	55.26	54.00	54.00	70.00	70	70.00
11	Penderita DBD yang ditangani	%	90.17	100.00	97.56	97.56	96.00	95	95.00
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	81.91	67.67	68.00	68.00	88.00	90	90.00
12	Rasio Posyandu per satuan balita	1/100	46.01	11.36	12.92	12.85	13.00	13.25	13.25
14	Rasio Puskesmas, pustu, dan poskesdes per 100.000 penduduk	1/100.000	45.58	45.18	44.17	44.17	45.14	45.43	45.43
15	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	1/100.000	1.07	1.05	1.04	1.04	0.95	0.92	0.92
16	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1/100.000	17.09	14.12	19.67	17.59	18.94	19.64	19.64
Pekerjaan Umum									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	46.05	76.10	78.93	79.14	86.91	90.93	90.93
2	Luas Cakupan Area yang teraliri	Ha	11,299	11,299	11,299	12,827	12,827	13,000	13,000
Penataan Ruang									
1	Persentase penyediaan RTH Publik	%	0.024	4.44	2.22	5.56	4.44	4.44	21.11
2	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rinciannya sesuai peta analog dan peta digital	%	0.80	0.96	0.32	0.64	0.96	0.96	0.96

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Perumahan								
1	Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	menit	10-45	10-45	10-45	10-40	10-40	10-30	10-30
3	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Orang	0	-	-	-	85	124	124
4	Jumlah mobil pemadam kebakaran	Unit	7	-	-	1	1	2	11
5	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	69.00	73.79	79.83	89.09	93.00	100.00	100.00
6	Rasio rumah layak huni yang dibangun	%	20.93	21.00	21.08	22.51	27.45	29.07	29.07
7	Jumlah rumah yang layak huni	Unit	55,920	55,963	56,004	56,809	57,920	58,420	58,420
8	Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi	unit	12	5	8	6	5	5	41
9	Jumlah Masyarakat yang memiliki akses air bersih	%	72.00	73.57	76.21	82.60	95.00	100.00	100.00
10	Jumlah Masyarakat yang memiliki akses sanitasi	%	69.00	73.79	79.83	89.09	93.00	100.00	100.00
11	Luas genangan akibat banjir musiman	%	32.4	31.56	30.9	28.81	27.04	25.32	25.32
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Linmas	31	31	31	31	31	31	31
2	Angka Kriminalitas yang tertangani	Kasus	142	219	220	276	219	200	200
	Sosial								
1	PMKS memperoleh bantuan sosial	Jiwa	20,754	18,129	11,582	11,709	11,709	11,709	11,709
2	Jumlah PMKS	Jiwa	20,754	20,754	14,207	14,334	14,334	14,334	14,334
3	Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Pemberian Bantuan Paket) Anak Terlantar/Lanjut Usia	AT/LU	16 /16	-	-	-	10/10	10/10	36/36
4	Kemiskinan	Jiwa	16,700	16,720	16,030	15,920	15,500	15,450	15,450
II	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemerintahan Daerah								
	Ketenagakerjaan								
1	Rasio penduduk yang bekerja	%	93.01	93.80	93.03	93.02	93.50	94.00	94.00
2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja								
3	a. Angkatan Kerja 15 Tahun keatas	Jiwa	112,583.00	104,006	112,252	112,592	115,000	116,054	116,054
4	b. Jumlah Penduduk usia 15 Tahun keatas	Jiwa	196,858	200,111	207,580	210,785	211,418	215,223	215,223
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja								
	a. Prosentase Jumlah Penduduk yang Bekerja	%	57.18	54	53.27	53.27	55.00	55.40	55.40

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
	b. Prosentase Tingkat Pengangguran	%	6.99	6.20	6.97	6.97	6.00	5.50	5.50
6	Pencari Kerja yang ditempatkan								
	a. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Jiwa	359	402	872	630	650	700	700
	b. Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar	Jiwa	1375	1040	1073	739	1300	1,500	1,500
7	Tingkat Pengangguran terbuka								
	a. Penganggur terbuka angkatan kerja	Jiwa	7,873	6,957	7,851	7,851	6,957	5,041	5,041
	b. Jumlah Penduduk angkatan kerja	Jiwa	112,583	112,252	112,592	112,592	115,000	116,054	116,054
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase Partisipasi Perempuan yang bekerja	%	87,38	89.2	89.53	90.01	90.5	90.75	90.75
2	Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur	Jiwa	2212.8	2,257.06	2,736.00	2,790.72	2,846.53	2,903.47	2,903.47
	Lingkungan Hidup								
1	Jumlah sampah yang tertangani	Kg	33.468	56.700	56.700	56.700	60.200	60.200	60.200
2	Jumlah sampah yang tertangani TPS3R	kubik	-	0	650	1.610	2.250	3.000	3.000
3	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	titik	24	24	24	2.440	1.220	1.220	1.220
4	Pemeliharaan areal pemakaman	lokasi	0	0	0	0	2	2	4
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Klp	4	4	4	4	4	4	4

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	2	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah LSM	Klp	2	4	0	2	3	3	14
4	LPM Berprestasi	Klp	38	38	38	38	38	38	38
5	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Posyandu Aktif	Unit	305	305	305	309	309	309	309
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Jiwa	2	2	2	2	2	2	2
2	Rasio Akseptor KB	%	67.00	-	72.00	72.00	69.23	70.05	70.05
3	Cakupan Peserta KB Aktif	%	67.09	86.29	75.87	75.20	77.00	80.00	80.00
	Perhubungan								
1	Jumlah izin trayek	buah	2,537	2,528	2,496	1,985	1,200	1,500	1,500
2	Pengujian kelayakan Angkutan Umum	buah	3,616	3,966	4,462	4,423	2,944	3,122	3,122
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1	Jumlah UMKM	unit	17,018	19,660	21,457	22,885	23,885	25,000	25,000
2	Jumlah usaha mikro	Unit	13,547	15,985	17,575	18,810	19,620	20,470	20,470
3	Jumlah usaha kecil	unit	3,193	3,323	3,436	3,574	3,689	3,874	3,874
4	Jumlah usaha menengah	unit	278	352	446	501	576	656	656

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
5	Jumlah BPR/LKM	unit	222	222	222	222	222	222	222
6	Persentase Koperasi Aktif	%	46.80	48.60	49.30	49.70	51.32	52.76	52.76
Penanaman Modal									
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	9	0	0	0	4	5	18
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	1,679.04	0	29.63	274.94	674.94	1,674.94	4,333.49
Kebudayaan									
1	Jumlah grup kesenian	buah	10	15	15	15	15	15	15
2	Jumlah situs kawasan cagar budaya yang dilestarikan	situs	1	1	1	2	4	6	6
Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah Organisasi Pemuda	OP	28	28	31	31	37	39	39
2	Jumlah Klub Olahraga	Organisasi	200	221	374	144	205	205	205
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	1	2	2	3	3	3	3
4.	Jumlah gedung olahraga/Lap. Olahraga	Buah	281	287	386	1,272	295	302	302
Kearsipan									
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	13.21	20.75	0	0	0	100	100
III	Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah								
	Urusan Peternakan dan Perikanan								
	Sasaran Populasi Ternak								

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Sapi	ekor	45,425	49,960	54,950	60,433	66,458	73,091	73,091
2	Kerbau	ekor	2,569	2,710	2,853	3,004	3,161	3,329	3,329
3	Kuda	ekor	1,072	630	599	579	1.124	1.138	1.138
4	Kambing	ekor	11,271	11,893	12,726	13,489	14,229	15,083	15,083
5	Ayam Buras	ekor	1,517,236	1,558,960	1,714,855	1,886,342	2,074,976	2,282,474	2,282,474
6	Ayam Ras Petelur	ekor	4,041,027	5,717,872	5,889,408	5,977,751	5,101,703	5,407,806	5,407,806
7	Ayam Ras / Pedaging	ekor	2,496,604	2,553,135	2,757,386	3,148,932	3,396,602	3,668,330	3,668,330
8	Itik / Bebek	ekor	461,529	521,185	438,527	581,607	627,905	678,138	678,138
9	Pengembangan IB	ekor	3,408	4,484	5,584	6,468	7,492	8,678	8,678
10	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2,768,3	3,065,9	2,320,4	3,219,9	3,392	3,562	3,562
11	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	632,18	641,07	641,44	708,79	763,39	806,80	806,80
	Pertanian								
1	Padi	Ton	461,617	488,883	536,012	587,982	561,100	589,200	589,200
2	Jagung	Ton	39.940	72,267	58,634	96,348	43,300	44,200	44,200

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
3	Kedelai	Ton	595	519,16	181	65.50	-	-	65.50
4	Melon	Ton	843.00	86.20	48.10	-	-	-	48.10
5	Cabe	Ton	268.50	1,227.00	1,105.00	941.50	285.00	289.00	289.00
6	Kakao	Ton	7,261.62	7,277.15	7,291.06	7,526.98	7,600.00	7,700.00	7,700.00
7	Jambu Mente	Ton	2,297.00	2,387.33	1,857.71	1,667.68	1,200.00	1,000.00	1,000.00
8	Cengkeh	Ton	510.38	696.74	696.75	702.04	620.00	651.00	651.00
9	Lada	Ton	80.07	80.24	80.25	83.65	84	85	85
10	Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Paket	-	-	1 (Dokumen Perda)	-	-	1 (Dokumen dan Peta Lahan Produktif)	2 Paket (Perda dan Perbup)
Ketahanan Pangan									
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	170,078.09	177,605.77	210,393.80	239,611.87	254,576.50	280,034.15	280,034.15
Kehutanan									
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis								
	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha	2,138	2,138	2,138	2,138	-	-	2,138

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
	Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	Ha	31,213	31,213	31,213	31,213	-	-	31,213
2	Kerusakan Kawasan Hutan								
	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	350	350	350	350			350
	Luas Kawasan Hutan	Ha	68,810.80	68,810.80	68,810.80	68,810.80	-	-	68,810.80
IV	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah								
	Perencanaan Pembangunan								
1	Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	1	-	-	-	-	-	1
2	Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dok	1	1	-	-	1	-	2
3	Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup	Dok	1	1	1	1	3	2	8
4	Laporan Monitoring, evaluasi DAK dan TP	Lap	4	4	4	4	4	4	20
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
I	Konsumsi Ekonomi Daerah								
	Konsumsi pangan dan non pangan								
	a.Konsumsi pangan	%	56.46	53.92	52.23	52	51	51	51
	b.Konsumsi Non Pangan	%	43.54	46.08	47.77	48	49	49	49
II	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
	Perhubungan								

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012/2013	REALISASI			TARGET		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2018
				TAHUN					
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah arus penumpang umum	orang	667,440	700,812	742,860	701,860	711,860	750,000	750,000
2	Tingkat kepemilikan kelulusan/kelulusan angkutan umum	buah	3,616	3,966	4,462	4,423	2,944	3,122	3,122

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sidenreng Rappang untuk 1 (satu) tahun kedepan.

10.1. Pedoman Transisi

Untuk mengisi kekosongan dokumen rencana pembangunan daerah dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi

Kebijakan perencanaan tahun 2018 secara umum dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD 2014-2018 melalui pemantapan kebijakan dari penyebaran misi pembangunan 2014-2018, sebagai berikut

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan kesatuan bangsa
7. meningkatkan Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

10.3. Program Transisi

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 6 (enam) misi yang telah ditetapkan beserta penjabaran kebijakan yang telah dirumuskan dalam setiap urusan untuk program-program Prioritas lanjutan. Penetapan program Prioritas pembangunan di tahun 2018 memperhatikan isu strategis yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan

kedepan dalam upaya pencapaian target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah.

10.4. Kaidah Pelaksanaan

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan penganggaran. Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang RKPD tahun 2018 .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Revisi RPJMD kepada Masyarakat, termasuk DPRD;
2. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD;
3. Pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sidenreng Rappang;
4. Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan Revisi Renstra-SKPD Tahun 2014-2018;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Sidenreng Rappang berkewajiban untuk menyusun Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;
6. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2014-2018;
7. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang agar melaksanakan program-program dalam Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 dengan sebaik baiknya;
8. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban dalam menyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten memperhatikan Revisi RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitas dan mediasi terhadap Revisi Renstra SKPD dan Renja SKPD serta Rancangan RPJMD.

9. Dalam pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018, perlu mengacuh kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;
10. Evaluasi Pelaksanaan Revisi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 dilakukan akhir tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan bupati untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;
11. Revisi RPJMD ini akan menjadi dasar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi;
12. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

BAB XI P E N U T U P

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Revisi RPJMD merupakan perencanaan tingkat (menengah) daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen Revisi RPJMD secara teknis menjadi pedoman` dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni **“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT”**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. RUSDI MASSE